BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun sekali.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun sekali.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB II
RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang pelaksanaannya dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
   a. RPJPD;
   b. RTRW; dan
   c. RPJMN dengan memperhatikan:
      1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
      2. KLHS RPJMD; dan
      3. RPJMD daerah sekitar.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
   c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja/Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. BAB V : Penutup.

(2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman:
a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
a. bencana alam;
b. goncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial/budaya;
e. gangguan keamanan, pemekaran Daerah; atau
f. perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RKPD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-127/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Cepat Terbaik Cepat (*Quick wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD Kabupaten Batang pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Batang tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan setiap daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah.

Proses penyusunan RPJMD dimulai setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan dilaksanakan dengan mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang mencerminkan harapan serta aspirasi masyarakat. RPJMD memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang terintegrasi dengan kebijakan dan program pembangunan nasional. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Batang telah dilaksanakan secara serentak untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Batang Suyono S.IP., M.Si. pada tahun 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama dalam periode RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Batang dalam periode ini adalah **"Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045"**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, dilakukan upaya yang dijabarkan dalam delapan misi, yaitu: 1) Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis; 2) Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh; 3) Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan; 4) Akselerasi ekonomi; 5) Meningkatkan pemerataan dan interkoneksi infrastruktur sampai ke pelosok desa: 6) Mewujudkan Batang yang tangguh dan berkelanjutan; 7) Percepatan penurunan kemiskinan yang inklusif, merata dan berorientasi pada keadilan sosial; 8) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas.

Secara substansi, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029; 2) keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025–2045 yang dinilai masih relevan di Batang hingga tahun 2030; 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017–2022 serta RPD Kabupaten Batang Tahun 2023–2026; 4) isu-isu strategis yang berkembang; dan 5) regulasi yang berlaku saat ini.

Selain itu, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan memperhatikan isu strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan guna memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan pembangunan yang

bersifat strategis berbasis lingkungan. Di samping itu, penyusunan dokumen perencanaan ini tidak terlepas dari adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam PP 21/2008 (Pasal 6 ayat (1)). RPB berisi program/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan risiko bencana, penanganan kedaruratan bencana, dan pemulihan pasca bencana yang sebaiknya diintegrasikan ke dalam RPJMD. RPB bukan semata-mata perencanaan dalam sektor penanggulangan bencana, melainkan rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan di daerah dalam membangun masyarakat yang berketahanan bencana. Lebih lanjut, penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) Tahun 2025–2029 sebagai instrumen perencanaan strategis dalam pengembangan kapasitas riset, inovasi, dan teknologi di daerah. RIPJ-PID memberikan arah kebijakan dan strategi untuk memperkuat ekosistem inovasi, meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan teknologi bagi pembangunan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. RPJMD ini juga menjadi pedoman utama bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Batang untuk periode 2025–2029, yang akan mencakup tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan guna memastikan implementasi kebijakan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya penyelarasan antara visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama nasional dengan dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Batang 2025–2029 diharapkan mampu selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta menjadi

instrumen perencanaan yang adaptif terhadap isu strategis dan kebutuhan pembangunan daerah. RPJMD ini sekaligus berfungsi sebagai panduan bagi sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Batang selama lima tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategus Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 10).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, serta

program pembangunan Kabupaten Batang selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan kondisi daerah.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Batang juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang, yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah. RPJMD ini juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, guna menjaga kesinambungan dan sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi, selain itu juga mempertimbangkan RPJMD kabupaten/kota lain yang berbatasan, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang, agar kebijakan pembangunan tidak hanya relevan dalam konteks lokal tetapi juga terintegrasi dengan pengembangan wilayah yang lebih luas. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

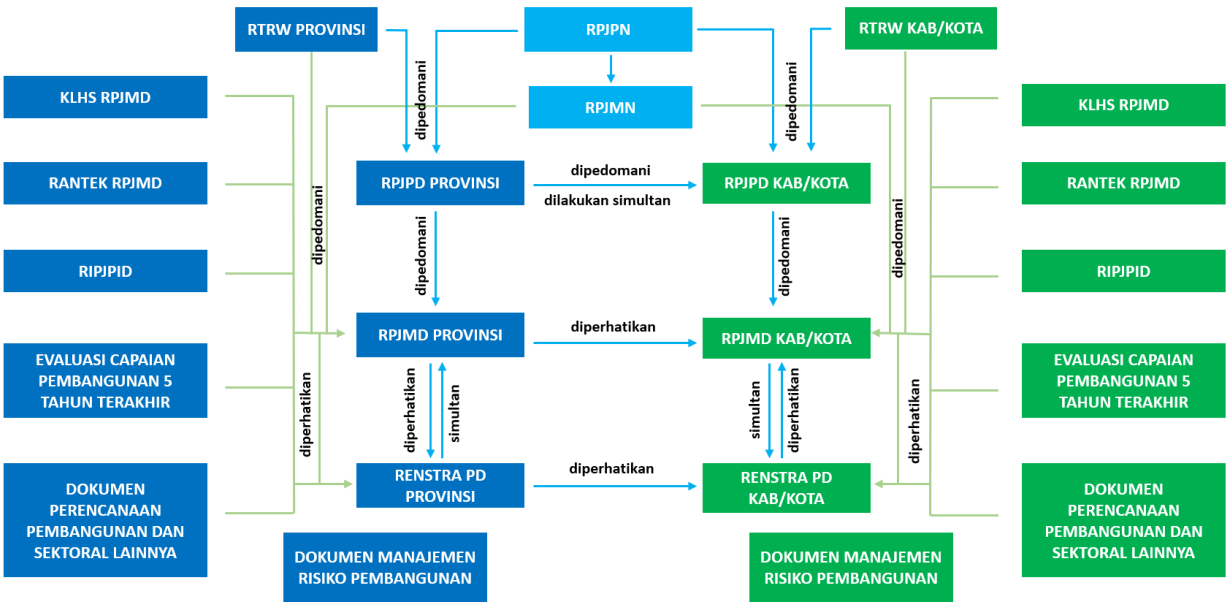

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya

Sumber: Inmendagri no. 2 tahun 2025

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,

berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta spasial.

RPJMD Kabupaten Batang yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.4. Maksud Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Maksud

   Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

   a. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Batang selama kurun waktu 2025-2029;
   b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten

Batang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;

c. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Batang yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029; serta

d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Batang meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing; gambaran keuangan daerah; serta permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini menguraikan program perangkat daerah beserta target dan pagu indikatifnya serta menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang harapan RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Batang lima tahun kedepan serta kesimpulan penting substansial terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memiliki cakupan dari berbagai aspek di dalamnya. Perkembangan pencapaian berbagai indikator mulai dari kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, serta evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dan RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografi, Kabupaten Batang terletak antara 6º 51' 46" dan 7º 11'47" Lintang Selatan dan antara 109º 40' 19" dan 110º 03' 06" Bujur Timur dengan luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 85.721 Ha. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

Sebelah Utara : Laut Jawa.
Sebelah Timur : Kab. Kendal.
Sebelah Selatan : Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara.
Sebelah Barat : Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan.

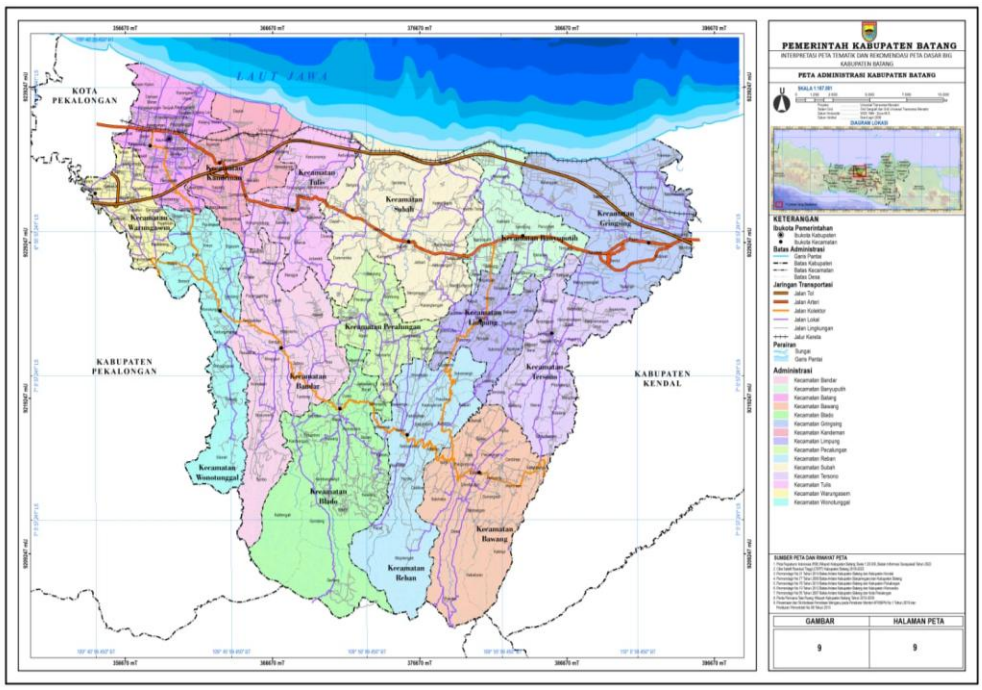

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Batang

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Batang 2024-2044

Secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan. Lima belas kecamatan tersebut meliputi Wonotunggal, Tersono, Pecalungan, Bandar, Gringsing, Tulis, Blado, Limpung, Kandeman, Reban, Banyuputih, Batang, Bawang, Subah, dan Warungasem. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Blado dengan luas 9.644,78 Ha (11,25%). Sedangkan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Warungasem dengan luas 2.445,61 Ha (2,85%).

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/ Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Batang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten
1	Wonotunggal	15	5.565,54	6,49%
2	Bandar	17	7.936,76	9,25%
3	Blado	18	9.644,78	11,25%
4	Reban	19	6.947,07	8,10%
5	Bawang	20	7.696,92	8,97%
6	Tersono	20	5.135,60	5,99%
7	Gringsing	15	7.989,29	9,32%
8	Limpung	17	3.271,72	3,81%
9	Banyuputih	11	4.242,36	4,94%
10	Subah	17	9.166,67	10,69%
11	Pecalungan	10	3.342,14	3,89%
12	Tulis	17	4.419,15	5,15%
13	Kandeman	13	4.060,20	4,73%
14	Batang	12 Desa/ 9 Kelurahan	3.931,44	4,58%

No.	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Luas (ha)	Persentase terhadap luas Kabupaten
15	Warungasem	18	2.445,61	2,85%
	Total	**248**	**85.721**	**100%**

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Batang 2024-2044

Secara geografis, Kabupaten Batang terletak di Pantai Utara Jawa dan dilewati oleh jalur pantura (jalan arteri primer). Jalur pantura mulai dibangun pada sekitar abad ke-18 M sehingga disebut sebagai salah satu jalur tertua yang ada di Pulau Jawa. Daerah-daerah yang dilalui oleh jalur pantura tersebut mendapatkan akses yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini, jalur pantura masih berfungsi sebagai simpul utama pergerakan barang dan manusia di Pulau Jawa. Hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan wilayah Kabupaten Batang, terutama dalam mendukung konektivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Aksesibilitas yang tinggi melalui jalur pantura mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor jalan tersebut, seperti perdagangan, jasa, logistik, serta kawasan industri. Selain itu, keberadaan jalur transportasi laut melalui Pelabuhan di wilayah utara Kabupaten Batang turut memperkuat posisi strategis daerah ini sebagai simpul transportasi regional, yang mendukung pertumbuhan sektor perikanan, distribusi barang, dan potensi ekspor produk lokal. Kombinasi antara transportasi darat dan laut menjadikan Kabupaten Batang sebagai wilayah dengan potensi besar dalam pengembangan ekonomi.

Dari sisi aksesibilitas, Kabupaten Batang memiliki keunggulan strategis karena dilalui oleh berbagai moda transportasi utama. Selain dilintasi oleh Jalan Pantura yang merupakan jalan arteri primer nasional, Kabupaten Batang juga terhubung dengan jaringan jalan tol trans-Jawa. Saat ini, Kabupaten Batang memiliki dua akses keluar *(exit toll)* utama, yaitu *Exit Toll* Kandeman dan *Exit Toll* Warungasem. Selain itu, akses tol menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Kecamatan Gringsing juga telah dibuka, semakin memperkuat konektivitas wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain jalan tol, Kabupaten Batang juga dilintasi oleh jalur kereta api yang memperkuat konektivitas antarwilayah. Saat ini, layanan naik dan turun penumpang dilayani melalui Stasiun Kereta Api Batang, yang termasuk dalam klasifikasi stasiun kelas II, berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat.

Kabupaten Batang tidak hanya memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi pada jalur darat saja, tetapi juga jalur laut. Hal ini ditandai dengan adanya pelayanan oleh Pelabuhan Batang. Saat ini Pelabuhan Batang berfungsi sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Selain Pelabuhan Pengumpan Regional, Kabupaten Batang juga memiliki Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi Pelabuhan Pengumpan Lokal Roban di Kecamatan Subah, Pelabuhan Pengumpan Lokal Celong di Kecamatan Banyuputih, terminal *multipurpose* di KEK Industropolis dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Seklayu di Kecamatan Gringsing.

Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Batang memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Potensi sumber daya alam Kabupaten Batang sangat beragam dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, dan pariwisata. Meskipun demikian, pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem dan keberlanjutannya.

Kabupaten Batang memiliki karakteristik morfologi wilayah yang beragam. Secara morfologi, wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi 3 yaitu wilayah bagian utara, wilayah bagian tengah dan wilayah bagian selatan. Pada sisi Utara Kabupaten Batang memiliki morfologi dataran rendah dan pesisir

pantai. Morfologi wilayah bagian Utara ini mencakup Kecamatan Gringsing, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Batang. Bagian Utara Kabupaten Batang memiliki potensi pengembangan wilayah perkotaan dan juga industri.

Adapun pada sisi Tengah dan Selatan, Kabupaten Batang memiliki morfologi pegunungan. Kondisi alam tersebut memberikan keuntungan bagi tumbuhnya potensi-potensi wisata alami. Selain itu, Bagian Tengah Kabupaten Batang sebagian besar dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan hutan rakyat. Morfologi wilayah bagian Tengah ini mencakup Kecamatan Tersono, Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan, dan Kecamatan Warungasem.

Sedangkan bagian Selatan sebagian tanah di luar kawasan hutan digunakan untuk budidaya sayur dan wilayah konservasi alam sebagai upaya untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam serta keanekaragaman hayati dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia dan lingkungan. Morfologi wilayah bagian Selatan ini mencakup Kecamatan Bawang, Kecamatan Reban, Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Wonotunggal.

A. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Kabupaten Batang memiliki relief yang bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan berbukit dengan pegunungan landai hingga curam, dan daerah pantai. Kabupaten Batang memiliki garis pantai yang panjang (38 km) dengan akses ke laut Jawa, sangat memungkinkan pengembangan sektor perikanan laut. Potensi kopi di Kabupaten Batang juga dapat tumbuh dengan kualitas yang baik khususnya di daerah pegunungan dan lereng-lereng gunung.

Kabupaten Batang dilihat dari letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 8 wilayah ketinggian mulai dari 0 meter (pantai) sampai dengan 2.565 meter (pegunungan), yaitu:

a. Ketinggian 0–7 m, seluas 9,05 %, di sebagian Kecamatan Banyuputih, Batang, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, dan Warungasem.

b. Ketinggian 7–25 m, seluas 6,83% di wilayah Kecamatan Banyuputih, Batang, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, dan Warungasem.
c. Ketinggian 25–100 m, seluas 12,71 % di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Gringsing, Kandeman, Subah, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
d. Ketinggian 100–250m, seluas 21,11 % di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Gringsing, Kandeman, Limpung, Pecalungan, Subah, Tersono, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
e. Ketinggian 250–500m, seluas 17,77 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Gringsing, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.
f. Ketinggian 500–1000m, seluas 17,67 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Reban, Pecalungan, Tersono, dan Wonotunggal.
g. Ketinggian 1000–2000m, seluas 13,78 % di sebagian Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, dan Reban.
h. Ketinggian >2000 m, seluas 1,08 % di sebagian Kecamatan Blado, Reban dan Bawang.

Sedangkan berdasarkan letak kemiringannya, wilayah Kabupaten Batang dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu:

a. Kelas lereng I (kemiringan 0 – 8 %) seluas 56,37 %, dengan penyebarannya di sebagian Kecamatan Bandar, Banyuputih, Batang, Bawang, Blado, Gringsing, Kandeman, Limpung, Reban, Pecalungan, Subah, Tersono, Tulis, Warungasem dan Wonotunggal.
b. Kelas lereng II (kemiringan 8 – 15%) seluas 17,33 %, dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Gringsing, Kandeman, Limpung, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.
c. Kelas lereng III (kemiringan 15 – 25%) seluas 12,68 % dengan penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bandar, Banyuputih, Bawang, Blado, Gringsing, Reban, Subah, dan Tersono.
d. Kelas lereng IV (kelerengan 25 - 40%) seluas 11,66 %, dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Reban, Subah, Tersono, Tulis, dan Wonotunggal.

e. Kelas lereng V (kelerengan > 40%) seluas 1,95%, dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, dan Wonotunggal.

B. Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Batang sebagian besar adalah pegunungan dengan geologi sebagai berikut: Aluvial 13,08%; aluvial dan endapan danau 0,11%; anggota batupasir 1,74%, Batuan gunung api Dieng 0,29%, Batuan gunungapi Jembangan 46,38%, Formasi Damar 32,00%, Formasi Kaligetas 0,31% dan Kipas Aluvial 6,10%. Susunan geologi tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

C. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Batang secara umum memiliki suhu rata rata 25^0C-31^0C dan curah hujan dengan klasifikasi rendah hingga tinggi, memiliki iklim tropis dengan dua pergantian musim sepanjang tahun. Musim penghujan antara bulan November sampai dengan bulan April dan musim kemarau antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Curah hujan yang tinggi selama musim hujan mendukung kesuburan tanah dan keberhasilan pertanian di Kabupaten Batang, terutama untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Curah hujan yang tinggi di musim hujan dapat menyediakan pasokan air yang cukup untuk irigasi pertanian di musim kemarau.

Menurut data pengukuran tinggi curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan rata rata curah hujan 304,58 dan rata rata hari hujan sebanyak 11,83 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2023 dengan rata-rata curah hujan sebanyak 201,72 mm dengan rata rata hari hujan 10,23 hari. Rata-rata hari dan curah hujan selama 5 (lima) tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Rata-Rata Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-rata curah/hari hujan	
	Hari	mm
2020	11,83	304,58
2021	12,70	299,66
2022	14,97	283,60
2023	10,23	201,72
2024	12,65	250,01

Sumber: Kab. Batang dalam Angka Tahun 2021-2025

D. Daerah Aliran Sungai

Terdapat 16 sungai yang melintasi Kabupaten Batang, yaitu Sungai Kupang, Sambong, Urang, Lampir, Susukan, Ambo Biji, Boyo, Kebanyon, Asin, Baja, Kedondong, Brontak, Pesanggrahan, Kuripan, Sengkarang, dan Serayu. Banyaknya sungai yang melintasi Kabupaten Batang dapat menyediakan air bagi permukiman, pertanian dan industri. Data Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3 Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Batang

No.	Wilayah Sungai/ Daerah Aliran Sungai	Kabupaten	Pengelola
I.	WS Pemali-Comal		PUSDATARU Jateng
1.	DAS Kupang	Kab. Batang dan Kota Pekalongan	
2.	DAS Gabus	Kab. Batang dan Kota Pekalongan	
3.	DAS Sambong	Kab. Batang	
4.	DAS Sono	Kab. Batang	
5.	DAS Karanggeneng	Kab. Batang	
6.	DAS Boyo	Kab. Batang	
7.	DAS Urang	Kab. Batang	
8.	DAS Kretek	Kab. Batang	
9.	DAS Bugel	Kab. Batang	
10.	DAS Kuripan	Kab. Batang	
11.	DAS Kedondong	Kab. Batang	
II.	WS Bodri-Kuto		PUSDATARU Jateng
1.	DAS Brontak	Kab. Batang	
2.	DAS Kedondong	Kab. Batang	

No.	Wilayah Sungai/ Daerah Aliran Sungai	Kabupaten	Pengelola
3.	DAS Kuto	Kab. Batang dan Kab. Kendal	
4.	DAS Pesanggrahan	Kab. Batang dan Kab. Kendal	
5.	DAS Lampir	Kab. Batang	

Sumber : Bapperida Kabupaten Batang, 2025

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Substansi tersebut tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan rencana tata ruang dan pembangunan daerah.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung air ditinjau dari ketersediaan air yang berasal dari air sungai besar di Kabupaten Batang pada tahun 2029 yaitu sebesar 779,14 juta m^3/tahun dan kebutuhan total akan air sebesar 411,52 juta m^3/tahun. Jika dibandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut maka didapatkan selisih sebesar 367,61 juta m^3/tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa status daya dukung daya tampung air di Kabupaten Batang masih surplus atau belum terlampaui hingga tahun 2029. Namun meskipun surplus, nilai surplus dan status daya dukung menunjukkan angka yang menurun pada kurun waktu tahun 2025 - 2029.

Daya dukung air permukaan pada tahun 2025 memiliki status aman bersyarat atau sedang dengan nilai SA/DA 1,94. Pada tahun 2029, kebutuhan air meningkat karena pertumbuhan penduduk, peningkatan luas pertanian dan peningkatan luas industri sesuai rencana pola ruang yang mulai diimplementasikan. Daya dukung air permukaan pada tahun 2029 memiliki status aman bersyarat atau sedang dengan nilai SA/DA yang

semakin menurun menjadi sebesar 1,89. Pada tahun 2029, proyeksi penduduk akibat pengembangan industri menjadi hingga 1,1 juta jiwa.

Berdasarkan perhitungan neraca air berbasis grid, pada tahun 2022 sampai tahun 2029 daya dukung air di Kabupaten Batang masih dalam kondisi surplus. Namun jika dilihat dari sebaran perkecamatannya, terdapat wilayah yang terlampaui dan belum terlampaui. Pada tahun 2022 terdapat 4 dari 15 Kecamatan di Kabupaten Batang yang terlampaui daya dukung airnya lebih dari 70% luas wilayahnya yaitu Kecamatan Batang, Gringsing, Limpung dan Tulis. Proyeksi pada tahun 2029, menjadi 5 kecamatan yang terlampaui daya dukung airnya seluas lebih dari 70% wilayahnya yang meliputi Kecamatan Batang, Gringsing, Limpung, Tulis dan Warungasem. Pada tahun 2029, persentase wilayah yang terlampaui daya dukung airnya meningkat dari 46,37% menjadi 52,45% pada tahun 2029.

B. Daya Dukung Pangan (Beras)

Sesuai perhitungan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, daya dukung lahan pangan di Kabupaten Batang ditinjau dari komoditas beras diketahui mengalami surplus atau kelebihan beras pada tahun 2022 - 2029. Pada tahun 2022, konversi gabah ke beras 106.555,12 ton, dengan kebutuhan konsumsi 71.313,35 ton, sehingga menghasilkan daya dukung lahan pangan sebesar 1,47 dan pada tahun 2022 dan Kabupaten Batang surplus sebanyak 34.241,77 ton.

Pada tahun 2029, jumlah produksi beras di Kabupaten Batang diasumsikan tetap sebesar 106.555,12 ton dengan kebutuhan konsumsi 100.565,18 ton, sehingga menghasilkan daya dukung lahan pangan sebesar 1,06. Artinya pada tahun 2029 Kabupaten Batang surplus beras, namun tingkat surplusnya menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2022. Suprplus beras pada tahun 2029 sebanyak 14.251,06 ton. Kondisi surplus beras yang terus menurun ini, harus diperhatikan, perlu adanya upaya peningkatan produktivitas dan ketersediaan beras di masa yang akan datang. Salah satunya adalah meningkatkan intensifikasi pertanian dan meningkatkan nilai rendeman agar nilai daya dukung lahan pangan dapat

bertahan pada nilai 1,61 dan surplus beras relatif stabil. Rantai pasok beras di Kabupaten Batang menjadi hal yang penting

agar bisa mendapatkan pasok beras yang stabil, terjangkau, dan mudah diakses.

C. Daya Dukung Ketersediaan Lahan

Daya dukung lahan Kabupaten Batang berperan penting untuk mendukung perkembangan zona industri di sepanjang jalur pantura Kabupaten Batang. Terlebih dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan *Batang Industrial Park,* Kabupaten Batang memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri, terutama yang berhubungan dengan ketahanan pangan dan rantai pasok industri.

Daya dukung lahan pangan di Kabupaten Batang ditinjau dari berbagai komoditi diketahui mengalami surplus pada tahun 2022 - 2029. Pada tahun 2022, kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk sebesar 817.100 jiwa adalah sebesar 155.957,9 ha dan ketersediaan lahan yang ada sebesar 237.587,81 ha. Sehingga daya dukung lahan Kabupaten Batang pada tahun 2022 berstatus surplus sebanyak 81.629,91 ha.

Pada tahun 2029, kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk sebesar 1.136.329,72 jiwa adalah sebesar 216.888,50 ha dan ketersediaan lahan yang ada sebesar 237.652,90 ha. Sehingga daya dukung lahan Kabupaten Batang pada tahun 2029 berstatus surplus sebanyak 20.764,40 ha.

Meskipun demikian, status surplus tersebut dapat dikatakan kecil dan menurun dari tahun ke tahun. Perlu adanya upaya untuk dapat melakukan peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan semua komoditi di masa yang akan datang, penguatan infrastruktur pendukung pangan dan penataan rantai pasok pangan Kabupaten Batang.

D. Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu permukiman (bangunan) untuk perkotaan dan pertanian untuk perdesaan. Berdasarkan hasil perhitungan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029,

daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Batang termasuk dalam kategori baik (DDLB > 3) dengan nilai sebesar 3,66. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya dukung lahan untuk bangunan di Kabupaten Batang masih mampu menampung rencana pengembangan lahan terbangun terutama pada zona perumahan. Meskipun demikian, penting untuk tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan lahan. Pengembangan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan potensi dampak lingkungan, seperti konversi lahan pertanian yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan lokal, serta risiko bencana seperti banjir atau kekeringan yang mungkin terjadi akibat perubahan tata guna lahan. Oleh karena itu, meskipun daya dukung lahan masih cukup, perlu adanya perencanaan tata ruang yang matang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan pengembangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Berketahanan Air, Energi, dan Pangan

Ketahanan air merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menjamin ketersediaan dan akses terhadap air minum bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, upaya peningkatan akses air minum menunjukkan kemajuan secara bertahap. Meskipun peningkatannya terjadi sedikit demi sedikit, tren positif ini mencerminkan komitmen yang konsisten dalam memperluas jangkauan layanan dasar air minum. Capaian air minum periode 5 (lima) tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini:

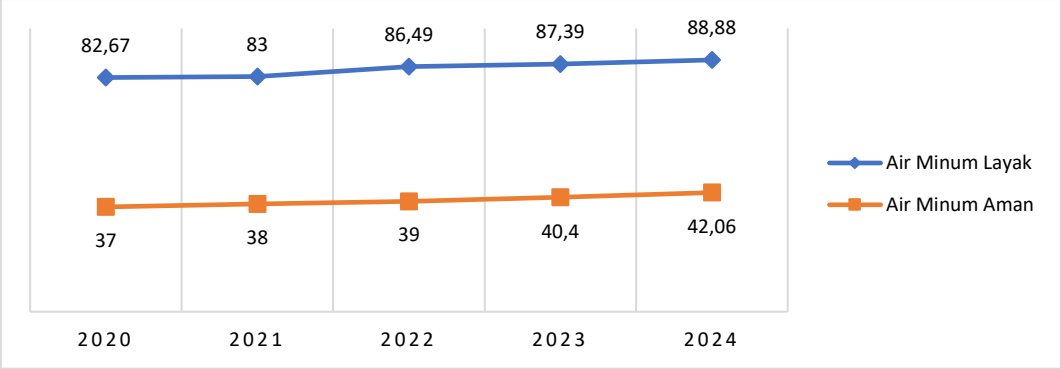

Gambar 2. 2 Persentase Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak dan Aman Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, cakupan layanan akses air minum baik layak maupun aman terus meningkat dari tahun 2020-2024. Cakupan layanan akses air minum layak meningkat dari 82,67% di tahun 2020 menjadi 88,88% di tahun 2024. Sementara itu, cakupan layanan air minum aman yang mencapai 42,06% pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan dalam memastikan air yang dikonsumsi masyarakat bebas dari kontaminasi dan aman untuk digunakan. Meskipun ada peningkatan, cakupan layanan air minum aman masih perlu diperluas untuk menjangkau lebih banyak penduduk di masa mendatang.

Kemudian untuk cakupan layanan air minum jaringan perpipaan dapat dilihat pada grafik berikut:

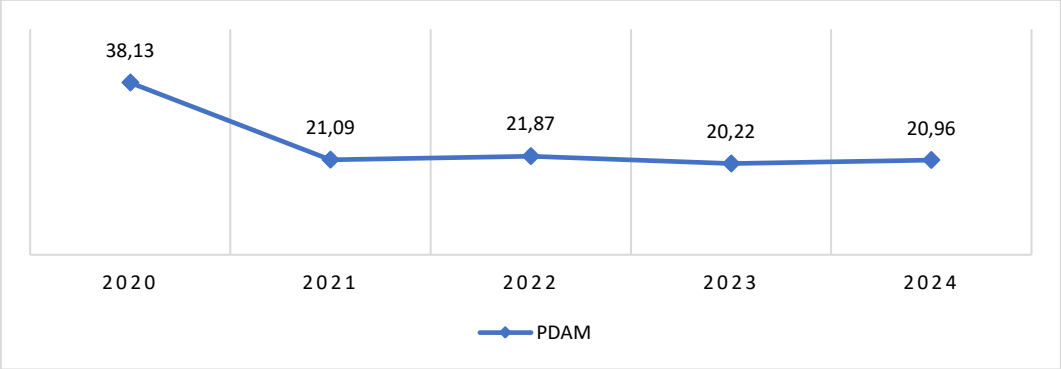

Gambar 2. 3 Persentase Cakupan Layanan Air Minum Jaringan Perpipaan PDAM

Sumber: PDAM Sendang Kamulyan, 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, cakupan layanan air minum jaringan perpipaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan layanan

tercatat sebesar 38,13%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 21,09% yang disebabkan karena penyesuaian data audit. Setelah penurunan tersebut, cakupan layanan mulai menunjukkan stabilisasi. Pada tahun 2022 meningkat sedikit menjadi 21,87%, namun kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 20,22% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, cakupan kembali naik secara terbatas menjadi 20,96%. Meskipun terdapat sedikit peningkatan di tahun-tahun terakhir, secara keseluruhan, cakupan layanan perpipaan PDAM dalam lima tahun terakhir masih berada di bawah capaian tahun 2020. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan strategi pelayanan, termasuk peningkatan investasi infrastruktur, perbaikan jaringan, serta perluasan layanan ke wilayah yang belum terjangkau, guna mencapai target akses air minum yang berkelanjutan.

Sementara itu, persentase cakupan layanan air minum jaringan perpipaan non PDAM dapat dilihat pada Grafik berikut:

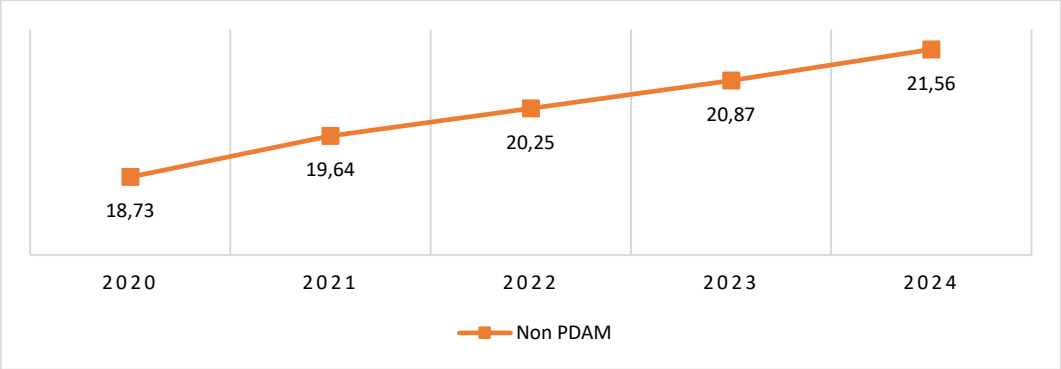

Gambar 2. 4 Persentase Cakupan Layanan Air Minum Jaringan Perpipaan Non-PDAM

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan data di atas, cakupan layanan air minum jaringan perpipaan Non-PDAM mengalami tren peningkatan. Dimulai dari 18,73% pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 21,56% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa penyedia layanan air minum jaringan perpipaan di luar PDAM, seperti Kelompok Pengelola SPAM di Desa, juga berkontribusi dalam menyediakan akses air perpipaan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tren positif dalam perluasan akses air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Batang, yang merupakan bagian dari target pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Selain cakupan layanan air minum, ketahanan air di Kabupaten Batang juga tercermin dari keberadaan dan kondisi jaringan irigasi yang berperan penting dalam mendukung sektor pertanian. Saat ini, luas jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang mencapai 20.329,896 hektare. Komitmen dalam pengelolaan sumber daya air terlihat dari peningkatan luas jaringan irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir sebagaimana data dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 4 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten (Ha) Tahun 2020-2024

No.	Kondisi Irigasi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Baik	11.561,61	11.676,97	12.628,93	13,116,38	13.912,52
2.	Rusak	8.768,28	8.652,92	7.700,966	7.213,514	6.417,36
	Total luas	20.329,90	20.329,89	20.329,89	20.329,89	20.329,89

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2025

Luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dapat dilihat pada grafik berikut:

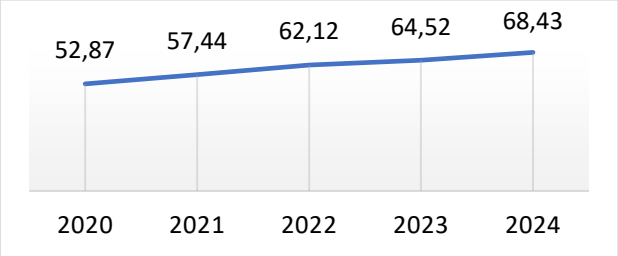

Gambar 2. 5 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang, 2025

Pada tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Batang sebesar 11.561,61 ha (52,87%) terus meningkat menjadi 13.912,52 ha (68,43%) pada tahun 2024. Luasan irigasi dalam kondisi baik ini lebih besar jika dibandingkan dengan luasan irigasi dalam kondisi rusak yaitu sebesar 6.417,36 ha pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang fokus terhadap upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Batang

guna menunjang produktivitas pertanian. Ke depan, upaya perbaikan masih perlu ditingkatkan, karena banyak bangunan irigasi yang rusak akibat sudah tua dan kurang pemeliharaan, serta sering terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan irigasi tersebut.

Terkait Energi, dalam rangka mendukung kebijakan nasional terkait pengembangan energi baru dan terbarukan, Pemerintah Kabupaten Batang mendorong pemanfaatan potensi energi alternatif yang bersumber dari kondisi alam dan aktivitas lokal masyarakat. Dua bentuk energi terbarukan yang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Batang adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan biogas. Keduanya merupakan sumber energi yang bersih, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Pengembangan PLTMH diarahkan untuk memanfaatkan potensi aliran sungai di wilayah perbukitan Kabupaten Batang yang memiliki debit air cukup stabil sepanjang tahun. Penggunaan PLTMH diharapkan dapat memperluas akses listrik bagi masyarakat.

Seluruh desa di Kabupaten Batang saat ini telah menikmati akses terhadap layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Capaian ini mencerminkan kemajuan dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang menjadi pondasi penting bagi pembangunan wilayah. Ketersediaan listrik yang merata hingga ke pelosok desa tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap teknologi, informasi, dan peluang ekonomi.

Di sisi lain, pengembangan biogas menjadi alternatif energi yang relevan di wilayah-wilayah dengan aktivitas peternakan yang tinggi. Limbah organik, khususnya kotoran ternak, dapat diolah menjadi energi untuk kebutuhan rumah tangga, seperti memasak dan penerangan, sekaligus menghasilkan produk sampingan berupa pupuk organik. Pemanfaatan biogas tidak hanya meningkatkan efisiensi pemanfaatan limbah, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terus mendorong pelaksanaan program-program energi terbarukan dengan memperkuat sinergi antara masyarakat, sektor swasta, dan instansi terkait. Diperlukan pula dukungan kebijakan yang komprehensif, baik dalam bentuk insentif, fasilitasi pembiayaan, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pengembangan energi alternatif di Kabupaten Batang dapat menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan ketahanan energi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Batang juga memiliki beberapa potensi energi terbarukan yang cukup bervariasi. Pada sektor energi angin *(onshore)*, potensi diestimasikan sebesar 31,75MW. Di bidang energi surya, daya PLTS (Photovoltaic) sebesar 2,75GWp telah teridentifikasi, namun untuk PLTS terapung belum tercatat adanya potensi. Untuk sektor hidro, potensi mikro (PLTMH) hingga kecil (PLTA RoR) ada sebesar 2,98MW, sementara potensi PLTA Bendungan tidak tercatat karena belum ada bendungan di Kabupaten Batang, namun kemungkinan ada potensi pengembangan Bendungan Kedunglanggar yang belum dihitung proyeksi potensi energinya. Pada potensi bioenergi dari sumber-sumber seperti gula, kayu, kelapa sawit, padi, pulp & kertas, dan tapioka di Batang seluruhnya masih nol, menandakan belum ada pemanfaatan sumber bioenergi tersebut. Kategori bioenergi dari limbah seperti sampah kota secara teknis dan teoritis mulai tercatat: 1,82MW (teknis) dan 6,07MW (teoritis), serta dari hutan produksi kritis sebesar 1,27MW. Namun belum ada data untuk pengembangan biomassa dan energi panas bumi di daerah ini. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Batang memiliki peluang utama pengembangan energi terbarukan terutama dari sektor angin (onshore), surya (PLTS), sedikit mikro-hidro, serta potensi bioenergi berbasis sampah kota dan hutan produksi kritis, walaupun jika dibandingkan dengan daerah lain masih terbilang lebih kecil. Sektor bioenergi dari limbah industri dan pertanian serta panas bumi belum tercatat potensi yang dapat dimanfaat pada saat ini.

Pembangunan pipa gas Cirebon–Semarang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bidang energi yang dirancang untuk

meningkatkan ketahanan dan ketersediaan energi, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Jalur pipa gas ini membentang dari Cirebon (Jawa Barat) hingga Semarang (Jawa Tengah), dan melewati wilayah Kabupaten Batang sebagai salah satu titik lintasan penting.

Kabupaten Batang secara strategis diuntungkan oleh keberadaan proyek ini karena membuka potensi pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur energi yang andal. Pipa gas bumi ini dirancang untuk memasok kebutuhan energi sektor industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga, yang sejalan dengan arah kebijakan transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih dan efisien.

Adanya pembangunan pipa gas ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya investasi di Kabupaten Batang, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan wilayah sekitar yang memiliki potensi pengembangan kawasan ekonomi baru. Selain itu, ketersediaan pasokan gas yang stabil akan menjadi daya tarik bagi industri-industri berbasis energi gas, serta mendukung pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang lebih mahal dan berdampak tinggi terhadap lingkungan.

Sementara itu terkait dengan pangan, ketersediaan pangan utama Kabupaten Batang masih didominasi oleh beras dan jagung. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian ketersediaan pangan beras dan jagung tersaji dalam grafik berikut ini:

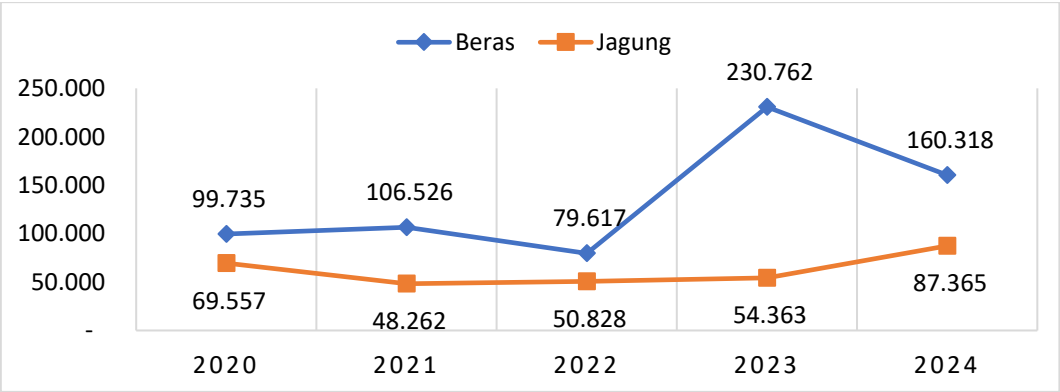

Gambar 2. 6 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Batang (Ton) Tahun 2020-2024

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2025

Dari grafik diatas, ketersediaan beras cenderung fluktuatif yaitu sebanyak 99.735 ton pada tahun 2020 dan terus menurun menjadi 79.617 ton di tahun 2022. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya bencana banjir pada bulan November dan Desember tahun 2022 yang mengakibatkan lahan seluas 150 Ha gagal panen yang berakibat pada penurunan produksi padi dan ketersediaan beras di Kabupaten Batang yang kemudian meningkat menjadi 230.762 ton pada tahun 2023 yang didukung adanya program Indeks Pertanaman (IP) 400 atau penanaman padi sebanyak 4 kali setahun. Dan menurun kembali menjadi 160.318 ton pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2024 terjadi karena adanya alih fungsi lahan, yang mengakibatkan penurunan kerusakan lahan kualitas lahan pertanian sehingga mengurangi produksi beras. Selain itu, kurangnya penggunaan teknologi pertanian yang memadai dapat menghambat produksi.

Sedangkan pada ketersediaan jagung juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2020 – 2024. Dimana pada tahun 2020 dengan ketersediaan pangan jagung sebanyak 69.557 ton kemudian menurun menjadi 48.262 ton pada tahun 2021 yang kemudian meningkat menjadi 87.365 ton pada tahun 2024. Capaian ini didukung adanya peningkatan kesadaran petani tentang budidaya jagung yang menjanjikan serta peningkatan partisipasi petani dalam program pemerintah.

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan mencapai 100% melalui website : *komoditas.batangkab.go.id.* Penyediaan informasi ini merupakan salah satu upaya yang bersifat antisipatif yaitu dengan melakukan pemantauan untuk meninjau ketersediaan produksi di tingkat produsen maupun bersifat responsif yang didukung sistem distribusi yang efektif dan efisien sehingga menciptakan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Cadangan pangan daerah digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di wilayah kabupaten Batang akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya. Sebagaimana data Cadangan Pangan Daerah tersaji dalam grafik berikut ini:

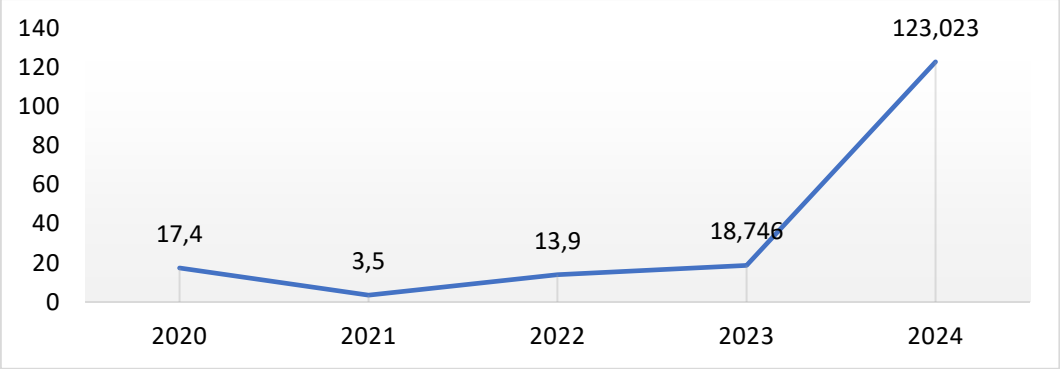

Gambar 2. 7 Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Batang (ton)

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2025

Dari grafik diatas, cadangan pangan daerah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat. Hal ini disebabkan cadangan pangan berupa gabah yang memiliki masa simpan tertentu, sehingga Pemerintah Kabupaten Batang tidak setiap tahun membeli gabah baru, tetapi menghabiskan dulu stok yang masih ada. Pada tahun 2020 cadangan pangan daerah sebanyak 17,4 ton yang kemudian menurun menjadi 3,5 ton dikarenakan Tidak ada kegiatan yang menunjang pengadaan cadangan pangan karena menghabiskan stok cadangan pangan yang masih ada dari tahun sebelumnya. Kemudian meningkat kembali menjadi 18,746 ton di tahun 2023 dan meningkat drastis pada tahun 2024 menjadi sebanyak 123,023 ton. Hal ini didukung pengoptimalisasian kegiatan cadangan pangan di Kabupaten Batang dan kedepan Pemerintah Daerah akan tetap memperhatikan alokasi cadangan pangan daerah untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga

Prevalensi ketidakcukupan pangan merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan, maka kian tinggi pula persentase penduduk yang mengonsumsi makanan, tetapi kurang dari kebutuhan energinya. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga mengaksesnya di tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Sedangkan ketahanan pangan menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Semakin tinggi angka Indeks Ketahanan Pangan semakin rendah tingkat kerentanan pangan. Berikut tersaji data Indeks Ketahanan Pangan dan PoU pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Batang :

Tabel 2. 5 Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	9,93	11,54	10,23	9,38	6,53
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81,28	82,98	83,19	83,15	84,77

Sumber : Dispaperta Kab. Batang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian PoU cenderung fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2023 yaitu pada rentang 9-11%. Hal tersebut menandakan bahwa tingginya tingkat konsumsi pangan masyarakat namun tidak sebanding dengan kebutuhan energi yang dibutuhkan. Kemudian pada tahun 2024, capaian PoU menurun menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 6,53%. Penurunan capaian PoU ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam kondisi ketahanan pangan masyarakat. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun tingkat konsumsi pangan masyarakat tetap tinggi, ada peningkatan dalam kualitas dan keberagaman pangan yang dikonsumsi, sehingga kebutuhan energi dan gizi lebih terpenuhi. Meskipun demikian, penurunan ini juga perlu diperhatikan secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa distribusi pangan tetap merata dan tidak terjadi ketimpangan akses pangan di beberapa wilayah atau kelompok masyarakat.

Sementara itu, nilai IKP Kabupaten Batang dari tahun 2020-2024 semakin meningkat. Hal ini menandakan rendahnya tingkat kerentanan pangan di Kabupaten Batang. Selain itu, IKP yang semakin baik bisa mengindikasikan

bahwa ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan di Kabupaten Batang juga semakin membaik.

Lingkungan Hidup Berkualitas

Jika penataan ruang dilakukan secara bijaksana maka kualitas lingkungan juga akan terjaga. Karena pada dasarnya lingkungan memiliki keterbatasan daya tampung dan daya dukung dalam menopang kehidupan. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Batang direpresentasikan dalam indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Berikut disajikan dalam 5 tahun terakhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Batang :

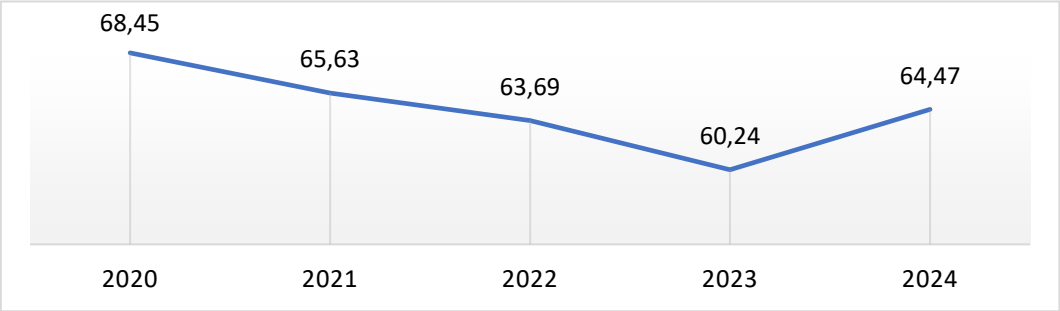

Gambar 2. 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : DLH Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang selama periode 2020-2023 terus mengalami penurunan dari sebesar 68,45 pada tahun 2020 menjadi 60,24 pada tahun 2023, hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Batang. Pembangunan kawasan industri baru dan pembukaan lahan di daerah Batang bagian selatan mempengaruhi penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 64,47, hal ini menunjukkan kondisi lingkungan yang semakin membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah mengalami peningkatan pada tahun 2024, tetap diperlukan upaya-upaya peningkatan

kinerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan agar keberlanjutan dapat dipertahankan.

Sementara itu, berkaitan dengan air limbah, pelayanan terhadap akses air limbah di Kabupaten Batang dalam periode 5 (lima) tahun terakhir sedikit demi sedikit terus mengalami peningkatan sebagaimana capaian air limbah yang tersaji dalam grafik berikut ini:

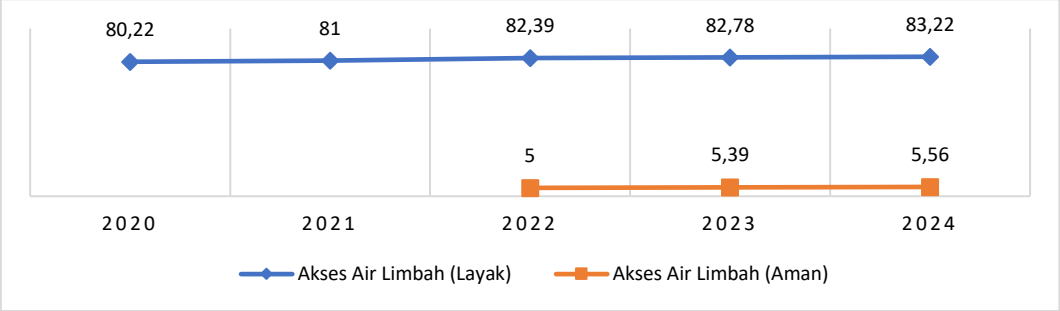

Gambar 2. 9 Persentase Cakupan Layanan Akses Air Limbah Layak dan Aman Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2025

Secara keseluruhan, grafik tersebut menggambarkan tren peningkatan akses air limbah yang layak dan aman. Akses air limbah yang layak meningkat dari 80,22% pada tahun 2020 menjadi 83,22% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga kini memiliki fasilitas pengelolaan air limbah yang memenuhi standar. Namun, akses air limbah yang aman masih tergolong rendah, hanya mencapai 5,56% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengelolaan air limbah yang layak, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan air limbah yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan lingkungan.

Selanjutnya dalam hal persampahan, infrastruktur persampahan di Kabupaten Batang saat ini terdiri dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sejumlah 1 unit, Tempat Penampungan Sementara (TPS) sejumlah 64 unit yang tersebar di seluruh kecamatan, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sejumlah 1 unit berlokasi di KEK Industropolis Batang (hanya melayani dalam kawasan industri) dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) sejumlah 2 unit berlokasi di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang dan Desa Pesaren Kecamatan Warungasem. Salah satu

penyebab ketidakseimbangan lingkungan hidup adalah sampah yang tidak ditangani dengan baik. Bukan hanya mengganggu keseimbangan lingkungan saja, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan juga sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi persampahan di Kabupaten Batang digambarkan dengan banyaknya timbulan sampah pada tahun 2024 yang mencapai 181.525,38 ton/tahun. Pengurangan sampah di Kabupaten Batang tahun 2024 sebesar 39.743,12 ton/tahun (21,89%) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 8.601,88 ton/tahun (5,53%). Kondisi persampahan Kabupaten Batang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 6 Kondisi Persampahan Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Pengurangan Sampah		Penanganan Sampah	
		ton/tahun	(%)	ton/tahun	(%)
2020	87.788,12	709,98	0,81%	86.870,00	98,95%
2021	118.317,38	4.839,78	4,09%	33.455,90	28,28%
2022	207.055,41	8.601,88	4,15%	41.975,00	20,27%
2023	181.525,38	10.042,92	5,53%	49.307,85	27,16%
2024	181.525,38	39.743,12	21,89%	36.243,40	0%

Sumber : DLH Kabupaten Batang, 2025

Penanganan sampah menunjukkan angka yang kecil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini terjadi karena bank sampah yang telah terbentuk tidak berjalan secara optimal dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk penanganan masalah persampahan belum cukup berhasil. Kurangnya infrastruktur persampahan juga menjadi masalah utama pengelolaan sampah di Kabupaten Batang, terlebih lagi kondisi TPA Randukuning yang merupakan TPA satu-satunya di Kabupaten Batang saat ini sudah melebihi kapasitas (*overload*). Pada tahun 2024, tingkat penanganan sampah di Kabupaten Batang tercatat sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena sampah yang terkumpul masih diangkut dan dibuang ke TPA dengan sistem *open dumping*. Dengan demikian, meskipun secara fisik terdapat aktivitas pengangkutan dan pembuangan, namun tidak memenuhi kriteria teknis dan lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam regulasi.

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berikut adalah peta potensi bahaya bencana yang berpotensi di kabupaten batang berdasarkan kajian resiko bencana tahun 2024 yang bersumber dari data IRBI :

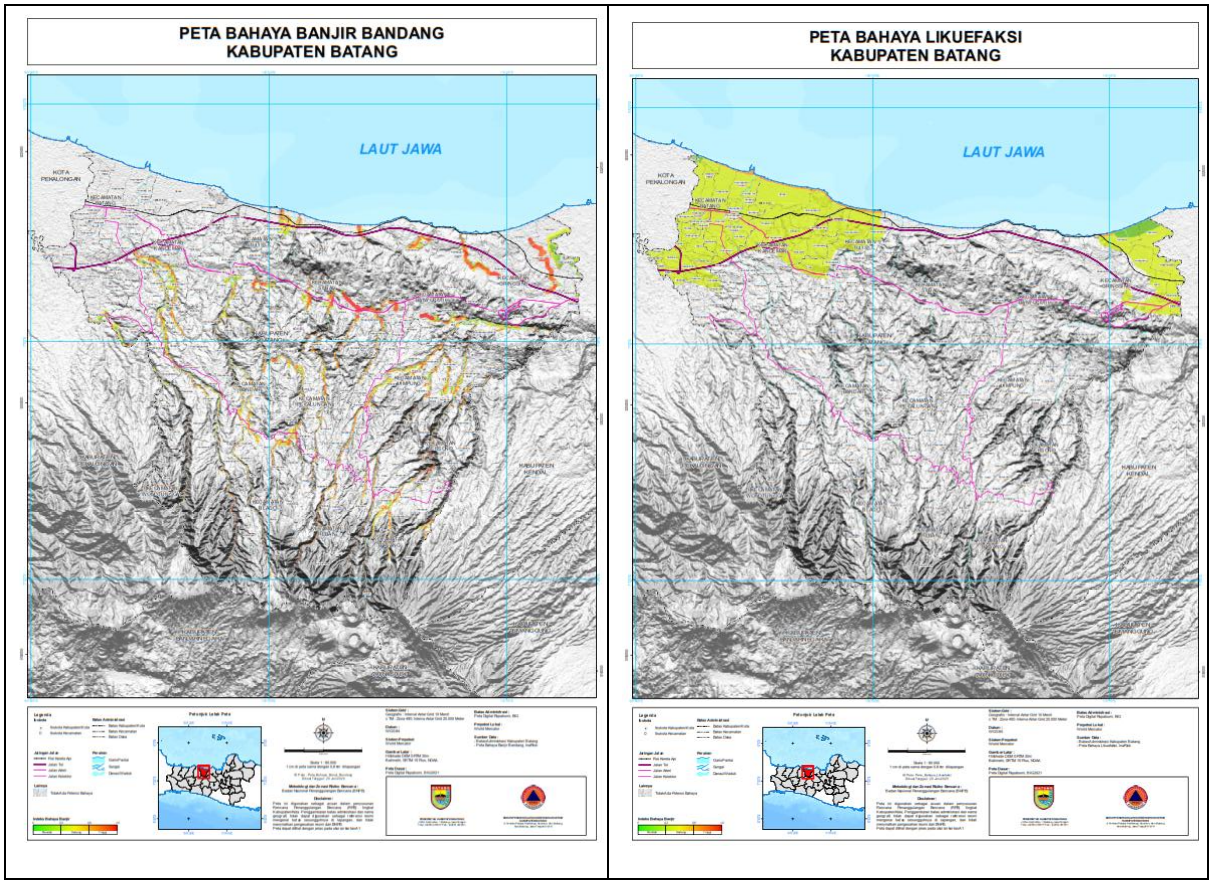

PETA BAHAYA BANJIR
KABUPATEN BATANG

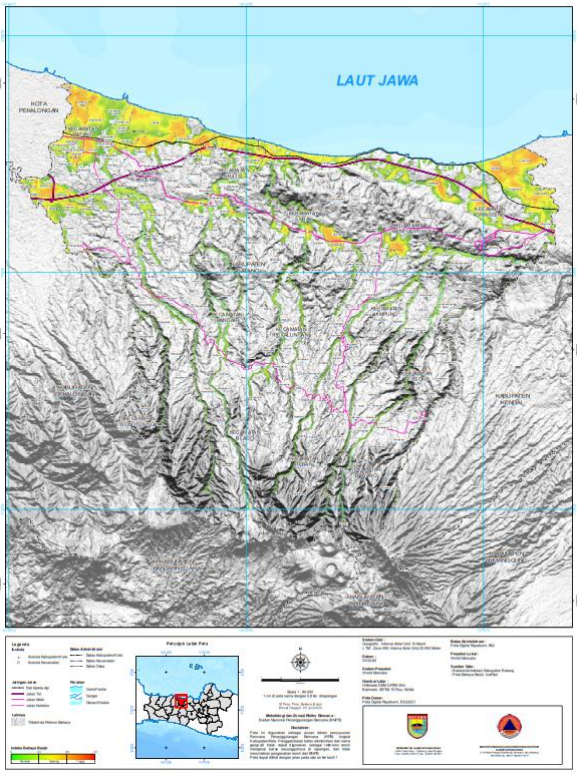

PETA BAHAYA TANAH LONGSOR
KABUPATEN BATANG

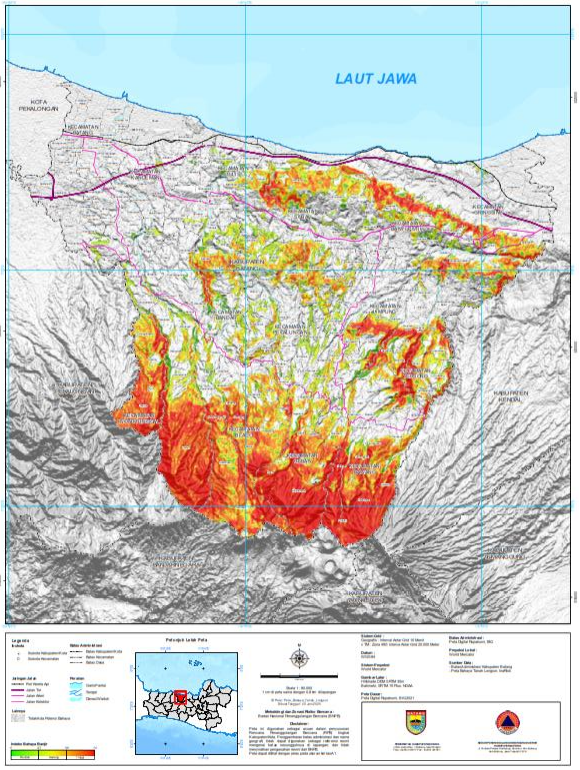

PETA BAHAYA LETUSAN GUNUNGAPI DIENG
KABUPATEN BATANG

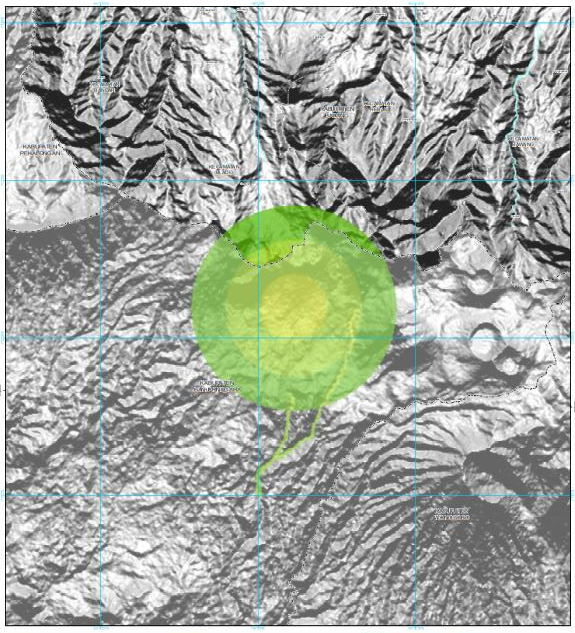

PETA BAHAYA KEKERINGAN
KABUPATEN BATANG



PETA BAHAYA KEGAGALAN TEKNOLOGI
KABUPATEN BATANG

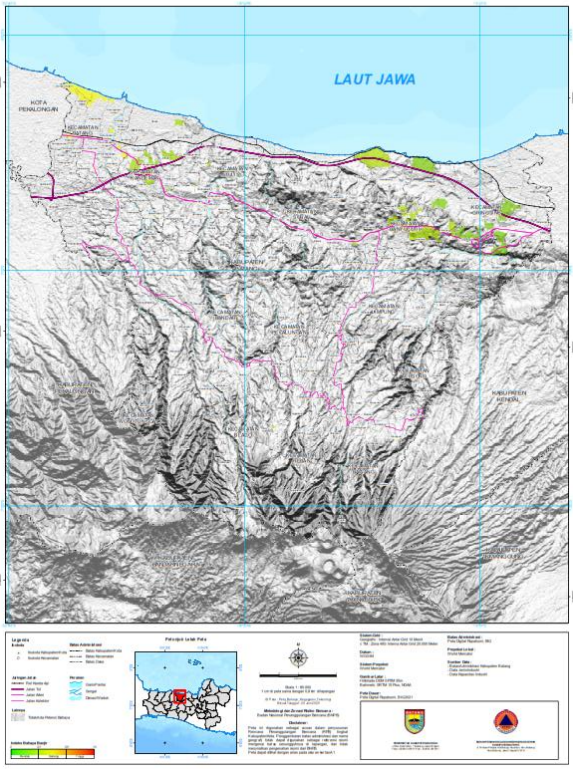

PETA BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN BATANG

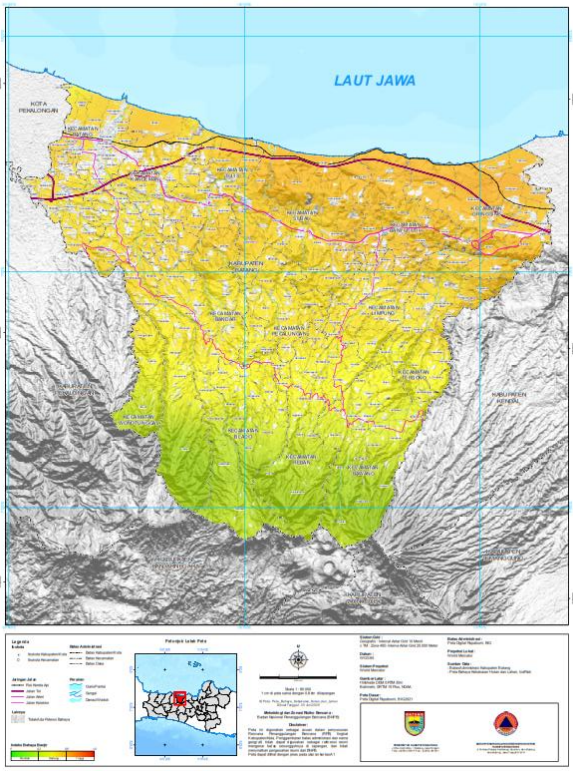

PETA BAHAYA GEMPABUMI
KABUPATEN BATANG

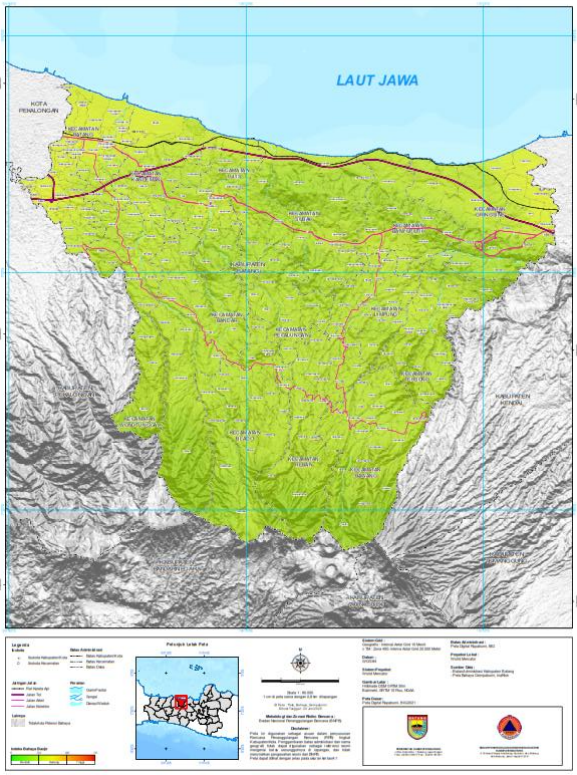

PETA BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI
KABUPATEN BATANG

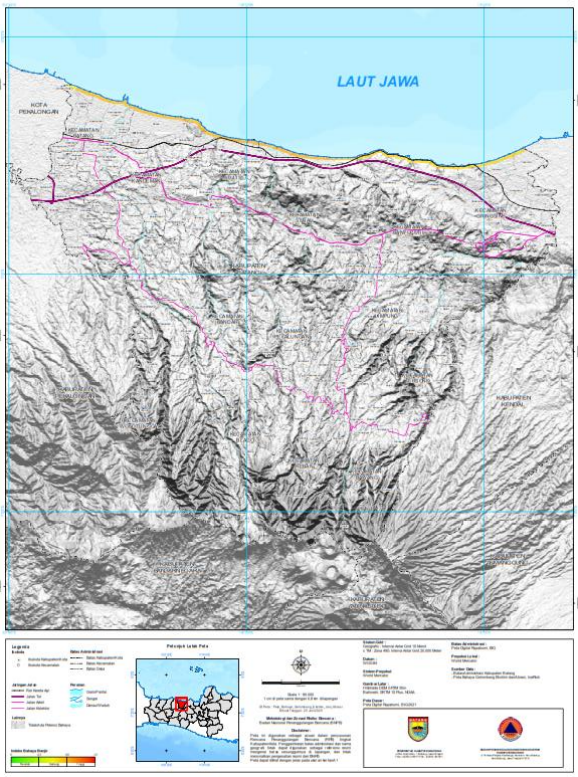

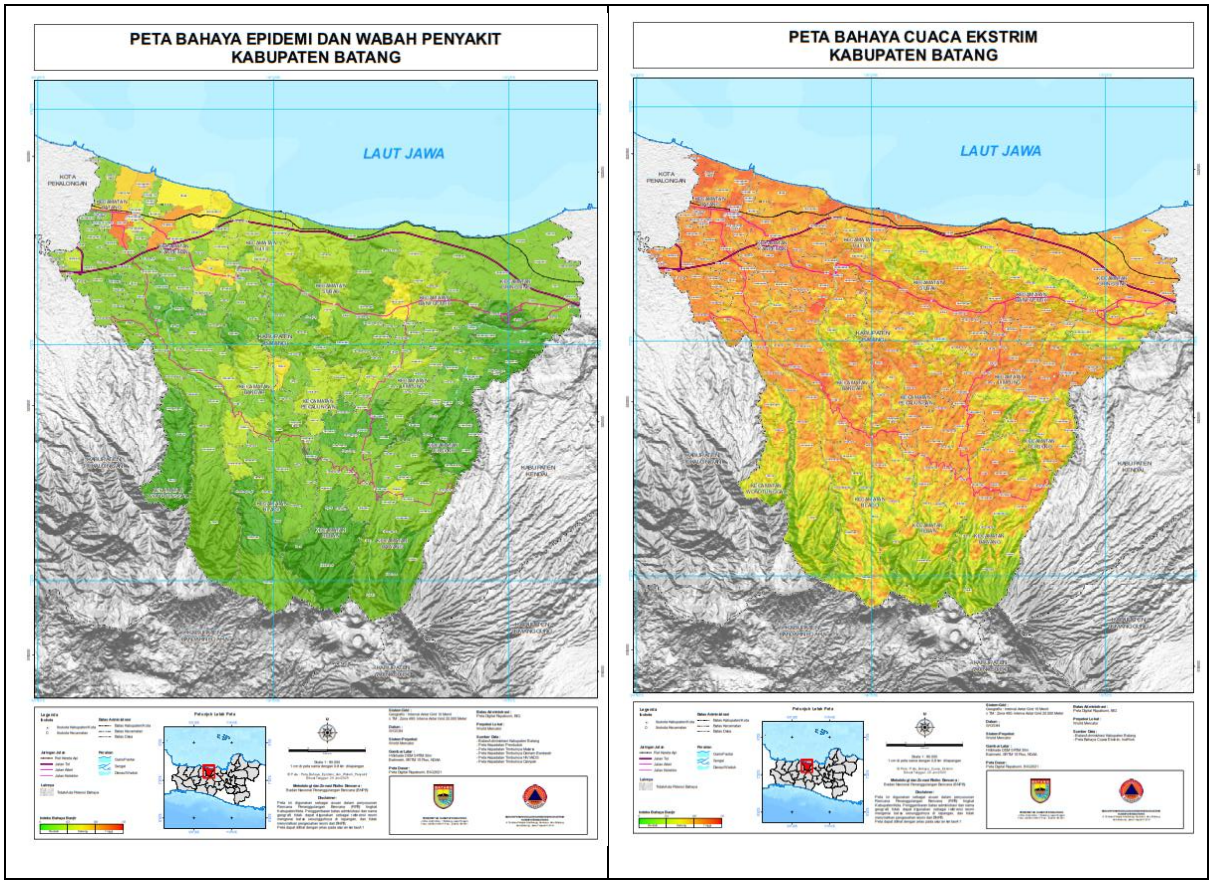

Kebencanaan di Kabupaten Batang direpresentasikan melalui indikator Indeks Risiko Bencana Kabupaten Batang yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Batang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar berikut:

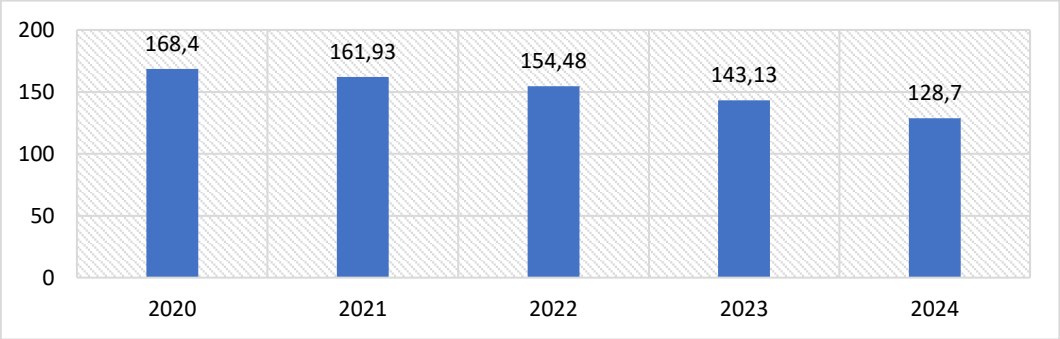

Gambar 2. 10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Batang

Sumber : BNPB, 2025

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Batang terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 yaitu pada skor 128,70. Meskipun Indeks Risiko Bencana Kabupaten Batang secara

keseluruhan terus mengalami penurunan, tingkat risiko pada bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim & abrasi, dan kekeringan masih cukup tinggi. Masih adanya tingkat bahaya dan kerentananan terhadap bencana disebabkan karena belum optimalnya kapasitas daerah dalam pengurangan kerentanan atau upaya tindakan mitigasi.

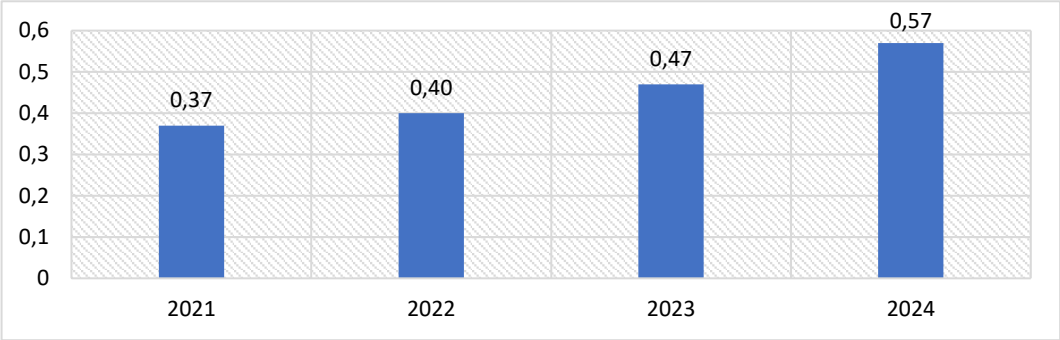

Gambar 2. 11 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021-2024

Sumber : BPBD Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan grafik diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Batang menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan kapasitas dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi risiko bencana. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 0,37 dan mengalami kenaikan menjadi 0,40 pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut lebih signifikan di tahun 2024 dengan capaian indeks sebesar 0,57. Secara umum, tren positif ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya penguatan ketahanan daerah, baik melalui perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas infrastruktur, maupun penguatan sistem kelembagaan dan partisipasi masyarakat, mulai menunjukkan hasil yang konkret. Meskipun nilai indeks masih berada di bawah angka ideal, namun arah perkembangan yang progresif ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan kapasitas dan efektivitas penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Fenomena perubahan iklim secara global juga berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam bahkan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Fenomena pemanasan global dimana terjadi peningkatan gas

rumah kaca pada lapisan atmosfer berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Secara akumulasi, total capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Batang tahun 2023 sebesar 31,3 ton CO_2Eq dan tingkat penurunnya semakin tinggi menjadi 183,852 ton CO_2Eq pada 2024. Angka ini merupakan kinerja Penurunan Emisi GRK yang dilaporkan oleh Kabupaten Batang dari berbagai kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan dan dilaporkan dalam Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA).

Adapatasi Perubahan Iklim menjadi penting agar para pemangku kepentingan di Kabupaten Batang dan masyarakatnya dapat mengetahui sejauh mana kondisi kerentanan saat ini, daya dukung dan kemampuan adaptasi lain (kelembagaan, ketersediaan sumber daya) serta opsi-opsi adaptasi apa yang sesuai di wilayahnya.

Berdasarkan data dari Variabel SIDIK KemenLHK (Indikator Nasional), Kabupaten Batang memiliki desa yang masuk pada kerentanan tinggi seperti pada Gambar berikut:

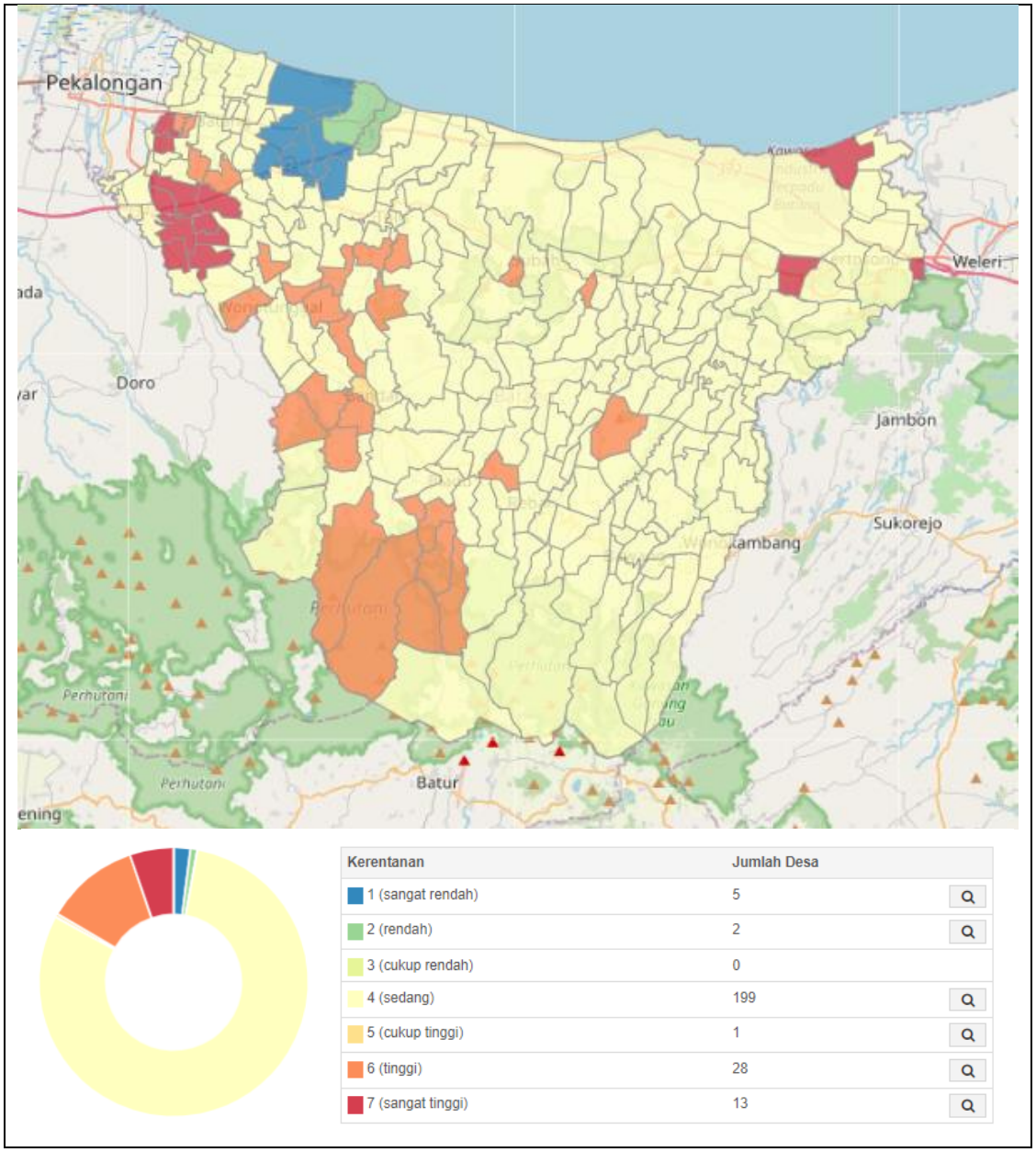

Gambar 2. 12 Peta Kondisi Kerentanan Perubahan Iklim

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kemudian jika dilihat dari suhu udara, terdapat peningkatan suhu rata-rata di Kabupaten Batang 10 tahun yang lalu seperti pada Gambar berikut:

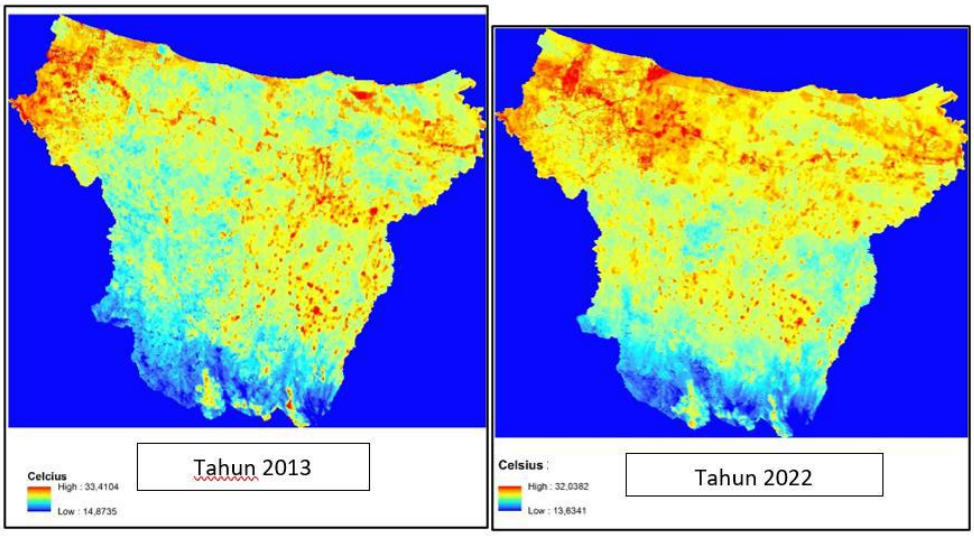

Gambar 2. 13 Peningkatan Suhu Udara

Sumber : Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kab. Batang, 2024

Pada tahun 2022, meskipun suhu tertinggi sedikit menurun dengan batas atas sekitar 32 derajat Celsius, luasan wilayah yang berwarna merah mengalami peningkatan dan penyebaran yang lebih luas. Tidak hanya di bagian barat laut, tetapi juga muncul di beberapa bagian timur laut Kabupaten Batang. Peningkatan luasan warna merah ini menandakan bahwa lebih banyak wilayah mengalami suhu tinggi, memperluas dampak panas ekstrem ke daerah-daerah yang sebelumnya mungkin tidak begitu panas.

Sedangkan jika dilihat dari kondisi cemaran udara di Kabupaten Batang berdasarkan peta sebaran karbon dioksida (CO_2), tahun 2023 menunjukkan variasi konsentrasi CO_2 yang signifikan di seluruh wilayah kabupaten. Bagian utara Kabupaten Batang ditandai dengan warna merah, menunjukkan tingkat konsentrasi CO_2 yang tinggi dengan nilai mencapai 36,3521 mol/m^2. Sebaliknya, bagian selatan Kabupaten Batang yang ditandai dengan warna biru memiliki konsentrasi CO_2 yang lebih rendah, sekitar 23,2404 mol/m^2.

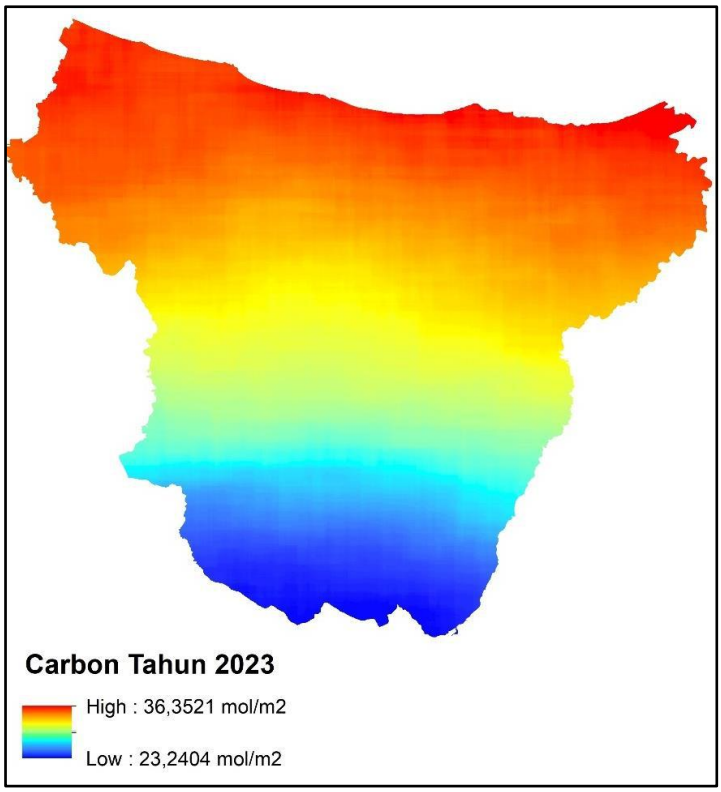

Gambar 2. 14 Peta Kondisi Pencemaran Karbon

Sumber : Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kab. Batang, 2024

Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 838.187 jiwa, yang terdiri dari 422.237 jiwa laki laki atau sebesar 50,37% dari total jumlah penduduk dan 415.950 jiwa perempuan atau sebesar 49,62% dari total jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,12%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Batang mencapai 1.051 jiwa/km^2 dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batang sebesar 4.018 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Blado sebesar 597 jiwa/km^2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin di tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Wonotunggal	20.436	20.233	40.669	763	101,00

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan			
2	Bandar	37.939	36.944	74.883	1.010	102,83
3	Blado	23.987	23.152	47.139	597	103,72
4	Reban	21.094	21.117	42.211	900	100,12
5	Bawang	29.319	28.141	57.460	772	104,23
6	Tersono	21.295	21.065	42.360	849	101,27
7	Gringsing	32.873	32.857	65.730	894	100,41
8	Limpung	22.884	22.990	45.874	1.358	99,77
9	Subah	19.218	18.959	38.177	851	101,47
10	Tulis	27.594	27.266	54.860	652	101,19
11	Batang	16.825	16.590	33.415	917	101,35
12	Warungasem	20.331	20.565	40.896	895	99,08
13	Kandeman	29.625	28.801	58.426	1.376	102,79
14	Pecalungan	70.085	69.407	139.492	4.018	101,10
15	Banyuputih	28.732	27.863	56.595	2.369	103,19
Jumlah		422.237	415.950	838.187	1.051	101,89

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2025

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur tersaji pada Gambar berikut:

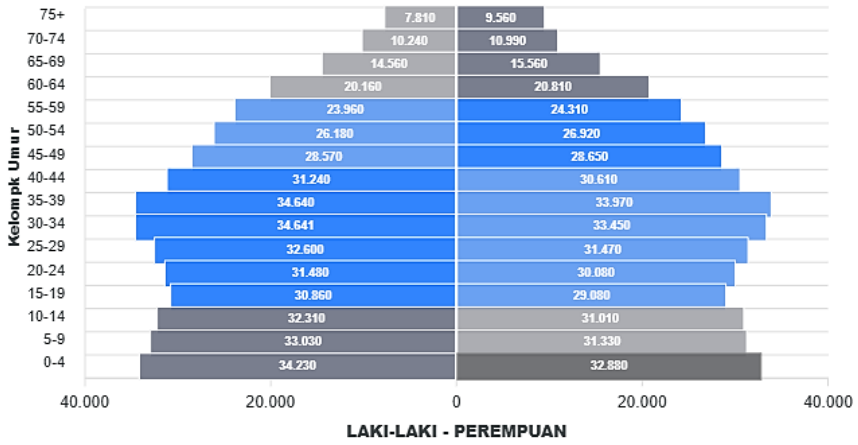

Gambar 2. 15 Piramida Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2025

Sumber: https://siperindu.online/piramida, diakses pada 19 Mei 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kelompok penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi populasi, dengan puncak tertinggi berada pada rentang usia 30–34 tahun dan 35–39 tahun untuk kedua jenis kelamin. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Batang masih berada dalam bonus demografi, dimana mayoritas penduduk berada pada usia

produktif, yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun) masih cukup besar namun mulai mengalami penurunan dibandingkan kelompok usia produktif. Ini menunjukkan adanya penurunan angka kelahiran dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) mulai menunjukkan peningkatan, meskipun masih dalam jumlah yang relatif kecil. Ini merupakan indikasi awal bahwa Kabupaten Batang mulai menuju penuaan penduduk (*aging population*), yang kedepannya perlu diantisipasi melalui kebijakan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan lansia. Secara umum, piramida penduduk mencerminkan bahwa Kabupaten Batang pada tahun 2025 berada dalam fase penting transisi demografi, yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan momentum untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan usia produktif secara optimal.

Tabel 2. 8 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Batang Tahun 2020 - 2024

TAHUN	TIDAK / BELUM TAMAT SD	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	STRATA
2020	24,58	33,86	20,35	16,97	0,81	3,44
2021	24,92	33,71	21,69	16,02	0,66	2,99
2022	23,94	33,60	21,48	17,13	0,80	3,05
2023	23,47	33,14	22,21	17,17	0,62	3,40
2024	22,38	33,66	23,10	17,15	0,70	3,01

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang belum tamat SD selama 5 tahun terakhir terus menurun yaitu dari 25,58 di tahun 2022 menjadi 22,38 di tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Penurunan persentase penduduk yang belum tamat SD menunjukkan adanya peningkatan akses dan keberhasilan dalam penyelesaian pendidikan dasar selama periode 2022 hingga 2024,

yang dapat mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam mengurangi angka putus sekolah di tingkat SD.

Sementara itu, tamatan SMP, SMA, Diploma dan Strata mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam pencapaian pendidikan di tingkat lanjutan, tingkat pendidikan di level ini masih tidak stabil. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pendidikan, akses ke pendidikan lanjutan yang terbatas, atau dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan pada tingkat pendidikan dasar, masih ada tantangan dalam memastikan kelanjutan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi secara konsisten.

Proyeksi dan Analisa Jumlah Penduduk

Perkiraan jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah yang memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan serta perencanaan efektif dari berbagai sektor dan aspek pembangunan seperti perencanaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, sosial, hingga peningkatan keamanan. Berikut merupakan grafik yang menjelaskan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025-2030 :

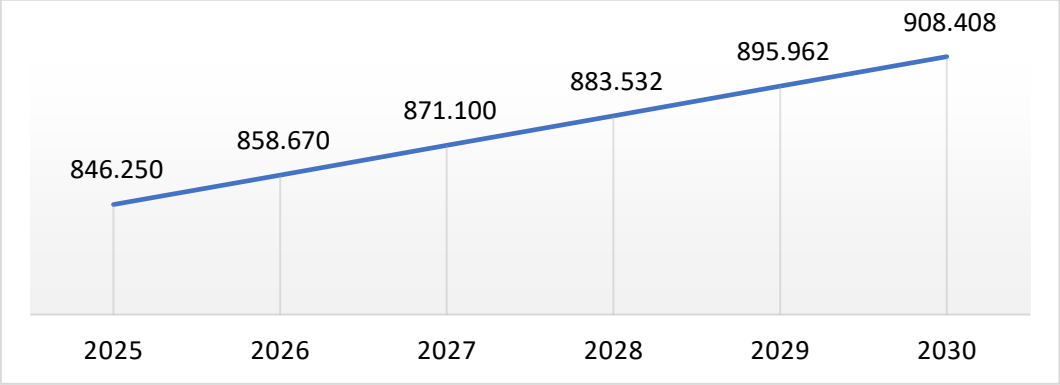

Gambar 2. 16 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2030

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang 2025-2045, diolah

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya, dengan jumlah kenaikan yang relatif konsisten. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 846.250 jiwa, dan pada tahun 2030, diperkirakan akan mencapai 908.408 jiwa. Proyeksi jumlah

penduduk Kabupaten Batang diperkirakan akan terus tumbuh dalam lima tahun ke depan. Faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, angka kematian, serta migrasi penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhannya, yang dapat dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan infrastuktur dan pelayanan publik yang sesuai.

Sementar itu, proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Batang pada tahun 2025 di proyeksikan sebesar 426.673 jiwa dan pada tahun akhir 2030 sebesar 455.503 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Batang pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 419.577 jiwa dan pada tahun akhir 2030 sebesar 452.905 jiwa.

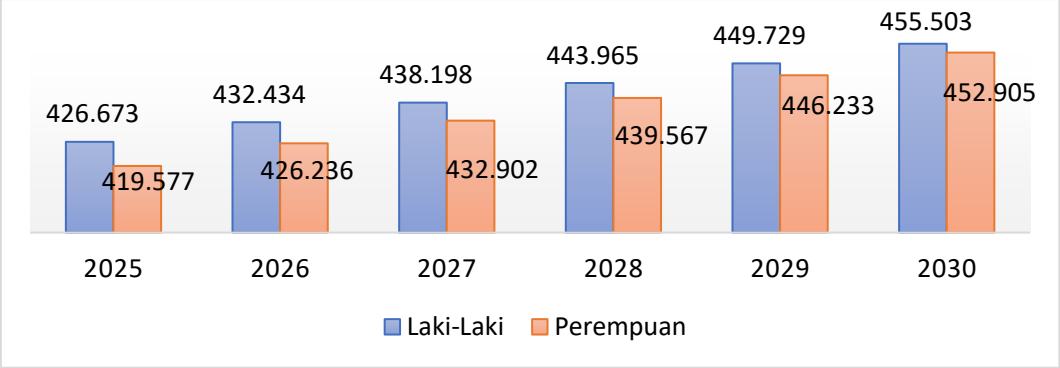

Gambar 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang 2025-2045, diolah

Kenaikan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap tahun cenderung hampir seimbang, dengan sedikit kelebihan kenaikan pada jumlah perempuan (sekitar 100 orang lebih banyak per tahun dibandingkan laki-laki). Terdapat sedikit perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam lima tahun ke depan, dengan jumlah laki-laki yang sedikit lebih banyak, namun perbedaan tersebut semakin mengecil.

Jika dilakukan analisis perbandingan rasio terkait dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Batang. Rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan *(sex rasio)* di Kabupaten Batang pada tahun 2025 sebesar 101,69%, sedangkan pada tahun 2030 sebesar 100,57%. Rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2025-2030 tersaji dalam grafik berikut:

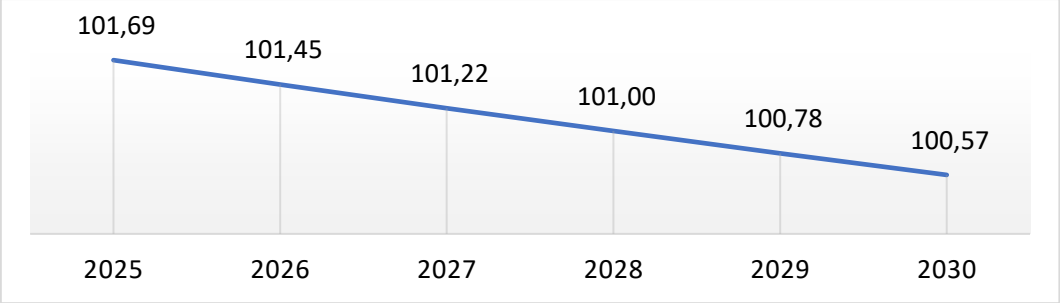

Gambar 2. 18 Rasio Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan (%) Kabupaten Batang Tahun 2025-2030

Sumber : diolah dari RPJPD, 2025

Berdasarkan grafik tersebut, terjadi penurunan sedikit dalam rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan *(sex ratio)* di Kabupaten Batang. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan semakin kecil seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2030, dengan rasio yang lebih mendekati 100%, jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Secara keseluruhan, penurunan *sex ratio* dari 101,69% pada 2025 menjadi 100,57% pada 2030 menandakan bahwa perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batang semakin kecil, dan menuju ke keseimbangan yang lebih stabil pada tahun 2030.

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dalam 5 (lima) tahun ke depan secara lebih lengkap di tiap kecamatan tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2025-2030

Kecamatan	2025			2026			2027		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bandar	44.079	42.628	86.707	45.721	44.216	89.937	47.364	45.804	93.168
Banyuputih	23.355	22.284	45.639	24.348	23.363	47.711	25.341	24.442	49.783
Batang	65.110	65.203	130.313	64.566	64.862	129.428	64.022	64.522	128.544
Bawang	24.393	23.996	48.389	23.637	23.358	46.995	22.881	22.720	45.601
Blado	25.867	24.975	50.842	26.253	25.383	51.636	26.639	25.792	52.431
Gringsing	38.584	38.062	76.646	40.033	39.780	79.813	41.482	41.498	82.980
Kandeman	24.206	24.057	48.263	25.581	25.669	51.250	26.956	27.282	54.238
Limpung	24.249	24.101	48.350	24.658	24.441	49.099	25.068	24.782	49.850
Pecalungan	15.951	15.552	31.503	15.636	15.342	30.978	15.321	15.132	30.453
Reban	19.580	19.778	39.358	19.347	19.617	38.964	19.115	19.456	38.571
Subah	26.800	26.850	53.650	26.646	26.731	53.377	26.492	26.613	53.105
Tersono	20.690	20.345	41.035	20.618	20.290	40.908	20.546	20.235	40.781
Tulis	19.575	19.208	38.783	19.583	19.199	38.782	19.591	19.191	38.782
Warungasem	29.405	28.120	57.525	29.726	28.302	58.028	30.047	28.484	58.531
Wonotunggal	24.829	24.418	49.247	26.081	25.683	51.764	27.333	26.949	54.282
Jumlah	**426.673**	**419.577**	**846.250**	**432.434**	**426.236**	**858.670**	**438.198**	**432.902**	**871.100**

Kecamatan	2028			2029			2030		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bandar	49.006	47.392	96.398	50.649	48.980	99.629	52.292	50.568	102.860
Banyuputih	26.334	25.522	51.856	27.327	26.601	53.928	28.321	27.681	56.002
Batang	63.478	64.182	127.660	62.934	63.842	126.776	62.391	63.502	125.893
Bawang	22.126	22.082	44.208	21.370	21.444	42.814	20.615	20.806	41.421
Blado	27.025	26.200	53.225	27.411	26.609	54.020	27.797	27.018	54.815
Gringsing	42.931	43.216	86.147	44.380	44.934	89.314	45.830	46.653	92.483
Kandeman	28.332	28.894	57.226	29.707	30.507	60.214	31.083	32.120	63.203
Limpung	25.477	25.122	50.599	25.887	25.463	51.350	26.297	25.804	52.101
Pecalungan	15.006	14.923	29.929	14.691	14.713	29.404	14.377	14.504	28.881
Reban	18.883	19.295	38.178	18.651	19.134	37.785	18.419	18.974	37.393
Subah	26.339	26.494	52.833	26.185	26.376	52.561	26.032	26.258	52.290
Tersono	20.474	20.181	40.655	20.402	20.126	40.528	20.331	20.072	40.403
Tulis	19.600	19.183	38.783	19.608	19.175	38.783	19.617	19.167	38.784
Warungasem	30.369	28.666	59.035	30.690	28.848	59.538	31.012	29.031	60.043
Wonotunggal	28.585	28.215	56.800	29.837	29.481	59.318	31.089	30.747	61.836
Jumlah	**443.965**	**439.567**	**883.532**	**449.729**	**446.233**	**895.962**	**455.503**	**452.905**	**908.408**

Sumber : RPJPD Kabupaten Batang 2025-2045, diolah

Berdasarkan proyeksi tersebut, pemerintah harus mempunyai strategi yang efektif untuk mengatasi kenaikan jumlah populasi kependudukan di Kabupaten Batang terlebih dengan adanya Proyek Stategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan Batang Industrial Park (BIP). Hal tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana publik mengingat adanya potensi terjadinya migrasi penduduk ke Kabupaten Batang.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami tren yang fluktuatif. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi pada berbagai sektor. Sedangkan penurunan pada tahun 2023 dikarenakan adanya pelambatan dari ekonomi global akibat dampak konflik geopolitik yang belum berakhir. Adapun jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang masih lebih tinggi. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2020-2024 tersaji dalam grafik berikut ini :

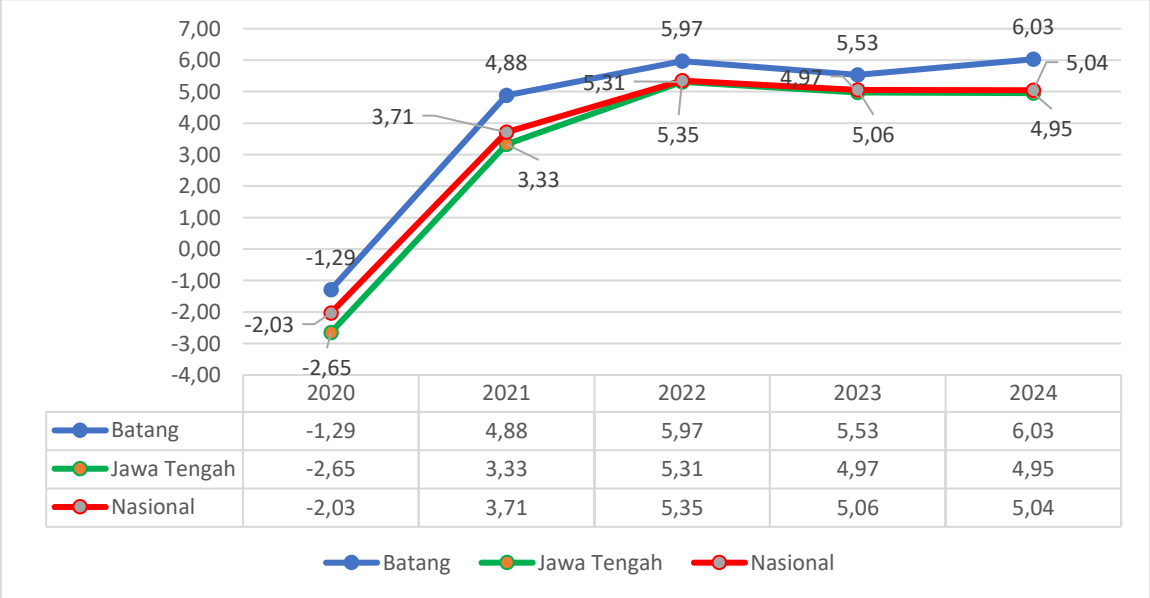

Gambar 2. 19 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS 2025

Lebih lanjut jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sekitar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

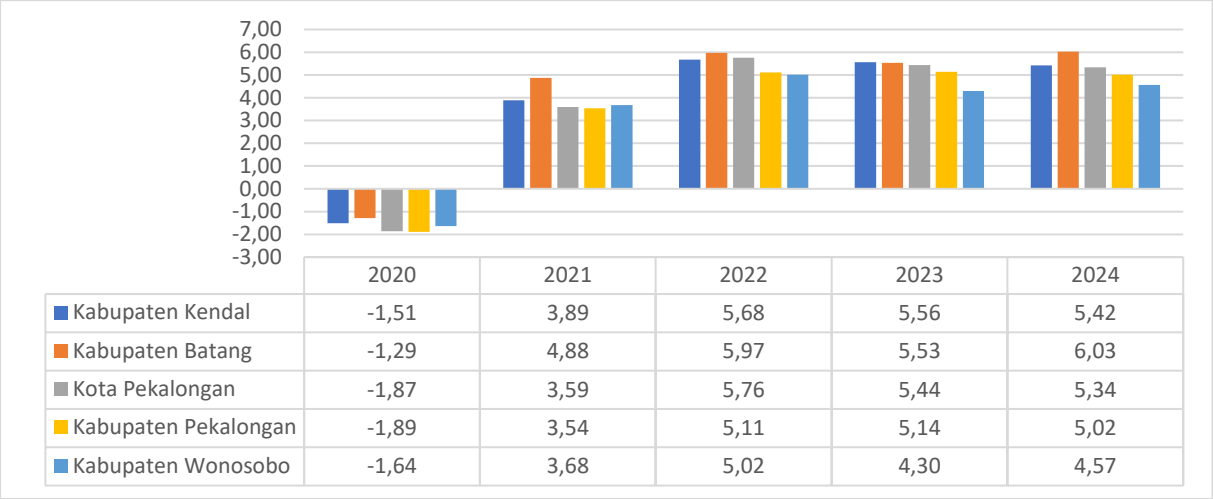

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kendal	-1,51	3,89	5,68	5,56	5,42
Kabupaten Batang	-1,29	4,88	5,97	5,53	6,03
Kota Pekalongan	-1,87	3,59	5,76	5,44	5,34
Kabupaten Pekalongan	-1,89	3,54	5,11	5,14	5,02
Kabupaten Wonosobo	-1,64	3,68	5,02	4,30	4,57

Gambar 2. 20 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Selama periode 2020–2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang menunjukkan performa yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, yakni Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Wonosobo.

Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun, Kabupaten Batang mencatat penurunan yang lebih ringan sebesar -1,29 persen, dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Pekalongan (-1,89 persen) dan Kota Pekalongan (-1,87 persen). Mulai tahun 2021, Kabupaten Batang bangkit lebih cepat dengan pertumbuhan 4,88 persen, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana Kabupaten Batang mencapai pertumbuhan tertinggi se-Jawa Tengah sebesar 6,03 persen, mengungguli Kabupaten Kendal (5,42 persen), Kota Pekalongan (5,34 persen), dan kabupaten/kota lainnya.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Batang tidak hanya berhasil melakukan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tetapi juga mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang stabil dan kompetitif di

tingkat regional. Hal ini menegaskan peran strategis Batang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pantura Jawa Tengah, didukung oleh masuknya investasi, pengembangan kawasan industri, serta penguatan sektor-sektor produktif lainnya.

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur guna melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Tingkat kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2020 sebesar 9,13% dan terus menurun hingga 8,73% pada tahun 2024. Adapun capaian tersebut lebih rendah dibanding dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut tersaji capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Batang dalam rentang tahun 2020-2024 :

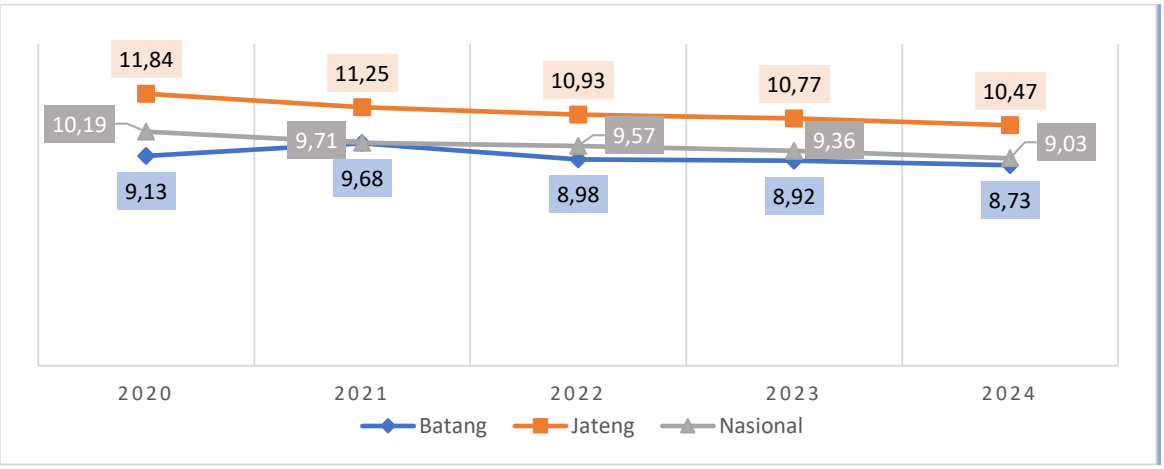

Gambar 2. 21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batang, Provinsi, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Prov. Jateng dan Nasional, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil dan konsisten. Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, persentase penduduk miskin Kabupaten Batang mengalami penurunan dari 9,13% pada tahun 2020 menjadi 8,73% pada tahun 2024. Meskipun laju penurunannya tidak terlalu tajam, namun capaian tersebut mencerminkan stabilitas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian Kabupaten Batang secara konsisten lebih baik. Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 tercatat sebesar 11,84% dan menurun menjadi

10,47% pada tahun 2024. Dengan demikian, terdapat selisih rata-rata sekitar 2 poin persentase antara Kabupaten Batang dan tingkat kemiskinan provinsi selama lima tahun terakhir. Selisih tersebut menunjukkan bahwa program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batang relatif lebih efektif dan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Selain itu, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, posisi Kabupaten Batang juga menunjukkan performa yang lebih baik, khususnya dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03%, sedangkan Kabupaten Batang berada pada angka 8,73%, yang berarti lebih rendah dari angka nasional. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Batang telah mampu menjaga tren positif dan mendekati capaian target nasional, bahkan sedikit melampauinya.

Secara umum, data ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batang telah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan untuk memperkuat kualitas pertumbuhan inklusif dan memperluas jangkauan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar bagi kelompok rentan. Dengan mempertahankan momentum penurunan yang ada dan memperkuat koordinasi lintas sektor, diharapkan Kabupaten Batang dapat mencapai target pengurangan kemiskinan secara lebih signifikan dan berkelanjutan dalam periode RPJMD berikutnya.

Selain kemiskinan secara umum, perhatian khusus juga perlu diberikan pada kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi di mana penduduk hidup dalam keterbatasan yang sangat parah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan sanitasi yang layak. Pada tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Batang tercatat sebesar 2,97%. Angka ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 1,55%. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 2,06%. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis hingga mencapai 0,40%, yang merupakan angka terendah dalam periode ini. Secara

keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Batang menunjukkan hasil yang positif.

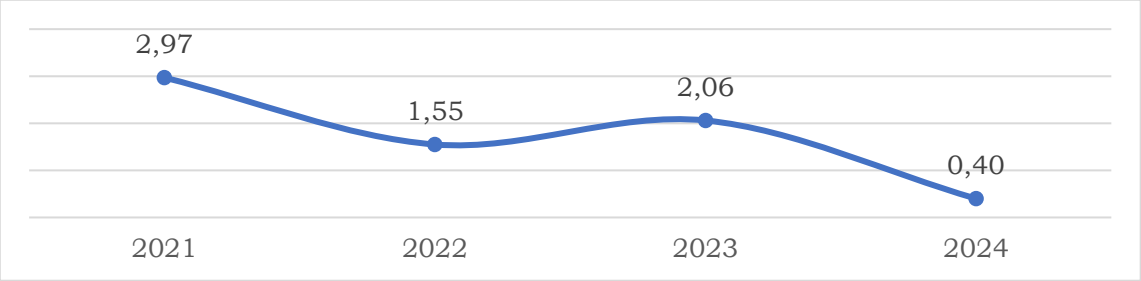

Gambar 2. 22 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Batang Tahun 2021-2024

Sumber : BPS Tahun 2024

BPS menghitung rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (GK), kemudian membuat ukuran berupa indeks untuk sebagai data penggambarannya. Ukuran itu disebut sebagai indeks kedalaman kemiskinan, yang didefinisikan sebagai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mencerminkan seberapa jauh rata rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan (GK), sehingga menjadi indikator penting dalam memahami intensitas kemiskinan. Ketika nilai indeks ini tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin memerlukan intervensi yang lebih besar untuk mencapai tingkat pengeluaran minimal sesuai GK. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk miskin sudah mendekati GK, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih terfokus pada mendorong mereka keluar dari garis tersebut. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang selengkapnya tersaji dalam grafik berikut :

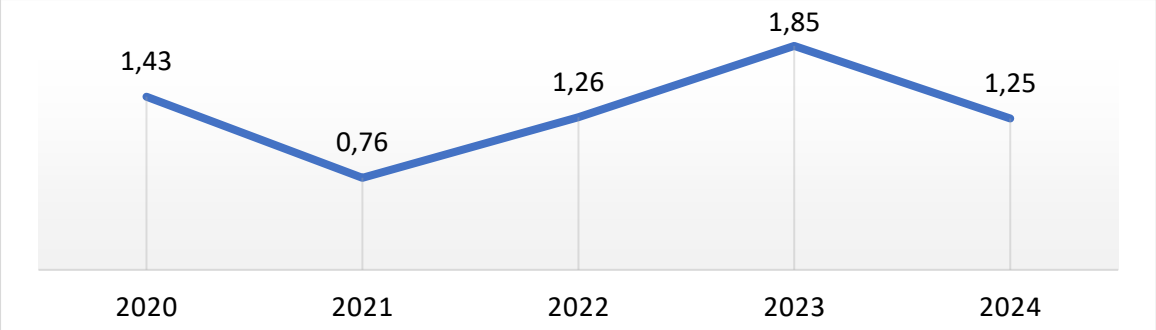

Gambar 2. 23 Indeks Kedamaan Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2025

Tren P1 Kabupaten Batang tahun 2020 hingga 2024 cenderung berfluktuasi. Pada 2020 hingga 2021, dampak dari pandemi covid-19 menyebabkan P1 mengalami kenaikan dari 1,43 poin menjadi 1,76 poin. Hal ini berarti bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK semakin jauh. Pada tahun 2022 P1 Kabupaten Batang sempat turun menjadi 1,26 poin, namun tahun 2023 P1 Kabupaten Batang kembali naik menjadi 1,85. Kemudian, pada tahun 2024 P1 kabupaten Batang Kembali turun menjadi sebesar 1,25 poin yang berarti bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK makin rendah.

Sementara itu, dalam menghitung ketimpangan Pengeluaran diantara penduduk miskin, BPS menggunakan indiaktor Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi atau semakin besar angka indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2020 – 2024 selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

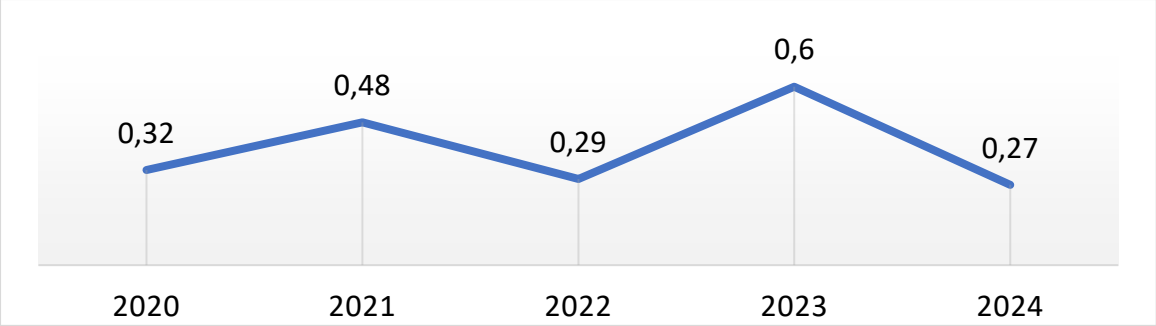

Gambar 2. 24 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2025

Perkembangan P2 Kabupaten Batang dari 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang sama dengan P1. Pada tahun 2020 sampai 2021, P2 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 P2 tercatat sebesar 0,32 kemudian bertambah 0,16 poin di tahun 2021 atau menjadi sebesar 0,48 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran antar penduduk miskin makin timpang. Kemudian P2 kembali membaik menjadi 0,29 poin pada tahun 2022. Pada 2023, P2 Kabupaten Batang kembali naik menjadi sebesar 0,60 poin sebelum akhirnya kembali mengalami penurunan menjadi 0,27 poin di tahun 2024. Tren ini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin berkurang.

C. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah diukur dengan mengetahui besarnya nilai pendapatan per kapita yaitu dengan menghitung PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

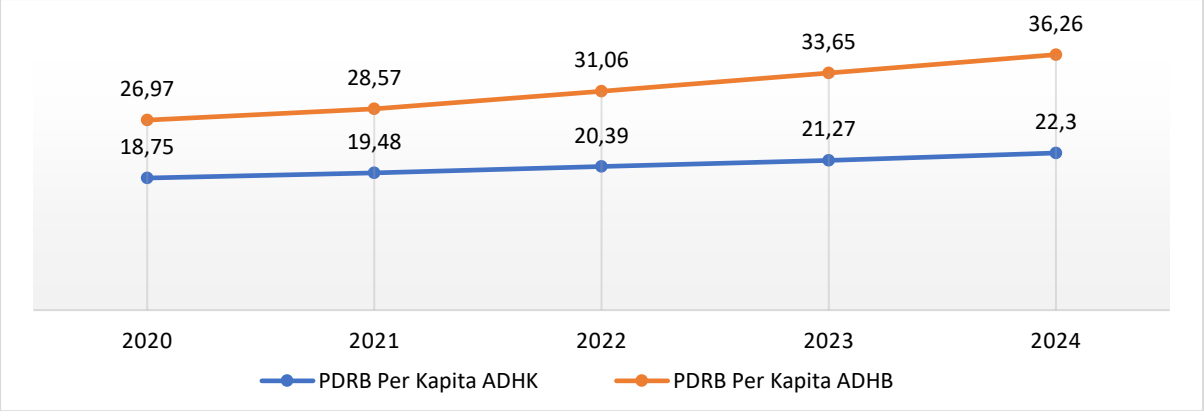

Gambar 2. 25 PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Batang (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Batang menunjukkan adanya kemajuan ekonomi yang positif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan PDRB per kapita ini mencerminkan bahwa produktivitas ekonomi di Kabupaten Batang semakin meningkat, di mana pendapatan rata-rata masyarakat terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama, peningkatan investasi, perbaikan infrastruktur, serta adanya kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan usaha dan industri. Peningkatan ini juga dapat mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, di mana lebih banyak pendapatan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perubahan PDRB per kapita tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian juga dipengaruhi oleh faktor inflasi.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. TPT mencerminkan proporsi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan namun sedang aktif mencari kerja.

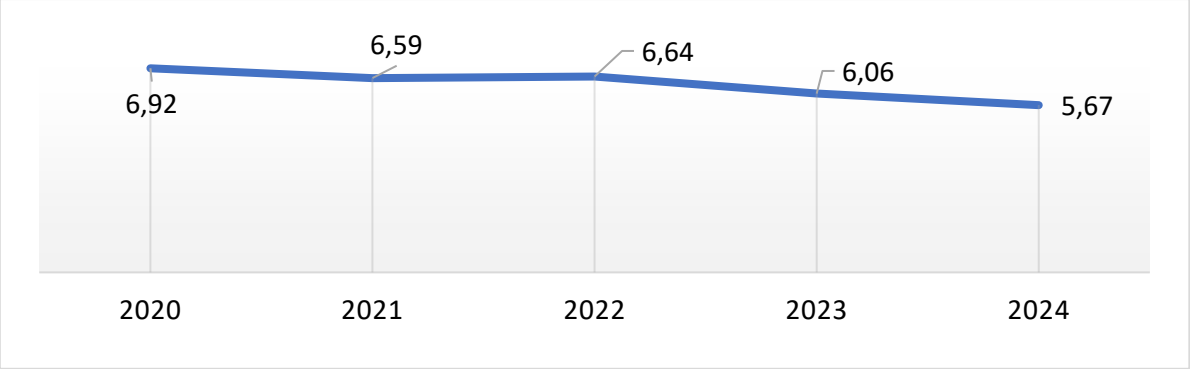

Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2025

Berdasarkan grafik di atas, hingga tahun 2024 TPT Kabupaten Batang terus mengalami penurunan semenjak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Batang sebesar 6,92% dan menurun hingga 5,57% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana lebih banyak lapangan pekerjaan tersedia atau terjadi perbaikan dalam sektor-sektor yang terdampak oleh covid-19. Selain itu, adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis dan *Batang Industrial Park* di Kabupaten Batang juga berperan penting dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan baru dan menarik investasi yang mendorong pertumbuhan sektor industri di wilayah tersebut. Pengembangan kedua kawasan ini telah meningkatkan aktivitas ekonomi, yang berdampak positif terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Adanya KEK Industropolis dan *Batang Industrial Park* membuka peluang kerja di berbagai bidang seperti manufaktur, logistik, jasa, dan lain sebagainya. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Batang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan yang lebih beragam dan stabil. Secara keseluruhan, penurunan TPT yang terus berlanjut hingga 2024 menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan investasi infrastruktur yang diterapkan di Kabupaten Batang mulai membuahkan hasil, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perkembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

E. Rasio Gini

Rasio gini adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana:

- Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna (semua orang memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama).
- Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (satu individu atau rumah tangga memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan, sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa).

Semakin mendekati nilai 1, semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat. Nilai rasio gini Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar berikut:

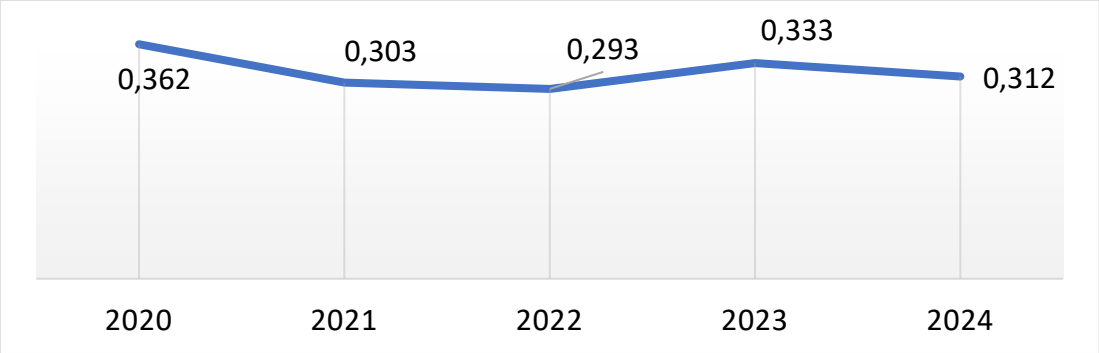

Gambar 2. 27 Rasio Gini Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan gambar di atas, Rasio Gini Kabupaten Batang menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan penurunan pada 2021 dan 2022, diikuti oleh peningkatan pada 2023, dan sedikit penurunan kembali pada 2024. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan ekonomi daerah, perubahan dalam struktur pasar kerja, atau kondisi ekonomi global dan nasional. Ketimpangan yang cenderung fluktuatif menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk memperbaiki distribusi pendapatan, tantangan untuk mencapai pemerataan ekonomi yang lebih stabil masih ada. Pemerintah daerah perlu terus berupaya dengan kebijakan yang lebih konsisten dan terfokus pada pengurangan kesenjangan ekonomi di Kabupaten Batang.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan usia harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*). Berikut disajikan secara ringkas capaian IPM Kabupaten Batang dari tahun 2020 hingga 2024 :

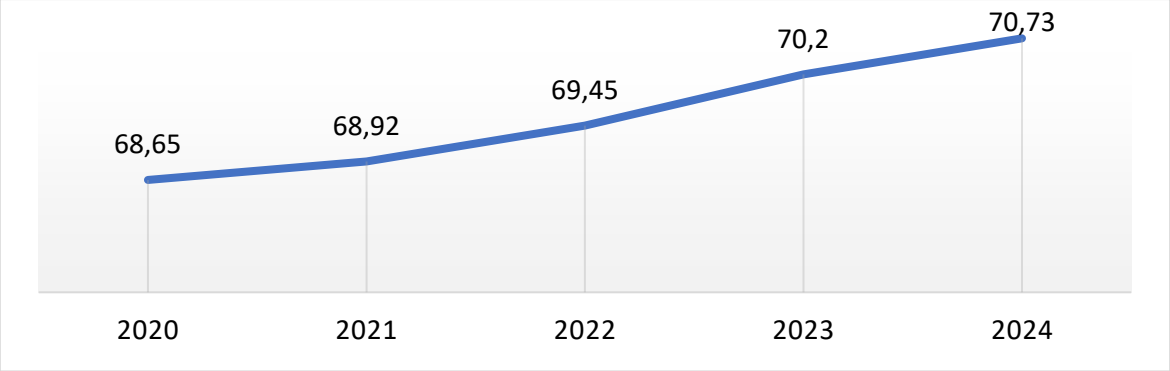

Gambar 2. 28 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2025

IPM Kabupaten Batang mengalami peningkatan yang positif selama periode 2020 hingga 2024. IPM yang meningkat dari 68,65 pada tahun 2020 menjadi 70,73 pada tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek kualitas hidup masyarakat, yang meliputi peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Peningkatan IPM ini berarti bahwa akses dan kualitas pendidikan lebih baik, kondisi kesehatan masyarakat membaik, dan daya beli atau kesejahteraan ekonomi masyarakat juga mengalami perbaikan. Secara umum, hal ini mencerminkan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Batang dalam lima tahun tersebut.

Namun, capaian perkembangan IPM Kabupaten Batang dari tahun 2020-2024 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perkembangan IPM Kabupaten Batang, Provinsi

Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

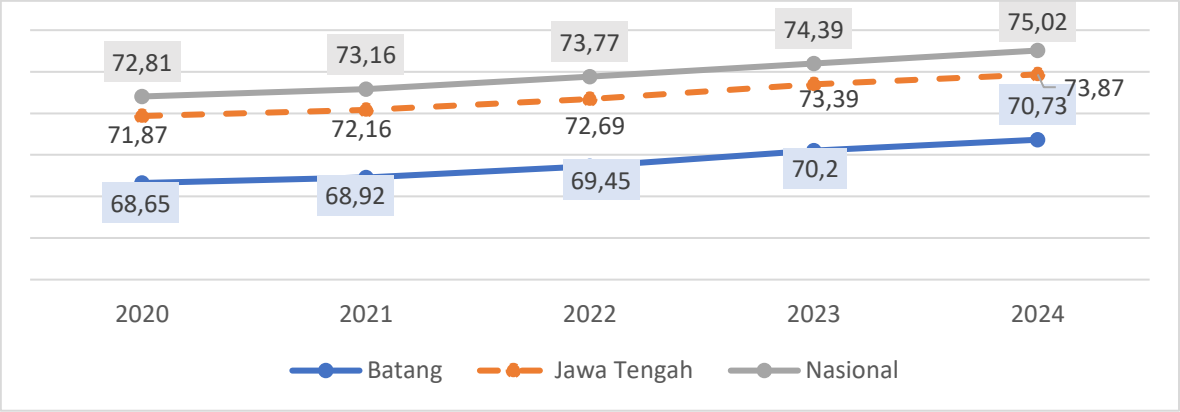

Gambar 2. 29 Perbandingan IPM Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah & BPS RI, 2025

Selanjutnya jika dibandingkan dengan kab/kota sekitar tersaji pada gambar berikut:

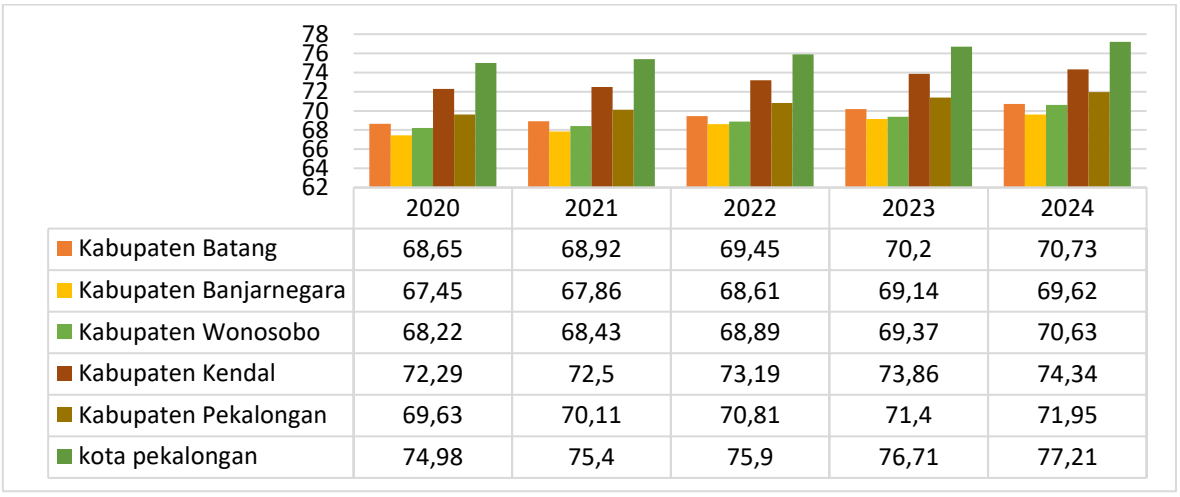

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Batang	68,65	68,92	69,45	70,2	70,73
Kabupaten Banjarnegara	67,45	67,86	68,61	69,14	69,62
Kabupaten Wonosobo	68,22	68,43	68,89	69,37	70,63
Kabupaten Kendal	72,29	72,5	73,19	73,86	74,34
Kabupaten Pekalongan	69,63	70,11	70,81	71,4	71,95
kota pekalongan	74,98	75,4	75,9	76,71	77,21

Gambar 2. 30 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang dengan Kab/Kota sekitar Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai yang naik dari 68,65 menjadi 70,73. Meskipun mengalami kemajuan, IPM Kabupaten Batang masih berada di tengah-tengah jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Kabupaten Batang memiliki IPM yang lebih tinggi daripada Kabupaten Banjarnegara, yang pada tahun 2024 berada di angka

69,62, serta sedikit unggul dibanding Kabupaten Wonosobo yang mencatat IPM sebesar 70,63 di tahun yang sama. Namun demikian, Batang masih tertinggal dari Kabupaten Pekalongan (71,95) dan Kabupaten Kendal (74,34), yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang lebih baik. Yang paling menonjol adalah Kota Pekalongan dengan IPM tertinggi di antara seluruh wilayah, yakni 77,21 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Kabupaten Batang terus mengalami perbaikan, masih terdapat kesenjangan pembangunan dengan beberapa daerah tetangga, terutama wilayah perkotaan seperti Kota Pekalongan.

Kesehatan untuk Semua

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kesehatan untuk semua menekankan pentingnya akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dengan memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membangun pondasi kuat bagi kemajuan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan di bidang kesehatan adalah angka harapan hidup. Indikator ini mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik pula kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, peningkatan angka harapan hidup menjadi cerminan langsung dari keberhasilan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh kelompok usia.

Pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Batang mencapai 75,01 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Berikut tren Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:

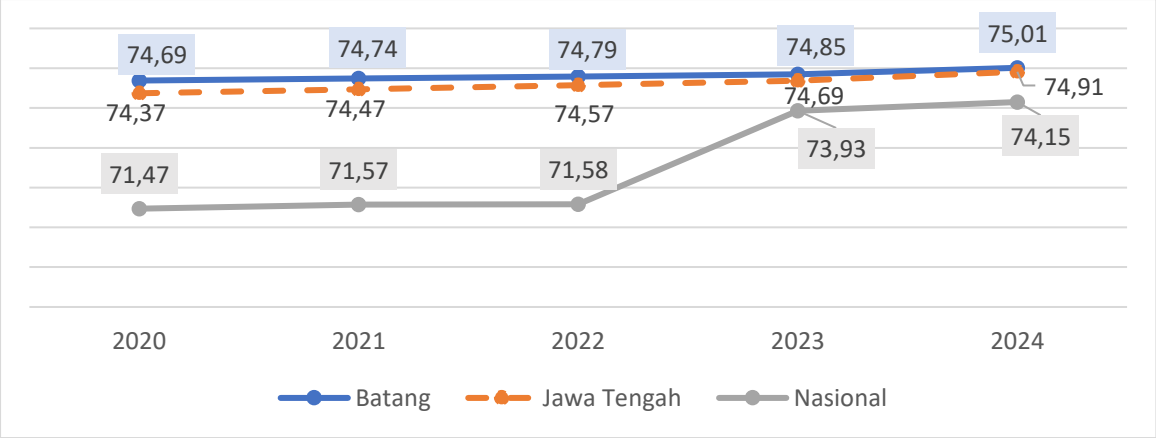

Gambar 2. 31 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik tersebut, AHH Kabupaten Batang pada tahun 2020 tercatat sebesar 74,69 tahun, sedikit lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah (74,37 tahun) dan secara signifikan di atas rata-rata nasional (71,47 tahun). Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dimana AHH Batang meningkat menjadi 75,01 tahun, mengungguli Provinsi Jawa Tengah (74,91 tahun) dan Nasional (74,15 tahun). Peningkatan AHH di Kabupaten Batang dari 2020 ke 2024 sebesar 0,32 tahun, yang berarti dalam lima tahun terakhir, harapan hidup masyarakat di Kabupaten Batang semakin baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya pembangunan bidang kesehatan, seperti perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta penurunan tingkat kematian pada kelompok usia rentan. Secara keseluruhan, AHH Kabupaten Batang secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, mencerminkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Batang relatif lebih baik dibandingkan dengan capaian regional dan nasional.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan komponen utama dalam sistem kesehatan yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Keberadaan puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu (pustu), serta rumah sakit menjadi tolok ukur penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Di Kabupaten Batang, terdapat 86 unit fasilitas kesehatan

dasar yang mencakup puskesmas, poliklinik, dan pustu, serta 3 unit rumah sakit yang melayani kebutuhan masyarakat pada tingkat lanjutan. Untuk menilai kecukupan dan pemerataan fasilitas tersebut, digunakan indikator rasio fasilitas pelayanan kesehatan per satuan penduduk sebagaimana kondisi dalam 5 (tahun) terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per penduduk	1:9.564	1:9.539	1:9.635	1:9.491	1:9.880
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per penduduk	1:258.230	1:270.282	1:276.192	1:278.390	1:283.229

Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2024

Data rasio fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang penting untuk dicermati, terutama dalam konteks ketersediaan layanan kesehatan dasar dan lanjutan terhadap jumlah penduduk. Pada indikator rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (pustu) per satuan penduduk, rasio menunjukkan nilai relatif stabil, berkisar antara 1:9.564 pada tahun 2020 hingga 1:9.880 pada tahun 2024. Meskipun terdapat sedikit peningkatan rasio di tahun terakhir (yang berarti satu fasilitas melayani lebih banyak penduduk), secara keseluruhan masih berada dalam kisaran yang relatif stabil. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketersediaan layanan kesehatan tingkat dasar di Kabupaten Batang cukup terjaga, walaupun tetap perlu perhatian agar pertumbuhan penduduk tidak menyebabkan beban layanan yang berlebihan.

Sementara itu, pada indikator rasio rumah sakit per satuan penduduk, terjadi tren kenaikan angka rasio dari 1:258.230 pada tahun 2020 menjadi 1:283.229 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kapasitas rumah sakit tidak bertambah secara proporsional dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yang berpotensi menyebabkan keterbatasan dalam akses layanan kesehatan tingkat lanjutan, seperti rawat inap dan tindakan medis

spesialis. Perbedaan arah tren antara kedua indikator tersebut menggambarkan bahwa meskipun fasilitas layanan dasar terus dijaga dan ditingkatkan, namun pemerataan dan penguatan rumah sakit sebagai fasilitas rujukan perlu menjadi perhatian utama ke depan.

Dalam pembangunan, salah satu pengukuran kesehatan keluarga direpresentasikan dalam indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS). Capaian IKS Kabupaten Batang pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 0,15 dan meningkat menjadi 0,17 pada tahun 2024. Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Batang meningkat dari 0,15 pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 0,17 pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dalam berbagai aspek kesehatan. Indeks ini mencerminkan kondisi keluarga dari segi akses terhadap layanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi, lingkungan, serta perencanaan keluarga. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program-program intervensi kesehatan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif, meskipun secara keseluruhan capaian masih tergolong rendah. Dengan demikian, diperlukan penguatan lintas sektor, edukasi kesehatan masyarakat, serta peningkatan akses layanan kesehatan dasar agar kualitas hidup keluarga di Kabupaten Batang dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Kondisi kesehatan di suatu wilayah juga digambarkan melalui indikator prevalensi stunting. Prevalensi stunting merupakan persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar yang seharusnya sesuai dengan usia mereka, yang menunjukkan masalah gizi kronis dan kurangnya pertumbuhan yang memadai selama masa anak-anak. Berbagai program dan kegiatan sudah digencarkan dalam penanganan stunting di Kabupaten Batang antara lain peningkatan pengetahuan ibu hamil, calon ibu hamil dan remaja putri tentang gizi, perilaku hidup sehat dan kesehatan reproduksi, pemberian ASI eksklusif dan MPASI, optimalisasi pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi serta penguatan posyandu. Intervensi lain yang dilakukan untuk penurunan stunting ini adalah pelaksanaan orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) bagi tenaga kesehatan, pembentukan konselor ASI, Kelas Ibu Hamil, Kelas

Ibu Balita, Penguatan surveilans gizi dan e-PPGBM, pengadaan antropometri kit, pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (Bumil KEK) dn balita kurus serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri.

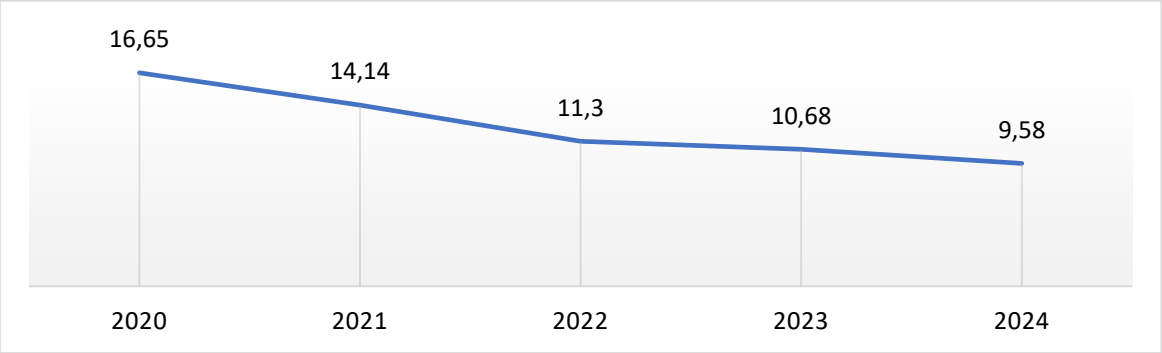

Gambar 2. 32 Prevalensi Stunting di Kabupaten Batang menurut e-PPGBM Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Batang, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, prevalensi stunting di Kabupaten Batang terus menurun hingga 9,58 persen di tahun 2024. Hal ini menandakan kinerja penanganan Tim Penanganan Penurunan Stunting di Kabupaten Batang sudah berjalan dengan baik walaupun masih perlu dioptimalkan mengingat masih adanya kasus stunting hingga tahun 2024.

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Indikator yang mencerminkan capaian kualitas pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan Harapan Lama Sekolah menunjukkan estimasi lamanya waktu pendidikan yang dapat diharapkan oleh anak usia sekolah di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut:

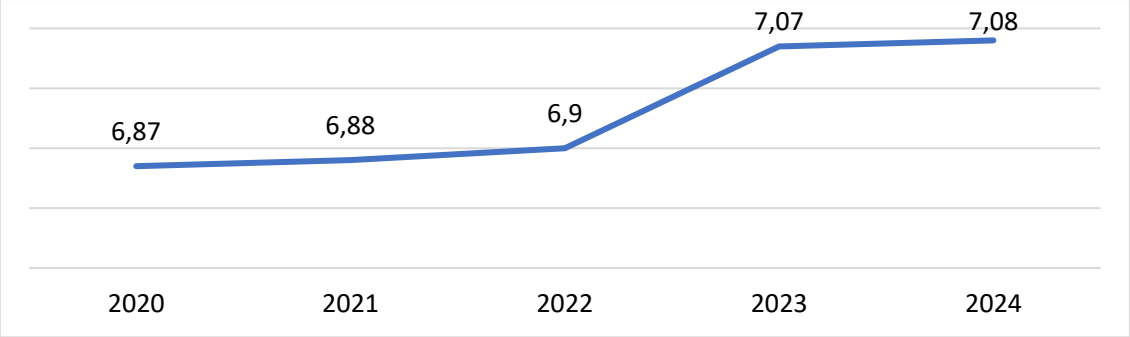

Gambar 2. 33 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Batang mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya relatif kecil. Ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal. Peningkatan yang paling signifikan terjadi antara tahun 2022 ke 2023, yaitu naik dari 6,90 ke 7,07 tahun. RLS dengan angka 7,08 pada tahun 2024, berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Batang telah menyelesaikan pendidikan hingga setara kelas 1 SMP. Angka ini masih di bawah target ideal nasional (12 tahun untuk SMA sederajat). Oleh karena itu, perlu upaya lanjutan untuk meningkatkan partisipasi sekolah lanjutan (SMP dan SMA), terutama di wilayah pedesaan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Batang juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana data yang tersaji dalam grafik berikut:

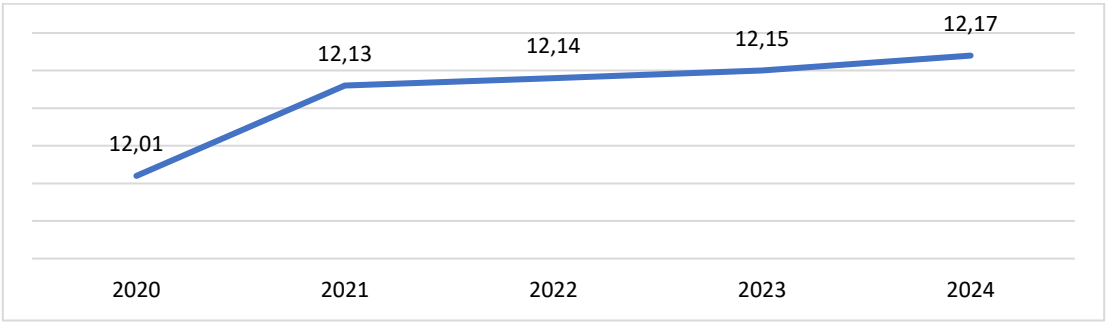

Gambar 2. 34 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Nilai 12,17 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Batang memiliki harapan untuk menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3

SMA (setara 12 tahun pendidikan). Nilai ini masih di bawah nilai Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,86 dan Nasional sebesar 13,21. Lebih lengkap perbandingan HLS di Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam 5 (tahun) terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut:

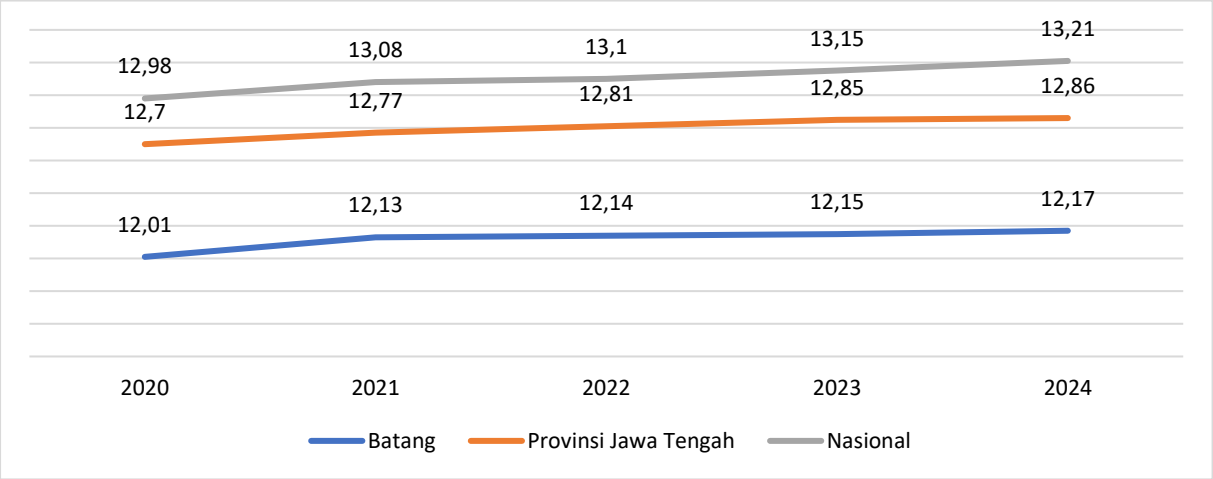

Gambar 2. 35 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Meskipun meningkat, HLS di Kabupaten Batang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, sehingga upaya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan masih perlu diperkuat. Hal ini bisa menjadi perhatian strategis bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan layanan pendidikan, mendorong partisipasi sekolah lebih tinggi, dan mengurangi angka putus sekolah.

Kemampuan literasi dan numerasi juga menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Literasi mencerminkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi dari berbagai jenis teks, sementara numerasi menunjukkan kecakapan mereka dalam menerapkan konsep dan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Rerata kemampuan literasi dan numerasi tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Batang tahun 2021-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 11 Kemampuan Literasi dan Numerasi Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Batang Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun				Keterangan
	2021	2022	2023	2024	
SD					
Kemampuan literasi	1,89	81,80%	86,14%	83,84%	Untuk tahun 2022 Rentang Nilai 1 - 3
Kemampuan numerasi	1,66	44,67%	76,26%	80,98%	Untuk tahun 2022 Rentang Nilai 1 - 3
SMP					
Kemampuan literasi	1,93	83,51%	88,15%	87,90%	Untuk tahun 2022 Rentang Nilai 1 - 3
Kemampuan numerasi	1,75	61,76%	83,54%	84,82%	Untuk tahun 2022 Rentang Nilai 1 - 3

Sumber : Disdikbud Kabupaten Batang, 2025

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial adaptif merupakan strategi pembangunan yang bertujuan memberikan jaring pengaman bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar tetap terlindungi dari berbagai risiko sosial, ekonomi, maupun bencana. Melalui perlindungan sosial yang adaptif, program jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga mampu merespons perubahan kondisi, seperti krisis kesehatan, pandemi, maupun tekanan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat memiliki ketahanan lebih baik untuk menghadapi guncangan tanpa terjebak dalam kerentanan baru.

Salah satu wujud nyata perlindungan sosial adaptif di sektor kesehatan adalah pencapaian **Universal Health Coverage (UHC)**. UHC menjamin seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, tanpa menghadapi hambatan finansial. Dalam pelaksanaannya, UHC di Indonesia diwujudkan melalui program **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Perkembangan cakupan UHC menunjukkan tren positif. Pada tahun **2023**, kepesertaan JKN telah mencapai **95,43%** penduduk. Angka tersebut terus meningkat, dan pada tahun **2024** capaian UHC naik signifikan menjadi

98,62%. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya perlindungan sosial di bidang kesehatan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan

Perlindungan pekerja harus diutamakan menghadapi tren pasar kerja yang semakin fleksibel. Salah satu bentuk perlindungan ini berupa jaminan sosial. Penguatan jaminan sosial menjadi salah satu kunci untuk melindungi pekerja di tengah fenomena pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel. Pemerintah perlu memastikan seluruh penduduk bekerja tercakup dalam kepesertaan jaminan sosial. Salah satu bentuk jaminan sosial pada tenaga kerja yaitu adanya jaminan sosial ketenagakerjaan yang diampu langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Adapun capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Sebagaimana tren kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tersaji dalam grafik berikut ini:

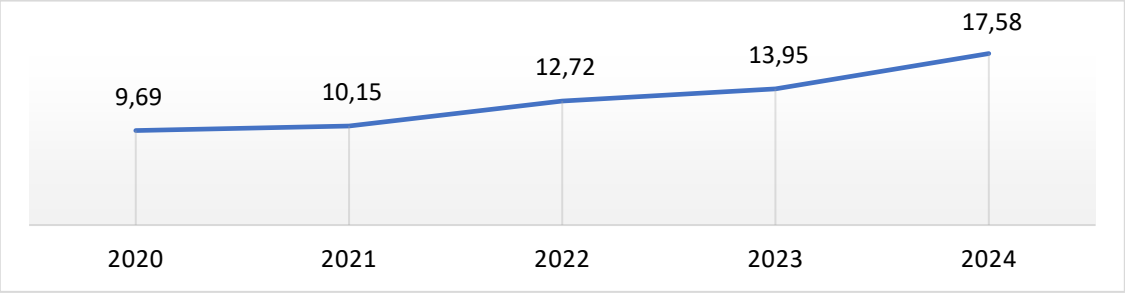

Gambar 2. 36 Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batang, 2025

Grafik tersebut menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan persentase mencapai 17,58 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan terus meningkat di Kabupaten Batang. Hal ini bisa menjadi indikator positif dari pertumbuhan sektor formal dan informal, meningkatnya kesadaran pemberi kerja dan pekerja terhadap pentingnya perlindungan kerja, atau intervensi kebijakan dan sosialisasi dari pemerintah daerah.

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kehidupan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju tercermin dari tingginya nilai-nilai moral, sosial, dan etika yang dijunjung bersama. Dalam konteks ini, angka kriminalitas menjadi salah satu indikator yang merefleksikan kondisi sosial dan keamanan suatu wilayah. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin menunjukkan bahwa masyarakat hidup dalam harmoni, memiliki kontrol sosial yang kuat, serta menjunjung tinggi norma agama dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu, pemantauan terhadap tren kriminalitas dapat memberikan gambaran seberapa jauh tatanan kehidupan yang aman, damai, dan beradab telah tercapai di tengah masyarakat. Berdasarkan data capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Batang, terjadi penurunan skor dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, indeks tercatat sebesar 74,59, namun pada tahun 2024 menurun menjadi 71,95.

Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan atau dinamika sosial yang memengaruhi harmoni antarumat beragama di daerah tersebut. Meskipun nilai 71,95 masih tergolong dalam kategori cukup tinggi, tren penurunan ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Upaya penguatan dialog lintas iman, toleransi, serta peran aktif forum kerukunan umat beragama (FKUB) menjadi penting untuk menjaga dan meningkatkan kembali indeks ini di tahun-tahun mendatang.

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga yang berkualitas menjadi pondasi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dalam konteks ini, penting pula untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang sosial, atau kondisi fisik, memiliki akses yang setara terhadap peluang dan layanan publik.

Kesetaraan gender dan masyarakat inklusif merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan manusia yang adil dan beradab. Kesetaraan gender membuka ruang partisipasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sementara masyarakat inklusif menjamin bahwa kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marjinal, tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Capaian IPG Kabupaten Batang pada tahun 2020 sebesar 91,47 mengalami tren kenaikan hingga tahun 2024 dengan capaian skor 92,68. Selain itu, pada tahun 2024 IPG Kabupaten Batang sudah melebih rata-rata nasional yaitu 91,85. Namun demikian, capaian ini masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dengan skor sebesar 93. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

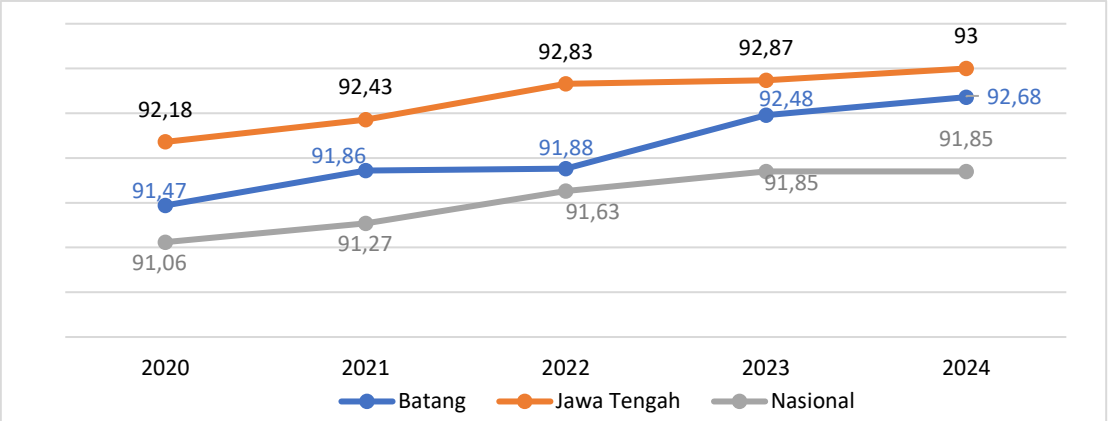

Gambar 2. 37 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, & BPS RI, 2025

Selanjutnya jika dibandingkan dengan kab/kota sekitar tersaji pada gambar berikut:

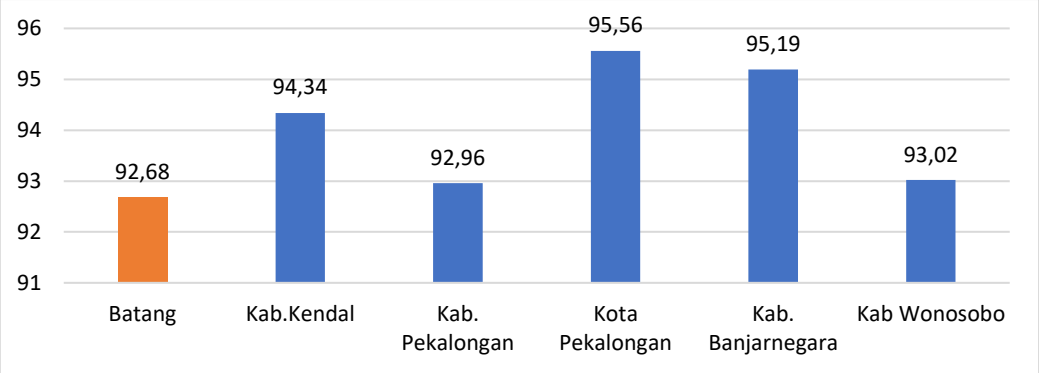

Gambar 2. 38 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Batang dengan Kab/Kota sekitar Tahun 2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

IPG Kabupaten Batang Tahun 2024 berada di angka 92,68, yang meskipun cukup tinggi, merupakan yang terendah dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar. Hal ini berarti bahwa tingkat kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batang masih sedikit tertinggal dibandingkan wilayah sekitarnya. Perbedaan tertinggi yaitu dengan Kota Pekalongan, yang menunjukkan bahwa Kota Pekalongan telah mengoptimalkan pembangunan berbasis kesetaraan gender dengan lebih baik. Meskipun selisihnya tidak besar, hal ini bisa menjadi alarm positif bagi Kabupaten Batang untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan perempuan dan pemerataan akses pembangunan bagi seluruh gender.

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan keterlibatan aktif perempuan dalam aspek politik dan ekonomi. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.

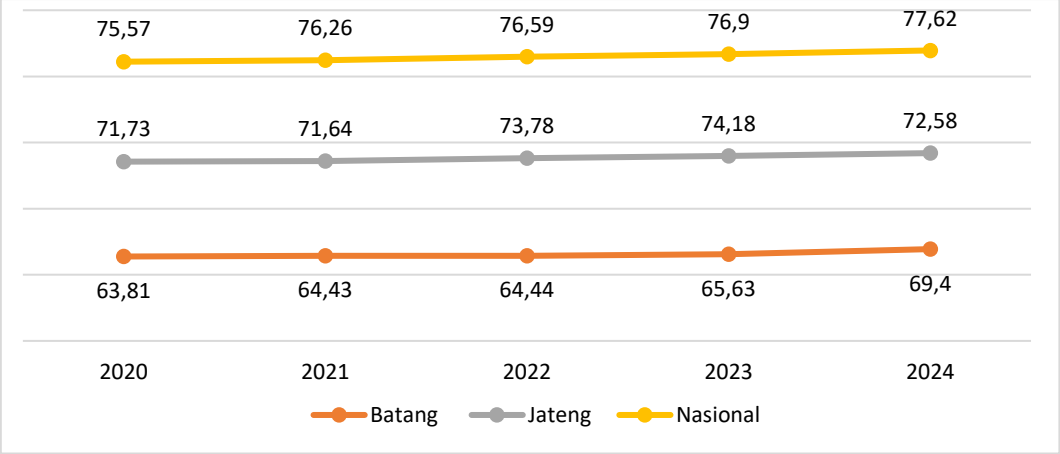

Gambar 2. 39 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2025

Dari grafik di atas terlihat capaian IDG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2020 sebesar 63,81 meningkat menjadi 69,40 pada tahun 2024, namun demikian capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,58 menurun dari tahun 2023 dan Nasional dengan capaian 77,62. Artinya, tingkat pemberdayaan perempuan di Kabupaten Batang masih berada di bawah rata-rata, baik pada level provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren IDG mengalami peningkatan, upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengambilan keputusan, masih perlu ditingkatkan.

Rendahnya capaian IDG dapat mencerminkan masih terbatasnya akses perempuan terhadap posisi strategis, kesenjangan partisipasi dalam dunia kerja, serta rendahnya representasi perempuan di lembaga legislatif dan pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan guna memperkuat kesetaraan peran dan peluang bagi perempuan di berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Batang. Namun ke depan, capaian IDG sudah tidak akan digunakan kembali dan digantikan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) didefinisikan sebagai ukuran ketimpangan gender untuk mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia. Ketimpangan gender dihitung berdasarkan tiga dimensi utama yang mencerminkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan yaitu dimensi kesehatan reproduksi wanita, dimensi pemberdayaan (TPAK dan persentase pendidikan minimal SMA), dan dimensi pasar tenaga kerja (keterwakilan di legislatif). Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Batang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini :

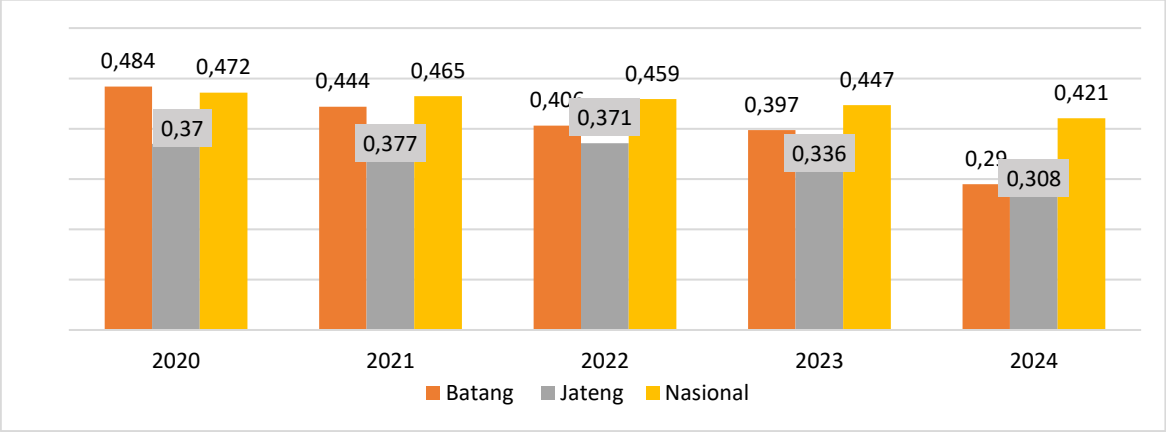

Gambar 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2025

Berangkat dari nilai indeks 0,484 pada tahun 2020 meningkat menurun terus menjadi 0,29 pada tahun 2024. Angka capaian Batang masih jauh lebih rendah dibanding nasional sebesar 0,421 dan Jawa Tengah sebesar 0,308 pada tahun 2024. Secara umum penurunan di Kabupaten Batang ini disebabkan pada perbaikan faktor dimensi kesehatan reproduksi yaitu penurunan capaian indikator perempuan yang melahirkan hidup tidak difasilitas kesehatan serta peningkatan pada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun ketimpangan gender di Kabupaten Batang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata rata ketimpangan gender Nasional.

D. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut:

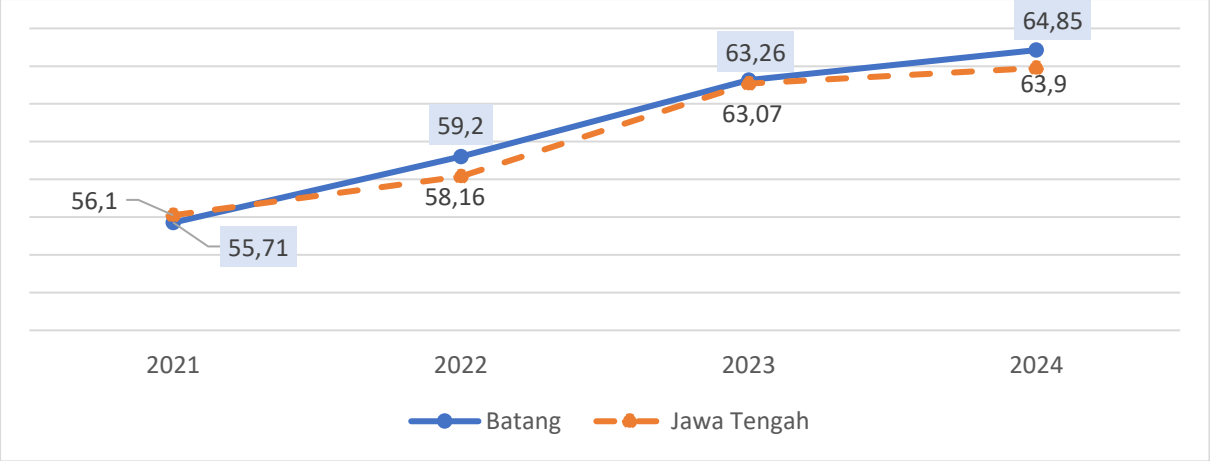

Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Sumber : https://siperindu.online/data/aksi.php, diakses 19 Mei 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Batang menunjukkan tren positif selama empat tahun terakhir. Pada 2021, iBangga tercatat sebesar 55,71, sedikit di bawah rata-rata Jawa Tengah yaitu 56,10. Tahun 2022, nilai iBangga meningkat menjadi 59,20, melampaui rata-rata provinsi. Tren positif ini berlanjut hingga pada tahun 2024 dengan capaian 64,85, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah (63,90). Secara keseluruhan, iBangga Kabupaten Batang naik 9,14 poin dalam empat tahun terakhir.

E. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Batang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir (berdasarkan ketersediaan data yaitu tahun 2022- 2023). Pada tahun 2022, IPA Kabupaten Batang tercatat sebesar 62,29, berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 64,99. Namun, pada tahun 2023, nilai IPA Kabupaten Batang menurun menjadi 60,44, sementara rata-rata Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan menjadi 64,34. Penurunan sebesar 1,85 poin di Kabupaten Batang menunjukkan adanya tantangan dalam upaya perlindungan anak, seperti pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari kekerasan, serta penyediaan layanan ramah anak. Sementara itu, meski provinsi juga mengalami penurunan, gap antara nilai IPA Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah justru melebar. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kembali program perlindungan anak di Kabupaten Batang.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Beban Ketergantungan/ Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan/ Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Berikut capaian angka ketergantungan Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir :

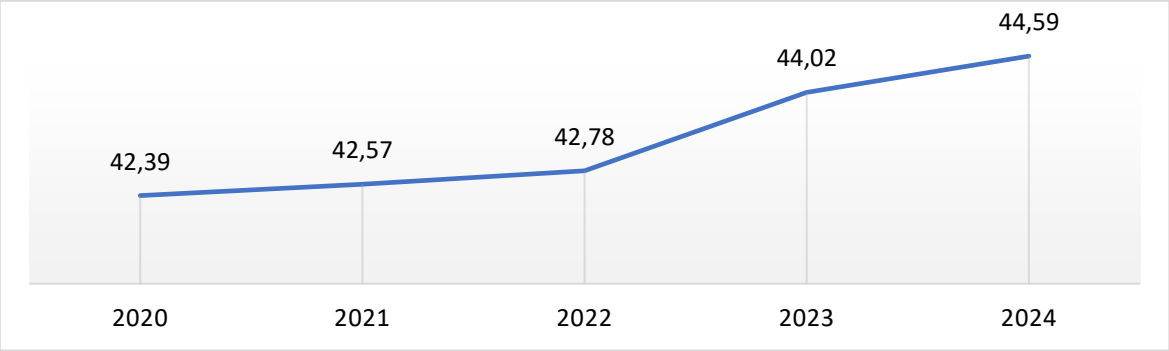

Gambar 2. 42 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat selama periode 2020-2024, angka beban ketergantungan cenderung naik setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2024 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 44,59 persen yang artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban dari 45 penduduk yang tidak produktif, yaitu anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan orang tua yang berusia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi angka beban ketergantungan, semakin banyak jumlah orang yang harus ditanggung oleh penduduk yang bekerja dan berada dalam usia produktif. Jika pada tahun 2024 angka beban ketergantungan Kabupaten Batang mencapai 44,59%, maka setiap 100 orang yang bisa bekerja harus menanggung 45 orang yang tidak bekerja (baik anak-anak maupun orang tua), yang bisa memberikan gambaran mengenai tantangan dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan untuk kelompok yang tidak produktif tersebut.

Rasio ketergantungan diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi pada sumber daya manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena Bonus Demografi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi, sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik, apabila banyak yang tidak bekerja. Hal ini karena pada usia produktif tapi tenaganya tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja.

B. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) didefinisikan sebagai rasio antara penduduk bekerja dengan angkatan kerja, dimana angkatan kerja dimaknai sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan yang sementara tidak bekerja maupun pengangguran. Kondisi kesempatan kerja Kabupaten Batang dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini :

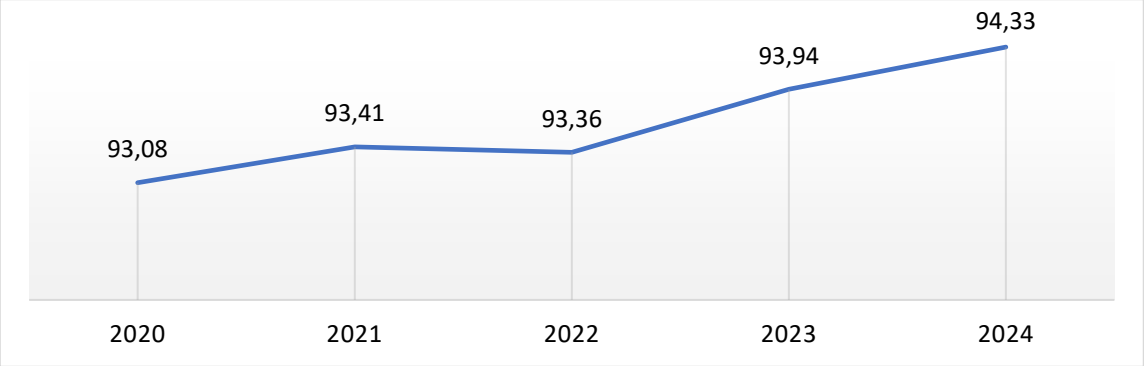

Gambar 2. 43 Tingkat Kesempatan Kerja Penduduk Kabupaten Batang Berumur 15 Tahun ke Atas (Persen)

Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan pada capaian tingkat kesempatan kerja tahun 2024 sebesar 94,33% dari sebelumnya yaitu 93,08% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan. Adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan *Batang*

Industrial Park memberikan lebih banyak peluang bagi tenaga kerja untuk bekerja.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah

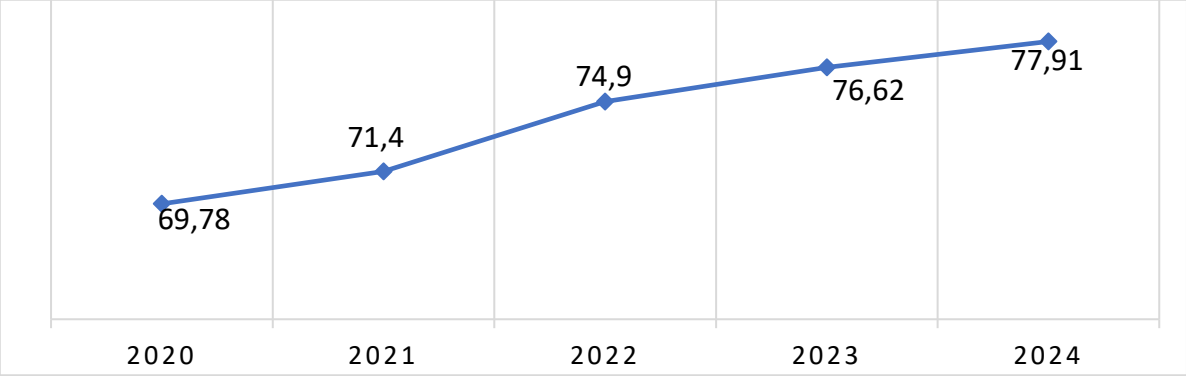

Gambar 2. 44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka, 2025

Berdasarkan gafik di atas, terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat, dari tahun 2020 sebesar 69,78 persen menjadi 77,91 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan semakin meningkatnya pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Batang.

Adapun berikut tersaji data TPAK menurut jenis kelamin tahun 2020-2024 :

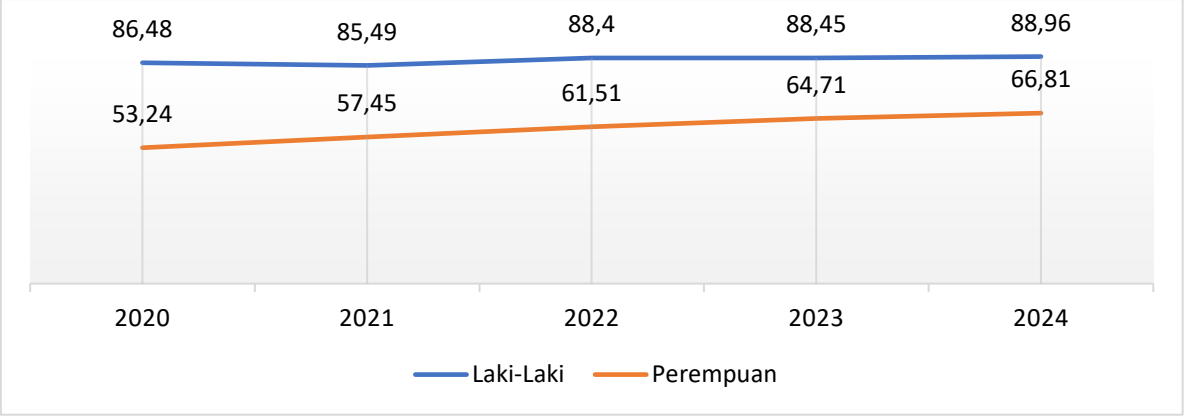

Gambar 2. 45 TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa TPAK Perempuan jauh lebih rendah dari laki laki. Hingga tahun 2024, baik TPAK laki-laki maupun perempuan, memiliki tren yang prositif. Namun peningkatan lebih tinggi pada perempuan yakni sebesar 13,57 poin, sedangkan peningkatan TPAK laki-laki hanya sebesar 2,48 poin dalam 5 tahun terakhir.

Meskipun TPAK perempuan secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, terjadi kemajuan signifikan dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja selama 5 tahun terakhir. Peningkatan TPAK perempuan menunjukkan adanya perubahan positif dalam pemberdayaan perempuan, dimana semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia kerja. Sementara itu, meskipun TPAK laki-laki juga menunjukkan tren positif, peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perempuan, yang menunjukkan adanya upaya lebih kuat yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan kemajuan dalam inklusi ekonomi perempuan, yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, perhatian khusus juga diberikan pada pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di Kabupaten Batang. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan kesempatan kerja yang inklusif, memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dalam berbagai sektor pekerjaan. Berbagai program pelatihan keterampilan khusus dan pendampingan kerja

diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja disabilitas. Dengan demikian, tidak hanya memperluas partisipasi tenaga kerja secara umum, tetapi juga mendorong kesetaraan sosial dan ekonomi bagi kelompok yang rentan. Pendekatan inklusif ini diharapkan dapat memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan beragam di Kabupaten Batang

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Batang didominasi oleh sektor industri pengolahan yang secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, dengan rata-rata kontribusi mencapai sekitar 34 persen setiap tahunnya. Oleh karena itu, kinerja sektor industri pengolahan sangat menentukan arah dan dinamika perekonomian Kabupaten Batang secara keseluruhan.

Di posisi selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati peringkat kedua, meskipun kontribusinya menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Sektor ini tetap memiliki arti penting, terutama dalam menopang ketahanan pangan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan.

Berdasarkan data PDRB tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar Rp10.601,82 miliar atau 34,89 persen dari total PDRB Kabupaten Batang. Sektor ini diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar Rp5.577,76 miliar (18,35 persen), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp3.783,11 miliar (12,45 persen), sektor konstruksi sebesar Rp2.452,57 miliar (8,07 persen), serta sektor jasa pendidikan sebesar Rp1.661,33 miliar (5,47 persen).

Dominasi sektor industri pengolahan ini menunjukkan arah transformasi struktur ekonomi Kabupaten Batang yang secara bertahap bergeser dari sektor primer menuju sektor sekunder. Meskipun demikian,

perlunya keseimbangan dan penguatan antar sektor tetap menjadi perhatian penting dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selengkapnya Distribusi setiap sektor terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sektor PDRB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,53	20,52	19,88	19,03	18,35
B. Pertambangan dan Penggalian	3,06	3,05	2,84	2,75	2,73
C. Industri Pengolahan	34,08	34,09	34,26	34,56	34,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,1	0,1	0,1	0,10
F. Konstruksi	5,5	7,22	7,29	7,75	8,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,7	12,74	12,48	12,53	12,45
H. Transportasi dan Pergudangan	1,75	1,71	2,93	3,16	3,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,63	3,65	3,96	4,18	4,32
J. Informasi dan Komunikasi	3,14	3,07	2,89	2,83	2,76
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	1,71	1,7	1,63	1,61
L. Real Estate	1,03	0,99	0,95	0,96	0,95
M,N. Jasa Perusahaan	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	2,14	2,04	1,88	1,88
P. Jasa Pendidikan	6,26	5,93	5,54	5,43	5,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	0,83	0,81	0,77	0,78	0,79
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,89	1,82	1,94	1,98	2,01
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2025

A. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Batang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 34,08 persen terhadap total PDRB. Angka ini mengalami peningkatan bertahap menjadi 34,09 persen pada tahun 2021, kemudian naik menjadi 34,26 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan yang lebih signifikan tercatat pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 34,56 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 34,89 persen.

Peningkatan kontribusi ini mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Batang, sekaligus menjadi indikator positif terhadap potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Konsistensi pertumbuhan ini juga menunjukkan bahwa sektor industri telah menjadi tulang punggung perekonomian yang mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

Sektor industri pengolahan diproyeksikan semakin menguat dengan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. KEK ini dirancang sebagai pusat pertumbuhan industri modern yang berbasis teknologi tinggi dan inovasi. Selain menarik investasi dalam dan luar negeri, KEK Industropolis juga akan mendorong transformasi industri lokal melalui peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi, dan perluasan akses pasar.

Dengan dukungan infrastruktur yang terus dibangun serta berbagai insentif fiskal dan non-fiskal yang ditawarkan, KEK Industropolis diharapkan menjadi katalis dalam mempercepat pertumbuhan sektor industri pengolahan. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat posisi Kabupaten Batang dalam peta ekonomi regional dan nasional, serta membuka peluang kerja dan penguatan ekosistem usaha lokal.

B. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada tahun 2020, sektor pertanian, kehutan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 21,53 persen, namun secara bertahap menurun menjadi 20,52 persen pada 2021, 19,88 persen pada 2022, 19,03 persen pada 2023, dan mencapai 18,35 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Batang dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier, seiring dengan berkembangnya kawasan industri. Produksi komoditas pertanian di Kabupaten Batang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13 Komoditas tanaman pangan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Komoditas	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	Ton	208.497	185.681	172.378	181.950	160.298
Jagung	Ton	79.950	77.047	81.143	77.163	89.659
Kedelai	Ton	33	57	119	-	0

Komoditas	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kacang Tanah	Ton	473	191	164	292	161
Ubi Kayu	Ton	27.310	22.639	15.517	27.440	12.444
Ubi Jalar	Ton	9.675	7.008	4.890	4.615	3.531
Kacang Hijau	Ton	6	31	36	-	0

Sumber : Dispaperta Kabupaten Batang, 2025

Komoditas utama sektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai). Pada periode tahun 2020-2024, komoditas tanaman pangan cenderung mengalami penurunan terutama komoditas padi. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya bencana banjir pada bulan November dan Desember tahun 2022 yang mengakibatkan lahan seluas 150 Ha gagal panen yang berakibat pada penurunan produksi padi dan ketersediaan beras di Kabupaten Batang yang kemudian meningkat menjadi 181.950 ton pada tahun 2023 yang didukung adanya program IP 400 atau penanaman padi sebanyak 4 kali setahun. Dan menurun kembali menjadi 160.298 ton pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2024 terjadi karena adanya alih fungsi lahan, yang mengakibatkan penurunan kerusakan lahan kualitas lahan pertanian sehingga mengurangi produksi beras. Selain itu, Kurangnya penggunaan teknologi pertanian yang memadai dapat menghambat produksi. Produksi komoditas jagung mengalami fluktuasi tergantung pada iklim, ketersediaan air, dan benih. Produksi komoditas kedelai mengalami tren menurun dikarenakan menurunnya minat petani terkait daya saing kedelai di pasar karena adanya kedelai impor sehingga menyebabkan menurunnya luas tanam kedelai.

Pada subsektor perikanan, produksi perikanan di Kabupaten Batang selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan antara perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap mengalami tren penurunan, dari 34.862 ton pada tahun 2020 menjadi 26.042,44 ton pada tahun 2024. Sebaliknya, perikanan budidaya menunjukkan tren peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 2.923,90 ton, kemudian mengalami peningkatan menjadi 2.982,39 ton pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 4.140,20 ton pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan pergeseran kontribusi subsektor dalam produksi

perikanan daerah, yang menandakan bahwa pengembangan perikanan budidaya menjadi salah satu potensi yang perlu terus didorong untuk menjaga ketahanan dan keberlanjutan sektor perikanan di Kabupaten Batang. Perkembangan produksi perikanan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 14 Produksi Perikanan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

No	Jenis	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perikanan Tangkap	Ton	34,862.00	35,979.00	30,673.00	26,459.29	26402,44
2.	Perikanan Budidaya	Ton	2,923.9	2,982.39	3,927.81	4,009.40	4,140.20

Sumber: Dislutkan Kabupaten Batang (2025)

Sementara itu, di sektor peternakan, produksi hasil peternakan khususnya daging dan telur cenderung meningkat dalam periode lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 15 Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produksi Hasil Ternak						
1	Daging	Kg	12.807.003	12.893.125	17.099.906	9.050.000	17.758.967
2	Telur	Kg	14.585.205	14.585.205	14.089.530	10.536.445	19.407.369
3	Susu	Liter	120.412	122.845	129.467	83.672	218.708

Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang Tahun 2024

Produksi hasil ternak di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Produksi daging sempat turun pada 2023 namun meningkat tajam di 2024 menjadi 17.758.967 kg. Produksi telur relatif stabil hingga 2022, menurun di 2023, lalu melonjak pada 2024 mencapai 19.407.369 kg. Sementara itu, produksi susu terus meningkat dengan puncaknya pada 2024 sebesar 218.708 liter.

Populasi ternak ruminansia dan non-ruminansia di Kabupaten Batang juga menunjukkan dinamika yang penting sebagai dasar produksi hasil ternak. Data populasi ternak di Kabupaten Batang selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16 Populasi Ternak di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
sapi potong	22.648	23.014	20.647	14.033	17.597

Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
sapi perah	96	111	105	182	171
kerbau	1.308	1.082	992	146	145
kambing	81.728	82.606	83.375	77.168	79.150
domba	32.042	32.373	32.465	3.166	9.454
babi	5.891	5.248	5.006	5.060	5.202

Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang Tahun 2024

Populasi sapi potong di Kabupaten Batang mengalami penurunan dari 22.648 ekor pada tahun 2020 menjadi 17.597 ekor pada tahun 2024, dengan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 14.033 ekor. Populasi sapi perah menunjukkan tren kenaikan dimana pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 96 ekor, meningkat menjadi 171 ekor pada tahun 2024. Populasi kerbau mengalami penurunan secara bertahap dari 1.308 ekor pada tahun 2020 menjadi 145 ekor pada tahun 2024. Untuk kambing dan domba, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023, dimana populasi kambing berkurang dari 83.375 ekor pada tahun 2022 menjadi 77.168 ekor, dan populasi domba turun drastis dari 32.465 ekor menjadi 3.166 ekor. Namun, pada tahun 2024 terjadi pemulihan populasi kambing mencapai 79.150 ekor dan domba sebanyak 9.454 ekor. Populasi babi relatif stabil sepanjang periode 2020-2024 dengan jumlah berkisar antara 5.891 hingga 5.202 ekor. Penurunan populasi ternak di Kabupaten Batang dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada tabel, secara signifikan dipengaruhi oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah ini mendorong banyak peternak untuk mengambil langkah strategis dengan menjual ternak yang dimiliki sebagai upaya meminimalisir risiko kerugian yang lebih besar.

C. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB tercatat sebesar 3,63 persen, yang mengalami peningkatan menjadi 3,65 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, kontribusinya kembali meningkat menjadi 3,96 persen , dan mencapai 4,18 persen pada tahun 2023. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2024, dimana kontribusi sektor ini tercatat sebesar 4,32 persen.

PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum didukung oleh sektor lain yang saling terhubung dan menciptakan ekosistem ekonomi yang

kuat, terutama dari sektor pariwisata. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, secara langsung mendorong permintaan terhadap layanan penginapan, restoran, warung makan, kafe, dan berbagai bentuk usaha kuliner lokal. Keberadaan destinasi wisata alam, budaya, religi, dan buatan di Kabupaten Batang telah menjadi magnet yang menggerakkan arus wisatawan serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal dan peningkatan PAD dari sektor pariwisata. PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Batang dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini:

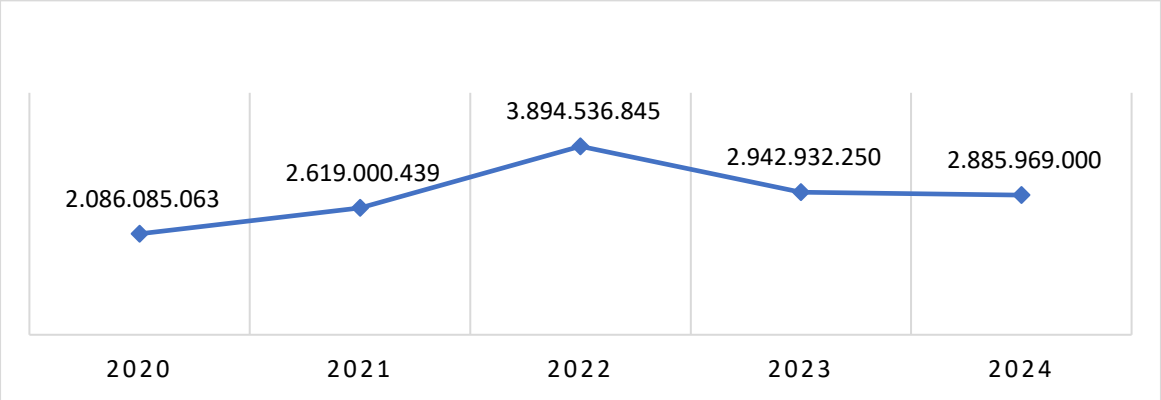

Gambar 2. 46 PAD dari sektor Pariwisata (Rupiah)

Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka 2025

Grafik di atas menunjukkan tren PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir, mulai tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PAD pariwisata tercatat sebesar Rp2.086.085.063, angka yang relatif rendah akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas wisata secara signifikan. Memasuki tahun 2021, terjadi kenaikan PAD menjadi Rp2.619.000.439 seiring dengan mulai pulihnya sektor pariwisata setelah pelonggaran pembatasan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk kembali berwisata.

Puncak pertumbuhan PAD pariwisata terjadi pada tahun 2022, di mana pendapatan melonjak tajam hingga mencapai Rp 3.894.536.845. Lonjakan ini mencerminkan adanya peningkatan yang kuat pascapandemi, didorong oleh tingginya minat wisatawan, promosi destinasi, serta berbagai inovasi dan event yang digelar untuk menarik kunjungan. Namun, tren positif ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2023, PAD pariwisata mengalami

penurunan menjadi Rp2.942.932.250. Pada tahun 2024, PAD pariwisata Batang kembali menurun menjadi Rp2.885.969.000. Penurunan PAD tersebut sejalan dengan penurunan kunjungan wisata yang juga terjadi selama 2 tahun terakhir. Kunjungan wisata di Kabupaten Batang dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini:

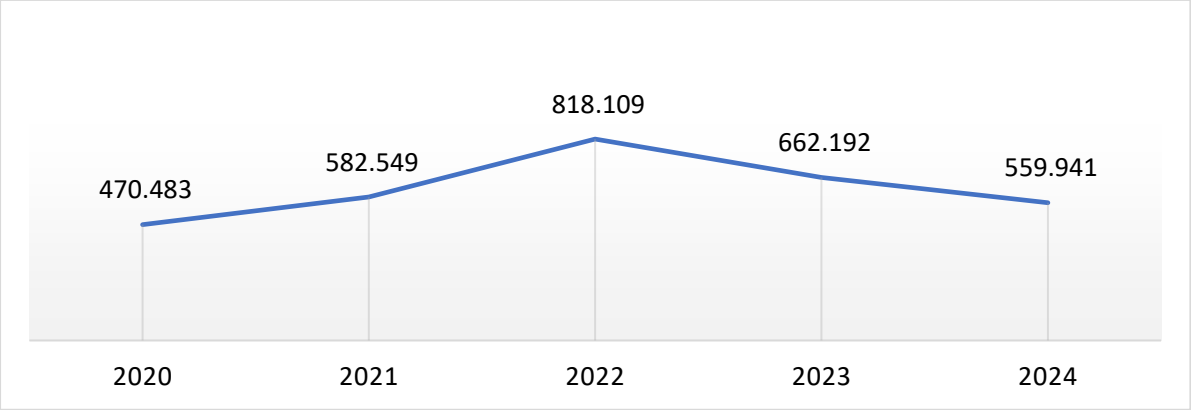

Gambar 2. 47 Jumlah Pengunjung Objek Wisata (Orang)

Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka 2025

D. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan di suatu daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat aktivitas dan dinamika ekonomi masyarakat. Rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa banyak individu yang terlibat dalam kegiatan wirausaha dan seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian lokal. Dengan meningkatnya rasio kewirausahaan, diharapkan terjadi peningkatan lapangan kerja, inovasi produk, dan daya saing ekonomi daerah.

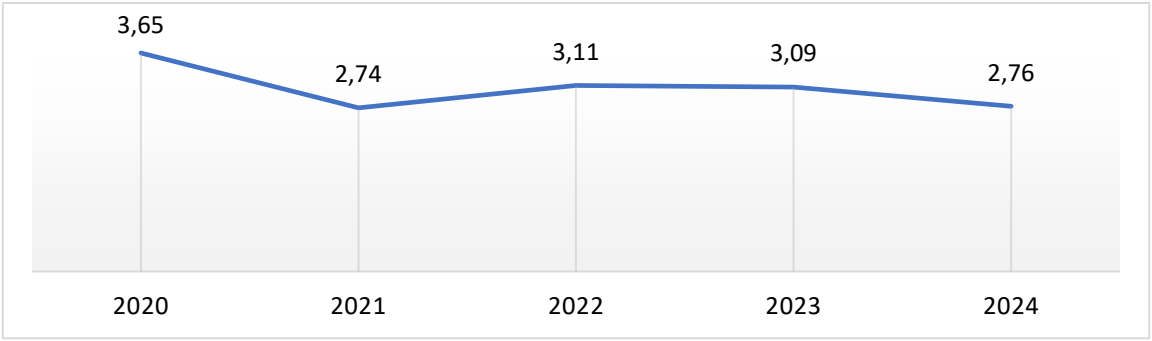

Gambar 2. 48 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Batang (%)

Sumber: BPS 2025, data diolah

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Batang menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan puncak tertinggi pada tahun 2020 dan penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Kewirausahaan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung daya saing daerah, karena dapat mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kenaikan rasio kewirausahaan mengindikasikan adanya lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha untuk berkembang, sehingga dapat menarik investasi dan memperkuat ekonomi lokal. Sebaliknya, tren penurunan rasio kewirausahaan mengindikasikan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Dukungan infrastruktur yang lebih baik dan kebijakan pemerintah yang memadai dapat mendorong pertumbuhan UMKM maupun ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting dalam merumuskan strategi pengembangan kewirausahaan, sehingga Kabupaten Batang dapat meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan di tingkat regional maupun nasional.

Selain pengembangan kewirausahaan konvensional, Kabupaten Batang juga menunjukkan komitmen dalam mendorong ekosistem ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi inklusi pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah aktif mendorong pelaku usaha dan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, meningkatkan daya saing produk serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha lokal. Inisiatif seperti pelatihan literasi keuangan syariah untuk ibu rumah tangga juga menjadi strategi penting untuk memperkokoh ketahanan ekonomi keluarga di tingkat akar rumput. Hingga tahun 2024, terdapat 8.558 produk UMKM di Kabupaten Batang yang sudah tersertifikasi halal.

Sementara itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat, terutama dalam perencanaan program yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembinaan UMKM, dan beasiswa pendidikan untuk dhuafa. Adapun lembaga penghimpun zakat di Kabupaten Batang terdiri dari Baznas, LazisMU, LazisNU, Tazzakat, dan MPZ Permata Hati Peduli.

E. *Return On Asset* (RoA) BUMD

Produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Batang dapat dilihat dari capaian ROA *(Return of Asset)* pada masing-masing BUMD. *Return on Assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dari aset yang digunakan. ROA memberikan gambaran keuangan perusahaan berdasarkan hasil keuntungan di masa lalu yang dapat digunakan sebagai patokan kinerja keuangan pada periode selanjutnya. Berikut tersaji capaian ROA BUMD Kabupaten Batang dari tahun 2017-2024 :

Tabel 2. 17 RoA *(Return Of Asset)* BUMD tahun 2017-2024

No	BUMD	ROA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Kab. Batang	10,9	8,68	8,72	12,01	12,35
2	PT. BPR BKK Batang	1,3	0,8	0,14	0,9	0,5
3	PERUMDA ANEKA USAHA	-3,94	-0,95	-5,4	-7,84	-2,71
4	PT. BPR BAPERA	1,71	1,51	1,51	1,34	1,38

Sumber : Bag. Perekonomian Setda Kab Batang, 2025

F. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi memiliki peranan penting dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, terutama tuntutan inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu perlu adanya dorongan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan inovasi sebagai acuan/roadmap sistem inovasi daerah. Berikut capaian Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Batang Tahun 2019-2024:

Tabel 2. 18 Realisasi Capaian IID (Indeks Inovasi Daerah)

TAHUN	PERINGKAT	NILAI	KETERANGAN
2019	127	650	Inovatif
2020	58	2.952	Sangat Inovatif
2021	127	46,84	Inovatif
2022	39	58,58	Inovatif
2023	209	43,76	Inovatif
2024	96	57,46	Inovatif

Sumber Bapperida Kabupaten Batang, 2025

Catatan: pada tahun 2021 mekanisme penilaian diubah dengan mengutamakan kematangan inovasi bukan jumlah/ kuantitas inovasi daerah. Kematangan inovasi diperoleh dari data dukung tiap inovasi daerah baik berupa regulasi, dokumentasi dan manfaat inovasi daerah

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan elemen fundamental dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Melalui penghubungan antara pasar lokal dengan pasar yang lebih luas, daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekspor barang dan jasa serta menarik investasi yang mendukung Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Peningkatan modal tetap bruto, termasuk infrastruktur dan teknologi, berkontribusi pada efisiensi produksi yang lebih tinggi. Selain itu, keterlibatan dalam rantai nilai global memungkinkan daerah untuk memperluas akses ke pasar internasional, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, strategi integrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa daerah dapat bersaing secara efektif di tingkat global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. PMTB mencerminkan total investasi yang dilakukan dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Pentingnya PMTB terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas produksi suatu daerah serta potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dengan meningkatnya PMTB, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

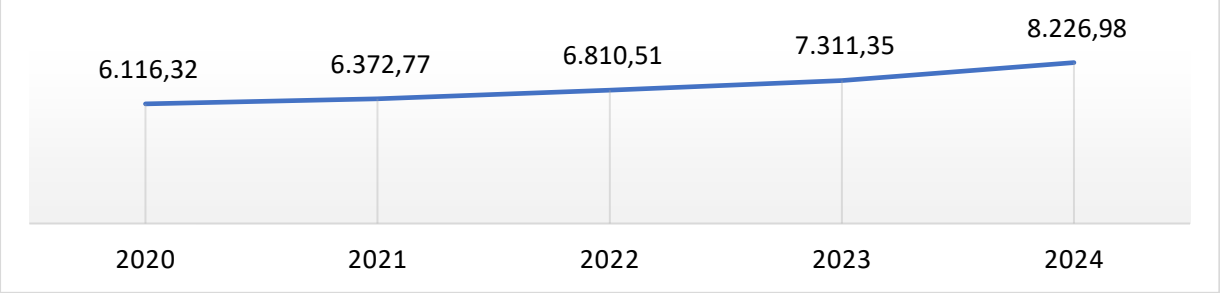

Gambar 2. 49 PMTB Kabupaten Batang (Miliar Rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa PMTB Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan menunjukkan adanya kepercayaan dari investor terhadap potensi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa baik pemerintah maupun sektor swasta telah melakukan investasi yang signifikan dalam aset tetap, seperti infrastruktur, bangunan, dan peralatan. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal. Selain itu, peningkatan PMTB dapat mendorong diversifikasi ekonomi dengan munculnya sektor-sektor baru dan pengembangan industri unggulan lokal. Secara keseluruhan, tren positif ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi di Kabupaten Batang. Rasio PMTB terhadap PDRB Kabupaten Batang dapat dilihat pada grafik berikut:

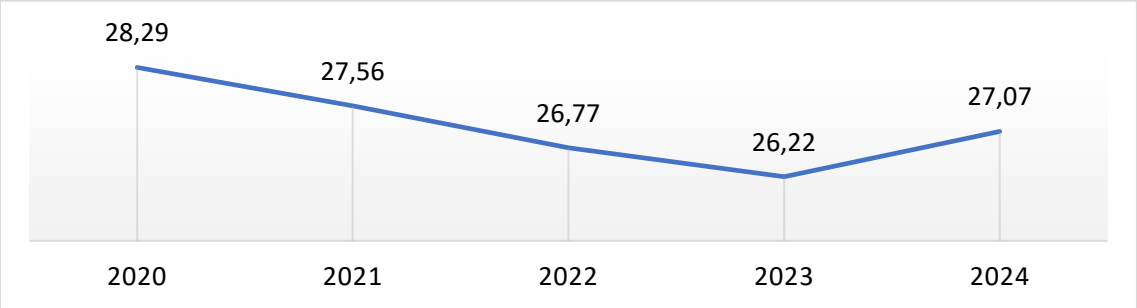

Gambar 2. 50 Rasio PMTB Terhadap PDRB Kabupaten Batang (%)
Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2025

Rasio PMTB terhadap PDRB Kabupaten Batang menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio PMTB terhadap PDRB berada di angka tertinggi yaitu 28,29 persen. Namun, dalam tiga tahun berikutnya, rasio ini mengalami penurunan berturut-turut menjadi 27,56 persen pada 2021, 26,77 persen pada 2022, dan mencapai titik terendah pada 2023 sebesar 26,22 persen. Penurunan ini mencerminkan melemahnya kontribusi investasi terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Batang, yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi, dampak pandemi, maupun lambatnya realisasi proyek-proyek investasi. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi kenaikan kembali rasio PMTB

terhadap PDRB menjadi 27,07 persen. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pemulihan atau peningkatan aktivitas investasi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang berpotensi memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Realisasi Investasi

Investasi di Kabupaten Batang dapat dilihat dari capaian jumlah realisasi investasi di Kabupaten Batang, jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Batang serta jumlah penyerapan tenaga kerja. Jumlah realisasi investasi Kabupaten Batang dalam periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi. Dimana total investasi yang masuk di Kabupaten Batang tahun 2020 sebanyak Rp. 5.757.205.373.067 kemudian meingkat di tahun 2021 menjadi 7.560.059.800.000. Realisasi investasi mengalami penurunan selama 2 tahun yaitu pada tahun 2022 menjadi Rp. 6.310.006.814.960, dan Rp. 6.175.695.295.783 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, realisasi investasi kembali naik menjadi Rp. 6.389.043.817.635 pada tahun 2024. Hal ini tidak terlepas dari adanya Kawasan Indsutri Terpadu Batang (KITB) yang bertrasformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

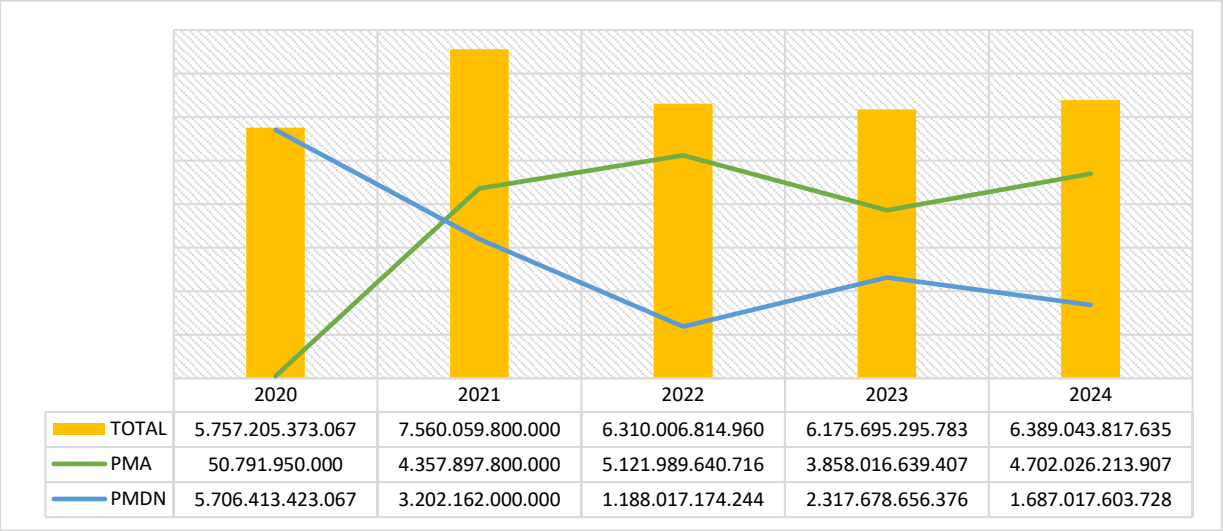

	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	5.757.205.373.067	7.560.059.800.000	6.310.006.814.960	6.175.695.295.783	6.389.043.817.635
PMA	50.791.950.000	4.357.897.800.000	5.121.989.640.716	3.858.016.639.407	4.702.026.213.907
PMDN	5.706.413.423.067	3.202.162.000.000	1.188.017.174.244	2.317.678.656.376	1.687.017.603.728

Gambar 2. 51 Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun, 2025

Realisasi investasi di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, penanaman modal dalam negeri

di Kabupaten Batang mencapai Rp. 5.706.413.423.067 dengan realisasi investasi terbesar berada di Kecamatan Tulis dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.598.400.000.000. Sektor tersier dengan sub sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran menjadi sub sektor dengan penanaman modal dalam negeri tertinggi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 4.876.340.000.000. Sedangkan penanaman modal asing hanya berada di satu kecamatan yaitu Kecamatan Kandeman dengan realisasi investasi sebesar Rp. 50.791.950.000 pada sektor sekunder dengan sub sektor industri tekstil.

Pada tahun 2021, penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan menjadi Rp. 3.202.162.000.000 dengan investasi terbesar berada di Kecamatan Warungasem dengan nilai investasi Rp. 1.844.954.700.000. Menurut sektor dan sub sektor, realisasi investasi terbesar berada pada sektor tersier dengan sub sektor transportasi, gudang, dan komunikasi dengan realisasi investasi mencapai Rp. 1.836. 083.700.000. Sedangkan untuk penanaman modal asing mencapai Rp. 4.357.897.800.000 dengan nilai investasi terbesar berada di Kecamatan Kandeman dengan realisasi investasi mencapai Rp. 3.553.757.560.000. Jika dirinci menurut sektor dan sub sektor, sektor tersier dengan sub sektor listrik, gas, dan air menjadi sub sektor dengan penanaman modal asing terbesar di Kabupaten Batang pada tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.236.043.930.000.

Pada tahun 2022, penanaman modal dalam negeri menurun kembali menjadi sebesar Rp. 1.188.017.174.244 dan meningkat menjadi 2.317 M pada tahun 2023. sedangkan pada Penanaman modal Asing realisasi di Tahun 2023 sebesar 3.858 M menurun dari tahun 2022 yang semula 5.121 M. Realisasi investasi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan total investasi mencapai Rp. 6.389.043.817.635 yang terdiri dari penanaman modal asing sebesar Rp. 4.702.026.213.907 dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp. 1.687.017.603.728

C. Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu indikator yang merefleksikan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem

keuangan formal. DPK mencerminkan jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga keuangan dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Rasio DPK terhadap PDRB digunakan untuk menilai seberapa besar potensi dana masyarakat yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula kapasitas lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit dan mendukung pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian, penguatan penghimpunan dana masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rasio DPK terhadap PDRB ADHB dapat dilihat pada grafik berikut:

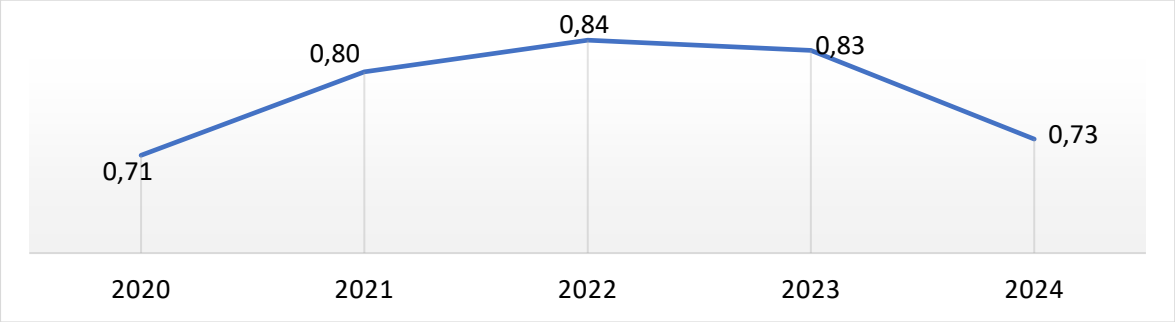

Gambar 2. 52 Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kabupaten Batang (%)

Sumber: OJK dan BPS (2025)

Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB di Kabupaten Batang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data, kontribusi pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,71 persen, kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,80 persen pada tahun 2021, dan mencapai puncak pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 0,84 persen. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan, yaitu menjadi 0,83 persen pada tahun 2023 dan 0,73 persen pada tahun 2024. Penurunan rasio DPK terhadap PDRB disebabkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang melebihi laju pertumbuhan DPK. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan nilai tambah ekonomi daerah berjalan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penghimpunan DPK.

D. Kontribusi Total Kredit terhadap PDRB

Kontribusi sektor keuangan, khususnya melalui penyaluran kredit, merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi daerah. Rasio total kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mencerminkan sejauh mana aktivitas pembiayaan berperan dalam mendorong produktivitas dan investasi di berbagai sektor ekonomi. Melalui indikator ini, dapat dilihat bagaimana peran lembaga keuangan dalam memperkuat struktur ekonomi lokal dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penyajian data ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dijalankan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Berikut Rasio Total Kredit Terhadap PDRB di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024:

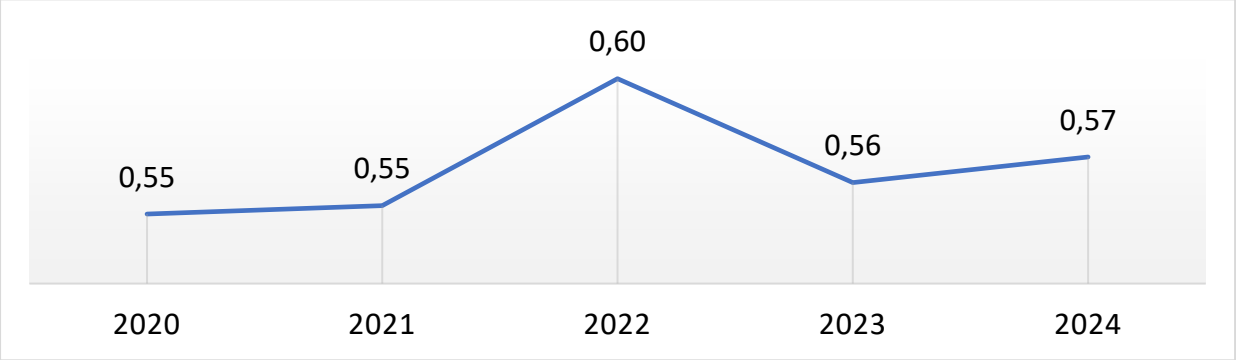

Gambar 2. 53 Rasio Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Batang (%)

Sumber: OJK dan BPS (2025)

Berdasarkan data diatas, rasio total kredit terhadap PDRB Kabupaten Batang menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada awal periode, rasio kredit tercatat stabil, kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Peningkatan ini mengindikasikan adanya dorongan pembiayaan yang lebih besar terhadap kegiatan ekonom. Namun, pada tahun berikutnya terjadi penurunan rasio, yang dapat mencerminkan penyesuaian dari sisi penyaluran kredit maupun pertumbuhan PDRB. Meskipun demikian, pada tahun terakhir periode pengamatan, rasio kembali menunjukkan kenaikan, menandakan adanya pemulihan kontribusi sektor perbankan terhadap perekonomian daerah.

E. Ekspor Barang dan Jasa

Data ekspor barang dan jasa daerah merupakan indikator krusial yang mencerminkan daya saing ekonomi suatu wilayah. Analisis data ini membantu mengidentifikasi potensi produk unggulan serta kontribusinya terhadap perekonomian lokal. Peningkatan volume ekspor menunjukkan

kemampuan daerah dalam memenuhi permintaan pasar internasional, sekaligus mencerminkan kualitas dan inovasi produk.

Ekspor berfungsi sebagai sumber pendapatan dan sarana untuk memperluas jaringan bisnis serta menarik investasi asing. Oleh karena itu, pemantauan dan pengembangan strategi berbasis data ekspor sangat penting untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

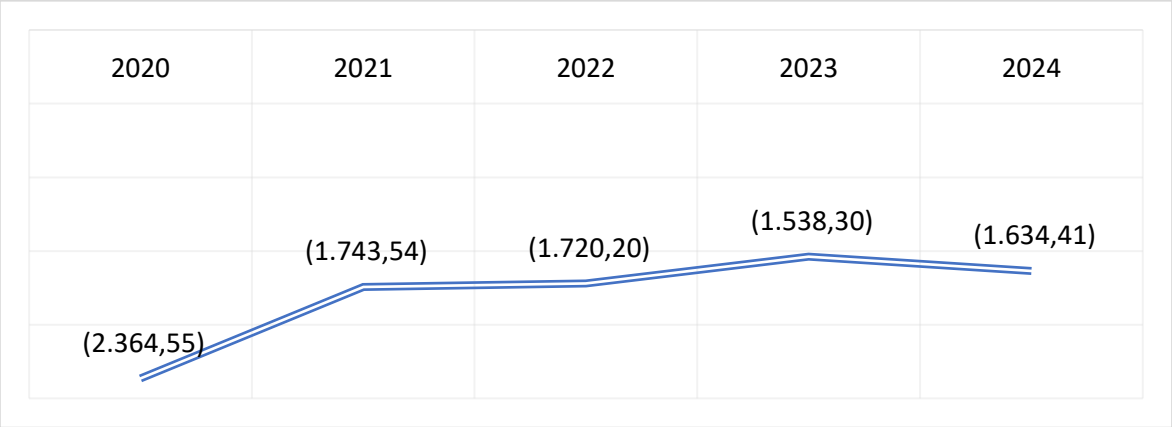

Gambar 2. 54 Net Ekspor Kabupaten Batang Tahun 2020-2024
Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2025

Grafik net ekspor barang dan jasa Kabupaten Batang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang mencerminkan tantangan dalam daya saing ekonomi daerah. Pada tahun 2020, net ekspor mencapai -2.364,55 Miliar Rupiah, menandakan ketergantungan yang tinggi terhadap impor. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2021 menjadi -1.743,54 Miliar Rupiah dan sedikit peningkatan ke -1.720,20 Miliar Rupiah pada tahun 2022, angka tersebut masih menunjukkan nilai defisit. Tahun 2023 tercatat peningkatan menjadi -1.538,30 Miliar Rupiah, menandakan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas atau volume produk yang diekspor; namun pada tahun 2024 kembali berada di angka -1.634,41 Miliar Rupiah.

Net ekspor yang negatif mengindikasikan bahwa ketergantungan pada barang dan jasa asing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan risiko ketidakstabilan ekonomi. Meskipun ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, perluasan pasar untuk produk lokal harus didukung oleh inovasi dan peningkatan kualitas agar mampu bersaing di pasar global. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan sektor-

sektor unggulan guna mendorong peningkatan volume ekspor serta menarik investasi agar Kabupaten Batang dapat bersaing secara efektif di tingkat nasional maupun internasional melalui penguatan sektor produksi lokal dan diversifikasi produk unggulan.

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan pondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di Kabupaten Batang, infrastruktur menjadi penggerak utama dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan produktivitas masyarakat di berbagai sektor. Kemajuan infrastruktur tercermin dari capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Batang pada tahun 2024 yang mencapai 204,43 poin, atau setara dengan sekitar 91,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang telah mengalami perkembangan yang baik. Capaian tersebut mencerminkan kualitas infrastruktur dasar yang telah dibangun, meskipun masih ada tantangan dalam menyediakan layanan yang lebih merata atau lebih optimal di beberapa daerah atau sektor seperti peningkatan sistem sanitasi, pengembangan akses jalan yang lebih luas, atau peningkatan distribusi air minum. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam menyediakan sarana dan prasarana dasar, tetapi juga menunjukkan kesiapan wilayah untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Sejak tahun 2023, berdasarkan SK Bupati Batang Nomor 050/430/2023 tanggal 16 November 2023, total panjang jalan kewenangan kabupaten di Kabupaten Batang adalah 540,450 km. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Batang. Berikut kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Batang dalam 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 2. 19 Kondisi Infrastruktur Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Kondisi Jalan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Baik	Km	279,316	160,240	317,96	400,57	367,71
2	Sedang	Km	111,788	249,694	148,75	49,93	93,32
3	Rusak Ringan	Km	64,967	83,792	56,88	51,69	35,56
4	Rusak Berat	Km	96,350	58,595	28,83	38,26	43,84

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2025

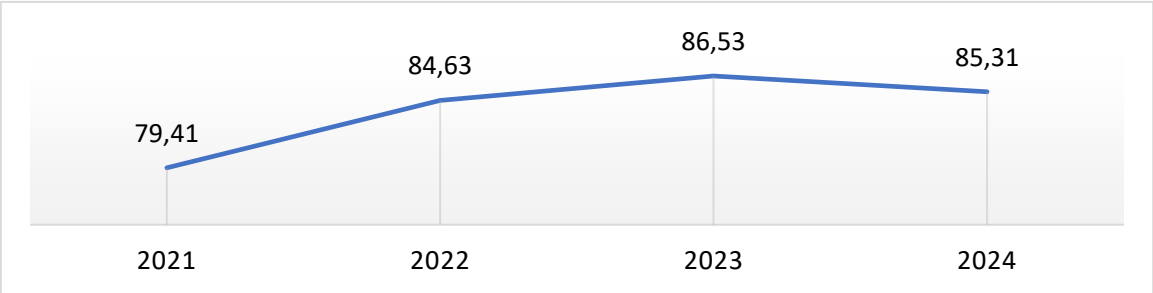

Gambar 2. 55 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Batang Tahun 2021-2024

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kondisi jalan mantap (baik dan sedang) dari tahun 2021 hingga tahun 2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 sebesar 79,41%, meningkat terus hingga 86,53% pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 85,31%. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan total panjang jalan kewenangan kabupaten. Perubahan total panjang jalan ini disebabkan karena adanya ruas jalan yang naik status menjadi jalan provinsi (berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023) sehingga terdapat penyesuaian panjang jalan kewenangan kabupaten di Kabupaten Batang. Perubahan total panjang jalan yang sebelumnya jalan kewenangan kabupaten sepanjang 540,450 km menjadi 535,818 km pada perhitungan tahun 2024.

Sistem transportasi juga penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Transportasi tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Wilayah perkotaan berperan sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pelayanan publik membutuhkan konektivitas tinggi dengan wilayah sekitarnya. Sementara itu, wilayah perdesaan menjadi sentra

produksi pertanian, industri kecil, dan sumber daya lokal yang harus terintegrasi dengan pasar dan pusat distribusi.

Kabupaten Batang memiliki 2 (dua) sistem jaringan transportasi berdasarkan jenis/ moda kendaraannya yaitu transportasi darat dan laut. Berikut sistem jaringan transportasi darat untuk akses antar kota dan/atau provinsi yang ada di Kabupaten Batang:

1. Jalan arteri primer:
   a. Bts. Kab. Batang – Sp.4 Barat Jln. Lingkar Weleri;
   b. Bts. Kota Batang – Bts. Kab. Kendal;
   c. Jln. Slamet Riyadi (Batang);
   d. Jln. Sudirman (Batang);
   e. Jln. Urip Sumoharjo (Batang);
   f. Jln Raya Batang (Pekalongan);
   g. Jln. Plelen Selatan dan Utara;
   h. Akses Jalan Pelabuhan Batang;
2. Jalan kolektor primer (JKP-2):
   a. Banyuputih – Platungan;
   b. Batang – Wonotunggal;
   c. Wonotunggal – Bts. Kab. Pekalongan;
   d. Wonotunggal – Surjo.
3. Jalan tol:
   a. Tol Pemalang – Batang;
   b. Tol Batang – Semarang;
   c. Tol Akses Wonosobo (Wonosobo – Pekalongan);
   d. Simpang Susun Kandeman; dan
   e. Simpang Susun Pekalongan – Batang.
4. Terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Banyuputih yang berada di Kecamatan Banyuputih
5. Terminal barang di Desa Penundan Kecamatan Banyuputih
6. Jembatan timbang berupa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Sarang yang berada di Kecamatan Subah
7. Jalur kereta api antarkota yaitu Jalur Pekalongan – Semarang Tawang

8. Stasiun kereta api kelas II yaitu Stasiun Batang yang berada di Kecamatan Batang

Lebih lengkap terkait sistem jaringan transportasi darat dapat dilihat pada gambar berikut:

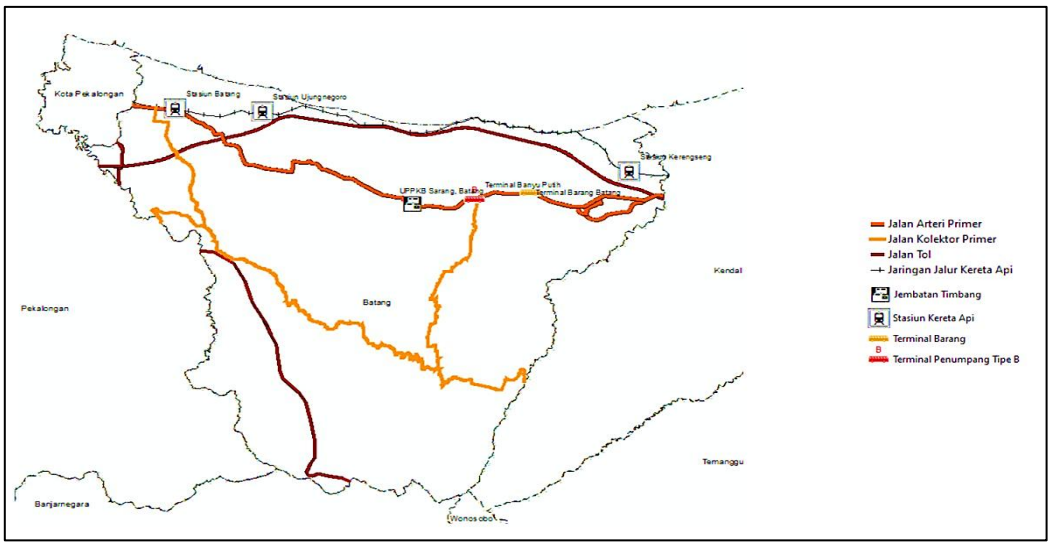

Gambar 2. 56 Sistem Jaringan Transportasi Darat Kabupaten Batang

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Batang 2024-2044

Kabupaten Batang tidak hanya memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi pada jalur darat saja, tetapi juga jalur laut. Hal ini ditandai dengan adanya pelayanan oleh Pelabuhan Batang. Saat ini Pelabuhan Batang berfungsi sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Selain Pelabuhan Pengumpan Regional, Kabupaten Batang juga memiliki Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi Pelabuhan Pengumpan Lokal Roban di Kecamatan Subah, Pelabuhan Pengumpan Lokal Celong di Kecamatan Banyuputih, terminal *multipurpose* KEK Indsutropolis Batang, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Seklayu di Kecamatan Gringsing. Lebih lengkap terkait sistem jaringan transportasi laut dapat dilihat pada Gambar berikut:

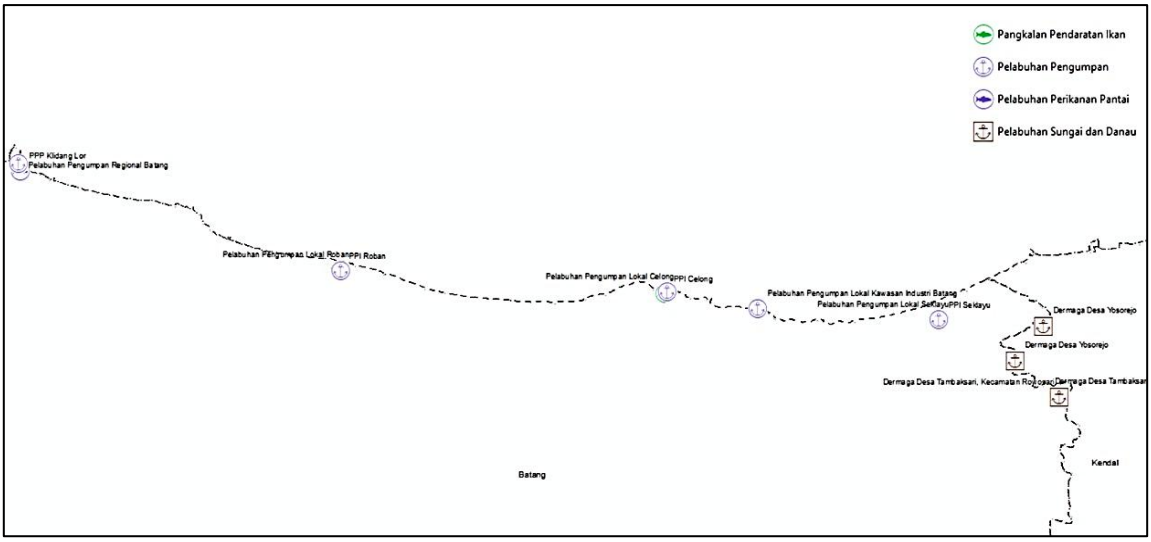

Gambar 2. 57 Sistem Jaringan Transportasi Laut Kabupaten Batang

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Batang 2024-2044

Selanjutnya berkaitan dengan hunian, data mengenai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana program perumahan dan permukiman berhasil menjangkau masyarakat secara merata. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut:

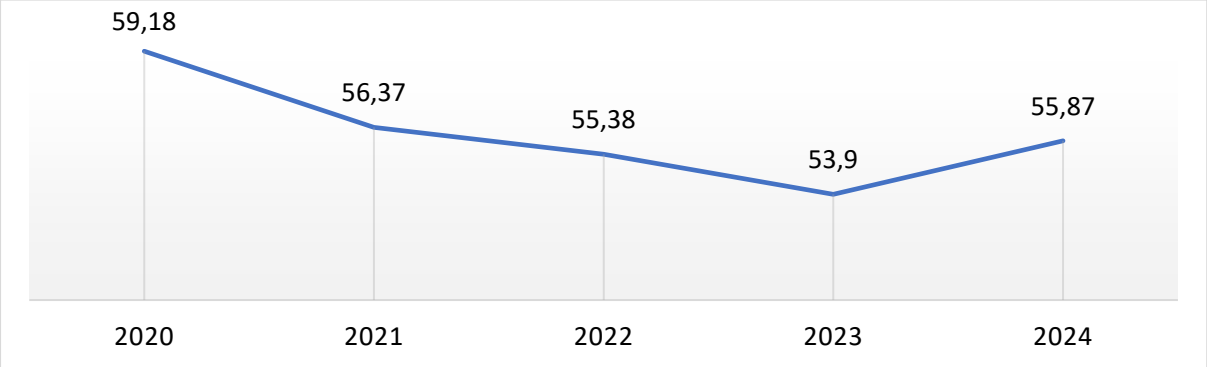

Gambar 2. 58 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2025

Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak tercatat sebesar 59,18%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan berturut-turut hingga mencapai titik terendah di 53,90% pada tahun 2023. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya pemenuhan standar kelayakan hunian, baik dari sisi fisik bangunan, akses air bersih, sanitasi, maupun kondisi lingkungan. Meski demikian, pada

tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan menjadi 55,87%, yang dapat menjadi sinyal awal perbaikan atau hasil dari intervensi kebijakan dan program di sektor perumahan dan permukiman. Tren ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya yang lebih kuat dan terarah untuk memastikan seluruh rumah tangga dapat mengakses hunian yang layak.

Sementara itu terkait dengan pembangunan desa, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) 2024, sebagian besar desa di Kabupaten Batang masih berstatus Berkembang (IDM 0,6–0,7), membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian sebanyak 80 desa telah mencapai kategori Maju (IDM > 0,7), mencerminkan kemajuan layanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hanya 6 desa yang telah berstatus Mandiri (IDM ≥ 0,8) dan dapat menjadi model kemandirian pembangunan desa. Faktor utama yang memengaruhi nilai IDM adalah tiga komponen utamanya, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Desa-desa dengan IKS tinggi umumnya memiliki layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, sementara desa dengan IKE kuat ditopang oleh produktivitas ekonomi dan akses pasar yang baik. Adapun IKL yang baik mencerminkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Data Status Desa berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 20 Status Desa Hasil Pemutakhiran IDM Kabupaten Batang Tahun 2020–2024

NO	STATUS DESA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	0	0	0	1	6
2	Maju	41	49	63	73	99
3	Berkembang	190	184	172	165	134
4	Tertinggal	8	6	4	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah		239	239	239	239	239

Sumber : Dispermades, 2025

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Batang menunjukkan tren pembangunan desa yang sangat positif, dengan pergeseran status desa dari "berkembang" dan "tertinggal" menuju "maju" dan "mandiri". Keberagaman

status IDM memberikan gambaran jelas tentang potensi dan tantangan pembangunan perdesaan di Kabupaten Batang. Desa-desa yang sudah Mandiri dan Maju dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, baik melalui sektor pertanian, pariwisata, maupun industri kecil. Sementara itu, desa yang masih Berkembang memerlukan intervensi lebih intensif, terutama dalam peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan memanfaatkan data IDM secara tepat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih terarah, seperti pengembangan klaster ekonomi berbasis potensi unggulan tiap wilayah.

Mulai tahun 2025, pemerintah menerapkan Indeks Desa sebagai alat ukur tunggal untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Indeks ini menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah digunakan sejak tahun 2016. Indeks Desa disusun berdasarkan enam dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Setiap dimensi memiliki sejumlah indikator yang mencerminkan kondisi faktual desa. Berdasarkan hasil penilaian, desa dikategorikan ke dalam lima status pembangunan, yaitu: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Penentuan status ini dihitung berdasarkan skor persentase dari seluruh indikator yang dikumpulkan. Hasil dari perhitungan sementara Indek Desa yang telah diverifikasi tingkat Kabupaten, ada peningkatan siginifakn terhadap jumlah desa mandiri menjadi 19 desa. Meskipun begitu capaian ini masih termasuk rendah, pemerintah kabupaten batang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah desa mandiri salah satunya dengan pembangunan desa berbasis kawasan (Kawasan Perdesaan) dan monitoring proses input indek desa yang dilaksanakan.

Dalam penentuan Indeks Desa perlu juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan desa yang mencakup upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketika pemberdayaan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, maka akan terjadi peningkatan pada

aspek-aspek yang diukur dalam Indeks Desa, seperti tingkat pendidikan, akses kesehatan, ketersediaan pelayanan dasar, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan kemandirian ekonomi desa. Berikut merupakan kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 2. 21 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi (%)	60	80	100	100	100
2	PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
3	Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
4	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	66	74	81	81	100

Sumber : Dispermasdes Kab. Batang (diolah)

Berdasarkan data kinerja pemderdayaan masyarakat dan desa diatas terlihat bahwa kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi menunjukkan peningkatan yang sangat baik, dari 60% pada tahun 2020 menjadi 100% sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas dan prestasi lembaga-lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan di tingkat desa. Sementara itu, indikator PKK Aktif dan Posyandu Aktif konsisten di angka 100% selama lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa peran kelembagaan perempuan dan layanan kesehatan dasar di tingkat desa berjalan sangat baik dan stabil. Adapun indikator Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat juga mengalami peningkatan signifikan, dari 66% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Artinya, desa semakin mampu menjaga dan merawat hasil program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan elemen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dua indikator kunci yang perlu diperhatikan adalah rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi. Rasio pajak daerah yang optimal mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

Pengendalian tingkat inflasi juga sangat penting untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di pasar lokal. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat serta menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha, berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan rasio pajak daerah dan pengendalian inflasi menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, serta memperkuat daya saing ekonomi suatu daerah di tengah dinamika perekonomian global saat ini.

A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak. Dalam konteks daya saing daerah, rasio ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan mendanai pembangunan. Tingginya rasio pajak daerah terhadap PDRB dapat mencerminkan kapasitas fiskal yang kuat, memungkinkan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat mengindikasikan tantangan dalam pengelolaan pajak dan potensi kehilangan peluang untuk meningkatkan daya saing wilayah tersebut di pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang rasio ini sangat penting bagi perumusan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat posisi kompetitif suatu daerah.

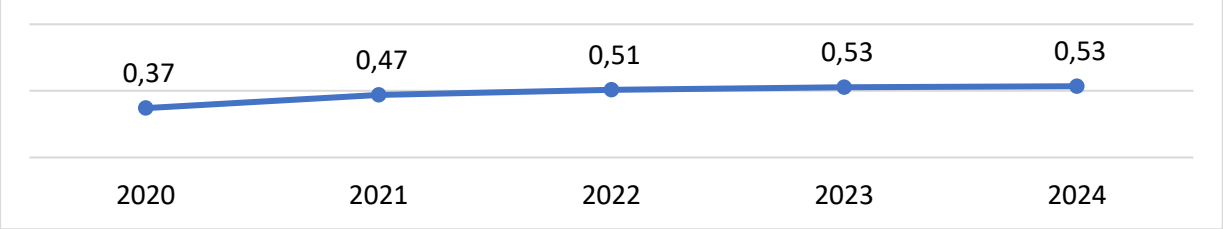

Gambar 2. 59 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Sumber : BPKPAD dan BPS 2025, data diolah

Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Batang dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB tercatat sebesar 0,37 persen dan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, mencapai 0,47 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, meningkat menjadi 0,51 persen pada tahun 2022 dan terus menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai 0,53 pada tahun 2023 dan 2024.

Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini berkontribusi pada peningkatan infrastruktur serta kualitas sumber daya manusia yang mendukung daya saing ekonomi daerah. Selain itu, stabilitas rasio pajak juga berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi makro Kabupaten Batang. Dengan pengelolaan yang baik terhadap pendapatan pajak dan penggunaan anggaran yang efisien, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang dapat berdampak signifikan terhadap daya saing daerah. Kenaikan biaya produksi akibat inflasi mengurangi profitabilitas perusahaan lokal dan menurunkan minat investasi. Selain itu, inflasi juga mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi konsumsi domestik. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya saing wilayahnya melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

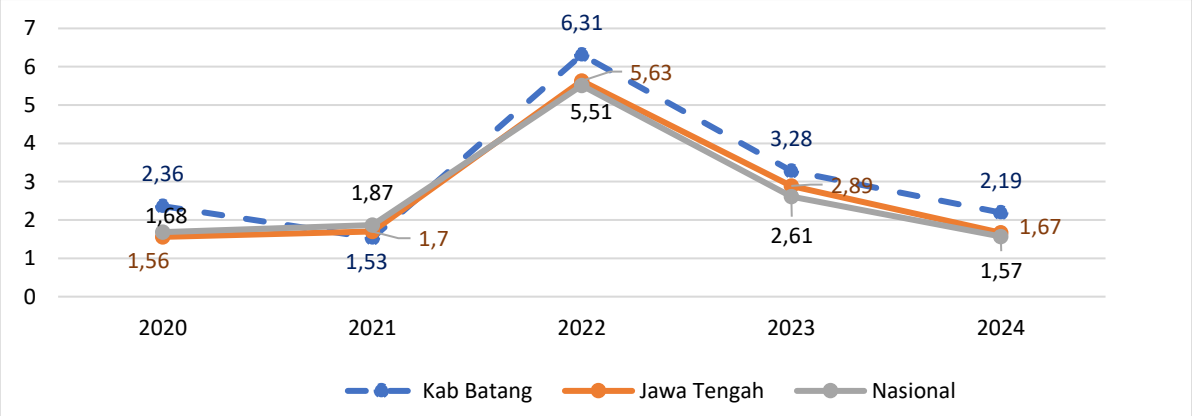

Gambar 2. 60 Perbandingan Inflasi Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2025

Perhitungan inflasi Kabupaten Batang sejak tahun 2020 menggunakan pendekatan *sister city* sebagaimana mengacu pada letak geografis yang berdekatan dan pola konsumsi yang hampir sama. *Sister city* yang ditentukan sebagai acuan perhitungan inflasi Kabupaten Batang adalah Kota Tegal. Hingga tahun 2024, Batang mengalami inflasi *year on year* (yoy) sebesar 2,19 persen, menurun sebesar 1,09 poin dari tahun 2023. Penurunan ini menandakan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Batang sudah berjalan dengan baik.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bergantung pada kualitas regulasi serta tata kelola pemerintahan yang diterapkan. Regulasi yang adaptif serta tata kelola yang transparan dan berintegritas penting untuk menciptakan birokrasi yang responsif, efisien, dan akuntabel. Kabupaten Batang terus berupaya memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip *good governance* melalui penguatan regulasi, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan integritas aparatur negara. Indeks SPBE, kualitas pelayanan publik, serta kebijakan yang inklusif menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana reformasi tata kelola dijalankan secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada masyarakat.

Penilaian Integritas aparatur sipil negara dihitung melalui Indeks Integritas Nasional (IIN). Indeks Integritas Nasional adalah ukuran yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai tingkat integritas dan risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuan dari Indeks Integritas Nasional antara lain mengukur risiko korupsi di sektor publik, menilai kualitas integritas birokrasi dan pelayanan publik, serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Adapun capaian Indeks Integritas Nasional Tahun 2020-2024 tersaji dalam grafik berikut :

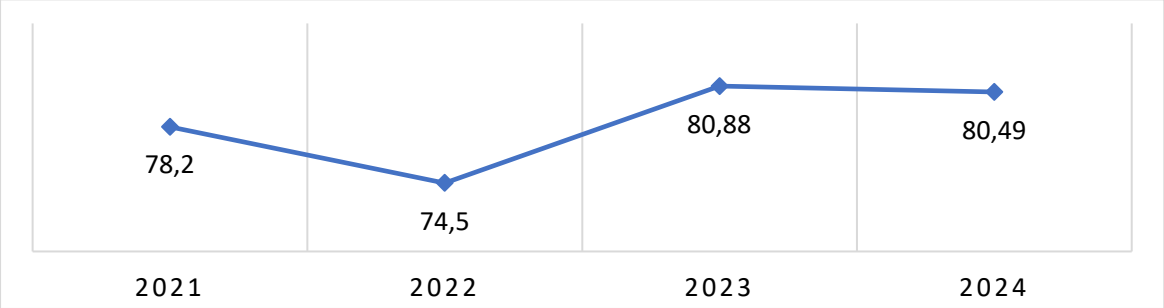

Gambar 2. 61 Capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : Inspektorat Kab Batang, 2025

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Batang memperoleh skor integritas sebesar 80,49. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya, Kabupaten Batang tetap menunjukkan performa yang baik dengan berada pada peringkat ketiga di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini menempatkan Kabupaten Batang dalam kategori terJAGA, yang mencerminkan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Batang dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut ditunjukkan melalui langkah-langkah konkret seperti pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan internal. Survei ini menggunakan instrumen strategis yang dirancang KPK untuk mengukur risiko korupsi dan kualitas integritas birokrasi pemerintah. Penilaian dilakukan terhadap berbagai kelompok responden, termasuk pegawai internal, pengguna layanan

eksternal, serta para ahli dan pemangku kepentingan. Indikator penilaian meliputi transparansi, integritas individu, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta budaya antikorupsi. Capaian ini merupakan bukti nyata dari keseriusan Kabupaten Batang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Selanjutnya perkembangan teknologi informasi saat ini harus mampu mendorong kinerja pemerintahan untuk lebih baik lagi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Selama periode lima tahun terakhir, capaian Indeks SPBE Kabupaten Batang menunjukkan fluktuasi, namun dengan tren peningkatan secara keseluruhan, sebagaimana data yang tersaji dalam grafik berikut:

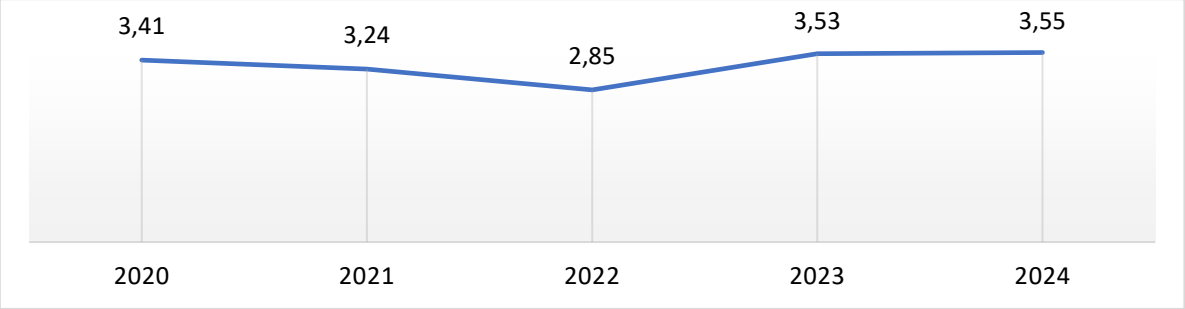

Gambar 2. 62 Indeks SPBE Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber : Kementerian PAN RB, 2021-2025

Pada tahun 2020, indeks SPBE berada pada angka 3,41, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 3,24 di tahun 2021, dan mencapai titik terendah dalam periode ini pada tahun 2022 dengan nilai 2,85. Namun demikian, kondisi tersebut berhasil dibalik dengan adanya peningkatan signifikan di tahun 2023, dimana indeks SPBE naik menjadi 3,53, dan kembali mengalami perbaikan pada tahun 2024 dengan capaian 3,55 dengan kategori sangat baik. Angka ini merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir dan mencerminkan penguatan upaya digitalisasi sistem pemerintahan di Kabupaten Batang. Secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan, data ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batang dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi layanan publik, dan transparansi birokrasi melalui

pemanfaatan teknologi informasi yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan semua perangkat daerah (PD) melalui optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Batang, hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesi (SDI) sebagai data penunjang termasuk hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral serta peningkatan layanan SPBE seperti peningkatan kualitas pengelolaan aduan masyarakat, tersusunnya regulasi tentang penyelenggaraan SPBE (seperti arsitektur SPBE, peta SPBE, dan penerapan manajemen data di perangkat daerah, serta Satu Data Kabupaten Batang), terbangunnya *data center* baru dan peningkatan layanan jaringan intra pemerintah, integrasi aplikasi berbagi pakai, literasi/sosialisasi terkait keamanan informasi. Meskipun demikian, nilai SPBE Kabupaten Batang 2024 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 4,42 dengan kategori memuaskan. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Batang Tahun 2023 sebesar 2,07 dengan predikat cukup dan kemudian meningkat menjadi 2,78 dengan predikat Baik pada tahun 2024.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) serta prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada menjadi 81,71 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kinerja birokrasi di Kabupaten Batang telah mengalami transformasi, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, efisiensi layanan, transparansi, serta digitalisasi pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi dalam 5 (lima) tahun terakhir tersaji dalam Grafik berikut:

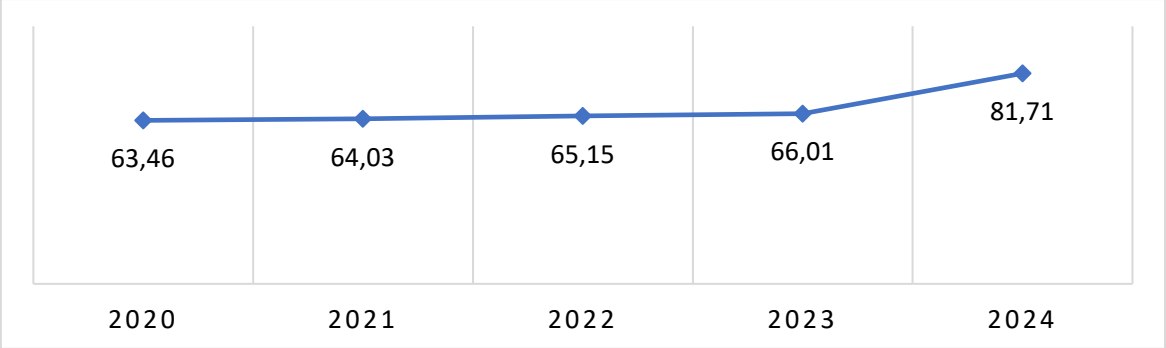

Gambar 2. 63 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kab Batang, 2025

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batang antara lain rendahnya inovasi pada sistem pemerintahan, sering terjadi perubahan intrumen penilaian kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja belum cukup maksimal dari segi waktu dan pemanfaatan ipteknya, serta terjadinya tumpang tindih regulasi.

Pelayanan publik yang berkualitas penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta mendorong terciptanya tata kelola yang baik. Pemerintah Kabupaten Batang terus berupaya meningkatkan standar pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian Indeks Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan pemerintah dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat secara adil, efisien, dan transparan. Data Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat pada tahun terakhir, sebagaiamana data tersaji dalam grafik berikut:

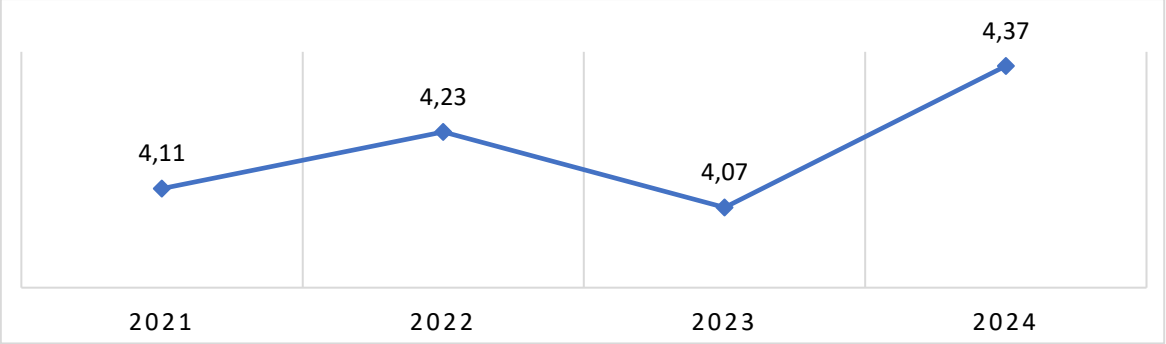

Gambar 2. 64 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Batang Tahun 2021-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, 2025

Peningkatan pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik, baik dari aspek kecepatan layanan, keterjangkauan, transparansi, hingga kepuasan masyarakat. Penurunan pada tahun 2023 kemungkinan disebabkan oleh kendala operasional atau adaptasi kebijakan, yang kemudian dapat diatasi di tahun berikutnya. Secara keseluruhan, IPP menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Batang terus diarahkan menuju kualitas yang lebih prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan pencapaian tertinggi dalam empat tahun terakhir terjadi pada tahun 2024.

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelesaian LHP sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 100 persen yang kemudian menurun menjadi 90 persen pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 mencapai 100 persen tindak lanjut temuan. Namun menurun pada tahun 2024 menjadi 85 persen yang disebabkan karena ketidaktepatan waktu penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah dan Desa. Meningkatnya kinerja pengawasan juga ditunjukkan oleh predikat WTP atas laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir dengan semua temuan dari BPK-RI sudah ditindaklanjuti dengan baik. Sebagaimana capaian urusan pengawasan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 22 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Batang, 2024

Pemerintah Kabupaten Batang juga berkomitmen memperkuat tata kelola data adminduk yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan pemeliharaan data kependudukan melalui pelayanan adminduk capil guna mewujudkan data yang valid sesuai dengan kondisi riil kependudukan. Data kependudukan yang valid menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan pengelolaan data yang baik, intervensi program pemerintah akan lebih tepat sasaran dan berdaya guna, terutama dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan SDM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Batang menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (admindukcapil) bagi seluruh masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program strategis yang menjamin kemudahan, keterjangkauan, dan keterbukaan akses layanan adminduk, termasuk bagi kelompok rentan, masyarakat terpencil, dan warga yang belum terdata secara lengkap. Dukungan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, inovasi layanan publik, jemput bola, integrasi sistem digital, serta kerja sama lintas sektor untuk memastikan setiap penduduk memiliki dokumen adminduk yang sah, seperti KIA, KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Pencatatan sipil, dan dokumen penting lainnya. Disdukcapil Kab. Batang menjamin semua penduduk tercatat dalam database kependudukan dan data berstatus aktif secara online dan dapat dijadikan dasar bagi pelayanan public lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan social, dan perbankan. Rasio kepemilikan eKTP cenderung meningkat pada periode 2020-2024, tahun

2020 sebesar 94,59 persen kemudian meningkat menjadi 99,54 di tahun 2024. Sebagaimana capaian Kepemilikan E-KTP dalam 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut ini :

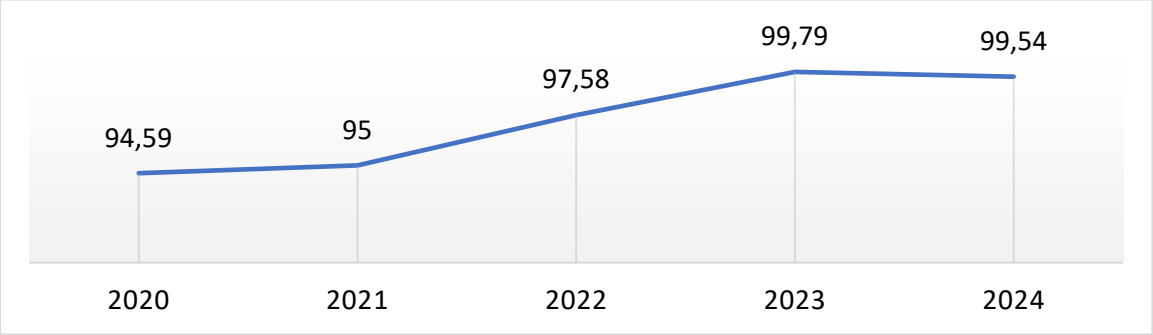

Gambar 2. 65 Rasio Penduduk berKTP elektronik Kabupaten Batang (%)
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2025

Kepemilikan akta kelahiran dalam periode lima tahun terakhir mengalami tren meningkat dari tahun 2020 sebesar 95 persen menjadi sebesar 97,52 persen pada tahun 2023 yang kemudian menurun menjadi 96,66 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan capaian akta kematian yang meningkat dari 78,91 persen tahun 2020 menjadi 99,75 persen ditahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai administrasi mulai meningkat namun kedepan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan diantaranya melalui sosialisasi dan meningkatkan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan.

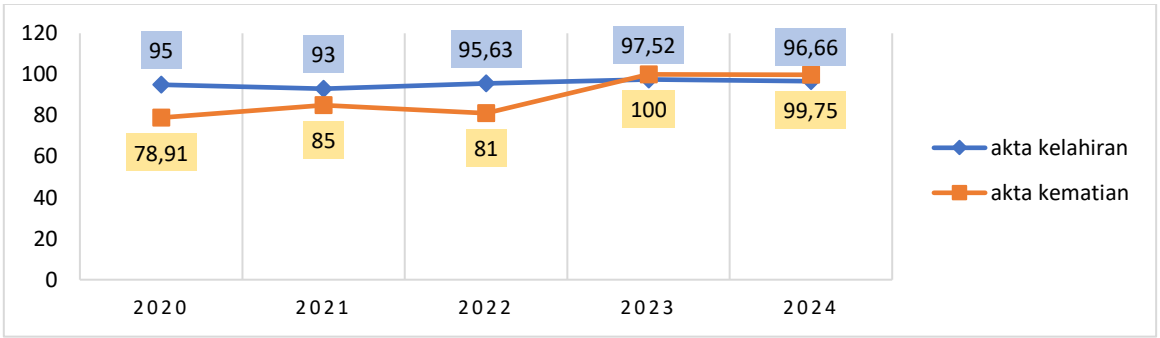

Gambar 2. 66 Rasio berakta kelahiran, berakta kematian Kabupaten Batang (%)
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2025

Sedangkan untuk kepemilikan akta nikah, hingga tahun 2024 semua pasangan di Kabupaten Batang sudah memiliki akta nikah dan pasangan ber akta cerai. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut ini :

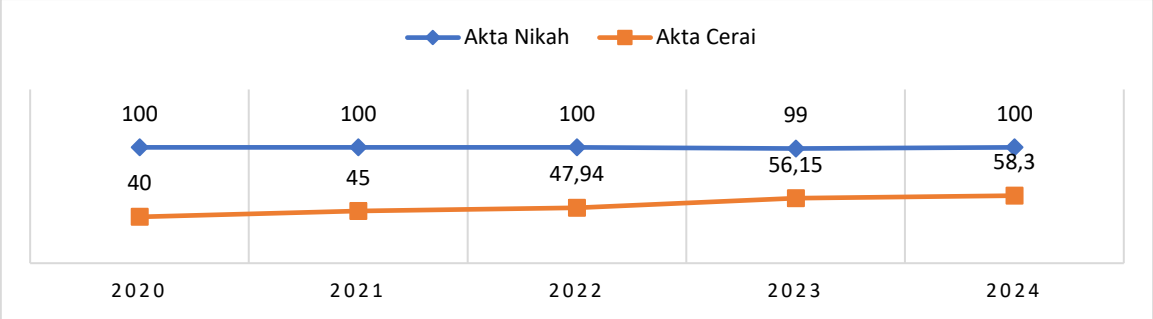

Gambar 2. 67 Rasio Pasangan Berakta Nikah dan Akta Cerai (%)

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang, 2025

Selanjutnya kepemilikan Kartu Identitas Anak dalam lima tahun terakhir konsisten mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan tingkat kesadaran orang tua dalam mengurus administrasi pada anak semakin meningkat. Berikut tersaji data capaian rasio anak yang memliki Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun 2020 hingga 2024 :

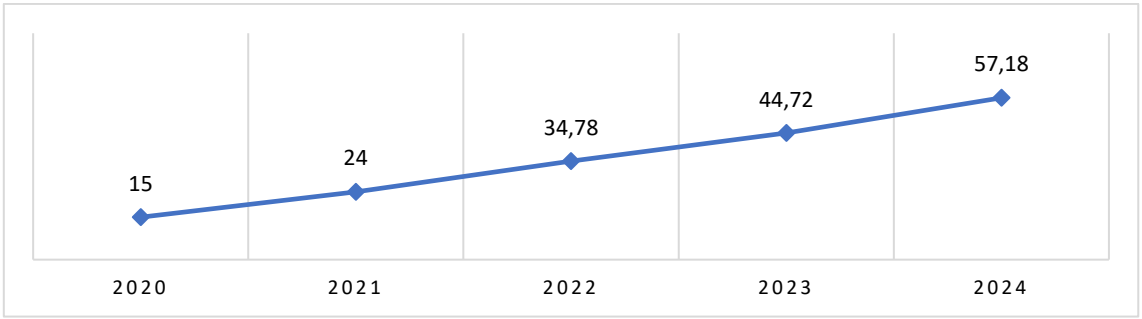

Gambar 2. 68 Rasio Anak yang memiliki KIA (%)

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2025

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan tahun 2020-2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5- 6 Tahun yang pendidikan PAUD	100	100	100	98,82	98,66
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau	100	100	100	87,86	95,86

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		menengah yang berpar-tisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
3	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	100	100	100	91,17	95,86
Kesehatan							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	96,43	93,64	94,83	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	99,49	99,6	99,78	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	99,39	99,3	99,36	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan	72,58	80,01	92,51	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	31,92	47,79	98,81	98,97	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	58,94	62,04	81,34	83,46	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	41,41	64,09	90,81	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41,04	34,76	55,59	65,8	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,26	94,7	100	99,57	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96,03	82,11	90,61	99,2	95,56

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	45,32	38,88	93,39	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	78,68	103,58	100	100	100
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	86,31	83,13	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperolehlayanan pengolahan airlimbah domestic	84,92	85,69	100	100	100
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100	0	0	100	100
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat							
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesipasiagaan terhadap bencana	3,99	100	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9,42	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
Sosial							
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang	Jumlah Warga Negera penyandang disabilitas	25,14	100	100	100	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	disabilitas terlantar diluar panti	yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	58,33	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	0	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negera/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	85	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Tabel diatas menyajikan capaian kinerja pelayanan dasar selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada Urusan Pendidikan, Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi warga negara usia 5–6 tahun menunjukkan tren yang sangat tinggi, mendekati angka universal. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, cakupan PAUD tercatat mencapai 100%, yang berarti seluruh anak usia 5–6 tahun telah mengakses layanan PAUD secara penuh. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 98,82%, dan kembali turun tipis di tahun 2024 menjadi 98,66%. Meskipun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, tingkat partisipasi PAUD tetap berada pada kisaran sangat tinggi dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak pendidikan anak usia dini. Penurunan kecil ini disebabkan karena indeks distribusi Guru yang masih sebesar 83,3% pada tahun 2025. Sementara itu Capaian partisipasi pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) bagi warga negara usia 7–15 tahun mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hingga 2022, partisipasi mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah pertama telah terlibat dalam kegiatan pendidikan sesuai jenjangnya. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga

91,17%. dan kembali meningkat pada tahun 2024, partisipasi kembali meningkat menjadi 95,86%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan pendidikan dasar dan respons cepat terhadap tantangan yang muncul pada tahun sebelumnya. Meskipun belum kembali ke angka maksimal, penurunan ini terkendala oleh capaian proporsi PTK Bersertifikat dan Proporsi PTK penggerak baik bagi SD/MI ataupun SMP/MTs

Pada urusan kesehatan, capaian persentase kinerja berbagai jenis pelayanan dasar kesehatan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pelayanan yang dipantau meliputi layanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, hingga pelayanan kesehatan pada berbagai kelompok usia seperti anak usia pendidikan dasar, usia produktif, dan usia lanjut. Selain itu, juga terdapat indikator pelayanan untuk penderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa berat, tuberkulosis, serta layanan bagi kelompok berisiko tinggi terhadap infeksi HIV. Dari data capaian, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan di hampir seluruh jenis pelayanan kesehatan, dengan beberapa indikator telah mencapai target 100% pada tahun 2023 dan 2024 sementara itu pada pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat baru mencapai 95,56%. Hal ini menunjukkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sesuai standar yang berlaku namun terkadang masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian awal yang bervariasi, komitmen yang kuat dan peningkatan berkelanjutan telah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menerima layanan kesehatan yang optimal sesuai kebutuhan mereka.

Selanjutnya pada urusan PUPR, capaian persentase kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyediaan layanan dasar terkait kebutuhan pokok air minum dan penyediaan rumah layak huni bagi warga negara, khususnya yang terdampak oleh bencana dan relokasi program pemerintah daerah, selama periode 2020 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan layanan pengolahan air limbah domestik berhasil mencapai target 100% mulai tahun

2022, menandakan tercapainya akses penuh bagi masyarakat terhadap layanan tersebut. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana juga konsisten mencapai 100% setiap tahun, mencerminkan komitmen kuat dalam pemulihan pascabencana. Sementara itu, fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah mengalami fluktuasi capaian, dengan capaian 0 pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali mencapai target 100% pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan upaya pemulihan dan perbaikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu pada urusan trantibum, capaian pelayanan pada urusan ini telah mencapai 100%. Selanjutnya pada urusan sosial, capaian persentase kinerja pelayanan dasar dalam bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial pada periode 2020 hingga 2024 telah mencapai 100%. Jenis pelayanan yang dipantau meliputi rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, yang semuanya dilakukan di luar panti. Selain itu, juga diukur pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana.

Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi

Terjaminnya rasa aman di tengah masyarakat merupakan indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tegaknya hukum yang berkeadilan, kokohnya sistem keamanan nasional, dan berkembangnya demokrasi yang sehat. Rasa aman tidak hanya mencerminkan kondisi keamanan fisik, tetapi juga mencakup kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, perlindungan hak asasi, serta kehadiran negara dalam menjamin stabilitas sosial dan politik. Indeks Rasa Aman Kabupaten Batang menunjukkan angka sebesar 4,48 pada tahun 2023, dan mengalami penurunan tipis menjadi 4,47 pada tahun 2024. Meski penurunan tersebut terbilang sangat kecil, hal ini tetap mencerminkan adanya dinamika dalam persepsi masyarakat terhadap rasa aman.

Penurunan nilai indeks ini disebabkan oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi risiko bencana alam, seperti

banjir, tanah longsor, atau cuaca ekstrem, yang sempat terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Batang. Kondisi tersebut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keselamatan mereka secara menyeluruh, meskipun situasi keamanan umum (seperti kriminalitas atau ketertiban sosial) relatif tetap terjaga. Dengan demikian, meskipun capaian indeks tetap berada pada level yang tinggi, penurunan ini memberikan catatan penting bahwa peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana menjadi aspek strategis dalam menjaga dan meningkatkan rasa aman masyarakat ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman tidak hanya ditentukan oleh aspek keamanan konvensional, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengantisipasi dan merespons risiko bencana secara cepat dan efektif.

Selain itu, angka kriminalitas juga menjadi indikator penting untuk membaca tingkat rasa aman masyarakat sekaligus efektivitas kinerja aparat penegak hukum dan sistem perlindungan sosial di suatu daerah. Angka kriminalitas dapat juga disebut sebagai risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk. Berikut disajikan kondisi kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2020-2024:

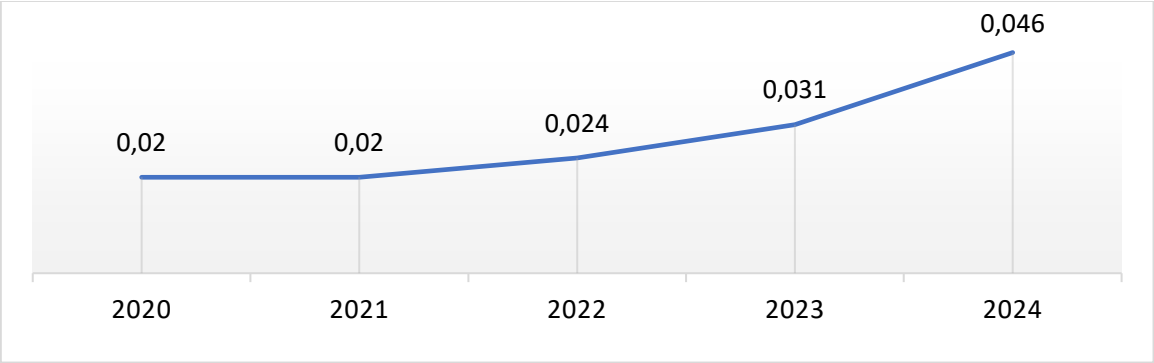

Gambar 2. 69 Angka Kriminalitas Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: Satpol PP Kab. Batang, 2025

Berdasarkan grafik di atas, data angka kriminalitas Kabupaten Batang menunjukkan adanya tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat kriminalitas tercatat sebesar 0,02, relatif stabil dan rendah. Namun, mulai tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 0,024, kemudian meningkat signifikan menjadi 0,031 pada tahun 2023, dan mencapai 0,046 pada tahun 2024. Fluktuasinya kondisi kriminalitas di

Kabupaten Batang masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sedikit meningkat, namun kondusivitas di Kabupaten Batang masih cukup terjaga.

Sementara itu, capaian Indeks Reformasi Hukum juga menjadi indikator penting dalam menilai seberapa jauh kebijakan, kelembagaan, serta pelaksanaan hukum di daerah telah bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman. Melalui peningkatan kualitas regulasi, penyederhanaan birokrasi hukum, serta penguatan kapasitas aparatur penegak hukum, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ruang yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut data capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Batang Tahun 2022-2024:

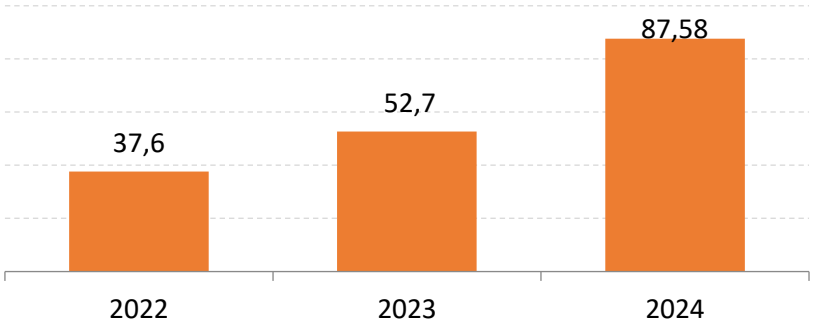

Gambar 2. 70 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Batang Tahun 2022-2024

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, 2025

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Batang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2022 indeks berada di angka 37,6, terjadi peningkatan cukup pesat ke angka 52,7 pada tahun 2023. Kemudian capaian indeks kembali meningkat menjadi 87,58 pada tahun 2024 menandakan bahwa Kabupaten Batang telah berada pada tahap matang dalam pelaksanaan reformasi hukum di tingkat daerah. Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membenahi sistem hukum yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola hukum yang berkeadilan sekaligus mendukung pembangunan demokrasi yang kokoh di Kabupaten Batang.

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi di tingkat daerah diwujudkan melalui penguatan kerja sama antardaerah, promosi potensi unggulan daerah, serta peningkatan daya tarik investasi dan wisata sebagai bagian dari citra positif Kabupaten Batang di tingkat regional maupun nasional. Sementara itu, pertahanan berdaya gentar kawasan diwujudkan melalui upaya membangun masyarakat yang tangguh bencana, meningkatkan kesadaran bela negara, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagaimana salah satu indiaktor dalam poin ini antara lain Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan sejauh mana sebuah daerah mampu menciptakan lingkungan yang kompetitif, stabil, dan adaptif terhadap dinamika kawasan. Dalam konteks ini, daya saing daerah mencerminkan kapasitas institusi, efisiensi birokrasi, kualitas infrastruktur, stabilitas keamanan, hingga kesiapan teknologi dan inovasi. Kabupaten Batang terus berupaya memperkuat daya saingnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan konektivitas, serta penciptaan ekosistem pembangunan yang inklusif dan tangguh. Berikut capaian IDSD Kabupaten Batang tahun 2022-2024:

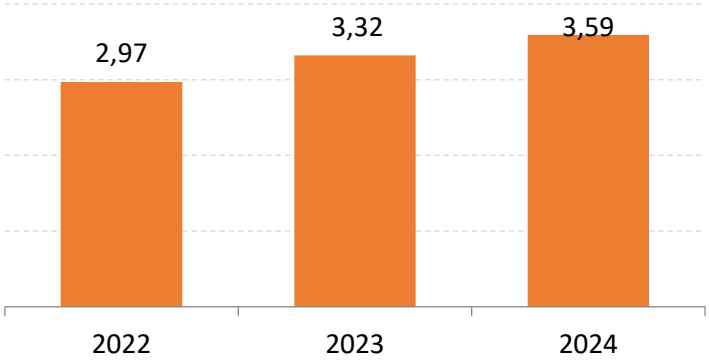

Gambar 2. 71 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022-2024

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah, 2025

Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Batang menunjukkan tren positif dalam penguatan daya saing daerah. Tercatat, IDSD Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan, dari 2,97 pada tahun 2022, naik hingga mencapai 3,59 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek, mulai dari kualitas infrastruktur, tata

kelola pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, hingga kesiapan menghadapi era digital. Penilaian IDSD dilakukan berdasarkan 12 pilar utama, yang mencerminkan berbagai aspek strategis pembangunan dan tata kelola daerah yaitu pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK (teknologi informasi dan komunikasi), pilar stabilitas ekonomi makro, pilar kesehatan, pilar keterampilan, pilar pasar produk, pilar pasar tenaga kerja, pilar sistem keuangan, pilar ukuran pasar, pilar dinamisme bisnis, dan pilar kapabilitas inovasi.

Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap perangkat daerah sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 24 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi	
				2023	2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	7,07	7,08
		Angka Harapan Sekolah	tahun	12,15	12,17
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	78,4	85,2
		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	66,14	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,7	90,21
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	76,45	76,5
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	123,7	98,4
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	10,28	13,99
		Angka prevalensi balita stunting	%	10,68	9,59
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,85	75,01
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	95,43	98,62
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	66,66	66,67
		Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	96	91,24
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	31,9	37,9
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	93,4	83,61

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi	
				2023	2024
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	77,7	79,6
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	76,25	80,2
		Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	80,48	87,53
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	92,67	80,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	60,45	67,3
4	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	81	87
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	81	84,32
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	88,42
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	0	69,7
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	74,96	70,57
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	64,52	68,43
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	86	85,31
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	77,01	77,01
		Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	11,067	11,07
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	25,51	25,6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,71	88,95
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	0	79,6
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	80,45	81,12
		Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	77,99	82,92
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	89,19	71,65
		Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	77,3	38,49
		Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	100	100
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	0	84,44
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	75,46	74,65
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,08	82,56
		Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100	82,56
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	3	0,355
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	77,02	77,6
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	74,59	71,95
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	76,55	76,6
		Persentase demo tertangani	%	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi	
				2023	2024
		Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	0	91,04
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	96	100
		Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	Indeks	0	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,89	81,53
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	73,96	73,8
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri, dan berfungsi sosial	%	100	100
		Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,71	87,27
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	76,14	76,95
11	Dinas Tenaga Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,75	88,82
		Tingkat Kesempatan kerja	%	93,94	94,33
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	32,43	71,02
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	76,45	76,1
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100	100
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,44	1,44
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	1,67	0,71
		Ratio KDRT	Rasio	0,0039	0,0004
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	0	0
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	0,0438	0,0163
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,54	85,87
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	73,76	73,76
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	90	56,5
		Indeks Kualitas Air	Indeks	50	56,5
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	80	84,61
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	80	68,21
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69	72,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	96,04
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	22	41,42
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0,55	1,079
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	0,77	2,59
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	0,46	10,7
		Persentase pkk aktif	%	50,3	55,3
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88	81,41
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	74,8	75

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi	
				2023	2024
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	92,13
		Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	310,65	84,46
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	21,5	2
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	77,06	77,4
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	0	0,00012
		Tingkat kelancaran dan keamanan lalu lintas	rasio	0	0,43
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,71	86,88
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	76,45	74,6
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	3,53	3,55
		Indeks Smart City	Indeks	3,4	3,59
		Indeks Keamanan Informasi	%	100	100
		Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	100	100
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	100	78,65
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	100	86,68
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	12,75	12,53
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	0	77,2
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	0	84,51
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	101,02	96,55
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	24	57,89
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,91	91,42
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	74,9	75,8
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	89	19,35
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	20	15
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	9	18,8
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	76,45	0
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	59	71
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	0	75,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,71	84,72
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	66,33	73,95
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	10,48	13,82
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70,8	74,05
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,33	88,26

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi	
				2023	2024
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	75,07	75,03
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	33,73	79,25
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	88,21	87,08
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	19,03	19,03
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	100	119,88
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	100	95,97
		Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	136,3	150,49
		Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	689,5	508,85
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	70	68,4
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	0,34	5,56
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)			
		a. Beras	Ton	230762	160298
		b. Jagung	Ton	54363	87.365
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	18746	123.023
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	19,03	19,03
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,04	0,04
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	86,71	93.96
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	76,45	77,01
24	Sekretariat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	93,18	97,27
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,33	88
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	79	80
		Nilai EKPPD	Skor	3,0823	3
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	82,986	82,78
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	76,95	78,55
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	0	0
		Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	0	0
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi	
				2023	2024
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,76	57,46
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	78,15	80,05
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,76	88,78
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	WTP	WTP
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	100
		Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	10,99	7,71
		Persentase Peningkatan PAD	%	-5,5	9,68
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	86,05	93,21
28	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	Skor	250	274,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	78	80,5
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	88,19	90,07
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	100	100
		Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	100	100
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	80	85,11
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	80	100
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	80	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	88,3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	77,8	80,2

Sumber : Bapperida, 2025

2.1.5 Kerja Sama Daerah

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif, Pemerintah Kabupaten Batang mendorong terbentuknya kerja sama yang sinergis dengan badan usaha. Kerja sama ini mencakup proses perencanaan yang transparan dan partisipatif, mulai dari studi kelayakan, penyusunan dokumen teknis, hingga pembentukan model pembiayaan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan mekanisme strategis yang memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Melalui skema ini, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mempercepat realisasi

proyek infrastruktur, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KPBU memberikan berbagai manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pemerintah, KPBU berperan penting dalam peningkatan kualitas infrastruktur, efisiensi pembiayaan, transfer pengetahuan dari sektor swasta, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan layanan publik. Sementara itu, badan usaha memperoleh peluang bisnis yang lebih besar, stabilitas pendapatan, peningkatan reputasi, serta akses ke sumber daya dan teknologi mutakhir, sekaligus berbagi risiko dengan pemerintah. Dengan melibatkan sektor swasta, KPBU memungkinkan pelaksanaan proyek yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memanfaatkan keahlian teknis dan inovasi dari mitra swasta, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi lebih efektif, terukur, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup:

(1) infrastruktur transportasi
(2) infrastruktur jalan
(3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi
(4) infrastruktur air minum
(5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat
(6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat
(7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan
(8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika
(9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
(10) infrastruktur konservasi energi
(11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan
(12) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan
(13) infrastruktur fasilitas sarana olahraga
(14) Infrastruktur Kawasan
(15) Infrastruktur pariwisata
(16) infrastruktur Kesehatan
(17) infrastruktur pemasyarakatan
(18) infrastruktur perumahan rakyat

(19) Infrastruktur bangunan gedung negara
(20) Infrastruktur ekosistem industri
(21) Infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

Pemerintah Kabupaten Batang tengah merancang inisiatif strategis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penanganan infrastruktur prioritas, khususnya dalam penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) berbasis teknologi cerdas. Proyek ini mengusung konsep *Smart Pole*, yaitu tiang lampu LED yang tidak hanya berfungsi sebagai penerangan jalan, tetapi juga terintegrasi dengan teknologi modern seperti deteksi polusi udara, sistem pemantauan CCTV, dan sensor deteksi banjir. Integrasi ini mendukung aspek keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan, sejalan dengan regulasi dari sektor perhubungan terkait standar kelengkapan jalan, yang mencakup penerangan, rambu, marka, dan sistem pemantauan lalu lintas.

Melalui kerja sama KPBU, Pemerintah Kabupaten Batang berusaha menghadirkan infrastruktur yang efisien energi dan mendukung pengelolaan kota yang lebih cerdas. Proyek ini tidak hanya mendorong inovasi dan efisiensi melalui pelibatan sektor swasta, tetapi juga mempercepat realisasi infrastruktur yang mendukung sistem transportasi jalan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan keterlibatan aktif dari sektor perhubungan, proyek ini diharapkan dapat memenuhi standar jalan yang fungsional, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

Manfaat ganda dari proyek ini meliputi peningkatan keamanan lingkungan, penguatan mitigasi bencana melalui deteksi banjir secara *real time*, serta peningkatan kualitas udara yang dapat dimonitor secara langsung. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya listrik daerah melalui penggunaan lampu LED hemat energi dan menciptakan ekosistem digital yang menunjang pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. Dengan adanya rencana KPBU ini, Pemerintah Kabupaten Batang menunjukkan komitmen untuk membangun

infrastruktur cerdas dan berkelanjutan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selain melalui skema KPBU, Pemerintah Daerah juga menginisiasi berbagai sumber pendanaan alternatif non-APBD seperti pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR).* Pendanaan ini diarahkan pada program-program prioritas, termasuk penguatan infrastruktur, lingkungan, ekonomi, hingga sosial. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, seluruh pelaksanaan serta pelaporan penggunaan dana TJSP dilakukan melalui aplikasi SIJEMPOL-TJSP (Sistem Jejaringan Monitoring Pelaporan *Online* TJSP). Aplikasi ini memudahkan monitoring, memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan, serta memungkinkan masyarakat dan pemerintah memantau kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah secara *realtime*. Dengan langkah ini, Pemerintah Daearh berkomitmen untuk memperluas kolaborasi lintas sektor, sekaligus menghadirkan sumber dana berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan akuntabel.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri

Pemerintah Kabupaten Batang, secara resmi mengajukan kemitraan *Sister City* dengan Pemerintah Luar Neger. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama, berbagi praktik terbaik, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor-sektor utama yang menjadi kepentingan bersama. Dengan Sasaran dari Kerjasama ini antara lain:

a) Membina kerjasama bilateral dalam perdagangan, investasi, dan pembangunan industri.
b) Mempromosikan pertukaran keahlian dalam pengelolaan energi dan keberlanjutan lingkungan.
c) Mendukung kolaborasi dalam pertanian, perikanan, dan teknologi pangan.
d) Memungkinkan pengembangan bersama dalam promosi pariwisata dan pertukaran budaya.
e) Mendorong pertukaran pendidikan, kejuruan, dan pemuda.

f) Berbagi praktik terbaik dalam administrasi publik dan perencanaan infrastruktur.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan kerjasama Kabupaten Batang dengan Pemerintah Luar Negeri dengan lingkup antara lain:

a) Pembangunan Ekonomi: Fasilitasi investasi industri, Pertukaran delegasi bisnis, Kolaborasi UKM
b) Energi dan Lingkungan: Kerjasama energi bersih dan terbarukan, Riset bersama tentang pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi
c) Pertanian dan Perikanan: Program pengembangan bersama dalam akuakultur dan agroindustri, Pelatihan teknis dan transfer teknologi
d) Pendidikan dan Pelatihan: Kemitraan kelembagaan antara sekolah kejuruan dan universitas, Program pertukaran mahasiswa dan fakultas
e) Pariwisata dan Budaya - Promosi bersama destinasi wisata - Pertukaran acara budaya dan warisan.

2.1.6 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi

Pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat. Dalam kerangka perencanaan jangka menengah daerah, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Melalui dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi seperti Pembangunan fasilitas pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana pembangunan ini mencakup sektor-sektor prioritas seperti konektivitas jalan, infrastruktur air bersih dan sanitasi, energi, perumahan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Pembangunan Bendungan Kedunglanggar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan salah satu proyek prioritas yang mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya air di Kabupaten Batang dan sekitarnya. Bendungan ini direncanakan berfungsi sebagai penyedia air baku untuk mendukung perkembangan industri, sebagai sumber air bagi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong, serta sebagai penyuplai air irigasi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Kehadiran bendungan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ketersediaan air yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkesinambungan.

Pengembangan Pelabuhan Pantai Klidanglor Kabupaten Batang merupakan salah satu program prioritas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Pengembangan ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai menjadi pelabuhan perikanan nusantara, serta memperkuat kapasitas pelayanan pelabuhan agar kapal nelayan dapat bersandar dengan lebih baik dan mendukung kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Pelabuhan Batang juga ditetapkan untuk ditingkatkan hierarki statusnya dari pelabuhan pengumpan regional menjadi pelabuhan pengumpul, dengan fokus pada peningkatan kapasitas untuk kegiatan sandar kapal dan bongkar muat barang. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan keberadaan pelabuhan dapat berfungsi optimal dalam mendukung sektor perikanan, perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, Pemerintah Pusat melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Sentul Kecamatan Gringsing sebagai salah satu proyek strategis sesuai amanat Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi Di Kawasan Industri Terpadu Batang (termasuk prioritas pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Luar Kawasan). Pembangunan TPST Sentul ditujukan untuk menangani peningkatan volume sampah di Kabupaten Batang wilayah Timur dan sekitarnya, yang seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi dari adanya KEK Industropolis Batang, memerlukan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Proyek ini dirancang tidak hanya sebagai fasilitas pemrosesan akhir, tetapi juga sebagai pusat edukasi, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah menjadi energi atau produk bernilai ekonomis.

Melalui pendanaan APBN, pembangunan TPST Sentul akan melibatkan perencanaan teknis menyeluruh, pembangunan infrastruktur fisik, dan penyediaan peralatan pengolahan sampah berbasis teknologi. Proyek ini diharapkan dapat mendorong implementasi ekonomi sirkular, serta mengurangi ketergantungan terhadap TPA konvensional. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra teknis, proyek TPST Sentul akan menjadi langkah konkret dalam menghadirkan solusi tata kelola sampah yang berkelanjutan.

Dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan PSN Lainnya

Dalam rangka mewujudkan sinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen mendukung berbagai agenda strategis yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini mencerminkan peran penting daerah dalam menyukseskan pembangunan lintas-sektor dan lintas-wilayah yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan wilayah Kecamatan Gringsing diarahkan sebagai kawasan penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dengan peran strategis sebagai pusat aktivitas baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan ini diproyeksikan berkembang menjadi simpul perkotaan baru yang terintegrasi, dilengkapi dengan

infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, serta sistem transportasi yang memadai guna menunjang kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas tenaga kerja. Dengan pengembangan tersebut, Kecamatan Gringsing diharapkan berfungsi sebagai kawasan pendukung utama dalam memperkuat daya saing KEK Industropolis Batang sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perencanaan jangka menengah tahun 2026–2030, dinamika pembangunan menuntut adanya dukungan penguatan penataan ruang, infrastruktur dasar, serta penyediaan kawasan yang adaptif terhadap transformasi wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan perhatian khusus pada penguatan kapasitas wilayah dalam mendukung pelaksanaan program strategis, baik yang berskala nasional maupun regional.

Sebagai langkah antisipatif terhadap arah pengembangan ke depan, termasuk potensi penyesuaian ruang akibat kebutuhan infrastruktur strategis, Pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan kebijakan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen membangun sinergi lintas-sektor dan lintas-wilayah guna memastikan setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional..

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Analisis Kebijakan APBD Tahun sebelumnya

1.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 diartikan sebagai seluruh hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak

perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan mengacu pada peraturan yang sama, terdapat perubahan pada struktur Pendapatan Daerah yaitu pada rincian pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, rincian pendapatan transfer meliputi transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut dana perimbangan diatur sebagai bagian pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain dana perimbangan, komponen pendapatan lainnya yang juga dikelompokkan dalam jenis pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain: dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara komponen pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dikelompokkan ke dalam pendapatan transfer antar-daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan daerah Kabupaten Batang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp 1.733.087.893.276 pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp1.821.822.580.994,64 ditahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.750.957.035.202,01 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.806.800.185.808,65 dan meningkat kembali menjadi Rp 1.958.338.899.659 pada tahun 2024. Sebagaimana Realisasi Pendapatan selama kurun waktu 2020-2024 tersaji pada grafik berikut ini :

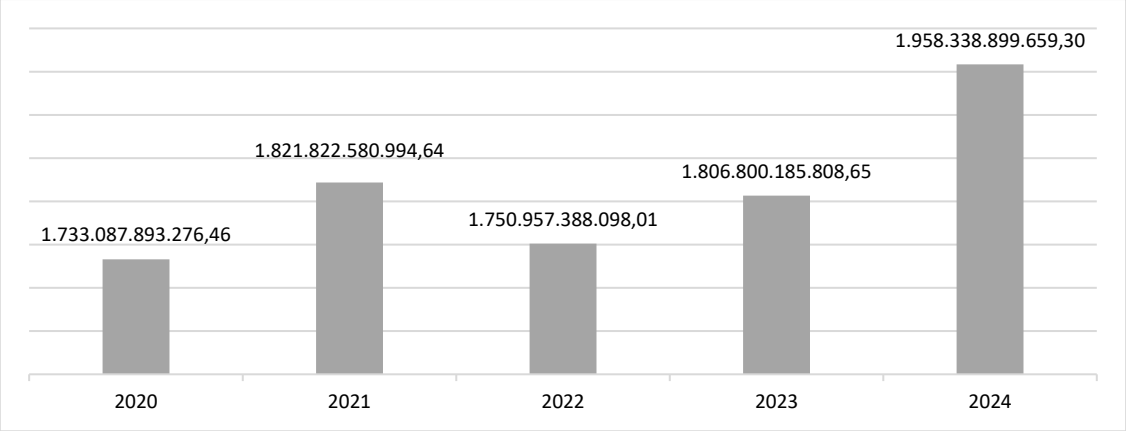

Gambar 2. 72 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020-2024
Sumber : BPKPAD Kab. Batang, 2025

Jika dilihat dari proporsi komponen Pendapatan Daerah, pendapatan daerah Kabupaten Batang didominasi oleh pendapatan Transfer dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2020 Pendapatan Transfer memiliki kontribusi sebesar 80,49% kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 77,90%. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 82,75% yang kemudian menurun menjadi 81,60% hingga tahun 2024. Sementara itu, derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Derajat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang pada tahun 2020 sebesar 14,85% meningkat menjadi sebesar 18,37% pada tahun 2024. Sedangkan kontribusi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,49% pada tahun 2019 turun menjadi sebesar 0,02% pada tahun 2024. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

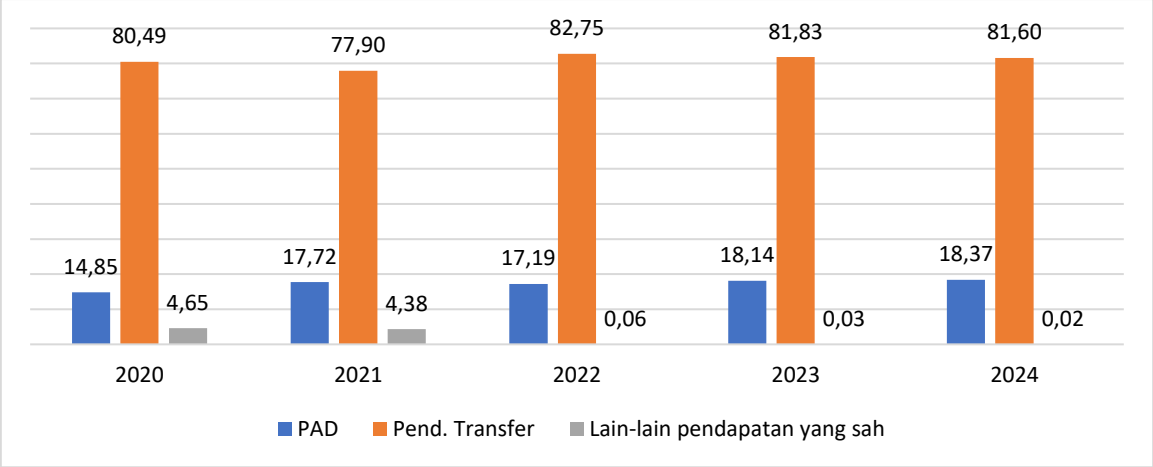

Gambar 2. 73 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (%)

Sumber : BPKPAD Kab. Batang, 2025

1.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Batang menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 belanja daerah sebesar Rp1.662.512.932.221,19, perkembangan belanja daerah mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.942.886.362.996,00. Selengkapnya belanja daerah dan Transfer Kabupaten Batang pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagai berikut :

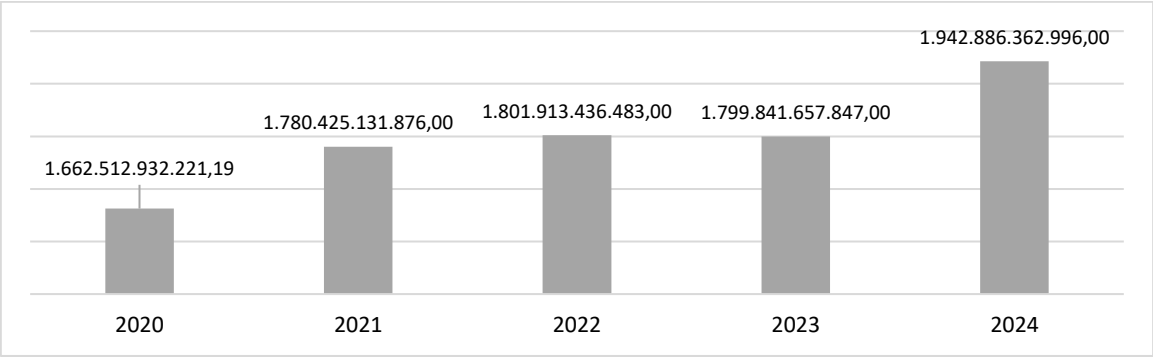

Gambar 2. 74 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Sumber : BPKPAD Kab. Batang, 2025

Komposisi terbesar Belanja Daerah terdapat pada komponen belanja Operasi dengan proporsi sebesar 70,70% ditahun 2020 meningkat menjadi sebesar 71,82% ditahun 2024, diikuti belanja modal yang cenderung fluktuatif pada kisaran 7,75-11,01% selanjutnya pada belanja transfer

cenderung pada kisaran 18,82-20,44%. Unsur belanja tak terduga proporsinya paling rendah bahkan di bawah 2%. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Batang tercantum pada gambar berikut :

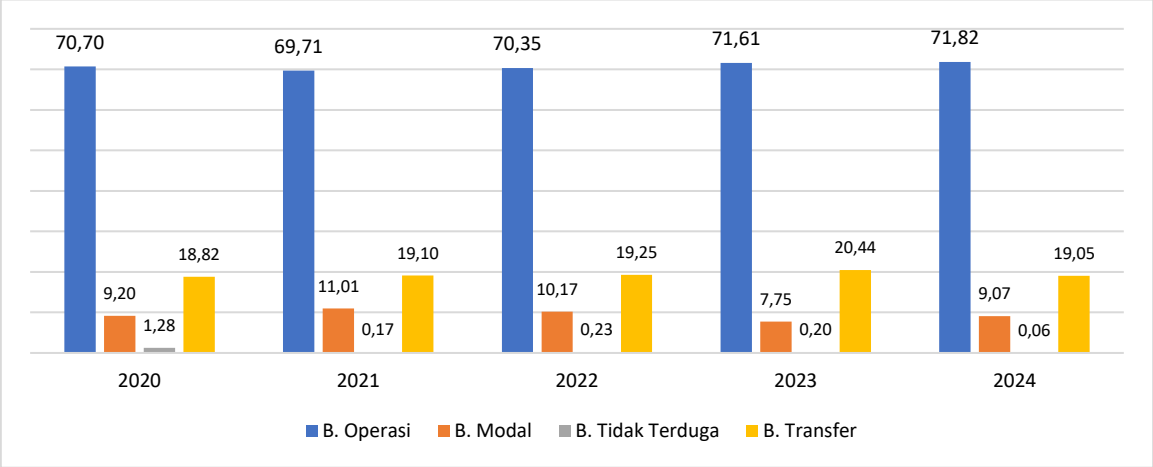

Gambar 2. 75 Realisasi Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Sumber : BPKPAD Kab. Batang, 2025

1.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Batang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pinjaman Dalam Negeri (Lembaga Keuangan) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Batang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi), Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri (Pemerintah Pusat), Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri (Lembaga Keuangan Bank), Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri (Lembaga Keuangan Bukan Bank), dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri (Lainnya). Sementara itu, Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Perkembangan penerimaan,

pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan netto Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 tersaji dalam grafik berikut ini :

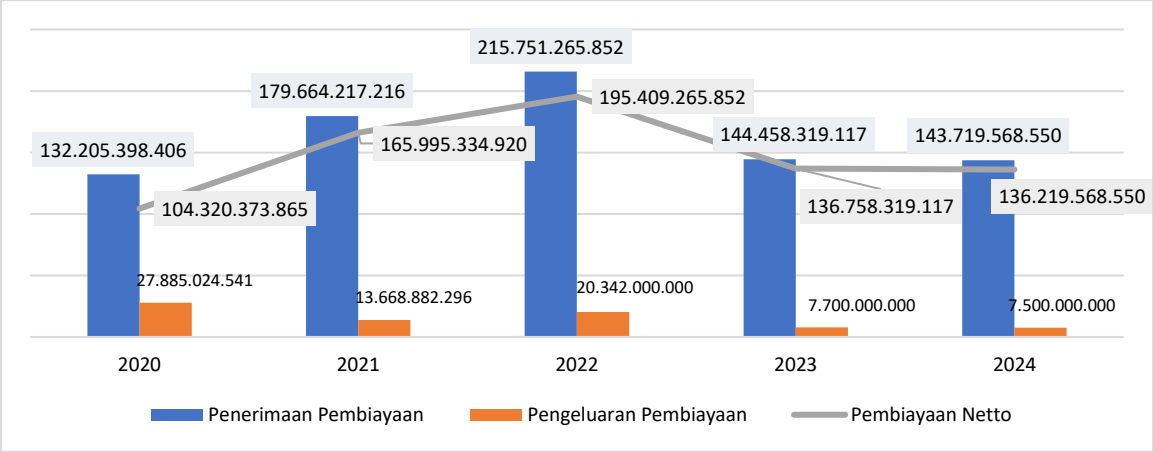

Gambar 2. 76 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2025

Dari gambar diatas terlihat bahwa perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Batang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dari sebesar Rp. 132.205.398.406 menjadi Rp. 215.751.265.851,77, kemudian hingga tahun 2024 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 143.719.568.550. Sementara itu, perkembangan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung mengalami penurunan yaitu dari sebesar Rp. 27.885.024.541 turun menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,00 pada tahun 2024. Perkembangan pembiayaan Neto Kabupaten Batang pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan di tahun 2020 hingga tahun 2022, yaitu dari sebesar Rp. 104.320.373.365 meningkat menjadi sebesar Rp. 195.409.265.851,77 pada tahun 2022, pembiayaan neto hingga tahun 2024 turun menjadi sebesar Rp. 136.219.568.550,43.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kabupaten Batang dalam periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, terjadi lonjakan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 207.392.784.038,77 dimana pada tahun 2019 SILPA hanya

sebesar Rp. 174.895.334.920, perkembangan SILPA kemudian menurun hingga tahun 2023 dengan angka sebesar Rp. 143.716.847.078,43 dan kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 151.672.105.213,73 Secara rinci perkembangan SILPA Kabupaten Batang tahun 2020-2024 dilihat pada gambar berikut :

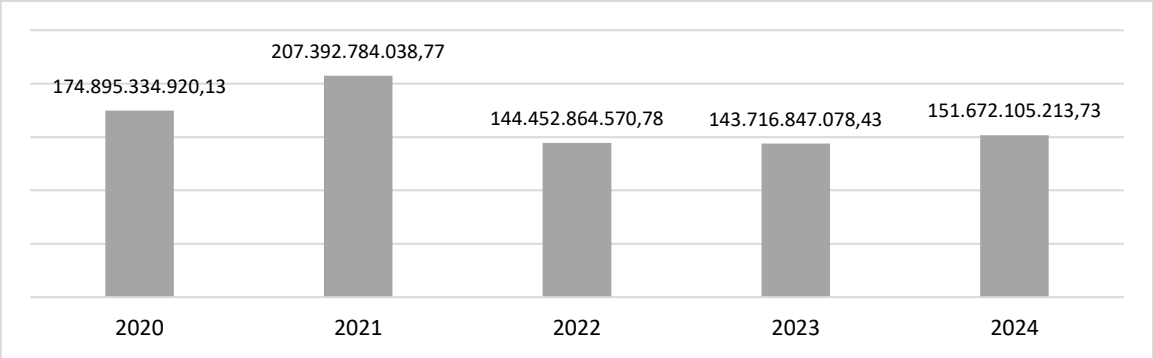

Gambar 2. 77 Perkembangan SILPA Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2025

Berikut tersaji tabel perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 :

Tabel 2. 25 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**	**1.733.087.893.276,46**	**1.821.822.580.994,64**	**1.750.957.035.202,01**	**1.807.569.985.808,65**	**1.952.458.265.589,30**
01.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**257.422.866.095,46**	**322.789.372.917,64**	**300.965.726.271,01**	**327.784.151.481,65**	**359.600.013.205,30**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	80.127.474.719,00	108.435.863.155,00	129.078.191.268,00	146.490.281.630,00	162.419.407.602,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	15.820.320.564,00	16.163.677.602,00	22.354.240.158,00	25.913.239.170,00	169.992.324.731,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	13.232.347.500,00	12.766.436.070,00	13.058.044.717,00	14.301.507.571,00	16.607.120.002,00
01.01.04	Lain-lain PAD yang disahkan	148.242.723.312,46	185.423.396.090,64	136.475.250.128,01	141.079.123.110,65	10.581.160.870,30
01.02	**Pendapatan Transfer**	**1.395.005.131.783,00**	**1.419.276.630.191,00**	**1.448.970.833.931,00**	**1.478.516.034.327,00**	**1.831.146.356.300,00**
01.02.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.008.861.912.901,00**	**1.068.002.486.995,00**	**1.096.299.986.931,00**	**1.105.133.484.669,00**	**1.452.173.365.406,00**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	28.767.704.135,00	62.161.899.343,00	41.909.578.554,00	43.594.414.126,00	38.301.702.000,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	9.255.959.201,00	3.558.815.529,00	4.189.088.638,00	2.524.982.000,00	1.986.175.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	743.088.164.000,00	737.685.667.000,00	734.763.251.000,00	772.544.083.000,00	849.769.534.054,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	227.750.085.565,00	264.596.105.123,00	315.438.068.739,00	286.470.005.543,00	323.347.850.436,00
01.02.02	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**279.903.722.000,00**	**221.954.156.235,00**	**208.032.695.000,00**	**223.279.438.000,00**	**233.066.294.000,00**
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)	86.872.377.000,00	26.237.653.000,00	7.839.277.000,00	-	5.544.353.000,00
1.2.3.1	Pendapatan Dana Desa	193.031.345.000,00	195.716.503.235,00	200.193.418.000,00	223.279.438.000,00	227.521.941.000,00
01.02.03	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**106.239.496.882,00**	**129.319.986.961,00**	**144.638.152.000,00**	**150.103.111.658,00**	**145.906.696.894,00**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.013.098.882,00	120.623.411.961,00	133.251.678.000,00	139.035.697.158,00	139.810.287.894,00
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	14.226.398.000,00	8.696.575.000,00	11.386.474.000,00	11.067.414.500,00	6.096.409.000,00
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**80.659.895.398,00**	**79.756.577.886,00**	**1.020.827.896,00**	**500.000.000,00**	**480.000.000,00**
01.03.01	Pendapatan Hibah	-	2.937.773.000,00	1.002.000.000,00	500.000.000,00	480.000.000,00
01.03.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			18.475.000,00		-
01.03.03	Pendapatan Lainnya	80.659.895.398,00	76.818.804.886,00	1.267.645.675.943,00	-	-

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.733.087.893.276,46**	**1.821.822.580.994,64**	**1.750.957.388.098,01**	**1.806.800.185.808,65**	**1.952.458.265.589,30**
	BELANJA OPERASI	**1.175.475.076.933,19**	**1.241.149.542.241,00**	**1.267.645.675.943,00**	**1.288.856.540.877,00**	**1.396.145.368.414,00**
02.01.01	Belanja Pegawai	736.483.205.203,00	736.685.014.763,00	728.689.787.535,00	727.519.485.187,00	812.411.658.223,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	333.721.676.434,19	409.192.008.978,00	440.412.460.908,00	439.445.809.479,00	473.423.659.758,00
02.01.05	Belanja Hibah	85.362.961.032,00	78.252.243.500,00	85.009.607.500,00	109.050.596.211,00	98.874.944.433,00
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	19.097.525.000,00	17.020.275.000,00	13.533.820.000,00	12.840.650.000,00	11.435.106.000,00
02.01.07	Bantuan Keuangan	809.709.264,00	-	-		-
02.02	**BELANJA MODAL**	**152.870.895.295,00**	**196.084.228.826,00**	**183.195.271.255,00**	**139.566.988.711,00**	**176.347.933.860,00**
02.02.01	Belanja Tanah	672.125.496,00	-	49.000.000,00	313.120.881,00	-
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	38.792.596.086,00	53.059.021.980,00	33.491.783.408,00	48.610.030.041,00	44.985.199.594,00
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	51.889.356.879,00	75.262.560.658,00	58.779.585.910,00	42.805.231.598,00	55.266.519.898,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.607.136.200,00	49.573.496.821,00	89.951.704.275,00	36.048.267.476,00	62.829.046.044,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.041.580.370,00	18.189.149.367,00	923.197.662,00	11.790.338.715,00	12.729.933.382,00
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	32.868.100.264,00	-	-		537.234.942,00
02.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**21.227.513.290,00**	**3.103.136.850,00**	**4.170.055.600,00**	**3.514.581.828,00**	**1.257.261.878,00**
02.03.02	**BELANJA TRANSFER**	**312.939.446.703,00**	**340.088.223.959,00**	**346.902.433.685,00**	**367.903.546.431,00**	**370.073.158.365,00**
2.3.2.1	**Belanja Bagi Hasil**	**312.939.446.703,00**	**340.088.223.959,00**	**346.902.433.685,00**	**10.251.862.223,00**	**370.073.158.365,00**
2.3.2.1.1	Bantuan Keuangan ke Desa	17.706.562.800,00	33.805.801.000,00	36.489.322.300,00		27.644.500.000,00
2.3.2.1.2	Dana Desa	193.031.345.000,00	195.716.503.235,00	200.193.418.000,00		227.521.941.000,00
2.3.2.1.3	Alokasi Dana Desa	92.939.041.903,00	100.642.298.724,00	100.643.068.481,00		103.720.824.392,00
2.3.2.1.4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.262.497.000,00	9.923.621.000,00	9.576.624.904,00	10.251.862.223,00	11.185.892.973,00
2.3.2.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**-**			**357.651.684.208,00**	
	JUMLAH BELANJA	**1.662.512.932.221,19**	**1.780.425.131.876,00**	**1.801.913.436.483,00**	**1.800.611.457.847,00**	**1.943.823.722.517,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**70.574.961.055,27**	**41.397.449.118,64**	**- 50.956.048.384,99**	**6.958.527.961,65**	**8.634.543.072,30**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**					**-**
03.01	**PENERIMAAN**	**132.205.398.405,86**	**179.664.217.216,13**	**215.751.265.851,77**	**144.458.319.116,78**	**143.723.655.078,43**
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.728.564.505,86	174.895.334.920,13	207.392.784.038,77	144.452.864.570,78	143.720.933.606,43
03.01.06	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	9.476.833.900,00	4.768.882.296,00	8.358.481.813,00		

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
03.02	**PENGELUARAN**	**27.885.024.541,00**	**13.668.882.296,00**	**20.342.000.000,00**	**7.700.000.000,00**	**7.500.000.000,00**
03.02.01	Penyertaan Modal Daerah	7.183.949.725,00	-	-	7.700.000.000,00	7.500.000.000,00
03.03	**PEMBIAYAAN NETTO**	**104.320.373.864,86**	**165.995.334.920,13**	**195.409.265.851,77**	**136.758.319.116,78**	**136.223.655.078,43**
03.04	**SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN**	**174.895.334.920,13**	**207.392.784.038,77**	**144.452.864.570,78**	**143.716.847.078,43**	**144.858.198.150,73**

Sumber : LRA Audited 2021-2024

1.1.1.4 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset Pemerintah Daerah, kondisi kewajiban Pemerintah Daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Analisis neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset Daerah untuk penyediaan dana pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan ekuitas suatu Pemerintah Daerah. Gambaran umum perkembangan neraca Daerah Kabupaten Batang pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset Daerah mengalami Peningkatan. Pada tahun 2020, nilai total aset Daerah mencapai sebesar Rp 2,909 triliun yang meningkat menjadi sebesar Rp 3,212 triliun pada tahun 2024. Sedangkan Jumlah Kewajiban Daerah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 65,237 miliar turun menjadi Rp. 36,52 miliar pada tahun 2022, dan hingga tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 68,56 miliar. Ekuitas Kabupaten Batang meningkat dari sebesar Rp. 2,84 triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 3,21 triliun pada tahun 2024. Sebagaimana Kinerja neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama kurun waktu Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 26 Neraca Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	274.669.532.708	288.079.529.451	213.825.719.096	219.176.497.711	232.497.511.355
	B. Investasi Jangka Panjang	131.804.754.085	145.479.419.216	165.952.751.808	176.135.036.709	184.636.008.117
	C. Aset Tetap	2.490.917.003.968	2.535.234.040.142	2.682.372.387.473	2.685.983.181.965	2.774.693.052.447
	D. Aset Lainnya	12.371.199.185	66.269.161.751	26.064.577.920	24.081.500.328	20.818.463.075
	JUMLAH ASET	2.909.762.489.945	3.035.062.150.560	3.088.215.436.297	3.105.376.216.713	3.212.645.034.993
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	65.237.751.266	53.052.796.431	36.528.021.151	51.548.481.629	68.564.600.616
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	65.237.751.266	53.052.796.431	36.528.021.151	51.548.481.629	68.564.600.616
3	EKUITAS					
	Ekuitas	2.844.524.738.678	2.982.009.354.129	3.051.687.415.146	3.053.827.735.085	3.144.080.434.377
	JUMLAH EKUITAS	2.844.524.738.678	2.982.009.354.129	3.051.687.415.146	3.053.827.735.085	3.144.080.434.377
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.909.762.489.945**	**3.035.062.150.560**	**3.088.215.436.297**	**3.105.376.216.713**	**3.212.645.034.993**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang Tahun 2025

1.1.1.5 Analisis Fiskal Daerah

- **Rasio Likuiditas dan Solvabilitas**

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Penyusunan neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Batang, akan dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 27 Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Batang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A.	**Rasio Likuiditas**					
	Aset Lancar	274.669.532.708	288.079.529.451	213.825.719.096	219.176.497.711	232.497.511.355
	Persediaan	24.313.436.171	35.524.121.138	35.573.676.805	33.253.460.813	39.419.647.026
	Kewajiban	65.237.751.266	53.052.796.431	36.528.021.151	51.548.481.629	68.564.600.616
1	Rasio Lancar (*current ratio)*	4,21	5,43	5,85	4,25	3,39
2	Rasio Cepat (*quick ratio)*	3,84	4,76	4,88	3,61	2,82
B.	**Rasio Solvabilitas**					
	Total Aset Daerah	2.909.762.489.945	3.035.062.150.560	3.088.215.436.297	3.105.376.216.713	3.212.645.034.993
	Total Hutang	65.237.751.266	53.052.796.431	36.528.021.151	51.548.481.629	68.564.600.616
	Total Ekuitas	2.844.524.738.678	2.982.009.354.129	3.051.687.415.146	3.053.827.735.085	3.144.080.434.377
1	Rasio Utang terhadap Ekuitas/ *Debt to Equity Ratio (DER)*	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
2	Rasio Utang terhadap Aset/ *Debt to Assets Ratio* (DAR)	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2025

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kabupaten Batang positif dan cenderung baik. Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1. Jika rasio masih diatas 1 menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress)* yang serius dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Meski cenderung ada penurunan, karena memang jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Batang cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio D*ebt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 2%. yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Batang, dilihat dari kinerja neraca daerah sangat sehat.

- **Rasio Kemandirian Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan.

Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari 14,85% pada tahun 2020 meningkat menjadi 18,42% pada tahun 2024. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 28 Rasio Kemandirian Daerah tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	257.422.866.095,46	322.789.372.917,64	300.965.373.375,01	327.784.151.481,65	359.778.837.359,30
Total Pendapatan Daerah	1.733.087.893.276,46	1.821.822.580.994,64	1.750.957.035.202,01	1.806.800.185.808,65	1.958.338.899.659,30
Rasio/Derajat Kemandirian/ Desentralisasi Fiskal Daerah	14,85	17,72	17,19	18,14	18,42

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2025

2.2.2 Proyeksi Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

- **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Batang diproyeksikan mengalami peningkatan ±23% selama 5 tahun, baik bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun pendapatan Lain-lain yang Sah. Beberapa asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dimana kinerja pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang selama periode 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami pertumbuhan re-rata sebesar 4,2%.
b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2020-2024 tumbuh 7,15%, Pendapatan Transfer sebesar 1,28% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar (-28,55%).
c. Pendapatan daerah Kabupaten Batang juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Daerah lainnya. sehingga perlu adanya upaya yang regresif untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berbagai upaya yang bisa ditempuh untuk mencapai target pendapatan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan penyebarluasan regulasi dan kebijakan terkait pendapatan asli daerah.
2. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, pengelolaan Basis Data Pajak, dan Penetapan Wajib Pajak Daerah.

4. Meningkatkan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dan intensifikasi Penagihan Pajak
5. Meningkatkan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mengintensifkan penarikan retribusi daerah.
7. Meningkatkan koordinasi dan pengajuan usulan program dalam rangka meningkatkan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

8. Kebijakan OPSEN PAJAK

Kabupaten Batang telah mengalokasikang anggaran untuk kegiatan Optimalisasi pengelolaan Opsen Pajak paling sedikit 0.75% dari target penetapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2025 (Rp88.000.000.000), anggaran yang telah di alokasikan sebesar Rp761.000.000,00

Kabupaten Batang telah melaksanakan Sosialisasi terkait Sengkuyung Prioritas dan launching pantang sambat (pajaknya batang bersama samsat batang) pada tanggal 24 Juni 2025 dengan narasumber Bupati Batang, PJ Setda Batang, Ka. UPPD Batang (diwakilkan), Kepala Cabang Jasa Raharja Pekalongan, Kasat Lantas Polres Batang (diwakilkan)dan di hadiri peserta dari semua kepala desa, lurah dan Kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Batang.

Kabupaten Batang juga telah melaksanakan upaya pendataan kendaraan bermotor yang Pilot Project awal semua ASN dan Non ASN yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, yang rencana kedepannya akan dilaksanakan untuk seluruh kendaraan bermotor yang ada di wilayah kabupaten Batang.

Terkait penangganan tunggakan PKB Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan pencetakan Tagihan Sengkuyung prioritas dan menyampaikan tagihan tersebut ke desa, serta melaksanakan evalaasi atas penyampaikan tagihan tersebut apakah telah di terima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Klausul upaya konkrit untuk peningkatan pendapatan Opsen Pajak

- Rapat Koordinasi dengan Samsat Batang
- Moitoring dan Evaluasi
- Melaksanakan Operasi Gabungan bersama Samsat Batang
- Melaksanakan penagihan tunggakan PKB melalui RT yang ada di Kabupaten Batang
- Jemput Bola (BPKPAD Hadir) atas pembayaran PKB melalui Pantang Sambat
- Melaksanakan PKS Samsat Corporate dengan mengikut sertakan Koperasi BPKPAD.

Tabel 2. 29 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**407.759.182.058**	**434.611.753.265**	**421.137.839.466**	**428.083.494.419**	**435.197.533.903**	**437.389.201.806**
Pajak Daerah	230.125.000.000	240.691.000.000	238.783.164.021	243.321.737.258	247.996.921.549	250.156.815.975
Retribusi Daerah	157.316.055.738	170.748.194.446	161.496.610.360	163.628.365.616	165.788.260.042	165.816.399.212
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.783.126.320	16.736.744.828	17.229.125.147	17.456.549.599	17.686.976.053	17.689.978.055
Lain-lain PAD yang Sah	3.535.000.000	6.435.813.991	3.628.939.938	3.676.841.946	3.725.376.259	3.726.008.564
PENDAPATAN TRANSFER	**1.566.288.258.378**	**1.640.341.107.500**	**1.734.143.868.860**	**1.819.774.115.562**	**1.906.575.117.109**	**1.994.574.675.492**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.851.006.578	1.553.849.256.700	1.642.706.617.060	1.728.336.863.762	1.815.137.865.309	1.903.137.423.692
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800	86.491.850.800	91.437.251.800	91.437.251.800	91.437.251.800	91.437.251.800
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**480.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Hibah	480.000.000	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	**1.974.527.440.436**	**2.074.952.860.765**	**2.155.281.708.326**	**2.247.857.609.981**	**2.341.772.651.012**	**2.431.963.877.298**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2025

- **Belanja Daerah**

Belanja Daerah tahun 2026-2030 Kabupaten Batang disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebijakan penggunaan belanja daerah selama kurun waktu tahun 2026-2030 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

   Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

   a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
   b) Gaji DPRD Kabupaten Batang.
   c) Tambahan Penghasilan PNS.
   d) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang Dan Jasa

   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

   a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   b) Pencapaian visi misi dan program unggulan Kepala Daerah
   c) Pemenuhan kebutuhan prioritas RPJMD Kabupaten Batang.

3) Belanja Bunga

   Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian *by name bg address* penerima hibah.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD

berkenaan, sehingga harus ada kepastian *by name bg address* penerima bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur dan layanan dasar permukiman.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Di dalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

Belanja Daerah Kabupaten Batang untuk periode tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, adapun besaran pertumbuhannya sebesar 16,67%. Pada tahun 2026 belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 2.127.452.860.765,- dan pada 2030 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp. 2.461.963.877.298. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 30 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA OPERASI	**1.488.676.679.523**	**1.528.294.091.819**	**1.544.797.521.965**	**1.614.121.202.560**	**1.670.258.011.729**	**1.715.150.337.972**
Belanja Pegawai	905.659.544.885	935.336.527.100	960.814.211.168	989.638.637.504	1.019.327.796.629	1.050.589.713.364
Belanja Barang dan Jasa	504.167.409.085	501.375.676.966	506.368.085.244	518.638.277.056	526.678.247.217	536.425.654.000
Belanja Hibah	69.005.437.553	77.286.237.753	67.770.937.553	96.000.000.000	114.407.679.884	118.290.682.608
Belanja Bantuan Sosial	9.844.288.000	14.295.650.000	9.844.288.000	9.844.288.000	9.844.288.000	9.844.288.000
BELANJA MODAL	**170.283.413.975**	**207.231.514.303**	**261.130.240.211**	**279.924.002.856**	**313.227.963.168**	**354.526.863.211**
Belanja Modal Tanah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.119.970.223	27.870.228.118	57.019.970.223	59.019.970.223	60.519.970.223	64.019.970.223
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.572.307.077	75.304.778.136	85.477.070.866	87.677.070.866	90.677.070.866	106.053.470.908
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.907.212.675	91.236.901.387	116.201.775.122	131.218.037.767	159.871.998.079	181.871.998.080
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.233.924.000	11.941.106.661	1.781.424.000	1.408.924.000	1.508.924.000	1.981.424.000
Belanja Modal Aset Lainnya	350.000.000	778.500.001	550.000.000	500.000.000	550.000.000	500.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**12.000.000.000**	**12.000.000.000**	**16.000.000.000**	**18.000.000.000**	**20.000.000.000**	**22.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	12.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000
BELANJA TRANSFER	**363.567.346.938**	**379.927.254.643**	**369.353.946.150**	**369.812.404.565**	**370.286.676.115**	**370.286.676.115**
Belanja Bagi Hasil	19.743.886.738	21.041.005.230	25.530.485.950	25.988.944.365	26.463.215.915	26.463.215.915
Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200	358.886.249.413	343.823.460.200	343.823.460.200	343.823.460.200	343.823.460.200
Jumlah Belanja	**2.034.527.440.436**	**2.127.452.860.765**	**2.191.281.708.326**	**2.281.857.609.981**	**2.373.772.651.012**	**2.461.963.877.298**
Total Surplus/(Defisit)	**-60.000.000.000**	-52.500.000.000	-36.000.000.000	-34.000.000.000	-32.000.000.000	-30.000.000.000

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2025

- **Pembiayaan Daerah**

Proyeksi penerimaan pembiayaan Daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan Daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran bersumber dari Penyertaan Modal Daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 31 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2026-2030

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**70.000.000.000**	**60.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.000.000	60.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.000.000.000**	**7.500.000.000**	**14.000.000.000**	**16.000.000.000**	**18.000.000.000**	**20.000.000.000**
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	7.500.000.000	14.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000
Pembiayaan Netto	**60.000.000.000**	52.500.000.000	36.000.000.000	34.000.000.000	32.000.000.000	30.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2025

Berikut proyeksi APBD Kabupaten Batang Tahun 2026-2030 :

Tabel 2. 32 Proyeksi APBD Kabupaten Batang tahun 2026-2030

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN DAERAH**					
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**414.356.163.260**	**434.611.753.265**	**428.083.494.419**	**435.197.533.903**	**437.389.201.806**
	Pajak Daerah	234.377.210.000	240.691.000.000	243.321.737.258	247.996.921.549	250.156.815.975
	Retribusi Daerah	159.392.627.673	170.748.194.446	163.628.365.616	165.788.260.042	165.816.399.212
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.004.663.587	16.736.744.828	17.456.549.599	17.686.976.053	17.689.978.055
	Lain-lain PAD yang Sah	3.581.662.000	6.435.813.991	3.676.841.946	3.725.376.259	3.726.008.564
	PENDAPATAN TRANSFER	**1.649.657.344.714**	**1.640.341.107.500**	**1.819.774.115.562**	**1.906.575.117.109**	**1.994.574.675.492**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.558.220.092.914	1.553.849.256.700	1.728.336.863.762	1.815.137.865.309	1.903.137.423.692
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.437.251.800	86.491.850.800	91.437.251.800	91.437.251.800	91.437.251.800
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	**2.064.013.507.974**	**2.074.952.860.765**	**2.247.857.609.981**	**2.341.772.651.012**	**2.431.963.877.298**
2	**BELANJA DAERAH**					

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
	BELANJA OPERASI	**1.516.701.741.213**	**1.528.294.091.819**	**1.614.121.202.560**	**1.670.258.011.729**	**1.715.150.337.972**
	Belanja Pegawai	932.829.331.232	935.336.527.100	989.638.637.504	1.019.327.796.629	1.050.589.713.364
	Belanja Barang dan Jasa	506.022.684.429	501.375.676.966	518.638.277.056	526.678.247.217	536.425.654.000
	Belanja Hibah	68.005.437.553	77.286.237.753	96.000.000.000	114.407.679.884	118.290.682.608
	Belanja Bantuan Sosial	9.844.288.000	14.295.650.000	9.844.288.000	9.844.288.000	9.844.288.000
	BELANJA MODAL	**211.332.740.211**	**207.231.514.303**	**279.924.002.856**	**313.227.963.168**	**354.526.863.211**
	Belanja Modal Tanah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.019.970.223	27.870.228.118	59.019.970.223	60.519.970.223	64.019.970.223
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.477.070.866	75.304.778.136	87.677.070.866	90.677.070.866	106.053.470.908
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.201.775.122	91.236.901.387	131.218.037.767	159.871.998.079	181.871.998.080
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.033.924.000	11.941.106.661	1.408.924.000	1.508.924.000	1.981.424.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000	778.500.001	500.000.000	550.000.000	500.000.000
	BELANJA TIDAK TERDUGA	**14.000.000.000**	**12.000.000.000**	**18.000.000.000**	**20.000.000.000**	**22.000.000.000**
	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000	12.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000
	BELANJA TRANSFER	**359.979.026.550**	**379.927.254.643**	**369.812.404.565**	**370.286.676.115**	**370.286.676.115**
	Belanja Bagi Hasil	16.155.566.350	21.041.005.230	25.988.944.365	26.463.215.915	26.463.215.915
	Belanja Bantuan Keuangan	343.823.460.200	358.886.249.413	343.823.460.200	343.823.460.200	343.823.460.200
	Jumlah Belanja	**2.102.013.507.974**	**2.127.452.860.765**	**2.281.857.609.981**	**2.373.772.651.012**	**2.461.963.877.298**
	Total Surplus/(Defisit)	- 38.000.000.000	-52.500.000.000	- 34.000.000.000	- 32.000.000.000	- 30.000.000.000
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**					

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**50.000.000.000**	**60.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000	60.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**12.000.000.000**	**7.500.000.000**	**16.000.000.000**	**18.000.000.000**	**20.000.000.000**
	Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	7.500.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000
	Pembiayaan Netto	38.000.000.000	52.500.000.000	34.000.000.000	32.000.000.000	30.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2025

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Batang dalam lima tahun mendatang merupakan hasil analisis menyeluruh mengenai kondisi daerah yang mencakup aspek geografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum, serta berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun terakhir. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Batang bersifat lintas sektor, makro, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Permasalahan pembangunan yang masih relevan di Kabupaten Batang dalam lima tahun ke depan dapat dijelaskan per aspek sebagai berikut:

ASPEK GEOGRAFI

1. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi yang telah disajikan, diidentifikasi permasalahan pembangunan yaitu kerentanan lingkungan dan ketahanan daerah. Permasalahan ini ditunjukkan dengan beberapa capaian indikator pembangunan antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang selama periode 2020-2024 cenderung menurun yaitu dari 68,45 di tahun 2020 turun hingga 60,24 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap lingkungan semakin tinggi, baik dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Komponen penyusun IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan, menghadapi gangguan yang signifikan akibat peningkatan pencemaran, alih fungsi lahan, serta degradasi kawasan resapan dan daerah hijau.

Faktor penyebab penurunan kualitas lingkungan ini antara lain tingginya intensitas kegiatan industri dan pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan limbah yang belum optimal, maraknya penebangan pohon dan konversi lahan untuk permukiman atau pertanian intensif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem dan banjir turut memperburuk kualitas ekosistem, terutama pada wilayah pesisir dan daerah aliran sungai.

Meski pada tahun 2024 IKLH kembali meningkat menjadi 64,47, capaian ini masih berada di bawah kondisi awal tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan telah mulai memberikan hasil, namun belum cukup untuk mengembalikan kualitas lingkungan pada level yang optimal. Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi mengganggu ketahanan daerah, menurunkan produktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, serta mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah terintegrasi yang mencakup penguatan regulasi lingkungan, peningkatan pengawasan, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Batang.

2. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penurunan tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator bahwa telah terjadi degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan pembangunan yang mengurangi daya dukung dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat juga turut berkontribusi terhadap tingginya permintaan sumber daya alam, sehingga menimbulkan tekanan yang signifikan pada ekosistem. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas, daya dukung, dan daya tampung lingkungan yang tercermin pada menurunnya kualitas air, berkurangnya tutupan lahan, serta penurunan kualitas udara.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan antara lain alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi persyaratan izin yang telah diberikan, serta masih terjadinya pelanggaran tata ruang akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian. Selain itu, maraknya aktivitas pertambangan ilegal telah memberikan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem, khususnya kualitas air dan keberlanjutan sumber daya alam.

Perubahan iklim juga menjadi ancaman nyata yang memperburuk kondisi lingkungan, ditandai dengan meningkatnya suhu udara rata-rata, pola cuaca yang semakin anomali, serta meningkatnya intensitas kejadian cuaca ekstrem. Fenomena ini tidak terlepas dari tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan oleh kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak diimbangi dengan upaya penurunan GRK yang memadai.

Selain itu, masalah pengelolaan sampah yang belum optimal turut memperburuk daya dukung lingkungan. Lemahnya penegakan sanksi terhadap pembuangan sampah sembarangan serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Akumulasi persoalan ini, apabila tidak ditangani dengan serius, berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang.

3. Kerentanan daerah terhadap kebencanaan

Selain kerentanan lingkungan, kondisi geografis juga berpengaruh terhadap tingkat kebencanaan di suatu daerah. Kabupaten Batang memiliki delapan jenis potensi bencana dengan tingkat risiko tinggi, termasuk banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana, terutama karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Tantangan terbesar dalam upaya penanggulangan bencana adalah sifat bencana yang dapat terjadi secara mendadak, sehingga memerlukan sistem deteksi dini dan

respons cepat yang efektif serta literasi masyarakat mengenai kebencanaan dan cara mitigasi masih menjadi masalah yang perlu diatasi untuk meminimalkan risiko bencana.

4. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah

Ketahanan daerah juga perlu ditingkatkan terutama dalam hal ketahanan pangan, yang akan menjadi tantangan besar akibat peningkatan jumlah penduduk dan migrasi yang terjadi seiring dengan beroperasinya kawasan industri di Kabupaten Batang. Penjaminan keamanan, akses, dan ketersediaan infrastruktur pangan; pencegahan pemborosan pangan *(food loss dan food waste);* pengendalian harga pangan; serta penyediaan pangan lokal yang mandiri dan berkelanjutan menjadi tantangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah, terutama dengan adanya penurunan daya dukung pangan.

Ketahanan daerah juga dapat dilihat dari ketahanan karakter masyarakat dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Dinamika modernisasi dan globalisasi saat ini secara tidak langsung mempengaruhi kebudayaan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif dapat menghasilkan akulturasi karakter dan budaya, namun masalah muncul jika dampak tersebut bersifat negatif terhadap karakter dan budaya masyarakat. Hal ini tentunya dapat menyebabkan ketidaksesuaian terhadap norma, moral, etika, kebudayaan, dan tradisi masyarakat, serta menjadi tantangan dalam mempertahankan karakter daerah.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang meliputi sebagai berikut:

1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Belum Merata

Kesejahteraan masyarakat umumnya ditunjukkan dengan indikator kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Kabupaten Batang masih pada angka 8,73 persen pada tahun 2024. Pasca Covid-19, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang cenderung lambat. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar karena tidak memiliki

pendapatan/rendahnya pendapatan yang diterima menjadi permasalahan utama dalam mengatasi kemiskinan.

Berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial, cenderung memiliki dampak yang minim terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini juga mencerminkan belum terwujudnya inklusi sosial di seluruh elemen masyarakat, yang berkontribusi pada ketimpangan yang masih ada.

Kemiskinan dan ketimpangan adalah masalah yang kompleks dan tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang ekonomi. Dari segi Sumber Daya Manusia, kualitas pendidikan yang rendah terlihat dari rata-rata lama sekolah yang setara dengan tingkat sekolah menengah pertama kelas 1, masih adanya anak yang tidak bersekolah, serta ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan yang tersedia.

Selain itu, rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga menjadi salah satu tantangan dalam mengatasi kemiskinan, yang ditunjukkan oleh tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta kasus kekurangan gizi dan stunting. Di sisi lain, dari perspektif infrastruktur, kemiskinan juga terlihat dari adanya kawasan permukiman kumuh, rumah yang tidak layak huni, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang belum optimal.

Aspek demografi juga berperan dalam kemiskinan, dimana program Keluarga Berencana (KB) belum berjalan optimal. Sebagian masyarakat masih berpegang pada prinsip "banyak anak banyak rejeki" tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga, yang berdampak pada pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

Selain indikator kemiskinan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Di Kabupaten Batang, angka TPT pada tahun 2024 mencapai 5,67 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,78 persen. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya pengangguran ini antara lain adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidaksesuaian antara kompetensi atau keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selain itu, Permasalahan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Batang masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun terdapat penurunan angka dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan ekstrem tetap mencerminkan kondisi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, rumah layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi penyebab utama yang memperkuat lingkaran kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan bantuan sementara, melainkan membutuhkan strategi jangka panjang yang berkelanjutan, melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

2. Pembangunan Infrastruktur belum optimal

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu komitmen utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang bertujuan agar seluruh masyarakat di Kabupaten Batang dapat merasakan manfaat dari adanya pembangunan tersebut. Pembangunan yang merata cenderung berfokus pada infrastruktur, seperti jalan, jembatan, permukiman yang layak, dan fasilitas publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam pembangunan infrastruktur yang merata, penting untuk memperhatikan kondisi lingkungan serta tata ruang dan wilayah, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Terkait pembangunan infrastruktur, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adalah masih adanya irigasi dalam kondisi rusak, jalan yang juga mengalami kerusakan berat, masih adanya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh, *backlog* perumahan, serta pelayanan akses sanitasi, air minum, dan persampahan yang belum optimal. Selain itu, terkait dengan sektor perhubungan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan seperti penerangan jalan umum masih belum merata.

Selain memastikan infrastruktur yang memadai, perhatian terhadap kondisi lingkungan juga sangat penting. Di samping itu, masih ada masalah terkait sampah yang belum tertangani, yang disebabkan oleh pertumbuhan timbulan sampah yang tidak sebanding dengan perkembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selain itu, bank sampah yang sudah ada juga belum beroperasi secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya kemitraan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tetap menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah Kabupaten Batang.

ASPEK DAYA SAING

Permasalahan pembangunan daerah tidak hanya ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, tetapi juga perlu dianalisis secara mendalam dari aspek daya saing daerah. Daya saing merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta menarik investasi dan mendorong perekonomian secara berkelanjutan. Di Kabupaten Batang, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek daya saing masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang terarah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain mencakup hal-hal berikut:

1. Belum Optimalnya daya saing daerah

a. Daya saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu motor penggerak keberhasilan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM dan tenaga kerja, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator hasil pembangunan Sumber Daya Manusia. Dalam perhitungannya, IPM terdapat beberapa dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Batang telah menyentuh pada angka 70,73 serta meningkat 2,08 poin dari tahun 2020 hingga 2024. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Pada komponen kesehatan yang ditunjukkan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Hidup masyarakat Batang meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2024 AHH sebesar 75,01 tahun yang menandakan bahwa dari kelahiran bayi setiap tahunnya memiliki harapan hidup lebih tinggi dari tahun tahun sebelumnya. Meski begitu, kualitas pelayanan kesehatan harus tetap perlu ditingkatkan mengingat adanya perubahan pola lingkungan dan perilaku masyarakat. Permasalahan yang timbul akibat adanya perubahan pola lingkungan dan perilaku terhadap kesehatan antara lain Sistem kesehatan belum optimal dalam merespon berbagai perubahan, guncangan kesehatan serta resiko terjadinya pandemi, semakin banyaknya jenis penyakit menular, belum optimalnya deteksi dini dan mitigasi kesehatan dalam meminimalisir risiko penyakit, masih adanya stunting dan gizi buruk, perilaku hidup masyarakat dan pola konsumsi yang tidak sehat, serta jika dilihat dari segi infrastrukturnya, masih adanya ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.

Pada komponen pendidikan yang ditunjukkan melalui indikator Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga 12,17 tahun pada 2024. Namun pada komponen Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Batang masih cukup rendah walaupun meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 capaian RLS baru saja menyentuh pada angka 7,08 tahun, hal ini menandakan tingkat RLS di Kabupaten Batang setara kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari analisa diatas terlihat kesenjangan antara rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah yang diharapkan.

Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya angka putus sekolah serta kemiskinan masyarakat yang akan berimplikasi langsung terhadap kualitas tenaga kerja di Kabupaten Batang serta berkontribusi langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya dilihat dari komponen standar hidup layak ditunjukkan melalui indiaktor Pengeluaran perkapita disesuaikan yang dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pembangunan manusia tak lepas dari peran gender dan tenaga kerja. Beberapa permasalahan dalam pengarusutamaan gender di Kabupaten Batang antara lain Masih adanya ketidakadilan gender (marginalitas, subordinasi, stereotip, dobel burden dan kekerasan terhadap perempuan dan anak) serta masih adanya kesenjangan gender dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan pemanfaatan hasil pembangunan. Sedangkan pada sisi tenaga kerja masih terdapat beberapa permasalahan antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, kurangnya pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, serta ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan persyaratan kerja yang diminta. Hal tersebut mengakibatkan daya saing tenaga kerja lokal masih cukup rendah.

b. Daya saing ekonomi

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Kabupaten Batang, mengalami penurunan signifikan akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan upaya pemulihan yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang kembali meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tercatat sebagai yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, perekonomian Kabupaten Batang perlu terus didorong agar tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian kondisi makro ekonomi nasional dan global. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah masih dijumpai berbagai

permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan sektor-sektor unggulan yang berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Batang menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB dan terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tren ini diproyeksi akan terus berlanjut sejalan dengan adanya transformasi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, yang membuka peluang besar bagi masuknya investasi dan peningkatan aktivitas industri. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi agar pertumbuhan sektor ini dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan tenaga kerja lokal yang terampil. Tenaga kerja di Kabupaten Batang saat ini masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Selain itu, integrasi antara UMKM lokal dan industri besar masih menghadapi hambatan dari sisi kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar. Infrastruktur pendukung seperti transportasi umum, perumahan pekerja, dan logistik juga masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing sektor industri.

2) Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan

Di tengah meningkatnya arus industrialisasi daerah, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Batang tetap menjadi salah satu sektor unggulan, dengan kontribusi terhadap PDRB yang menempati posisi kedua setelah sektor industri pengolahan. Namun demikian, dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya produksi komoditas utama pada subsektor pertanian, yaitu padi. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya bencana banjir pada bulan November dan Desember tahun 2022 yang mengakibatkan gagal panen yang berakibat pada penurunan produksi padi dan ketersediaan beras di Kabupaten Batang. Penurunan pada tahun 2024 terjadi karena adanya alih fungsi lahan, yang mengakibatkan penurunan kerusakan lahan kualitas lahan pertanian

sehingga mengurangi produksi beras. Selain itu, Kurangnya penggunaan teknologi pertanian yang memadai dapat menghambat produksi.

Pada subsektor perikanan, penurunan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Batang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan antara biaya operasional dan harga jual hasil tangkapan. Harga ikan yang cenderung murah tidak sebanding dengan meningkatnya biaya melaut, terutama harga solar dan perbekalan. Kondisi ini membuat aktivitas penangkapan menjadi kurang menguntungkan dan berdampak pada menurunnya frekuensi melaut nelayan. Selain itu, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur juga turut memengaruhi ruang gerak nelayan. Dengan adanya pembatasan wilayah operasi, nelayan tidak lagi leluasa menjangkau lokasi-lokasi tangkapan potensial yang selama ini menjadi andalan. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan dan dukungan alternatif bagi nelayan di tingkat lokal. Faktor cuaca ekstrem, khususnya yang terjadi di awal tahun, turut memperburuk kondisi. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sebagian besar nelayan tidak dapat melaut dalam jangka waktu tertentu, sehingga berpengaruh langsung terhadap menurunnya volume tangkapan. Ketiga faktor ini, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terus menekan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan secara umum.

3) Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah serta sumber potensial dalam meningkatkan PAD. Selain itu, sektor ini turut berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pengembangan usaha kecil dan menengah yang mendukung aktivitas pariwisata. Secara umum, kinerja sektor pariwisata tercermin dari perkembangan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Berdasarkan data BPS, sektor ini menunjukkan tren peningkatan kontribusi terhadap PDRB dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan

pariwisata secara riil, mengingat jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan pada periode yang sama. Penurunan jumlah kunjungan tersebut berdampak langsung pada menurunnya PAD yang bersumber dari sektor pariwisata, terutama dari pengelolaan objek wisata yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan pariwisata yang lebih terintegrasi dan berbasis potensi lokal, guna mendorong peningkatan kunjungan wisata sekaligus optimalisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pada sektor pariwisata yang berhasil teridentifikasi melalui *Focus Group Discussion (FGD)* antara lain aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata masih terbatas, kapasitas SDM pariwisata masih rendah dan belum merata, minimnya strategi dan sarana promosi wisata yang terintegrasi dan efektif, kurangnya kolaborasi antar stakeholder pariwisata, pelestarian warisan budaya belum maksimal, rendahnya investasi dan dukungan dana untuk pengembangan pariwisata, minimnya data dan riset tentang tren dan minat wisatawan, kurangnya fasilitas pendukung wisata, potensi ekonomi kreatif belum diangkat secara optimal dalam pariwisata, serta kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata lokal.

4) Sektor UMKM dan ekonomi kreatif

Sektor UMKM dan ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun demikian, perkembangan sektor ini masih memerlukan optimalisasi pada berbagai aspek pendukung. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah rendahnya rasio kewirausahaan, yang menunjukkan masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha mandiri serta menjadi gambaran awal terhadap belum terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang kuat di daerah.

Beragam permasalahan masih dihadapi dalam pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, serta kesulitan dalam memasarkan produk secara berkelanjutan dan menjangkau pasar yang lebih

luas. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur pendukung, seperti *creative hub*, turut menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, lemahnya pengawasan terhadap mutu produk, serta tingginya persaingan antar produk sejenis juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi. Di sisi lain, sinergi antara pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dengan asosiasi pengusaha serta pihak-pihak terkait lainnya masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan agar sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

c. Daya saing iklim investasi

Iklim investasi di suatu daerah merupakan refleksi dari stabilitas ekonomi makro, kualitas infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang efektif. Dalam lima tahun terakhir, tren realisasi investasi di Kabupaten Batang menunjukkan fluktuasi, dengan kecenderungan penurunan hingga tahun 2022, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, nilai investasi yang masuk masih perlu terus ditingkatkan, terutama seiring dengan transformasi status KITB menjadi KEK Industropolis Batang. Perubahan status ini memberikan peluang strategis dalam menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal serta kemudahan berusaha lainnya.

Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya promosi dan *branding* daerah sebagai destinasi investasi unggulan, kurangnya sosialisasi regulasi terutama terkait dengan kawasan industri, kurangnya pemahaman investor terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta keterbatasan infrastruktur pendukung yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan investasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan terintegrasi untuk memperkuat iklim investasi, termasuk peningkatan kepastian hukum, penyediaan infrastruktur yang berdaya saing, serta

penguatan peran kelembagaan dalam memberikan pelayanan investasi yang cepat, transparan, dan akuntabel.

2. Tingkat Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Perlu Dioptimalkan

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mendasar dan sangat krusial dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan produktif. Kondisi Kamtibmas yang baik tidak hanya memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya.

Masyarakat mendambakan adanya jaminan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat individual maupun kolektif, yang dapat mengganggu ketenteraman dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Ancaman tersebut dapat berupa tindakan kriminal, kekerasan, maupun bentuk intimidasi lainnya yang menimbulkan rasa takut dan kecemasan. Ketidakamanan yang dirasakan masyarakat menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kehadiran dan efektivitas dalam menjaga Kamtibmas.

Situasi Kamtibmas yang kondusif juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam lingkungan yang aman, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan aktivitas ekonomi, berinovasi, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial secara optimal. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Upaya menjaga dan meningkatkan Kamtibmas harus ditempuh melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan peran aktif dari seluruh elemen, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun masyarakat itu sendiri. Sinergi yang baik dalam mencegah dan menangani potensi gangguan keamanan akan mendorong terciptanya rasa saling percaya dan rasa memiliki terhadap keamanan wilayah.

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kondusivitas suatu wilayah. Di Kabupaten Batang, angka kriminalitas menunjukkan tren yang fluktuatif dalam beberapa tahun

terakhir, namun mengalami peningkatan pada tahun 2024. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh maraknya aktivitas kelompok kriminal seperti gangster di beberapa wilayah, yang turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus-kasus pelanggaran hukum. Kondisi ini menjadi perhatian serius yang perlu direspons secara cepat dan terpadu melalui penguatan peran aparat keamanan, peningkatan kewaspadaan masyarakat, serta pendekatan preventif yang berbasis komunitas.

Selain meningkatnya aktivitas kelompok kriminal, salah satu isu yang turut mencoreng kondisi Kamtibmas di Kabupaten Batang adalah masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Dampak dari kekerasan anak tidak hanya dirasakan oleh korban secara pribadi, tetapi juga berimplikasi pada kualitas generasi penerus daerah. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berpotensi mengalami hambatan dalam perkembangan mental, sosial, dan akademik, bahkan berisiko mengulangi siklus kekerasan di masa depan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini membutuhkan intervensi menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, hingga komunitas lokal.

ASPEK PELAYANAN UMUM

Di Kabupaten Batang, terdapat berbagai permasalahan yang signifikan dalam aspek pelayanan publik, yang mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan belum berjalan secara optimal. Salah satu masalah utama adalah pelaksanaan pelayanan publik yang belum efektif, yang disebabkan oleh kapasitas SDM yang masih kurang memadai. Hal ini berimplikasi pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam pencapaian sasaran kinerja, yang menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan budaya organisasi juga masih rendah, sehingga menghambat proses inovasi dan perbaikan dalam pelayanan.

Rendahnya kemandirian keuangan daerah menjadi masalah lain yang krusial, di mana kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal, yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan program-program pelayanan publik.

Lebih lanjut, pengelolaan data dalam pemerintahan belum terintegrasi dengan baik, yang mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Menurunnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemerintahan juga menjadi tantangan, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan ini saling terkait dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merujuk pada kondisi atau aspek yang perlu diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan, mengingat dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa depan. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai kondisi atau peristiwa penting yang jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, dapat menghilangkan peluang jika tidak dimanfaatkan.

Karakteristik dari isu strategis mencakup hal-hal yang penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian, serta menentukan tujuan di masa depan. Oleh karena itu, untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih sebagai isu strategis.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang.

Rumusan isu strategis mencakup isu global, nasional, dan regional yang saling terkait dan terintegrasi.

1.1.1.6 Telaah Isu Strategis Global

Isu strategis global perlu menjadi perhatian setiap pemangku kepentingan termasuk pemerintah Kabupaten Batang. Beberapa isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Batang meliputi:

- Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diprakirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

- Disrupsi Teknologi

Pandemi COVID-19 secara tidak langsung meningkatkan penggunaan informasi teknologi untuk membantu kegiatan sehari-hari. Salah satu yang

paling penting adalah karena aturan untuk menjaga jarak fisik mengharuskan semua pertemuan dilakukan melalui konferensi video. Kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis juga sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih luas. Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan teknologi IT, khususnya di bidang telekomunikasi.

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi dengan sangat cepat dan menjadi lebih mudah bagi semua orang untuk menggunakannya. Perkembangan positif ini telah menyebabkan dunia industri teknologi informasi dan komunikasi mengalami agregat yang semakin besar. Ke depan, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemakai (user) tetapi juga menjadi pembuat (produsen), sehingga dapat bersaing secara global.

Namun Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies*.

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Disrupsi Teknologi yang berkembang akan mempengaruhi berbagai sektor seperti sektor manufaktur, sektor pendidikan, dan sektor lainnya yang akan memberikan inovasi pada berbagai aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, adanya disrupsi teknologi akan berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah yang akan membuka peluang baru pada percepatan

pembangunan ekonomi serta mendorong transformasi pada tata kelola kinerja pelayanan publik.

- Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (borderless) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara- negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 % pada tahun 2015 menjadi 20% pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya

- Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi

- Perubahan Iklim *(Climate Change/ Global Warming)*

Saat ini, semua orang memperhatikan masalah pemanasan global. Kerusakan ekosistem alam sebagai akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan adalah inti dari masalah pemanasan global . Dengan dampak yang signifikan bagi manusia dan lingkungan, seperti kekeringan, pemanasan global memerlukan antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia.

Protokol Kyoto, yang merupakan perubahan terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan hidup akan tetap baik. Negara-negara yang meratifikasi protokol setuju untuk mengurangi emisi dan pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau untuk bekerja sama dalam perdagangan emisi. jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework

Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui *"Katowice Climate Package"* yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Batang.

- Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif.

1.1.1.7 Telaah Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional juga perlu mendapat perhatian khusus di dalam rencana pembangunan daerah. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan

muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya perlakuan khusus dalam mengantisipasinya. Isu strategis nasional yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Batang beberapa diantaranya bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029.

Selanjutnya, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 menetapkan Kabupaten Batang sebagai lokasi strategis di Jawa Tengah untuk pengembangan kawasan perkotaan Pekalongan-Batang. Rencana ini mencakup penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan secara terpadu, pemenuhan layanan dasar seperti air minum dan penanganan limbah, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, terdapat fokus pada peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan. Beberapa inisiatif lain termasuk penataan permukiman kumuh, pembangunan rumah murah bagi pekerja dan generasi muda, serta pengembangan infrastruktur seperti TPST Regional Pekalongan-Batang dan SPAM Regional Pekalongan-Batang. Rencana ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan ketahanan banjir serta pengembangan koridor industri Batang yang meliputi sektor-sektor prioritas seperti industri mesin dan kendaraan bermotor. Infrastruktur pendukung lainnya juga akan dibangun untuk mendukung konektivitas daerah.

Selain itu, Kabupaten Batang juga termasuk ke dalam Lokasi strategis di Jawa Tengah sebagai Kawasan Swasembada Pangan dan Air. Salah satu proyek penting dalam rencana ini adalah pembangunan Bendungan Kedunglanggar, yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen sumber daya air dan mendukung pertanian berkelanjutan. Proyek ini juga mencakup rehabilitasi jaringan irigasi serta pengelolaan lahan pertanian yang lebih baik melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian. Selain itu, akan ada upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui modernisasi teknik pertanian dan promosi fasilitas pendukung bagi petani. Dengan demikian, rencana ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik tetapi juga pada peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan akses terhadap teknologi terbaru.

1.1.1.8 Telaah Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat di dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah belum optimal akibat rendahnya produktivitas sektor ekonomi dan kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Isu utama ke depan adalah menciptakan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi, yang mencakup pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas rata-rata nasional menjadi tantangan yang harus diatasi. Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang mencakup layanan dasar, kualitas sumber daya manusia, dan ketidakberdayaan ekonomi. Untuk menurunkan angka kemiskinan secara efektif, penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan empat prinsip utama: perbaikan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pembangunan inklusif.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah, sebagai lumbung pangan nasional, berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus memenuhi kebutuhan penduduk secara berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan perlu fokus pada

sarana prasarana pertanian, pengelolaan lahan, dan peningkatan produktivitas.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Pembangunan prasarana ini menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan perjalanan, serta mendukung distribusi barang dan jasa (logistik daerah). Selain itu, prasarana yang baik juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana merupakan isu strategis pembangunan Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan. Isu ini berfokus pada: 1) penanganan kerusakan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan pencemaran; 2) penanggulangan bencana terkait meningkatnya kejadian banjir dan tanah longsor.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat

Membangun kekuatan budaya ini menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi: di satu sisi, kehidupan modern perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan,

sementara di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga dapat mengancam nilai-nilai budaya lokal yang harus dilestarikan.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah transformasi tata kelola pemerintahan untuk mendorong efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Transformasi ini bertujuan menciptakan tata kelola yang dinamis dan adaptif, sambil tetap mematuhi asas dan mekanisme yang berlaku.

1.1.1.9 Isu Strategis Kabupaten Batang

Isu strategis daerah Kabupaten Batang selengkapnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan daya Saing Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Batang saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, isu kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja Kabupaten Batang yang mampu bersaing bukan hanya dalam lingkup nasional tetapi juga mampu menjawab tantangan global. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang optimal dalam setiap dimensi kehidupan serta meningkatkan kualtas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis keterampilan guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di kawasan industri.

2. Pengentasan Kemiskinan

Isu strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batang meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Selain itu, perlu adanya program pemberdayaan ekonomi yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses modal dan pemasaran. Pengembangan infrastruktur dasar, seperti kesehatan dan layanan sosial, juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi angka kemiskinan.

3. *Clean Industrial City*

Isu strategis dalam perwujudan "Clean Industrial City" di Kabupaten Batang terkait dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan *Batang Industrial Park* (BIP). Pengembangan kedua kawasan ini menerapkan praktik industri ramah lingkungan dan prinsip ekonomi hijau, seperti penggunaan teknologi bersih dan pengelolaan limbah yang efisien, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon. Pendekatan ekonomi hijau ini juga mendorong pertumbuhan yang inklusif secara sosial dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau baru yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan industri sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi hijau. Adanya KEK Industropolis Batang dan BIP, diharapkan dapat menarik investasi yang berfokus pada industri berkelanjutan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

4. Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim

Isu strategis berikutnya adalah bagaimana mengurangi degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim. Isu ini tidak terlepas dari kondisi dimana daya dukung dan daya tampung lingkungan yang saat ini mulai terlampaui. Sehingga degradasi terhadap lingkungan harus dikendalikan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Batang. Pengendalian ini didorong melalui dukungan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dan *circular economy*, termasuk kebijakan *green infrastructure* yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, efisiensi penggunaan energi dan air, serta perlindungan ekosistem. Kebijakan ekonomi hijau ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga

mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial secara luas.

Selain itu, salah satu tantangan penting yang perlu ditangani adalah **pengelolaan sampah**. Volume sampah di Kabupaten Batang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) semakin terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan sampah terpadu mulai dari pengurangan sampah di sumber, peningkatan sistem pemilahan, pemanfaatan kembali (reuse), daur ulang (recycle), hingga pemrosesan akhir yang ramah lingkungan. Penguatan peran masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah berbasis circular economy akan menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Batang.

5. Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah

Isu strategis dalam konektivitas wilayah untuk mendukung daya saing daerah di Kabupaten Batang meliputi pengembangan infrastruktur transportasi yang efisien, seperti jalan, jembatan, dan sistem angkutan umum, untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Selain itu, perlu adanya integrasi sistem transportasi yang memudahkan pergerakan barang dan orang, serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi antar sektor. Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat memperkuat jaringan ekonomi lokal, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan.

6. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam mendukung kenyamanan hidup masyarakat

Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Prasarana dan sarana yang dirancang dengan standar mutu tinggi akan memberikan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan akses bagi seluruh

lapisan masyarakat. Dalam penyediaannya, prinsip keberlanjutan harus menjadi prioritas, mulai dari pemilihan material yang ramah lingkungan, efisiensi penggunaan energi dan air, hingga pengelolaan limbah yang tepat. Dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan, pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat, bersih, dan tertata dengan baik

7. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata

Isu strategis dalam hal pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata di Kabupaten Batang meliputi pengembangan potensi ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan dan dukungan terhadap UMKM untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, promosi pariwisata yang berkelanjutan perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal, serta meningkatkan infrastruktur pendukung untuk aksesibilitas. Peningkatan konektivitas antar wilayah juga penting untuk memperluas pasar dan distribusi produk. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan merata.

8. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif

Isu strategis lainnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dimana kondisi Kabupaten Batang saat ini dapat dikatakan belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya pelayanan publik, rendahnya kemandirian keuangan daerah, kurangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan budaya organisasi dan terlambatnya pencapaian sasaran kinerja. Oleh karena itu, isu kedepan adalah bagaimana meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, mandiri dan *agile* di dalam menyikapi perkembangan dan perubahan. Sehingga penting untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi guna mendukung kinerja pemerintah secara lebih baik.

9. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Isu strategis Kabupaten Batang dalam ketahanan pangan yang berkelanjutan meliputi peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi modern dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk. Diversifikasi pangan juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman, sementara pengelolaan sumber daya air yang efektif diperlukan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi pengembangan sektor pertanian. Selain itu, penguatan sistem distribusi pangan dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat akan mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan.

10. Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah

Isu strategis Kabupaten Batang yang juga sangat penting adalah stabilitas ketentraman dan kondusivitas wilayah. Pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kondusivitas wilayah. Oleh karena itu adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan sinergitas Forkopimda dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah guna mendukung pencapaian pembangunan daerah.

2.3.3 Integrasi Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Sebagai upaya untuk memastikan keselarasan antara pembangunan berkelanjutan dan perencanaan jangka menengah daerah, dilakukan integrasi antara isu strategis yang diidentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025–2029. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan wilayah. Berikut hasil integrasi isu strategis KLHS RPJMD dengan isu strategis RPJMD sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel 2. 33 Integrasi Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu Strategis RPJMD

KLHS	RPJMD
Belum Optimalnya Perwujudan Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera	Pengentasan Kemiskinan
	Ketahanan pangan yang berkelanjutan
Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Cerdas, Sehat dan Mandiri Masih Terbatas	Kualitas SDM dan daya Saing Tenaga Kerja
Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata
Ancaman Degradasi Lingkungan, Kerentanan Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana	Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim
	Clean Industrial City
Ketimpangan Wilayah Akibat Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Belum Merata	Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah
	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam mendukung kenyamanan hidup masyarakat
Belum Optimalnya Kondusivitas, Penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Stabilitas dan Kondusivitas Wilayah
Kurangnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Dalam Merespon Transformasi Perubahan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2025

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025–2029, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pertama, masih belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera ditandai dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan serta penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Kedua, kualitas sumber daya manusia masih terbatas dalam aspek daya saing, kesehatan, dan kemandirian. Untuk itu, RPJMD menekankan peningkatan kualitas SDM serta daya saing tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan dan persaingan global.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya berkelanjutan dan inklusif. Arah pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Keempat, ancaman degradasi lingkungan, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta potensi bencana menuntut adanya strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan daerah diarahkan pada pengendalian degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim melalui pengembangan konsep Clean Industrial City yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan keberlanjutan lingkungan.

Kelima, masih adanya ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur dan akses pelayanan dasar yang belum merata. Untuk menjawab hal ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah, serta penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan guna mewujudkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.

Keenam, aspek kondusivitas wilayah, penegakan hukum, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah mencakup penguatan stabilitas dan kondusivitas wilayah untuk mendukung terciptanya iklim pembangunan yang aman, tertib, dan kondusif.

Ketujuh, kapasitas tata kelola pemerintahan masih terbatas dalam merespons dinamika transformasi pembangunan. Untuk itu, RPJMD menekankan pentingnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif sebagai landasan utama tercapainya tujuan pembangunan daerah.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1.Visi dan Misi

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang tahun 2025–2029 atau RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan perwujudan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode tahun 2025–2030. Dalam upaya mewujudkan arah pembangunan jangka menengah yang adaptif dan berkelanjutan, Kabupaten Batang mengusung *tagline* ***"Clean Industrial City"*** sebagai identitas sekaligus kompas pembangunan wilayah yang dimaknai sebagai berikut:

Clean Industrial City yang bermakna keseimbangan antara tiga dimensi utama pembangunan: kemajuan industri, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi komunitas lokal. Filosofi ini merespon tantangan pesatnya pertumbuhan kawasan industri yang tidak hanya membawa potensi ekonomi, tetapi juga risiko sosial dan ekologis. Dengan pendekatan yang transformatif dan kolaboratif, konsep ini menekankan bahwa industri bukan hanya pelaku pertumbuhan, melainkan mitra dalam menciptakan kota yang bersih, sehat, dan membahagiakan.

Secara umum ***"Clean Industrial City"*** diharapkan mampu menjembatani berbagai pendekatan: ***Green City*** yang menekankan aspek ekologis yang berfokus pada lingkungan hijau, ***Smart City*** yang berfokus pada digitalisasi dan teknologi cerdas, serta ***Sustainable City*** yang menyatukan ketiganya secara makro yang lebih afirmatif terhadap sektor industri, melalui pilar-pilar pembangunan yang mengedepankan pengelolaan lingkungan, pemberdayaan

masyarakat lokal, inklusi UMKM, transformasi digital, tata ruang berkelanjutan, investasi hijau, dan tata kelola kolaboratif.

Tagline "***Clean Industrial City***" menjadi filosofi pembangunan dalam perwujudan semangat kepemimpinan daerah yang mengakar pada potensi lokal namun berpandangan global. Ini adalah komitmen untuk menjadikan Batang bukan hanya sebagai kawasan industri, tetapi juga sebagai ekosistem kehidupan yang bersih, cerdas, manusiawi, dan berdaya saing. Dari filosofi diatas, ditetapkan visi pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2025–2029 sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batang dalam membangun daerah yang **MANDIRI** dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan, serta **BERDAYA SAING** di tingkat regional maupun nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah. Seluruh upaya pembangunan ini diarahkan untuk berkontribusi dalam mewujudkan **INDONESIA EMAS 2045**.

Makna dari Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

MANDIRI. Kemandirian daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi secara optimal, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, termasuk pemerintah pusat. Sebagai bagian dari otonomi dan desentralisasi, Kabupaten Batang harus mengembangkan kemandirian, khususnya mencakup pada pengelolaan ekonomi, penguatan sektor lokal, penyediaan layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Cerminan daerah yang mandiri mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indikator Keberhasilan dari frasa "Mandiri" yaitu dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan PDRB Perkapita.

DAYA SAING DAERAH. Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah atau wilayah untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal

peningkatan ekonomi, pembangunan, serta kualitas hidup masyarakat. Daya saing ini melibatkan berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan pemerintah, potensi alam, inovasi, dan sektor-sektor unggulan yang ada di daerah tersebut. Daya saing daerah sangat penting dalam menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, daya saing daerah juga berperan dalam pembangunan suatu daerah, karena daerah yang memiliki daya saing tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Indikator Keberhasilan dari frasa "Daya Saing Daerah" yaitu Indeks Daya Saing Daerah.

INDONESIA EMAS 2045. Kalimat "*menuju Indonesia Emas 2045*" pada visi Kabupaten Batang selaras dengan cita – cita Indonesia untuk menjadi negara maju dan berdaulat pada tahun 2045. Kabupaten Batang harus berkontribusi secara signifikan pada cita – cita nasional tersebut, salah satunya yakni mewujudkan Indonesia Emas melalui pemanfaatan bonus demografi dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pembangunan. Perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Indikator Keberhasilan dari frasa "Indonesia Emas 2045" yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tindkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kepala Daerah, dirumuskan delapan misi yang akan menjadi pedoman bersama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Batang. Delapan misi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1
Visi dan Misi Kabupaten Batang Tahun 2025 – 2029

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis

Agama dan budaya adalah dua aspek fundamental yang membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat. Dengan memperkuat kedua aspek ini, masyarakat akan memiliki landasan moral dan etika yang kuat, yang dapat mencegah konflik sosial dan degradasi moral dan menciptakan kondisi yang harmonis. Agama dan budaya menjadi pilar dalam kehidupan sosial karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi cara individu berinteraksi, berperilaku, dan membentuk identitas mereka dalam masyarakat

Lebih jauh, harmonisasi dalam masyarakat merupakan aspek penting untuk menjadi tolak ukur keberlangsungan kehidupan sosial. Kondisi lingkungan yang harmonis merepresentasikan kondisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Harmoni sosial memiliki peran penting untuk menciptakan stabilitas dan keamanan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Melalui penguatan nilai – nilai agama dan budaya yang moderat dan toleran yang

tercantum pada misi ini, masyarakat Kabupaten Batang diharapkan dapat terhindar dari paham radikal yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Misi 2: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah input utama dalam melaksanakan pembangunan daerah. Mewujudkan SDM yang berdaya saing melalui perbaikan akses, sarana, dan prasarnan kesehatan dan pendidikan secara menyeluruh merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Batang. Di era globalisasi, daya saing sangat ditentukan oleh kapabilitas SDM. Daerah dengan karakteristik SDM yang sehat dan terdidik akan lebih mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan global.

Kolaborasi antara investasi di sektor kesehatan dan pendidikan memiliki peran vital, diekspektasikan dapat mendorong pembangunan melalui perbaikan modal manusia. Masyarakat yang sehat lebih produktif dan pendidikan yang berkualitas akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Salain itu, perlu ditekankan bahwa aspek kesehatan dan pendidikan merupakan dua faktor utama dalam memutus siklus kemiskinan (lingkaran setan kemiskinan). Individu yang sehat dan terdidik memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan layak dan meningkatkan taraf hidupnya. Lebih lanjut, kesehatan dan pendidikan adalah pilar utama dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.

Misi 3: Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan

Pengembangan industri dan kawasan industri berbasis alih teknologi dan ramah lingkungan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat dan mendorong kemajuan daerah. Sektor industri menawarkan sejumlah potensi manfaat ekonomi karena nilai tambah dan *multiplier effects* yang ditawarkan. Dengan mengintegrasikan konsep industri

yang teknologi dan ramah lingkungan, maka pertumbuhan sektor industri diharapkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, minim polusi dan limbah; efisiensi energi dan air; mengurangi konsumsi energi; dan melindungi keanekaragaman hayatidan tetap memberikan produktivitas tinggi, memastikan kontribusi tinggi pada PDRB Kabupaten Batang.

Selain adopsi teknologi, perkembangan industri juga diprioritaskan mendukung hilirisasi. Melalui hilirisasi, komoditas mentah hasil pertanian dan perikanan tidak langsung di jual ke pasar, baik domestik maupun ekspor, tetapi diolah kembali menjadi barang yang memiliki nilai tambah lebih besar. Strategi hilirisasi akan mendukung tumbuhnya industri atau pelaku usaha baru karena menciptakan rantai nilai yang lebih panjang. Hal ini membuka peluang bagi industri lainnya untuk terlibat dalam setiap tahapan rantai produksi. Artinya hilirisasi akan membantu perbaikan PAD dan penguatan daya saing ekonomi daerah.

Misi 4: Akselerasi Ekonomi

Misi akselerasi ekonomi sejalan dengan rencana percepatan pembangunan nasional untuk menjadi negara maju 2045. Akselerasi ekonomi merangkum semua tujuan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, angka stunting, penurunan pengangguran, dan perbaikan pendapatan per kapita. Akseselerasi ekonomi adalah langkah strategi guna mendorong Kabupaten Batang menjadi daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing. Akselerasi ekonomi dapat melalui penguatan peran UMKM dan industri, serta harus diarahkan ke semua wilayah, baik desa maupun kota.

Akselerasi ekonomi dapat dicapai melalui beberapa strategi. Pertama, investasi dan inovasi ditengarai menjadi faktor kunci untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah syarat perlu untuk membentuk modal sedangkan inovasi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Faktor lainnya adalah pembiayaan. Aspek permodalan memiliki posisi fundamental untuk mendukung tumbuhnya UMKM yang menjadi salah satu mesin penggerak perekonomian. Selain itu, akselerasi ekonomi

membutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah sebagai perencana dan pengambil keputusan.

Misi 5: Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi Infrastruktur Sampai Ke Pelosok Desa.

Pemerataan dan interkoneksi infrastruktur sampai ke pelosok desa adalah langkah krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Batang. Pemerataan infrastruktur akan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Akses terhadap infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa dan membuka peluang pembangunan ekonomi inklusif. Infrastruktur yang baik akan mempermudah aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan melalui peningkatan aktivitas perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Lebih lanjut, akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, internet, air bersih dan sanitasi akan meningkatkan kesehatan masyarakat. Ketersediaan listrik akan memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih maju dalam pendidikan dan kesehatan. Konektivitas internet akan membuka akses informasi dan peluang belajar yang lebih luas. Interkoneksi infrastruktur yang baik akan memperkuat integrasi antar daerah. Konektivitas yang lebih baik akan mempermudah mobilitas penduduk, barang, dan jasa sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi.

Misi 6: Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan

Mewujudkan Kabupaten Batang yang tangguh dan berkelanjutan adalah misi penting dan relevan di era perubahan iklim saat ini. Daerah tindak hanya dituntut pada kemandirian ekonomi, tetapi juga kemampuan menghadapi risiko dampak lingkungan dan bencana alam. Perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola cuaca yang ekstrem, seperti peningkatan intensitas dan frekuensi badai, siklon tropis, dan hujan lebat. Kondisi ini mengancam aktivitas ekonomi seperti pertanian dan perikanan. Tidak hanya

itu, guncangan (shock) lainnya seperti pandemi di bidang kesehatan juga mungkin terjadi lagi di masa depan.

Kabupaten Batang harus tumbuh menjadi daerah yang mampu memitigasi seluruh risiko dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan bencana alam akibat perubahan iklim dan faktor lain yang dapat menjadi sumber guncangan. Mitigasi daerah rawan bencana, diversifikasi ekonomi, dan perbaikan infrastruktur adalah contoh beberapa langkah untuk menjadi daerah yang tangguh dan berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa kenaikan emisi karbon, banjir rob, banjir, tanah longsor, kekeringan, badai, abrasi, dan timbunan sampah merupakan beberapa isu lingkungan yang tampak saat ini.

Misi 7: Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial

Percepatan pengentasan kemiskinan merupakan agenda penting karena eksistensi penduduk miskin dapat menghambat proses pembangunan daerah. Penduduk miskin tersebar di desa dan kota, tapi dengan karakteristik yang berbeda. Hingga tahun 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batang tercatat 8,73 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,4 persen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya program ata kebijakan percepatan penurunan angka penduduk miskin. Meski demikian, perlu dicatat bahwa kemiskinan termasuk masalah multidimensi, melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik, sehingga tidak mudah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan upaya membentuk modal manusia yang berkualitas. Manusia adalah agen sekaligus objek pembangunan, termasuk dalam masalah kemiskinan. Pemerintah harus kolaborasi dengan masyarakat lokal dalam program penurunan penduduk miskin dan kelompok rentan, memahami kebutuhan – kebutuhan strategis mereka, tidak hanya fokus pada aspek pendidikan dan kesehatan saja. Lapangan kerja, akses permodalan, akses terhadap listrik dan air, dan internet, perbaikan tata kelola pemerintah, perbaikan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat adalah beberapa langkah strategis untuk

pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, baik penduduk miskin desa maupun kota.

Misi 8: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas

Kelembagaan merupakan faktor kunci dalam mengelola sumber daya daerah. Mewujudkan tata kelola (*governance*) pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas adalah langkah strategis untuk membangun daerah yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing. Tata kelola yang baik akan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan sebaliknya.

Tata kelola pemerintahan yang profesional akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, efisien, dan efektif. Melalui tata kelola yang profesional dan integritas, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Kondisi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Perlu diketahui bahwa tanpa kepercayaan publik, maka pemerintah akan kesulitan untuk menjalankan fungsinya.

Lebih lanjut, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif sangat penting di era globalisasi yang dinamis dan penuh perubahan seperti sekarang ini. Kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif terhadap perubahan lingkungan, baik dari internal maupun eksternal, adalah kunci untuk mendukung keberlangsungan program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang harus mampu merespons perubahan teknologi, globalisasi, perubahan iklim, dan tantangan-tantangan lainnya.

Dalam mendukung peningkatan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUD), Corporate Social Responsibility (CSR), jasa ekosistem), kolaborasi dan sinergi

antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait pendapatan, serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3.1.2.Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan penjabaran visi dan misi pembangunan yang telag ditetapkan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran operasional dari visi yang selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Batang tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian dirumuskan lebih rinci dalam bentuk strategi dan arah kebijakan hingga program prioritas yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Kabupaten Batang dalam periode 2025-2029 kedepan, Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

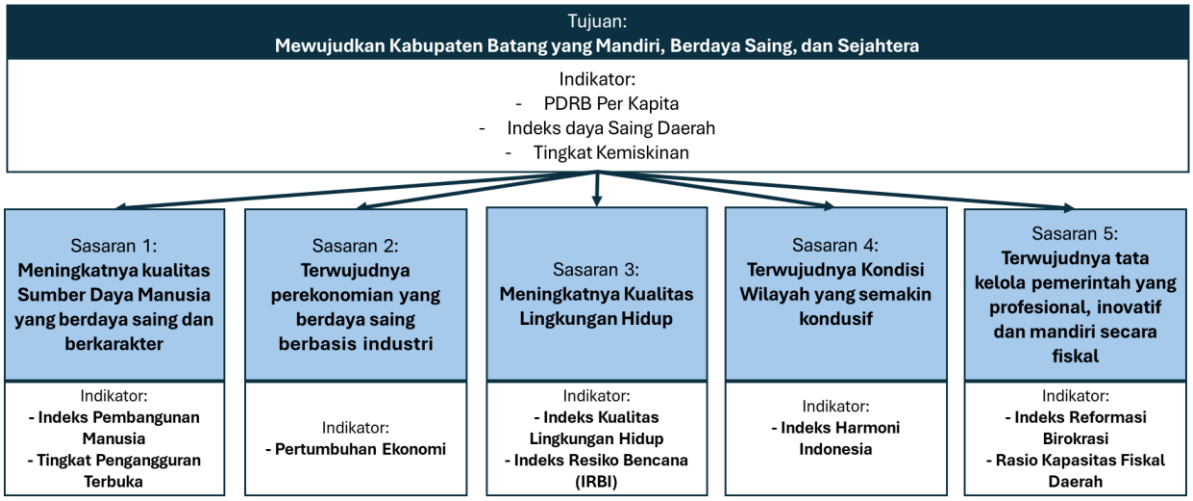

Gambar 3. 2 Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Sumber : Bapperida, 2025

Tujuan Pembangunan Kabupaten Batang dalam lima tahun kedepan adalah **Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera.** Kabupaten Batang yang **"Mandiri"** merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi secara optimal, mengurangi ketergantungan pada pihak luar selain itu diarahkan pada peningkatan kemandirian daerah secara fiskal.

Kabupaten Batang yang "**Berdaya Saing**" merujuk pada kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal peningkatan ekonomi,

serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai faktor kunci dalam pembangunan. Daya saing daerah sendiri diharapkan dapat menjadi magnet pembangunan yang mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kabupaten Batang ýang "**Sejahtera**" merujuk pada kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan dimana masyarakat Kabupaten Batang mengalami peningkatan kualitas hidup baik secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan pembangunan yang merata, pemerintahan yang baik, dan masyarakat yang mandiri serta berdaya saing.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan tujuan pembangunan Kabupaten Batang yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan digunakan 3 indikator kinerja yaitu PDRB Perkapita, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dan Tingkat Kemiskinan. Sementara itu guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan lima Sasaran pembangunan Daerah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter

Dalam mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Pembangunan manusia menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia (SDM)** diarahkan tidak hanya pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat, cerdas, sehat, dan produktif.

Peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia (SDM)** harus didorong melalui berbagai aspek secara inklusif. Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM antara lain melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, kesehatan untuk semua, penyediaan perlindungan sosial yang adaptif, mendorong kesetaraan gender pada berbagai sektor pembangunan, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter yang

berakhlak dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan dan pembentukan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan memperkuat ketahanan budaya yang tak terbatas pada seni dan warisan budaya saja namun juga mendorong penguatan budaya hidup sehat jasmani serta budaya literasi masyarakat pada berbagai aspek.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dan **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).**

Sasaran 2 : Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing berbasis industri

Dalam upaya mendorong kemajuan perekonomian Kabupaten Batang, ditetapkan sasaran pembangunan Perekonomian yang berdaya saing. Hal ini menjadi pijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor- sektor unggulan ekonomi serta peningkatan produktivitas yang dikolaborasikan dengan pengembangan inovasi dan teknologi.

Perekonomian yang berdaya saing difokuskan pada optimalisasi potensi sumber daya alam, peningkatan kualitas produk unggulan daerah, pengembangan sektor industri secara berkelanjutan menuju *Clean Industrial City*, serta pengembangan industri/ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan daya saing yang mampu menarik investasi baru di Kabupaten Batang, memperkuat keberlangsungan pembangunan perekonomian daerah serta menciptakan kemudahan akses pasar secara luas.

Kawasan Industri yang berkembang pesat di Kabupaten Batang tidak hanya menjadi pusat kegiatan produksi, tetapi juga menjadi magnet bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui kehadiran industri baru yang mendorong tumbuhnya sektor pendukung pembangunan daerah seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi, dan penyediaan bahan baku yang secara simultan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi secara inklusif dan pengembangan kawasan industri secara tidak langsung dapat memberikan *Multiplier effect* yang signifikan terhadap perekonomian daerah yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunannya sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Pertumbuhan Ekonomi (PE).**

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan, serta perlindungan terhadap sumber daya alam dan ekosistem. Langkah ini terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, konservasi air, dan penghijauan menjadi bagian penting dalam pencapaian sasaran ini.

Kabupaten Batang yang memiliki karakteristik geografis, menjadikannya rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan untuk tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan juga didukung oleh penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dan penguatan tata kelola lingkungan. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Batang

tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan.

Sinergi antara pembangunan lingkungan dan kebencanaan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan lingkungan dengan dokumen kebijakan penanggulangan bencana, serta penerapan teknologi ramah lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui berbagai kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas air, udara, dan tanah sehingga risiko bencana lingkungan dapat ditekan dan mewujudkan masyarakat yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dan **Indeks Resiko Bencana (IRBI).**

Sasaran 4 : Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif

Pencapaian sasaran terwujudnya kondisi wilayah yang semakin kondusif difokuskan pada penguatan ketahanan sosial dan menjaga stabilitas daerah dari potensi konflik sosial, kriminalitas, serta ancaman yang dapat menghambat investasi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, iklim wilayah yang kondusif juga ditopang oleh peningkatan kualitas pelayanan publik serta penegakan hukum yang adil. Pemerintah Kabupaten Batang terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, memperluas akses informasi, serta membangun budaya toleransi dan gotong royong ditengah masyarakat.

Kondisi wilayah yang kondusif menjadi pondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang aman, tertib, dan stabil menjadi syarat mutlak bagi terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi wilayah yang kondusif mencakup aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, harmonisasi kehidupan sosial, kepastian hukum, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

Pencapaian sasaran ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif bagi masyarakat, investor, dan pelaku usaha, sehingga mendukung terwujudnya daerah yang maju, harmonis, dan berdaya saing tinggi.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Harmoni Indonesia (IHaI).**

Sasaran 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan mandiri secara fiskal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang responsif, akuntabel, serta mampu mendorong percepatan pembangunan melalui pelayanan publik yang berkualitas dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang profesional ditandai dengan aparatur yang kompeten, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas secara efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance*. Untuk mendukung hal tersebut, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur terus dilakukan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

Di sisi lain, tata kelola yang inovatif menekankan pentingnya pembaruan dan kreativitas dalam pelayanan publik serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Penggunaan teknologi digital serta transformasi layanan berbasis data menjadi prioritas guna menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.

Kemandirian fiskal juga menjadi bagian penting dari sasaran ini. Dengan memperkuat potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi belanja, Kabupaten Batang diarahkan untuk tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, melainkan mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan dari sumber daya lokal. Strategi ini ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang produktif.

Dengan terwujudnya tata kelola yang profesional, inovatif, dan mandiri secara fiskal, Kabupaten Batang akan memiliki pondasi pemerintahan yang kuat dan *modern* dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** dan **Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Rasio KFD).**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan proyeksi untuk menjadi panduan dalam penyusunan perencanaan tahunan seera menjadi instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029. Penetapan target per indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2025-2030

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera		PDRB Perkapita	36,26	41,67	45,05	49,88	53,48	58,28	61,08
					Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,32	3,74	3,89	4,04	4,19	4,34	4,49
					Tingkat Kemiskinan	8,73	8,34-8,27	8,30-8,21	8,25- 8,00	8,15-7,79	6,79 – 6,47	6,50 – 6,35
				Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,73	70,75	71,2	71,71	72,12	73,2	73,54
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,67	5,65 - 5,27	5,54 - 5,10	5,34 - 5,05	5,2 - 5,0	5,1 - 4,8	4,95 - 4,55
- Tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata - Rendahnya IPM terutama pada rata-rata lama sekolah - Masih adanya AKI, AKB, Stunting - Ketimpangan akses pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan - adanya angka putus sekolah - Rendahnya kualitas tenaga kerja, ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan pasar tenaga kerja - Masih adanya ketidakadilan gender (marginalitas, subordinasi, stereotip, dobel burden dan kekerasan terhadap perempuan dan anak)	- Kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja - Pengentasan kemiskinan - Ketahanan Pangan yang berkelanjutan	***Misi 1 :*** Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis ***Misi 2 :*** Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh ***Misi 7 :*** Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial										

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing berbasis industri	Pertumbuhan Ekonomi	6,03	5,5 - 6,1	6.35 - 6.50	6,9-7,4	7,0-7,5	7,4-7,9	7,5-8,0
- Daya saing ekonomi : Rendahnya nilai tambah industri kecil, belum adanya integrasi rantai pasok antar industri, belum optimalnya penerapan industri yang ramah lingkungan - Sektor pertanian : Penurunan produktivitas pertanian, alih fungsi lahan, hasil produksi belum memenuhi standar industri - Sektor pariwisata : arah pengembangan pariwisata masih belum jelas, penurunan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah, sarpras belum mendukung dalam pengembangan pariwisata - Sektor Jasa : rendahnya investasi sektor jasa, stagnasi pengembangan sektor jasa - Sektor UMKM dan ekraf : rendahnya inovasi dan promosi dalam pengembangan usaha kecil - Sektor kelautan dan perikanan : overfishing, hasil perikanan tangkap masih rendah	- Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata berbasis industri dan pariwisata - Clean Industrial City - Ketahanan pangan yang berkelanjutan - Konektivitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah	***Misi 3 :*** Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan ***Misi 4:*** Akselerasi Ekonomi ***Misi 5 :*** Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi Infrastruktur sampai ke Pelosok Desa. ***Misi 7 :*** Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial										
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,47	70,66	70,7	70,75	70,79	70,84	70,88
					Indeks Resiko Bencana (IRBI)	128,7	125,04	123,52	121,99	120,47	118,95	117,42
- Penurunan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan - maraknya pertambangan	- Degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim	***Misi 3 :*** Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi										

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
ilegal yang dapat merusak kualitas air - Perubahan iklim ini terjadi akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) - Rendahnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	-Clean Industrial City	berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan ***Misi 6 :*** Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan										
				Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	81,71	81,5	82	82,5	83	83,5	84
					Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	0,962	0,992	0,992	1,051	1,081	1,111	1,145
- Pelaksanaan pelayanan publik belum optimal - Rendahnya kemandirian keuangan daerah - Pengelolaan data dalam pemerintahan belum terintegrasi	- Tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif - Pengentasan Kemiskinan	***Misi 7 :*** Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan **Berorientasi pada Keadilan Sosial** ***Misi 8 :*** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas										
				Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	NA	6,64	6,7	6,8	6,9	7	7,1
- Meningkatnya angka kriminalitas, tindak kekerasan atau intimidasi di masyarakat - Maraknya aktivitas gengster	- Stabilitas dan kondusivitas wilayah	***Misi 1:*** Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis										

Sumber : Bapperida Kab. Batang, 2025

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025–2045

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang merupakan arah pembangunan yang bersifat strategis, menyeluruh, dan berjangka panjang. Selanjutnya, misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap pertama agar dapat dilaksanakan secara terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap periode pembangunan. Sebagaimana berikut keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 (Tahap Pertama RPJPD) :

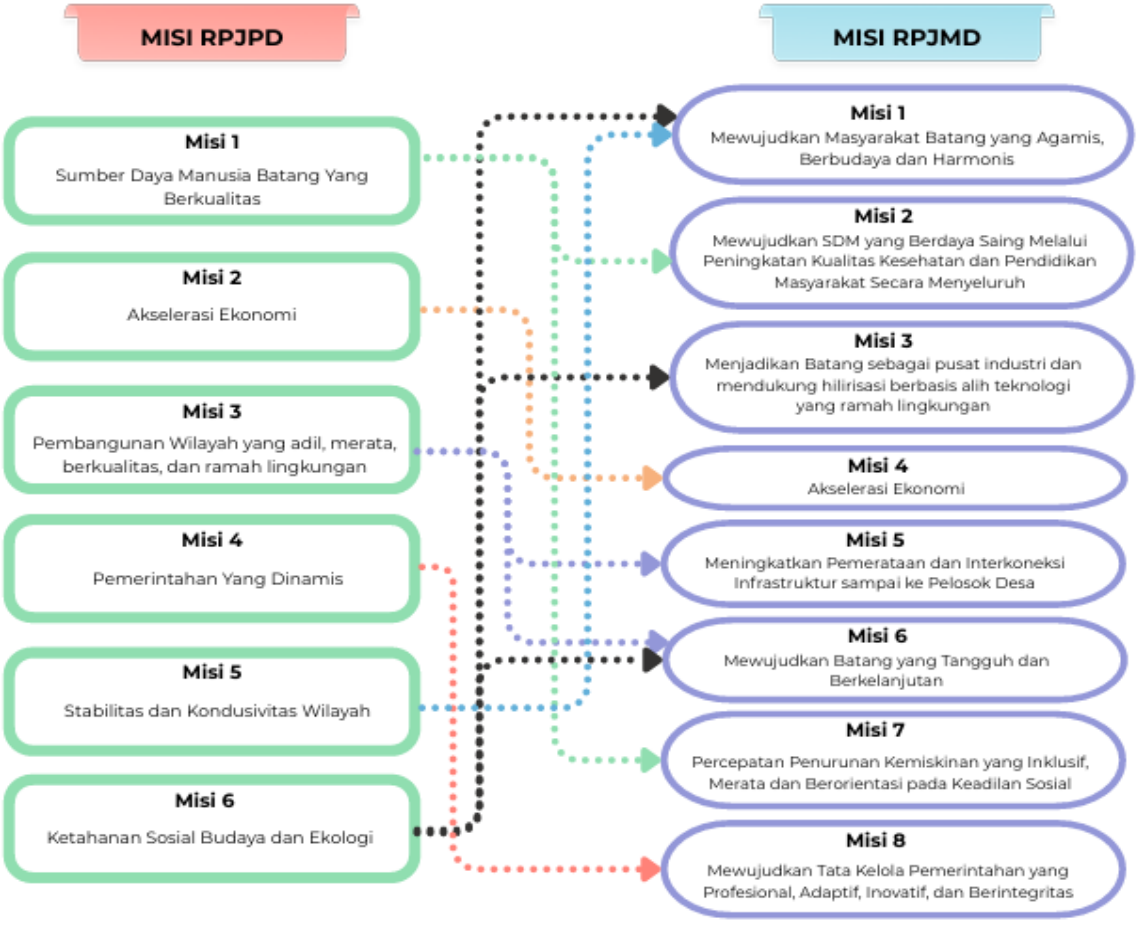

Gambar 3. 3 Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Sumber : RPJPD dianalisis dan diolah, 2025

Secara garis besar, keterkaitan antara misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Misi RPJPD mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dijabarkan dalam RPJMD melalui misi untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara menyeluruh, serta misi untuk membangun masyarakat yang agamis, berbudaya, dan harmonis.
2. Misi RPJPD tentang akselerasi ekonomi diterjemahkan langsung ke dalam RPJMD sebagai komitmen untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diperkuat dengan misi menjadikan Batang sebagai pusat industri, mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan, serta misi peningkatan pemerataan dan interkoneksi infrastruktur hingga pelosok desa.
3. Misi RPJPD mengenai pembangunan wilayah yang adil, merata, berkualitas, dan ramah lingkungan dipertegas dalam RPJMD melalui upaya pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta orientasi pembangunan industri yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
4. Misi RPJPD tentang pemerintahan yang dinamis diwujudkan dalam RPJMD dengan penekanan pada tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas.
5. Misi RPJPD terkait stabilitas dan kondusivitas wilayah serta ketahanan sosial budaya dan ekologi diperkuat dalam RPJMD melalui misi mewujudkan Batang yang tangguh dan berkelanjutan, serta misi percepatan penurunan kemiskinan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dari keterkaitan diatas ditegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 menjadi penjabaran tahap pertama dari arah pembangunan

jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD. RPJMD berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan tantangan aktual, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat.

3.1.3.Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.



Gambar 3. 4 Visi Misi Presiden

Sumber: RPJMN 2025-2029

Asta Cita memuat program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2025-2029 juga memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.



Gambar 3. 5 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional
Sumber: RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lrmbaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebilakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3.1.4.Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030 yang tertuang dalam Blue Print Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk **"NGOPENI. NGLAKONI. Jateng**". Filosofi tersebut diartikan sebagai berikut:

Ngopeni bermakna melayani masyarakat dan memelihara capaian pembangunan yang telah diwujudkan oleh para pemimpin terdahulu.

Nglakoni bermakna melaksanakan komiten dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Ngopeni-Nglakoni Jateng menjadi Perwujudan Semangat Pimpinan Daerah yang menginspirasi pada seluruh Penyelenggara Pemerintahan untuk RESPONSIF, PEDULI mencurahkan perhatiannya untuk memelihara dan merawat, dan tidak segan melakukan tindakan POSITIF sebagai perwujudan komitmen dan tanggung jawab untuk Jawa Tengah Maju, Berwibawa dan Berkelanjutan dengan Semangat Kolaboratif dan Responsif.

Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

"JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Makna dari visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

MAJU. Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kotributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan Responsif terhadap Lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara.

BERKELANJUTAN. Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan Integrasi Program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan Kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

INDONESIA EMAS 2045. Kontribusi Provinsi Jawa Tengah sebagai Episentrum Pembangunan Sumber Daya Manusia Nasional menuju bonus demografi pada tahun 2045, yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta Ekonomi yang tumbuh berkembang.

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, berikut disajikan gambaran cascading tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 :

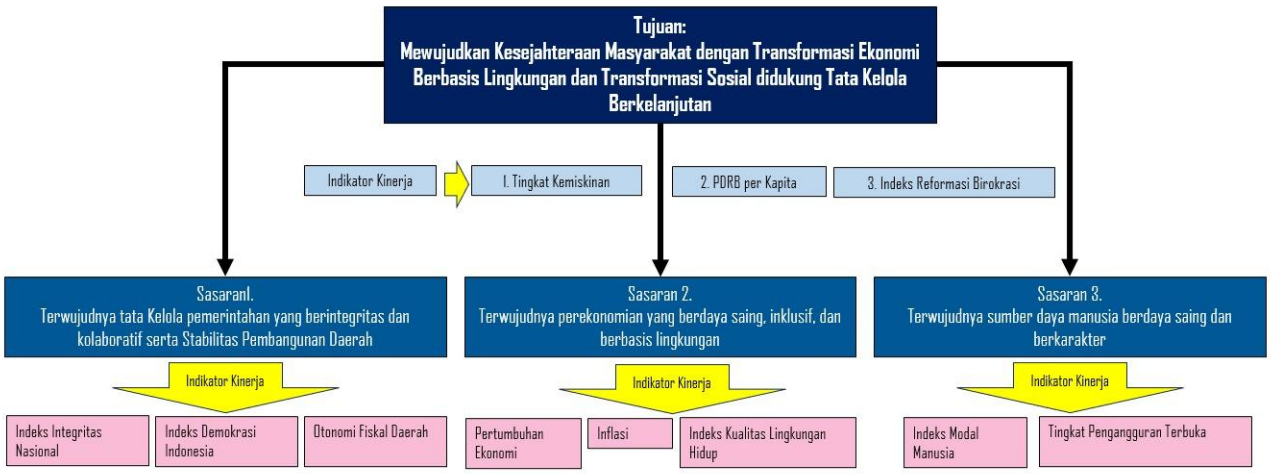

Gambar 3. 6 Tujuan Sasaran Provinsi Jawa Tengah
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

3.1.5. Penyelarasan Misi Pembangunan Nasional dengan Misi Kabupaten Batang

Dalam mendukung pencapaian Misi Pembangunan Nasional (Asta Cita), Kabupaten Batang telah menyelaraskan keterkaitan antara Misi Nasional (ASTA CITA) dengan Misi Pembangunan Kabupaten Batang. Berikut matriks penyelarasan misi pembangunan nasional dengan Misi Kabupaten Batang :

Tabel 3. 2 Penyelarasan Misi Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dengan Misi Kabupaten Batang

NO	MISI PEMBANGUNAN NASIONAL	MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BATANG	MISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis	Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan	
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi Infrastruktur Sampai Ke Pelosok Desa.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif

NO	MISI PEMBANGUNAN NASIONAL	MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BATANG	MISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
4	Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh	Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan	Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
		Akselerasi Ekonomi	- Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; - Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial	

NO	MISI PEMBANGUNAN NASIONAL	MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BATANG	MISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis	

Sumber : Bapperida Kab. Batang, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJM Nasional 2025 - 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah menetapkan beberapa program strategis yang perlu diimplementasikan secara terpadu di tingkat pusat maupun daerah. Program strategis nasional tersebut antara lain:

1. **Penanggulangan Kemiskinan**

   Dilaksanakan melalui berbagai proyek dan kegiatan, seperti:

   - Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
   - Penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin.
   - Pembangunan tiga juta unit rumah sebagai upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

2. **Ketahanan Pangan**

   Difokuskan pada proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

3. **Kesehatan untuk Semua**

   Melalui proyek/kegiatan:

   - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjamin akses layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat.
   - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

4. **Perluasan Akses Pendidikan**

   Dilaksanakan melalui proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah, guna memastikan mutu layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

5. **Pertumbuhan Ekonomi**

   Didukung oleh berbagai kegiatan, antara lain:

   - Pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

- Percepatan pembentukan **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** sebagai penggerak ekonomi lokal.
- Kemudahan perizinan di daerah untuk mendorong iklim investasi dan usaha.

6. **Program Strategis Nasional Lainnya**

   Selain program-program di atas, juga terdapat program strategis nasional lain yang ditetapkan secara khusus oleh Presiden sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

Sementara itu, dalam Perpres nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Kabupaten Batang masuk dalam lokasi strategis di Jawa Tengah sebagai Kawasan Pertumbuhan yang tergabung dalam regional wilayah Petanglong (Lokasi prioritas: Kota Pekalongan, Kab. Batang, dan Kab. Pekalongan). Selain itu, Kabupaten Batang juga masuk Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal (Lokasi Prioritas: Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, dan Kab. Batang).

Kawasan Pertumbuhan yang dimaksud adalah Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan lndustri Batang. Dalam kawasan ini terdapat beberapa Indikasi Intervensi yaitu:

- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekalongan-Batang, antara lain melalui:
  - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
  - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH;
  - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
- Pembangunan rumah murah beransitasi bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekalongan-Batang (PHTC);
- Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang;
- Pembangunan SPAM Regional Pekalongan-Batang;

- Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Pekalongan dan pembangunan pengamanan pantai pesisir Pekalongan-Batang;
- Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengekapan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri semikonduktor, hilirisasi nikel);
- Pengembangan KIT Batang, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan, sistem penyediaan air baku dan air minum, telekomunikasi, dry port, pelabuhan, dsb;
- Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang;
- Perencanaan dan Persiapan Pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakada-Surabaya;
- Pengembangan kota Agropolitan Pekalongan; dan
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

Kemudian Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali Comal yang terdapat beberapa Indikasi Intervensi yaitu:

- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Waduk Malahayu, D.I. Kumisik, D.I. Pemali Bawah, D.I. Cacaban, D.I. Cipero, D.I. Gung, D.I Sungapan, D.I. Comal, D.I. Kupang Krompeng, D.I. Sragi, dan D.I. Kaliwadas;
- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah;
- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi);
- Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan);
- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura;
- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura;

- Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Bogowonto;
- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan dam, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Progo Hulu, Waduk Wadiaslintang, Waduk Sempor, Waduk Mrica;
- Pembangunan Bendungan Kedunglanggar;
- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui: Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, Penyelamatan dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan, dan Optimalisasi dan modernisasi lahan pertanian;
- Peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan dan peningkatan pemasaran produk, antara lain melalui: Penyediaan fasilitasi dan promosi hasil pertanian, Pengembangan hilirisasi/pupuk dan pestisida hayati berbasis OPT dan residu peternakan/perikanan, dan Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani;
- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan hilirisasi pertanian, penyediaan sistem logistik pertanian, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani, antara lain: Penguatan dan perbaikan manajemen usaha petani, Penyediaan akses pasar bagi petani, Pengembangan dan peningkatan infrastruktur logistik dan jalan akses bagi petani, dan Peningkatan sistem penyediaan dan pelayanan hasil pertanian; dan
- Penguatan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

3.2.2.Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi 2025 – 2029

Provinsi Jawa Tengah akan dikembangkan 10 titik aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru (berbasis WP) yang mana Kabupaten Batang masuk dalam WP Petanglong bersama Kota Petanglong dan

kabupaten Pekalongan. Penjabaran pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui Pengembangan Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Wilayah Pengembangan (WP) yang meliputi Program Unggulan dan Program Strategis.

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Petanglong berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

a. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi.
   - Mendorong percepatan investasi di KITB melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
   - Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
   - Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
   - Mendorong pengembangan SPAM Industri;
   - Mendorong inisiasi pengembangan dan penguatan sistem perkotaan berorientasi transit (TOD) yang menggabungkan sistem transportasi berbasis rel dengan penyediaan layanan angkutan u mum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Petanglong yang terkoneksi dengan KITB dan dengan kawasan pariwisata;
   - Mendorong Perencanaan Tata Ruang serta Tata Bangunan dan Lingkungan yang baik utamanya pada kawasan penyangga KIT Batang untuk mengantisipasi urban sprawl serta kekumuhan;
   - Mendorong pemenuhan RTH kawasan industri;
   - Inisiasi proses rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten/Kota di WP Petanglong yang terintegrasi dengan KITB dan moda transportasi lainnya;

- Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Banyuputih Batang sebagai simpul rencana layanan Trans Jateng Petanglong;

b. Pengembangan *Shopping Tourism*, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif.
   - Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
     - ✓ Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Wiradesa-Kajen Kalibening dan Wonotunggal-Surjo;
     - ✓ Mendorong peningkatan aksesibilitas koridor pariwisata Bandar-Dieng;
     - ✓ Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Kajen-Wonotunggal-Surjo.

c. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
   - Mendorong pengembangan kawasan tematik sebagai lokasi belanja yang representatif, kreatif dan inovatif;
   - Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
   - Mengembangkan kampung/desa wisata utamanya pada koridor Bandar-Dieng serta Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya;
   - Fasilitasi pengembangan berbagai event kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain: Syawalan, Balloon Festival, Festival Kesenian;
   - Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerjasama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global
   - Bimbingan teknik produksi dan pengelolaan usaha bagi wirausaha baru industri komoditas.

d. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, teh dan perikanan tangkap).

- Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
  - ✓ Pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan didukung fasilitasi penyediaan sarpras; peningkatan kompetensi; korporasi pertanian; serta pencegahan alih fungsi lahan pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengembangan minapolitan untuk mendorong produksi dan hilirisasi komoditas perikanan tangkap didukung pengembangan pelabuhan perikanan, bantuan sarpras penangkapan ikan, fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
  - ✓ peningkatan sistem irigasi melalui rehabilitasi daerah irigasi Sudikampir
  - ✓ Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan waduk Kedunglanggar, Wonotunggal, Gondang Hilir, Karanggondang, Kradegan, Sidoharjo, Mesoyi, Wonodadi dan Candi;
- Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
  - ✓ Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan.

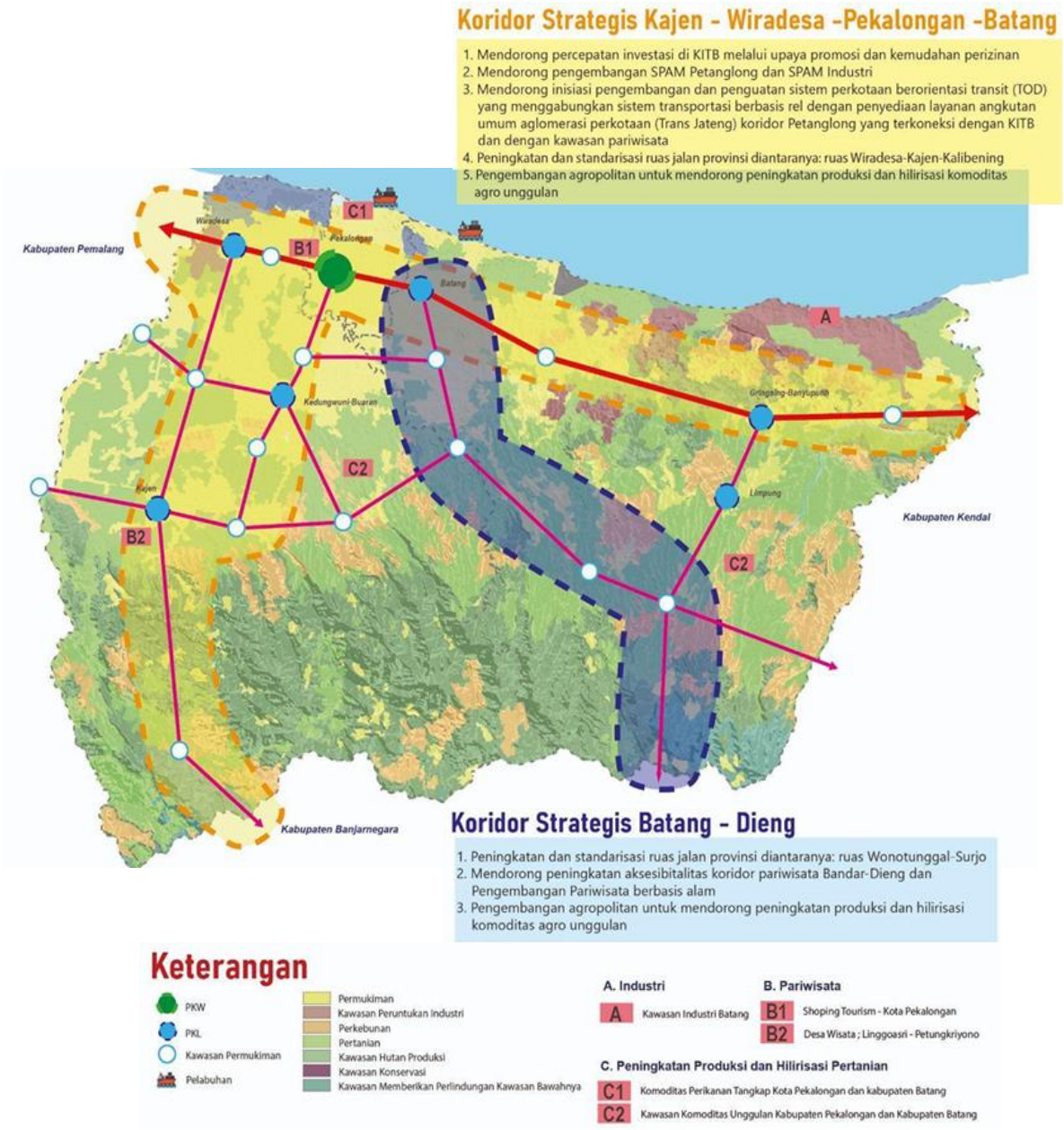

Gambar 3. 7 Arah Pengembangan Petanglong

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Dukungan daerah terhadap 35 Program Delegasi Provinsi

Berikut dukungan daerah terhadap 35 program delegasi provinsi :

Tabel 3. 3 Dukungan Daerah terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pembentukan Kecamatan Berdaya untuk saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jika anggaran memungkinkan, Pembentukan Kecamatan Berdaya akan dirintis mulai Tahun 2026. Namun terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Disparpora selama ini dalam rangka "Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center" yaitu diantaranya kegiatan untuk pendataan pelaku ekraf. Selain itu di Kabupaten Batang juga terdapat Pemuda Berwirausaha. Dalam pemberdayaan disabilitas, di Kabupaten Batang terdapat NPCI (National Paralimpic Comitte Indonesia) dan Sahabat Disabilitas. Untuk Sport Center sementara hanya masih di GOR Abirawa.
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Dengan peningkatan Program penanganan permukiman kumuh, program perbaikan RTLH baik dengan APBD Kabupaten serta optimalisasi alternatif pembiayaan lain seperti CSR dan lainnya. Kemudian didukung percepatan legalisasi Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai landasan dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas perul=mahan dan kawasan permukiman salah satunya sebagai upaya dukungan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni utamanya percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Batang pada tahun 2030.
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK	- Penyelenggaraan pengawasan internal sub keg kerjasama pengawasan internal
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	- Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer di tiap-tiap wilayah kecamatan - Berobat Gratis - Layanan Gawat Darurat 24 Jam Ambulan Gratis -Layanan Speling (Spesialis Keliling)
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Pembinaan dan monitoring tambak budidaya nila
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	- Mendorong pembangunan SMA/SMK unggulan di Limpung dan Reban, melalui permohonan pengajuan kuota kepada Gubernur
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	- Membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak di Kec Tulis, dengan 2 desa sebagai pilot project. - Pelatihan kepada kader untuk dapat memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pengembangan Desa Wisata
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	- Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dianggarkan pada kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pelatihan Tagana di setiap kecamatan
11	Cek Kesehatan Gratis	- Pelaksanaan Cek kesehatan gratis di setiap Puskesmas
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	- Menyediakan 1 bidan, 1 perawat di setiap Pustu

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	-Sosialisasi Anti Korupsi Pemerintah Desa
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	- Bantuan hukum untuk guru, disabilitas, perempuan yang ASN telah dinaungi dalam perbup Bantuan Hukum ASN. Sementara untuk guru, disabilitas, perempuan dan anak non ASN harus masuk dalam kriteria masyarakat Miskin baru diberi bantuan hukum bekerjasama dengan LBH (lembaga Bantuan Hukum), dilaksanaakn oleh Perangkat Daerah BAGIAN HUKUM SETDA BATANG melalui kegiatan bantuan hukum masyarakt miskin
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	- Pengembangan kawasan penyangga Kawasan Industri sebagai katalisator percepatan ekonomi petanglong dengan peningkatan rantai pasok industri (optimalisasi kawasan sekitar KITB untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Batang); - Optimalisasi wisata pantai (termasuk DTW Safari Beach Jateng) dan wisata alam gunung (pagilaran, curug, wana wisata, Dieng, dll); - Produksi dan hilirisasi komoditas unggulan teh dan perikanan tangkap termasuk adanya koridor strategis Batang – Dieng; - Pengembangan kawasan strategis perkotaan Batang dan KIT Batang
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	- Penyediaan Bantuan Sosial Santunan Anak Terlantar termasuk anak yatim piatu - Rehabilitasi Dasar bagi Anak Terlantar seperti fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, rumah singgah, fasilitasi terapi fisioterapi, okupasi dan terapi wicara, fasilitasi layanan rujukan ke panti, maupun penyediaan alat bantu bagi anak disabilitas terlantar - Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten - Penyediaan Jaminan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Pekerja Rentan Fakir Miskin - Pemberian santunan kematian bagi Masyarakat Fakir Miskin (BTT) - Pemberian bantuan operasional bagi penunggu pasien fakir miskin yang dirawat di rumah sakit Daerah (BTT) - Pemberian bantuan sosial bagi korban bencana (BTT) - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat bagi Disabilitas Fakir Miskin - Fasilitasi Bantuan Sosial berupa Asistensi bagi Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas Terlantar yang Miskin
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Sertifikasi HAKI
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan dan sertifikasi rumah pemotongan hewan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	- Terskema dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sedang dalam tahap proses penyusunan dokumen perencanaanya. Dilaksanakan lintas sektor opd pengampu.
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro di Dukuh Kemloko Desa Kambangan Kecamatan Blado

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	- Program PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) - PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) - Program ICM (Integrated Coastal Management) oleh *Focuss*
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	- Lomba Konten Promosi Wisata Batang
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	- Bantuan Modal Usaha UMKM & PKL - Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro - Kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan umkm serta kapasitas dan kompetensi sdm umkm dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan - Pengembangan usaha mikro
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Penyusunan RAD API
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	- Penyusunan Perda RTRW, Penyusunan RDTR - Penataan dan peningkatan ruang terbuka publik perkotaan - Reboisasi/penghijauan pada kawasan dataran tinggi dan sekitar sumber air - Program Batang Hijau
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	- Sosialisasi, bimtek dan pendampingan yang dianggarkan pada kegiatan Wasbang dan Forum Kerukunan Umat Beragama
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	- Sosialisasi, bimtek dan pendampingan yang dianggarkan pada kegiatan Wasbang dan Forum Kerukunan Umat Beragama
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	- Pelatihan/Peningkatan kapasitas kader posyandu - Mendorong desa dalam pemanfaatan DD untuk kegiatan Posyandu melalui penerbitan Surat Edaran Bupati - Pemberian insentif/ operasional bagi kader posyandu
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	- Germas, pelatihan kader untuk pelayanan posyandu lansia, pengadaan lansia Kit (alat tensi, stetoskop, alat tes darah, cek kolesterol dll), kelas lansia
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	- Program Santri dan Pemuda Mandiri - Satu Kecamatan satu *training center*
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	1) Penguatan, pendampingan, dan pengawasan koperasi merah putih 2) Pengembangan Koperasi Buruh.
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	- Pemberian tali asih kepada atlet berprestasi - Pelatihan pada cabang olahraga Panjat Tebing dan Petanque - Pengiriman dalam event olahraga - Pengembangan olahraga masyarakat - Pelatihan dan Sertifikasi pelatih - Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Atlet - Fasilitas latihan dan pertandingan yang memadai dan berstandar - Memberikan penghargaan dan pengakuan atas dedikasi dan prestasi atlet - Mendorong pertumbuhan industri olahraga yang berkelanjutan - Penyusunan Perbup keolahragaan dan kepemudaan - Pelatihan dan pendidikan SDM dalam manajemen olahraga
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	- Pengembangan sekolah inklusif yang diintegrasikan di tiap sekolah (dalam bentuk rombongan belajar tersendiri).
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	- *SMART POLE,* Pemasangan cctv pemantau banjir dan polusi udara - Pembangunan Stasiun Pengamatan Penurunan Permukaan Tanah (SPPPT)

Sumber : Bapperida, 2025

3.2.3.Strategi dan Arah Kebijakan daerah

a. Strategi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berupaya menciptakan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan segala potensi dan tantangan yang dimiliki, Kabupaten Batang memiliki kesempatan besar untuk menjadi daerah yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan berkelanjutan. Namun dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, dibutukan strategi yang komprehensif, terarah, dan berfokus pada pemanfaatan potensi lokal guna mengatasi kelemahan yang ada. Strategi ditentukan sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah atau upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Penentuan strategi memperhatikan isu pembangunan serta faktor internal dan eksternal di Kabupaten Batang.

Melalui strategi pembangunan yang berbasis pada kekuatan dan potensi daerah, serta dengan meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, Kabupaten Batang diharapkan dapat menjadi daerah yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan komitmen kuat multisektor pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta — Kabupaten Batang akan dapat menavigasi tantangan-tantangan yang ada dan melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.

Penentuan strategi pencapaian dilakukan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats).* Analisis ini mengklasifikasikan faktor lingkungan internal dan eksternal daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagaimana hasil analisis SWOT tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 3. 4 Analisis SWOT dalam Penentuan Strategi Pembangunan

Internal (SW) / Eksternal (OT)	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	1. Kondisi Geografis: Potensi besar untuk pengembangan industri, pariwisata, perikanan, dan pertanian. 2. Jalur Ekonomi: Terletak di jalur ekonomi Pulau Jawa Utara dengan mobilitas tinggi 3. Jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan non-produktif. 4. Dukungan Teknologi: Sistem informasi dan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang baik. 5. Adanya kawasan industri besar yang menarik minat investasi dan dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah 6. Infrastruktur Terkoneksi: Infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah. 7. Potensi Pariwisata Alam dan Budaya : adanya Pantai, pegunungan, tempat budaya yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata 8. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengawal pembangunan daerah	1. Kualitas Sumber Daya Manusia: rata-rata lama sekolah setara kelas 1 SMP 2. Tingginya pengangguran di kalangan lulusan SMK. 3. Rendahnya kemandirian keuangan daerah dan kapasitas fiskal. 4. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. 5. Belum optimalnya infrastruktur hingga pelosok desa. 6. Masih tingginya AKI, AKB, Stunting dan kasus kesehatan lainnya 7. Adanya Ketimpangan pembangunan
Opportunities (Peluang)	**Strategi SO (Strengths-Opportunities)**	**Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)**
1. Bonus Demografi: Memanfaatkan bonus demografi untuk meningkatkan produktivitas 2. Penetapan Batang menjadi wilayah strategis di jawa tengah sebagai kawasan pertumbuhan dan kawasan ketahanan air dan pangan. Penetapan ini menjadikan Batang mendapat dukungan dari pemerintah pusat 3. Pembiayaan pembangunan melalui TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) 4. Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi : Penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi di semua sektor dan membuka peluang baru dalam sektor digital dan ekonomi kreatif	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung konektivitas antar wilayah serta pngembangan sektor perdagangan dan jasa 2. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pembangunan kepemudaan 3. Mengoptimalkan potensi alam dan budaya Batang untuk menjadi daya tarik wisata utama dengan memanfaatkan peluang pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan 4. Pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif daerah 5. Penguatan sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, serta merespons tren pasar produk pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif dan inovatif	1. Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan 2. Pengembangan dan penetapan zonasi kawasan ekonomi dan infrastruktur yang berfokus pada sektor unggulan 3. Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan penguatan sumber pembiayaan TJSP 4. Memperluas alternatif sumber pendanaan serta Mendorong kemitraan publik-swasta (PPP) dalam proyek pembangunan infrastruktur 5. Pembangunan sosial masyarakat yang inklusif dengan memastikan pemenuhan hak anak, menjamin kesetaraan gender dalam pembangunan, serta memperkuat ketahanan keluarga 6. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan 7. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah dan akses pelayanan dasar
Threats (Ancaman)	**Strategi ST (Strengths-Threats)**	**Strategi WT (Weaknesses-Threats)**
1. Persaingan antar daerah yang semakin ketat. 2. Budaya Barat: Pengaruh budaya barat akibat migrasi yang tinggi 3. Ketidakstabilan Ekonomi 4. Fenomena perubahan iklim dan bencana 5. Dampak Lingkungan: Dampak lingkungan dari pembangunan industri.	1. Pengembangan program konservasi tanah dan air untuk melindungi kualitas tanah dan mendukung pembangunan berkelanjutan 2. Mendorong pengembangan industri ramah lingkungan dalam mendukung *clean industrial city* 3. Penerapan prinsip *Circular Economy* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 4. Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kebudayaan 5. Penguatan perlindungan terhadap ekosistem	1. Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga-lembaga pendidikan dalam penyediaan tenaga kerja 2. Membangun sistem mitigasi bencana yang efektif untuk menghadapi perubahan iklim dan bencana alam 3. Pengentasan kemiskinan berbasis desa melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal dan peningkatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan 4. Penguatan kolaborasi multisektor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sumber : Bapperida Kab.Batang, 2025

Kabupaten Batang memiliki sejumlah potensi internal dan eksternal yang menjadi dasar penting dalam perumusan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats)*, dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi untuk menghasilkan strategi pengembangan yang terarah dan berdampak.

Kondisi Internal

Kekuatan (*Strengths*)

Kabupaten Batang dianugerahi kondisi geografis yang strategis dan potensial, yang memungkinkan pengembangan berbagai sektor unggulan seperti industri, pariwisata, perikanan, dan pertanian. Lokasinya yang berada di jalur ekonomi Pantura Jawa memberikan keunggulan dalam hal mobilitas dan konektivitas antar wilayah.

Populasi usia produktif yang dominan menjadi aset penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih dengan dukungan sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan publik yang semakin baik. Keberadaan kawasan industri besar telah menarik minat investasi yang dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah. Infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah serta kekayaan potensi wisata alam dan budaya juga memberikan nilai tambah tersendiri. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam mendukung kemajuan daerah.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Namun demikian, Kabupaten Batang juga menghadapi berbagai tantangan internal. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah setara kelas 1 SMP, menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingginya pengangguran, khususnya di kalangan lulusan SMK, serta rendahnya kemandirian fiskal daerah menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, keterbatasan infrastruktur di pelosok desa, serta permasalahan kesehatan seperti AKI, AKB, dan stunting juga masih

menjadi perhatian utama. Selain itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

Kondisi Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

Terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan, antara lain bonus demografi yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas daerah. Penetapan Kabupaten Batang sebagai kawasan strategis di Jawa Tengah dalam konteks pertumbuhan dan ketahanan air serta pangan memberikan dukungan lebih dari pemerintah pusat.

Selain itu, peluang pembiayaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP) serta pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk mendorong efisiensi dan inovasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif.

Ancaman *(Threats*)

Di sisi lain, Kabupaten Batang juga menghadapi sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi, seperti meningkatnya persaingan antar daerah, pengaruh negatif budaya luar akibat migrasi, serta ketidakstabilan ekonomi nasional maupun global. Perubahan iklim dan potensi bencana alam juga menjadi tantangan yang harus dihadapi secara adaptif dan berkelanjutan, terutama mengingat adanya dampak lingkungan dari pembangunan industri yang kurang terkelola.

Strategi Pembangunan Daerah

Strategi SO (*Strengths – Opportunities*)

Strategi yang dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada antara lain mencakup peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan sektor perdagangan-jasa, pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya, serta inovasi ekonomi kreatif daerah. Selain itu, penguatan

sektor pertanian berkelanjutan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif menjadi langkah penting dalam menjawab peluang yang ada.

Strategi WO (*Weaknesses – Opportunities*)

Untuk mengatasi kelemahan sambil meraih peluang, strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, penetapan zonasi kawasan ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan daerah, dan mendorong kemitraan publik-swasta (PPP) untuk pembangunan infrastruktur, upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial yang inklusif, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah dan akses pelayanan dasar juga menjadi kunci dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan.

Strategi ST (*Strengths – Threats*)

Dalam menghadapi ancaman eksternal dengan memanfaatkan kekuatan daerah, strategi yang dapat dijalankan meliputi pengembangan program konservasi dan lingkungan, pengembangan industri ramah lingkungan, serta penerapan prinsip *Circular Economy*. Penguatan nilai budaya dan sosial masyarakat juga penting dalam menjaga ketertiban umum serta menghadapi pengaruh budaya luar.

Strategi WT (*Weaknesses – Threats*)

Untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman sekaligus, strategi yang relevan meliputi kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan dalam penyiapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan berbasis desa, pembangunan sistem mitigasi bencana, serta penguatan kolaborasi multisektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat**.**

b. Penahapan pembangunan RPJMD Tahun 2026-2030

RPJMD 2025–2029 menjadi tahap pertama dalam implementasi arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Oleh karena itu, RPJMD ini memiliki peran strategis sebagai dasar pijakan awal dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Batang dua puluh tahun ke depan. Tahapan pembangunan sebagai pondasi arah kebijakan yang merupakan penjabaran dalam mewujudkan visi dan misi jangka Panjang. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan tersebut menjadi

salah satu dasar acuan penahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029. Pentahapan pembangunan dalam RPJMD merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Sebagaimana berikut merupakan penjabaran Tahapan pembangunan dalam RPJPD kedalam RPJMD :

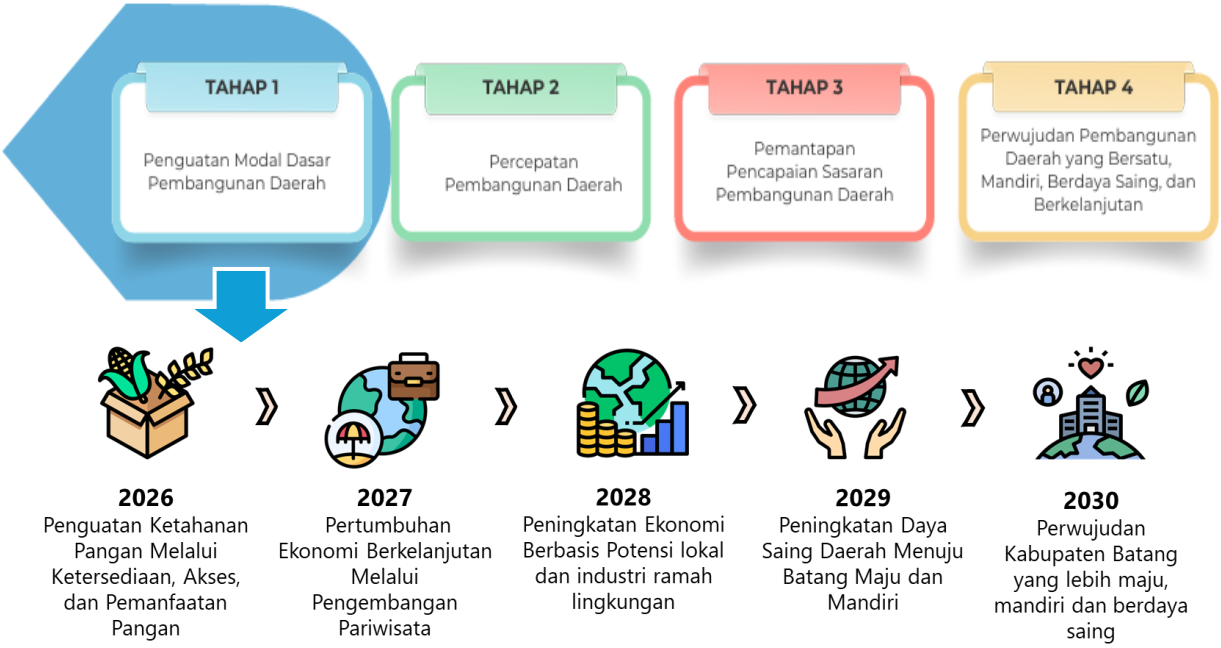

Gambar 3. 8 Integrasi Arah Kebijakan dalam RPJPD kedalam Penahapan Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

Sumber : Bapperida, 2025

c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun

evaluasi. Berikut merupakan arah kebijakan yang dijabarkan pada setiap Penahapan Pembangunan Daerah pada RPJMD Tahun 2026-2030 yang selaras dengan misi pembangunan daerah tahun 2025-2029 dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus pelaksanaan strategi dan kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahun, ditetapkan penahapan kebijakan pembangunan sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Fokus kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Batang pada tahun 2026-2030 ditetapkan sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan **"Penguatan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan"** dengan upaya prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian, diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
2. Peningkatan efisiensi dan kesinambungan pasokan air irigasi. mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP) dan intensifikasi lahan, mengurangi risiko alih fungsi lahan produktif akibat rendahnya daya dukung infrastruktur;
3. Pengembangan *cold storage* dan sistem logistik ikan segar dan olahan;
4. Perluasan akses pangan dan Pemanfaatan Pangan yang Aman, Bergizi, dan Berkelanjutan;
5. Peningkatan infrastruktur pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;
6. Pencegahan pemborosan pangan;
7. Penyediaan pangan lokal dan berkelanjutan;
8. Peningkatan konsumsi ikan melalui kampanye gizi dan edukasi masyarakat (gemarikan);
9. Mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
10. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian berkelanjutan;

11. Penguatan cadangan dan sistem monitoring ketahanan dan kerawanan pangan (*Early Warning System);*

Tahap pertama ini juga diarahkan untuk penguatan pondasi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang meliputi :

1. Penguatan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter :
   - Pemerataan akses layanan pendidikan termasuk pesantren yang inklusif dan merata bagi kelompok rentan dalam mendukung pemenuhan wajib belajar (WAJAR) 13 tahun;
   - Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan dalam mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah serta penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah;
   - Penguatan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa melalui integrasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan peran Posyandu dalam penyelenggaraan layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), serta sosial;
   - Peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi;
   - Penguatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pemetaan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan gizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan remaja;
   - Pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas kepemudaan;
   - Mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah;

- Menjamin perlindungan serta partisipasi anak dan perempuan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif;
- Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja layak untuk semua, utamanya bagi perempun dan kaum rentan melalui ekonomi keperawatan;
- Peningkatan peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
- Penyusunan dukungan regulasi dan kolaborasi pemerintah dengan perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% dalam pemenuhan tenaga kerja formal khususnya sektor industri;
- Pemetaan kebutuhan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri;
- Penguatan pembangunan keolahragaan dan kepemudaan;
- Pengembangan inkubasi usaha dan wirausaha muda;
- Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan korban kekerasan.

2. Penguatan perekonomian yang berdaya saing berbasis industri:
   - Pemetaan potensi ekonomi lokal di sektor unggulan (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan, dan UMKM);
   - Peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan);
   - Mendorong percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang sebagai pusat industri yang mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar kawasan industri (Kawasan Penyangga);
   - Integrasi UMKM dalam mendukung rantai pasok industri;
   - Pemberdayaan UMKM berbasis syariah, melalui pelatihan kewirausahaan halal, sertifikasi produk halal, dan pembinaan manajemen usaha sesuai prinsip syariah;
   - Pembentukan ekosistem ekonomi halal;

- Pemerataan infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat terutama bagi masyarakat miskin;
- Pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah sektor perkebunan;
- Peningkatan produksi sektor kelautan, perikanan (budidaya dan tangkap) serta penguatan sistem rantai dingin (*cold chain)* dan infrastruktur pelabuhan;
- Pengembangan skema pembiayaan ekonomi masyarakat yang inklusif;
- Pembentukan inkubasi wirausaha dan ekonomi kreatif;
- Penciptaan iklim usaha kondusif dan pelayanan peizinan yang cepat dan transparan;
- Promosi potensi investasi daerah;
- Penguatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah serta penguatan Koperasi termasuk Koperasi Merah Putih;
- Penguatan upaya pengendalian inflasi daerah;
- Pemberdayaan ekonomi desa dan perempuan dalam mendukung kemandirian ekonomi terutama bagi masyarakat miskin;
- Pengembangan destinasi unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya;
- Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal.
- Peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal (Transjateng).

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup :
   - Pembangunan TPST Sentul sebagai langkah dalam menghadapi Perkembangan kawasan industri di kabupaten Batang;

- Pengelolaan sampah dari hulu dengan pengurangan timbulan dan pemilahan sampah mandiri, serta pengelolaan sampah organik menjadi pupuk tanaman;
- Pengawasan terhadap limbah industri dan implementasi AMDAL;
- Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dan penanganan kumuh dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- Mendorong transisi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi;
- Penguatan Ketahanan Daerah terhadap dampak perubahan iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan alternatif pendanaan, serta integrasi adaptasi iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat serta Integrasi perspektif gender dalam pembangunan responsif terhadap iklim dan tangguh bencana;
- Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- Penguatan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK;
- Peningkatan kualitas RTH meliputi taman, lapangan desa, peningkatan vegetasi pada jalur hijau seperti tepian jalan dan median jalan, serta memperketat penyediaan RTH oleh pengembang perumahan.
- Pemanfaatan RTH dalam mendukung aktivitas publik.

4. Penguatan Kondusivitas wilayah :
   - Deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan wilayah;
   - Penguatan sinergitas antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat;
   - Mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas;

- Menumbuhkan kesadaran hukum dan toleransi di masyarakat.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan :
   - Peningkatan kualitas layanan publik yang lebih adaptif berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;
   - Penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara;
   - Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan;
   - Peningkatan integritas organisasi penyelenggara pemerintahan;
   - Optimalisasi kualitas belanja daerah;
   - Penguatan kualitas perencanaan berbasis riset, data, dan risiko;
   - Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi perekonomian;
   - Penyusunan mitigasi risiko bencana dan pangan;
   - Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat;
   - Perbaikan tata kelola dan basis data kemiskinan;
   - Penyempurnaan regulasi serta memperkuat kerjasama kolaboratif dan multisektor (Pemerintah dalam pencapaian pembangunan daerah;
   - Peningkatan kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan serta penyediaan pelayanan secara inklusif dan responsif;
   - Penguatan tata kelola pemerintahan desa;
   - Memperluas Alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penguatan pembiayaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027

Arah kebijakan pembanguann daerah tahun 2027 fokus diarahkan pada kebijakan **"Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan Pariwisata"** dengan upaya prioritas sebagai berikut :

1. Pemantapan *Grand Design Pembangunan Pariwisata;*

2. Pengembangan destinasi unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya;
3. Penerapan prinsip *sustainable tourism* dilakukan melalui pendekatan 5A (aksesibilitas, akomodasi, atraksi, aktivitas, dan amenitas) dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk pengembangan masyarakat sadar wisata yang ramah dan memiliki keunikan lokal;
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan UMKM Pariwisata;
5. Penguatan ekosistem ekonomi halal;
6. Peningkatan kecakapan dan keahlian SDM pariwisata;
7. Penguatan produk kreatif lokal yang terintegrasi dengan kegiatan wisata dan kebudayaan lokal;
8. Peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata dan sarana pendukungnya;
9. Peningkatan promosi melalui platform digital, media sosial, dan kolaborasi dengan *influencer* atau duta wisata serta pembangunan citra (*branding*) daerah untuk meningkatkan *awareness*;
10. Memastikan terjaganya kelestarian lingkungan dan kebudayaan lokal dalam pengembangan pariwisata daerah.

Tahap kedua ini juga diarahkan untuk peningkatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang meliputi :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter:
    - Pemerataan akses layanan pendidikan termasuk pesantren yang inklusif dan merata bagi kelompok rentan dalam mendukung pemenuhan wajib belajar (WAJAR) 13 tahun;
    - Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan serta penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah;
    - Penguatan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa melalui integrasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan peran Posyandu dalam penyelenggaraan layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang

kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), serta sosial;

- Peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan; penguatan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta mendorong pembiasaan masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan gizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan remaja;
- Pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas kepemudaan;
- Mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah;
- Menjamin perlindungan serta partisipasi anak dan perempuan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif;
- Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja layak untuk semua, utamanya bagi perempun dan kaum rentan melalui ekonomi keperawatan;
- Peningkatan peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
- Peningkatan kolaborasi pemerintah dengan perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% dalam pemenuhan tenaga kerja formal khususnya sektor industri;
- Penyediaan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri;
- Peningkatan daya saing keolahragaan dan kepemudaan;
- Pengembangan inkubasi usaha dan wirausaha muda;
- Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan korban kekerasan;

- Perluasan akses pangan dan sistem monitoring ketahanan dan kerawanan pangan (*Early Warning System*) serta pencegahan pemborosan pangan.

2. Peningkatan perekonomian yang berdaya saing berbasis industri:
   - Peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan);
   - Peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang sebagai pusat industri yang mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar kawasan industri (Kawasan Penyangga);
   - Integrasi UMKM dalam mendukung rantai pasok industri;
   - Pemberdayaan UMKM berbasis syariah, melalui pelatihan kewirausahaan halal, sertifikasi produk halal, dan pembinaan manajemen usaha sesuai prinsip syariah.
   - Peningkatan kualitas infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat;
   - Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian, diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
   - Pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah sektor perkebunan;
   - Peningkatan produksi sektor kelautan, perikanan (budidaya dan tangkap) serta penguatan sistem rantai dingin (*cold chain)* dan infrastruktur pelabuhan;
   - Pengembangan skema pembiayaan ekonomi masyarakat yang inklusif;
   - Pembentukan inkubasi wirausaha dan ekonomi kreatif;
   - Penciptaan iklim usaha kondusif dan pelayanan peizinan yang cepat dan transparan;
   - Promosi potensi investasi daerah;

- Pengembangan destinasi unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya;
- Peningkatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah serta penguatan Koperasi termasuk Koperasi Merah Putih;
- Penguatan upaya pengendalian inflasi daerah;
- Pemberdayaan ekonomi desa dan perempuan dalam mendukung kemandirian ekonomi terutama bagi masyarakat miskin;
- Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal;
- Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- Peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal (transjateng).

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup :
   - Pembangunan TPST Sentul sebagai langkah dalam menghadapi Perkembangan kawasan industri di kabupaten Batang;
   - Pengelolaan sampah dari hulu dengan pengurangan timbulan dan pemilahan sampah mandiri;
   - Pengawasan terhadap limbah industri dan implementasi AMDAL;
   - Penguatan Ketahanan Daerah terhadap dampak perubahan iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan alternatif pendanaan, serta integrasi adaptasi iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang;

- Mendorong transisi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat serta Integrasi perspektif gender dalam pembangunan responsif terhadap iklim dan tangguh bencana;
- Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam, salah satunya untuk peningkatan kepariwisataan berbasis lingkungan;
- Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dan penanganan kumuh dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- Penguatan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK;
- Peningkatan kualitas RTH meliputi taman, lapangan desa, peningkatan vegetasi pada jalur hijau seperti tepian jalan dan median jalan, serta memperketat penyediaan RTH oleh pengembang perumahan.
- Pemanfaatan RTH dalam mendukung aktivitas publik.

4. Peningkatan Kondusivitas wilayah :
   - Deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan wilayah;
   - Penguatan sinergitas antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat;
   - Mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas;
   - Menumbuhkan kesadaran hukum dan toleransi di masyarakat.
5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan :
   - Peningkatan kualitas layanan publik yang lebih adaptif berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;
   - Penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara;
   - Pemantapan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan;
   - Peningkatan integritas organisasi penyelenggara pemerintahan;
   - Optimalisasi kualitas belanja daerah;

- Peeningkatan kualitas perencanaan berbasis riset, data, dan risiko;
- Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi perekonomian;
- Penyusunan mitigasi risiko bencana dan pangan;
- Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat;
- Pemantapan tata kelola dan basis data kemiskinan;
- Pemantapan kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan serta penyediaan pelayanan secara inklusif dan responsif;
- Pemantapan tata kelola pemerintahan desa;
- Memperluas Alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penguatan pembiayaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2028

Arah kebijakan pembanguann daerah tahun 2028 fokus diarahkan pada kebijakan **"Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Industri Ramah Lingkungan"** dengan upaya prioritas sebagai berikut :

1. Pengembangan potensi UMKM dalam rantai pasok dalam industri dengan mendorong tumbuhnya usaha baru dan fasilitasi pelatihan pengembangan;
2. Mendorong investasi industri bersih (*clean industry*) dan simplifikasi perizinan;
3. Penerapan regulasi dan pengawasan dalam pemanfaatan air baku industri yang ramah lingkungan dan pengolahan limbah dan pengurangan emisi industri;
4. Peningkatan pengolahan sampah di TPST dan mendorong pemanfaatan limbah (domestik atau nom-domestik) sebagai bahan baku baru dalam proses produksi (*circular economy*) serta Kampanye pengurangan sampah, penggunaan ulang produk, pemilahan sampah dari rumah dan pengolahan sampah berbasis desa;

5. Dukungan riset untuk teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dengan kolaborasi multi pihak;
6. Pengembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
7. Peningkatan kapasitas sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta jasa lainnya berbasis kearifan lokal sebagai penyangga ekonomi non-industri;
8. Pengembangan kawasan penyangga KEK Industropolis dan Kawasan Industri lain dalam hal penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dan permukiman serta pengembangan angkutan umum;
9. Mendorong transisi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi untuk mendukung ekonomi hijau.
10. Pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri serta sinkronisasi kurikulum dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan kompetensi industri serta Program sertifikasi tenaga kerja lokal.

Tahap ketiga ini juga diarahkan untuk percepatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang meliputi :

1. Percepatan pembentukan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter :
   - Pemerataan akses layanan pendidikan termasuk pesantren yang inklusif dan merata bagi kelompok rentan dalam mendukung pemenuhan wajib belajar (WAJAR) 13 tahun;
   - Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan serta penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah;
   - Penguatan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa melalui integrasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan peran Posyandu dalam penyelenggaraan layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat,

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), serta sosial;

- Percepatan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layananan kesehatan, penguatan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta mendorong pembiasaan masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan gizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan remaja;
- Pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas kepemudaan;
- Mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah;
- Menjamin perlindungan serta partisipasi anak dan perempuan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif;
- Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja layak untuk semua, utamanya bagi perempun dan kaum rentan melalui ekonomi keperawatan;
- Peningkatan peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
- Penguatan kolaborasi pemerintah dengan perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% dalam pemenuhan tenaga kerja formal khususnya sektor industri;
- Penyediaan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri;
- Peningkatan daya saing keolahragaan dan kepemudaan;
- Pengembangan inkubasi usaha dan wirausaha muda;
- Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan korban kekerasan;

- Perluasan akses pangan dan sistem monitoring ketahanan dan kerawanan pangan (*Early Warning System*) serta pencegahan pemborosan pangan.

2. Akselerasi perekonomian yang berdaya saing berbasis industri:
   - Peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan);
   - Percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang sebagai pusat industri yang mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar kawasan industri (Kawasan Penyangga);
   - Percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat;
   - Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian, diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
   - Pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah sektor perkebunan;
   - Peningkatan produksi sektor kelautan, perikanan (budidaya dan tangkap) serta penguatan sistem rantai dingin (*cold chain)* dan infrastruktur pelabuhan;
   - Pengembangan skema pembiayaan ekonomi masyarakat yang inklusif;
   - Penciptaan iklim usaha kondusif dan pelayanan peizinan yang cepat dan transparan;
   - Promosi potensi investasi daerah;
   - Pengembangan destinasi unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya;
   - Peningkatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah serta penguatan Koperasi termasuk Koperasi Merah Putih;

- Pemberdayaan UMKM berbasis syariah, melalui pelatihan kewirausahaan halal, sertifikasi produk halal, dan pembinaan manajemen usaha sesuai prinsip syariah;
- Pengembangan ekosistem ekonomi halal;
- Penguatan upaya pengendalian inflasi daerah;
- Pemberdayaan ekonomi desa dan perempuan dalam mendukung kemandirian ekonomi terutama bagi masyarakat miskin;
- Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal;
- Peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal (Trans Jateng).

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup :
   - Pembangunan TPST Sentul sebagai langkah dalam menghadapi Perkembangan kawasan industri di kabupaten Batang;
   - Pengelolaan sampah dari hulu dengan pengurangan timbulan dan pemilahan sampah mandiri;
   - Pengawasan terhadap limbah industri dan implementasi AMDAL, serta memastikan ketaatan industri dalam emisi gas karbon;
   - Penguatan Ketahanan Daerah terhadap dampak perubahan iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan alternatif pendanaan, serta integrasi adaptasi iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang;
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat serta Integrasi perspektif gender dalam pembangunan responsif terhadap iklim dan tangguh bencana;
   - Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

- Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dan penanganan kumuh dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- Penguatan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK;
- Peningkatan kualitas RTH meliputi taman, lapangan desa, peningkatan vegetasi pada jalur hijau seperti tepian jalan dan median jalan, serta memperketat penyediaan RTH oleh pengembang perumahan;
- Pemanfaatan RTH dalam mendukung aktivitas publik.

4. Penguatan Kondusivitas wilayah :
   - Deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan wilayah;
   - Penguatan sinergitas antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat;
   - Mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas;
   - Menumbuhkan kesadaran hukum dan toleransi di masyarakat.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan :
   - Peningkatan kualitas layanan publik yang lebih adaptif berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;
   - Penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara;
   - Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan;
   - Peningkatan integritas organisasi penyelenggara pemerintahan;
   - Optimalisasi kualitas belanja daerah;
   - Penguatan kualitas perencanaan berbasis riset, data, dan risiko;
   - Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi perekonomian;
   - Penyusunan mitigasi risiko bencana dan pangan;
   - Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat;
   - Penguatan tata kelola dan basis data kemiskinan;

- Peningkatan kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan serta penyediaan pelayanan secara inklusif dan responsif;
- Penguatan tata kelola pemerintahan desa;
- Memperluas Alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penguatan pembiayaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2029

Arah kebijakan pembanguann daerah tahun 2029 fokus diarahkan pada kebijakan **"Peningkatan Daya Saing Daerah menuju Batang Maju dan Mandiri"** dengan upaya prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui peningkatan akses layanan dan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan budaya literasi, serta peningkatan daya saing kepemudaan dan olahraga;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan merata;
3. Penciptaan iklim investasi yang berkelanjutan;
4. Pemantapan sistem perlindungan sosial yang adaptif;
5. Pemantapan pembangunan berbasis gender;
6. Peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja lokal dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja industri;
7. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.

Tahap keempat ini juga diarahkan untuk pemantapan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang meliputi :

1. Pemantapan pembentukan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter :
   - Pemantapan akses layanan pendidikan termasuk pesantren yang inklusif dan merata bagi kelompok rentan dalam mendukung pemenuhan wajib belajar (WAJAR) 13 tahun;

- Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan serta penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah;
- Penguatan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa melalui integrasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan peran Posyandu dalam penyelenggaraan layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), serta sosial;
- Pemantapan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layananan kesehatan, penguatan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta mendorong pembiasaan masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan gizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan remaja;
- Pemantapan pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas kepemudaan;
- Mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah;
- Menjamin perlindungan serta partisipasi anak dan perempuan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif;
- Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja layak untuk semua, utamanya bagi perempun dan kaum rentan melalui ekonomi keperawatan;
- Peningkatan peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
- Pemantapan kolaborasi pemerintah dengan perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% dalam pemenuhan tenaga kerja formal khususnya sektor industri;

- Penyediaan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri;
- Peningkatan daya saing keolahragaan dan kepemudaan;
- Pengembangan inkubasi usaha dan wirausaha muda;
- Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan korban kekerasan;
- Perluasan akses pangan dan sistem monitoring ketahanan dan kerawanan pangan (*Early Warning System*) serta pencegahan pemborosan pangan.

2. Pemantapan perekonomian yang berdaya saing berbasis industri:
   - Peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan);
   - Percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang sebagai pusat industri yang mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar kawasan industri (Kawasan Penyangga);
   - Integrasi UMKM dalam mendukung rantai pasok industri;
   - Pemberdayaan UMKM berbasis syariah, melalui pelatihan kewirausahaan halal, sertifikasi produk halal, dan pembinaan manajemen usaha sesuai prinsip syariah;
   - Pemantapan ekosistem ekonomi halal;
   - Pemantapan kualitas infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat;
   - Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian, diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
   - Pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah sektor perkebunan;

- Peningkatan produksi sektor kelautan, perikanan (budidaya dan tangkap) serta penguatan sistem rantai dingin (*cold chain)* dan infrastruktur pelabuhan;
- Pengembangan skema pembiayaan ekonomi masyarakat yang inklusif;
- Pemantapan iklim usaha kondusif dan pelayanan peizinan yang cepat dan transparan;
- Promosi potensi investasi daerah;
- Peningkatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah serta penguatan Koperasi termasuk Koperasi Merah Putih;
- Pemantapan upaya pengendalian inflasi daerah;
- Pemberdayaan ekonomi desa dan perempuan dalam mendukung kemandirian ekonomi terutama bagi masyarakat miskin;
- Pemantapan pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal;
- Mendorong transisi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi;
- Peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal (trans jateng).

3. Pemantapan peningkatan kualitas lingkungan hidup :
   - Pembangunan TPST Sentul sebagai langkah dalam menghadapi Perkembangan kawasan industri di kabupaten Batang;
   - Pengelolaan sampah dari hulu dengan pengurangan timbulan dan pemilahan sampah mandiri;
   - Pengawasan terhadap limbah industri dan implementasi AMDAL;
   - Penguatan Ketahanan Daerah terhadap dampak perubahan iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis

seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan alternatif pendanaan, serta integrasi adaptasi iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang;

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat serta Integrasi perspektif gender dalam pembangunan responsif terhadap iklim dan tangguh bencana;
- Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dan penanganan kumuh dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- Penguatan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK;
- Peningkatan kualitas RTH meliputi taman, lapangan desa, peningkatan vegetasi pada jalur hijau seperti tepian jalan dan median jalan, serta memperketat penyediaan RTH oleh pengembang perumahan;
- Pemanfaatan RTH dalam mendukung aktivitas publik.

4. Pemantapan Kondusivitas wilayah :
   - Deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan wilayah;
   - Penguatan sinergitas antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat;
   - Mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas;
   - Pemantapan masyarakat dengan kesadaran hukum dan toleransi yang tinggi.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan :
   - Pemantapan kualitas layanan publik yang lebih adaptif berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;
   - Penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara;
   - Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan;

- Peningkatan integritas organisasi penyelenggara pemerintahan;
- Optimalisasi kualitas belanja daerah;
- Penguatan kualitas perencanaan berbasis riset, data, dan risiko;
- Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi perekonomian;
- Penyusunan mitigasi risiko bencana dan pangan;
- Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat;
- Penguatan tata kelola dan basis data kemiskinan;
- Peningkatan kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan serta penyediaan pelayanan secara inklusif dan responsif;
- Penguatan tata kelola pemerintahan desa;
- Memperluas Alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penguatan pembiayaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2030

Arah kebijakan pembanguann daerah tahun 2030 fokus diarahkan pada kebijakan **"Perwujudan Kabupaten Batang yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing"** dengan upaya prioritas sebagai berikut :

1. Perwujudan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter:
   - Percepatan akses layanan pendidikan termasuk pesantren yang inklusif dan merata bagi kelompok rentan dalam mendukung pemenuhan wajib belajar (WAJAR) 13 tahun;
   - Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan serta penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah;
   - Penguatan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa melalui integrasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan peran Posyandu dalam penyelenggaraan layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat,

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), serta sosial;

- Percepatan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta mendorong pembiasaan masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan gizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan remaja;
- Pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas kepemudaan;
- Mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah;
- Menjamin perlindungan serta partisipasi anak dan perempuan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif;
- Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja layak untuk semua, utamanya bagi perempun dan kaum rentan melalui ekonomi keperawatan;
- Peningkatan peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
- Penguatan kolaborasi pemerintah dengan perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% dalam pemenuhan tenaga kerja formal khususnya sektor industri;
- Penyediaan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri;
- Peningkatan daya saing keolahragaan dan kepemudaan;
- Pengembangan inkubasi usaha dan wirausaha muda;
- Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan korban kekerasan;

- Perluasan akses pangan dan sistem monitoring ketahanan dan kerawanan pangan (*Early Warning System*) serta pencegahan pemborosan pangan.

2. Perwujudan perekonomian yang berdaya saing berbasis industri:
   - Peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan);
   - Percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang sebagai pusat industri yang mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar kawasan industri (Kawasan Penyangga);
   - Integrasi UMKM dalam mendukung rantai pasok industri;
   - Perwujudan UMKM berbasis syariah yang berdaya saing;
   - Perwujudan ekosistem ekonomi halal;
   - Percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat;
   - Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian, diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
   - Pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah sektor perkebunan;
   - Peningkatan produksi sektor kelautan, perikanan (budidaya dan tangkap) serta penguatan sistem rantai dingin (*cold chain)* dan infrastruktur pelabuhan;
   - Pengembangan skema pembiayaan ekonomi masyarakat yang inklusif;
   - Penciptaan iklim usaha kondusif dan pelayanan peizinan yang cepat dan transparan;
   - Promosi potensi investasi daerah;
   - Peningkatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, pariwisata berkelanjutan dan

ekonomi syariah serta penguatan Koperasi termasuk Koperasi Merah Putih;
- Pemantapan upaya pengendalian inflasi daerah;
- Pemberdayaan ekonomi desa dan perempuan dalam mendukung kemandirian ekonomi terutama bagi masyarakat miskin;
- Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal.
- Peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal (Trans Jateng).

3. Perwujudan peningkatan kualitas lingkungan hidup :
   - Pembangunan TPST Sentul;
   - Pengelolaan sampah dari hulu dengan pengurangan timbulan dan pemilahan sampah mandiri;
   - Pengawasan terhadap limbah industri dan implementasi AMDAL;
   - Penguatan Ketahanan Daerah terhadap dampak perubahan iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan alternatif pendanaan, serta integrasi adaptasi iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang;
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat serta Integrasi perspektif gender dalam pembangunan responsif terhadap iklim dan tangguh bencana;
   - Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
   - Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dan penanganan kumuh dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
   - Penguatan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK;
   - Peningkatan kualitas RTH meliputi taman, lapangan desa, peningkatan vegetasi pada jalur hijau seperti tepian jalan dan median

jalan, serta memperketat penyediaan RTH oleh pengembang perumahan;
- Pemanfaatan RTH dalam mendukung aktivitas publik.

4. Perwujudan Kondusivitas wilayah :
   - Deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan wilayah;
   - Perwujudan sinergitas antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat;
   - Mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas;
   - Perwujudan masyarakat dengan kesadaran hukum dan toleransi.
5. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan :
   - Perwujudan kualitas layanan publik yang lebih adaptif berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;
   - Perwujudan penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara;
   - Perwujudan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan yang profesional;
   - Perwujudan integritas organisasi penyelenggara pemerintahan;
   - Optimalisasi kualitas belanja daerah;
   - Perwujudan perencanaan berbasis riset, data, dan risiko;
   - Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi perekonomian;
   - Perwujudan mitigasi risiko bencana dan pangan;
   - Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat;
   - Perwujudan kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan serta penyediaan pelayanan secara inklusif dan responsif;
   - Perwujudan tata kelola pemerintahan desa;
   - Memperluas Alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penguatan pembiayaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan pada setiap Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera		
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis Misi 2: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh Misi 3 : Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan Misi 4: Akselerasi Ekonomi Misi 5 : Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi Infrastruktur sampai ke Pelosok Desa. Misi 6 : Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan Misi 7 : Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial Misi 8 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter	1. Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan - Pemerataan akses layanan pendidikan termasuk pesantren yang inklusif dan merata bagi kelompok rentan dalam mendukung pemenuhan wajib belajar (WAJAR) 13 tahun; - Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan serta penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah; - Pemantapan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi; - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layananan kesehatan, penguatan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta mendorong pembiasaan masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan gizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan remaja; - Penguatan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa melalui integrasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan peran Posyandu dalam penyelenggaraan layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), serta sosial/ 2. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pembangunan kepemudaan; 3. Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga-lembaga pendidikan dalam penyediaan tenaga kerja; - Pemetaan kebutuhan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri; - Penguatan pembangunan keolahragaan dan kepemudaan; - Pengembangan inkubasi usaha dan wirausaha muda.
			4. Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kebudayaan - Pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas kepemudaan; 5. Pembangunan sosial masyarakat yang inklusif dengan memastikan pemenuhan hak anak, menjamin kesetaraan gender dalam pembangunan, serta memperkuat ketahanan keluarga

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
			- Mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah; - Menjamin perlindungan serta partisipasi anak dan perempuan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif - Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja layak untuk semua, utamanya bagi perempun dan kaum rentan melalui ekonomi keperawatan; - Peningkatan peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
			6. Pengentasan kemiskinan berbasis desa melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal dan peningkatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan; 7. Penguatan kolaborasi multisektor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat - Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan korban kekerasan; - Pemberdayaan ekonomi desa dan perempuan dalam mendukung kemandirian ekonomi terutama bagi masyarakat miskin; - Perbaikan tata kelola dan basis data kemiskinan; - Penguatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dan daerah serta penguatan Koperasi termasuk Koperasi Merah Putih; - Pemerataan infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat terutama bagi masyarakat miskin; - Penyempurnaan regulasi serta memperkuat kerjasama kolaboratif dan multisektor (Pemerintah dalam pencapaian pembangunan daerah;
		Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing berbasis industri	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung konektivitas antar wilayah serta pngembangan sektor perdagangan dan jasa; 2. Pengembangan dan penetapan zonasi kawasan ekonomi dan infrastruktur yang berfokus pada sektor unggulan - Pemetaan potensi ekonomi lokal di sektor unggulan (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan, dan UMKM); - Peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan); - Mendorong percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang sebagai pusat industri yang mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar kawasan industri (Kawasan Penyangga); - Integrasi UMKM dalam mendukung rantai pasok industri; - Pembentukan ekosistem ekonomi halal; - Pemberdayaan UMKM berbasis syariah, melalui pelatihan kewirausahaan halal, sertifikasi produk halal, dan pembinaan manajemen usaha sesuai prinsip syariah; - Pengembangan skema pembiayaan ekonomi masyarakat yang inklusif;

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
			- Penciptaan iklim usaha kondusif dan pelayanan peizinan yang cepat dan transparan; - Promosi potensi investasi daerah; - Peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal; - Pengembangan potensi UMKM dalam rantai pasok dalam industri dengan mendorong tumbuhnya usaha baru dan fasilitasi pelatihan pengembangan; - Mendorong investasi industri bersih (clean industry) dan simplifikasi perizinan; - Penerapan regulasi dan pengawasan dalam pemanfaatan air baku industri yang ramah lingkungan dan pengolahan limbah dan pengurangan emisi industri; - Peningkatan pengolahan sampah di TPST dan mendorong pemanfaatan limbah (domestik atau nom-domestik) sebagai bahan baku baru dalam proses produksi (circular economy) serta Kampanye pengurangan sampah, penggunaan ulang produk, pemilahan sampah dari rumah dan pengolahan sampah berbasis desa; - Dukungan riset untuk teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dengan kolaborasi multi pihak; - Pengembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); - Peningkatan kapasitas sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta jasa lainnya berbasis kearifan lokal sebagai penyangga ekonomi non-industri; - Pengembangan kawasan penyangga KITB dan Kawasan Industri lain dalam hal penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dan permukiman serta pengembangan angkutan umum; - Pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri serta sinkronisasi kurikulum dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan kompetensi industri serta Program sertifikasi tenaga kerja lokal. 3. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah dan akses pelayanan dasar - Percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat; - Peningkatan Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal.
			4. Mengoptimalkan potensi alam dan budaya Batang untuk menjadi daya tarik wisata utama dengan memanfaatkan peluang pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan 5. Pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif daerah - Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal; - Penguatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dan daerah;

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
			- Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal. - Pemantapan *Grand Design* Pembangunan Pariwisata; - Pengembangan destinasi unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya; - Penerapan prinsip sustainable tourism dilakukan melalui pendekatan 5A (aksesibilitas, akomodasi, atraksi, aktivitas, dan amenitas) dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk pengembangan masyarakat sadar wisata yang ramah dan memiliki keunikan lokal; - Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan UMKM Pariwisata; - Peningkatan kecakapan dan keahlian SDM pariwisata; - Penguatan produk kreatif lokal yang terintegrasi dengan kegiatan wisata dan kebudayaan lokal; - Peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata dan sarana pendukungnya; - Peningkatan promosi melalui platform digital, media sosial, dan kolaborasi dengan *influencer* atau duta wisata serta pembangunan citra *(branding*) daerah untuk meningkatkan *awareness*; - Memastikan terjaganya kelestarian lingkungan dan kebudayaan lokal dalam pengembangan pariwisata daerah.
			6. Penguatan sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, serta merespons tren pasar produk pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. 7. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan - Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian, diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; - Pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah sektor perkebunan; - Peningkatan produksi sektor kelautan, perikanan (budidaya dan tangkap) serta penguatan sistem rantai dingin (*cold chain)* dan infrastruktur pelabuhan; - Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian, diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; - Pengembangan cold storage dan sistem logistik ikan segar dan olahan; - Perluasan akses pangan dan Pemanfaatan Pangan yang Aman, Bergizi, dan Berkelanjutan; - Peningkatan infrastruktur pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan; - Pencegahan pemborosan pangan; - Penyediaan pangan lokal dan berkelanjutan; - Peningkatan konsumsi ikan melalui kampanye gizi dan edukasi masyarakat (gemarikan); - Mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi lokal;

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
			- Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian berkelanjutan; - Penguatan cadangan dan sistem monitoring ketahanan dan kerawanan pangan (*Early Warning System*);
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pengembangan program konservasi tanah dan air untuk melindungi kualitas tanah dan mendukung pembangunan berkelanjutan 2. Penerapan prinsip *Circular Economy* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 3. Penguatan perlindungan terhadap ekosistem 4. Mendorong pengembangan industri ramah lingkungan dalam mendukung *clean industrial city* - Pembangunan TPST Sentul sebagai langkah dalam menghadapi Perkembangan kawasan industri di kabupaten Batang; - Pengelolaan sampah dari hulu dengan pengurangan timbulan dan pemilahan sampah mandiri; - Pengawasan terhadap limbah industri dan implementasi AMDAL; - Penguatan Ketahanan Daerah terhadap dampak perubahan iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan alternatif pendanaan, serta integrasi adaptasi iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang; - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat serta Integrasi perspektif gender dalam pembangunan responsif terhadap iklim dan tangguh bencana; - Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam; - Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dan penanganan kumuh dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; - Mendorong transisi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi; - Penguatan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK; - Pemanfaatan RTH dalam mendukung aktivitas publik; - Peningkatan kualitas RTH meliputi taman, lapangan desa, peningkatan vegetasi pada jalur hijau seperti tepian jalan dan median jalan, serta memperketat penyediaan RTH oleh pengembang perumahan.

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
		Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal	1. Memperluas alternatif sumber pendanaan serta Mendorong kemitraan publik-swasta (PPP) dalam proyek pembangunan infrastruktur - Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi perekonomian; 2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif dan inovatif - Pemantapan kualitas layanan publik yang lebih adaptif berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien; - Penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara; - Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan; - Peningkatan integritas organisasi penyelenggara pemerintahan; - Optimalisasi kualitas belanja daerah; - Penguatan kualitas perencanaan berbasis riset, data, dan risiko; - Penyusunan mitigasi risiko bencana dan pangan; - Perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat; 3. Penguatan tata kelola dan basis data kemiskinan; 4. Peningkatan kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan serta penyediaan pelayanan secara inklusif dan responsif; 5. Penguatan tata kelola pemerintahan desa; 6. Memperluas Alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penguatan pembiayaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
		Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif	1. Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kebudayaan - Deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan wilayah; - Penguatan sinergitas antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat; - Mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas; - Pemantapan masyarakat dengan kesadaran hukum dan toleransi yang tinggi.

Sumber : Bapperida, 2025

d. Arah Kebijakan Sektoral Pembangunan Daerah

1) Masterplan Pembangunan Daerah

Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi ekonomi dan pembangunan yang terus berkembang. Terletak di jalur strategis Pantai Utara Jawa (Pantura) dan berdekatan dengan Kota Semarang serta Pelabuhan Tanjung Emas, Batang memiliki keunggulan dalam aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Batang telah mengalami peningkatan investasi, terutama dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Kehadiran KITB diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri, serta penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Selain sektor industri, Kabupaten Batang juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata, perikanan, dan pertanian. Destinasi wisata seperti Pantai Sigandu, Ujung Negoro, serta potensi wisata agro di daerah perbukitan memberikan peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya. Sementara itu, sektor perikanan dan pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk, memerlukan penguatan dalam hal modernisasi, rantai distribusi, dan akses pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif telah disusun masterplan pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Kabupaten Batang yang membagi wilayah ke dalam lima zona pengembangan utama, yaitu:

a) **Zona Pertanian dan Agro Wisata** – Zona ini berlokasi di wilayah Kecamatan Wonotunggal, Warungasem, Bandar, Blado, Reban, Bawang, dan Tersono, yang berfokus pada pengembangan sektor agroproduksi dan agroindustri guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemasaran komoditas lokal unggulan. Selain itu juga mengembangkan sektor pariwisata berbasis pertanian dengan konsep

wisata edukasi, perkebunan, dan peternakan. Kawasan ini akan menjadi daya tarik wisata alternatif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor agrowisata yang terintegrasi.

b) **Zona Industri** – Sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi nasional, KITB menjadi motor utama penggerak ekonomi Kabupaten Batang dengan sektor manufaktur, otomotif, elektronik, dan industri berbasis teknologi tinggi. Zona ini mencakup wilayah Kecamatan Subah, Banyuputih, Gringsing, Limpung, Tersono, dan Tulis. Pada zona ini diperlukan sinkronisasi dalam penataan kawasan karena menjadi pusat pertumbuhan baru yang harus menompang aktivitas yang sangat tinggi sehingga diperlukan integrasi transportasi umum dan penyediaan perumahan atau hunian masyarakat.

c) **Zona Bahari** – Berfokus pada pengembangan wisata bahari dan sektor perikanan berbasis teknologi untuk meningkatkan daya tarik wisata serta kesejahteraan nelayan. Kawasan ini mencakup destinasi seperti Pantai Sigandu dan Ujung Negoro, dengan rencana penguatan ekowisata dan konservasi pesisir. Selain itu juga terdapat arahan untuk pengembangan perikanan tangkap melalui peningkatan pelabuhan. Zona ini berlokasi di Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman.

d) **Zona Pendidikan** – Dirancang sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dengan fasilitas pendidikan berkualitas, baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Penguatan kawasan ini diharapkan dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di sektor industri dan ekonomi kreatif. Zona ini berada di Kecamatan Bandar sebagai pusat pengembangan akademik. Zona pendidikan menjadi salah satu zona dengan lingkup perkotaan sehingga dapat disusun lebih detal dalam rencana detail dalam penataan ruangnya.

e) **Zona Pemerintahan** – Difokuskan sebagai kawasan perkantoran dan pusat layanan publik yang terintegrasi, dengan konsep tata ruang yang efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Zona ini berlokasi di wilayah Kecamatan Batang.

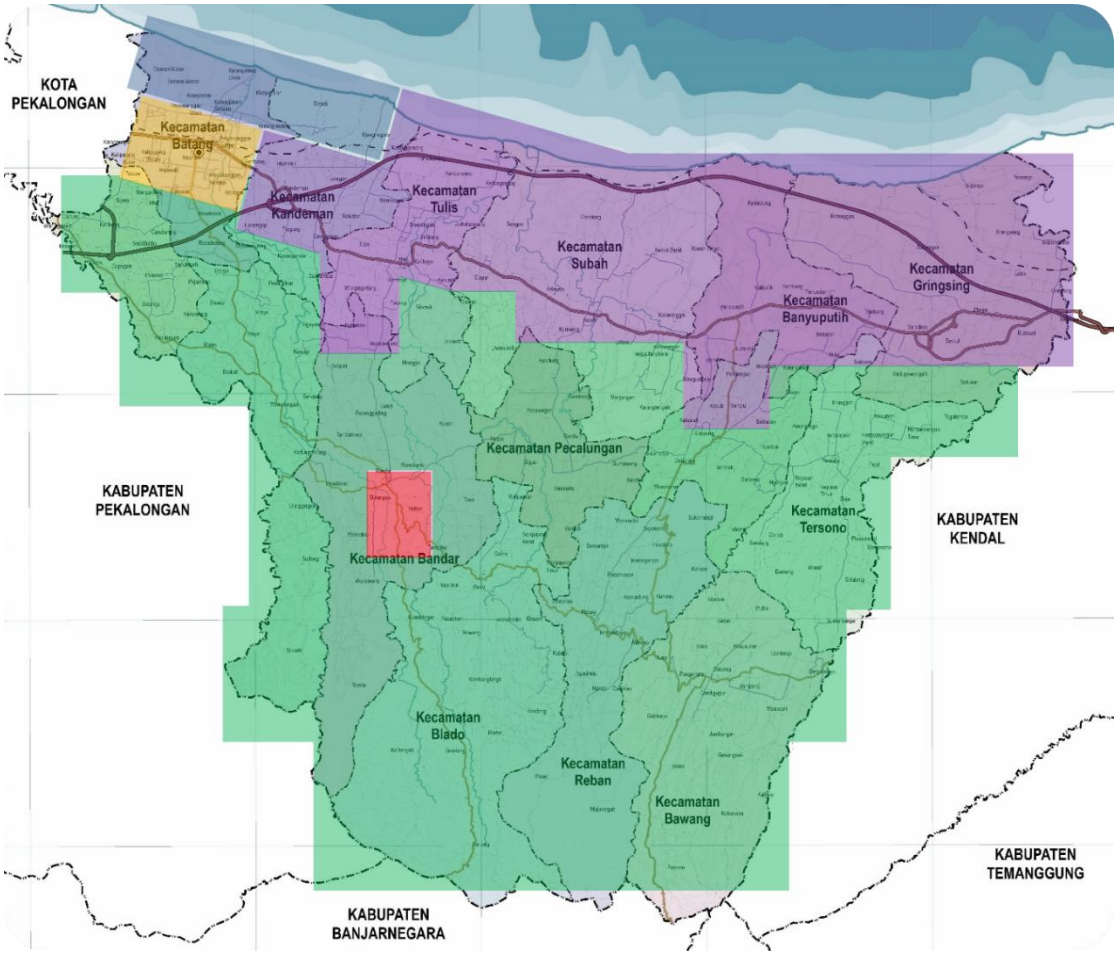

Gambar 3. 11 Zona Pengembangan Utama

Sumber : Masterplan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

Dengan adanya pembagian zona ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Batang dapat lebih terarah dan optimal, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan. Masterplan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, mendorong pertumbuhan industri dan investasi, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk menjadikan 5 zona tersebut dapat bersinergi perlu adanya integrasi. Integrasi ini dipengaruhi oleh Sistem jaringan transportasi merupakan elemen krusial dalam mendukung konektivitas dan mobilitas suatu wilayah. Dalam konteks Kabupaten Batang, perencanaan sistem transportasi mencakup Rencana Pengembangan Terminal dan Rencana Pengembangan Trayek Angkutan umum. Diarahkan pengembangan Trayek

angkutan BRT Trans Jateng dengan trayek Gringsing-Batang-Terminal Kota Pekalongan.

Melalui Strategi Pengembangan Wilayah ini, Kabupaten Batang diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan, serta mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

2) Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan disusun untuk mendorong pemerataan pembangunan, pemanfaatan potensi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan kawasan. Kebijakan ini dijalankan secara bertahap dan terstruktur mulai dari identifikasi potensi hingga implementasi program lintas sektor.

Secara umum, arah kebijakan Pembangunan Kawasan Pedesaan meliputi:

1️⃣ Identifikasi Potensi Kawasan Perdesaan

Pemetaan dan analisis potensi kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan dan analisis spasial akan menjadi dasar penentuan kawasan prioritas yang layak dikembangkan.

2️⃣ Penguatan Kelembagaan & Penetapan Kawasan

Penguatan kelembagaan di tingkat daerah dengan membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan. Penetapan kawasan dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPKP) untuk periode 2025–2029.

3️⃣ Sinergi Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah

Sinkronisasi program dan kegiatan di berbagai perangkat daerah. Identifikasi program prioritas dilakukan untuk menjawab kebutuhan nyata di kawasan perdesaan. Selanjutnya dilakukan analisis supply-demand dan integrasi pelaksanaan program agar efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3) Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Batang, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Kabupaten Batang

tahun 2025-2029 diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

a) Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
b) Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat miskin.
c) Strategi Penurunan wilayah kantong kemiskinan dengan mensinergikan kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi.

Strategi utama tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor serta didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kewilayahan/spasial. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sedangkan untuk pendekatan kewilayahan difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala dan dimensi spasial yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kewilayahan antara lain: 1) Integrasi Program Pembangunan Daerah Berbasis Kawasan, 2) Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan infrastruktur dasar penunjang ekonomi, dan 3) Pengembangan potensi lokal. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan CSR di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

4) Arah Kebijakan Deteksi Dini Faktor Risiko dan Surveilans Penyakit

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, deteksi dini terhadap faktor risiko dan kasus penyakit, serta penguatan

sistem surveilans, menjadi elemen strategis dalam pembangunan kesehatan daerah. Arah kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan sistem kesehatan dalam mengenali potensi masalah kesehatan sejak dini, baik yang bersumber dari perilaku, lingkungan, maupun penularan penyakit, guna memungkinkan intervensi yang cepat dan tepat. Kebijakan deteksi dini diarahkan untuk mencakup dua spektrum utama yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular.

a) Penyakit Menular

Untuk penyakit menular, deteksi dini dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan terhadap gejala awal, penjangkauan populasi kunci berisiko tinggi, perluasan skrining dan pelacakan kontak erat, serta penguatan surveilans berbasis masyarakat. Penyakit seperti Aids, Tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS dan Malaria menjadi fokus utama deteksi dini untuk mencegah kejadian luar biasa dan kematian yang dapat dicegah.

b) Penyakit Tidak Menular

Sementara itu, untuk penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan kanker, deteksi dini difokuskan pada peningkatan cakupan skrining populasi berisiko tinggi. Kegiatan skrining dilakukan melalui cek kesehatan gratis, Integrasi Layanan Primer (ILP), dan kegiatan masyarakat lainnya. Deteksi dini terhadap faktor risiko seperti obesitas, konsumsi tembakau (merokok), pola makan tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik menjadi landasan intervensi promotif dan preventif yang berbasis bukti.

Arah kebijakan ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan, yang meliputi balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas.

(1) Untuk balita, kebijakan diarahkan pada deteksi dini gangguan pertumbuhan, perkembangan, gizi buruk, stunting, dan penyakit infeksi melalui Posyandu, serta pencatatan hasil pemantauan ke dalam sistem e-PPGBM dan surveilans lainnya.

(2) Pada ibu hamil, dilakukan deteksi dini risiko kehamilan berisiko tinggi dan penyakit penyerta seperti anemia dan hipertensi kehamilan.

(3) Bagi lansia, diarahkan pada deteksi dini penyakit kronis, gangguan kognitif, serta perawatan jangka panjang berbasis keluarga dan komunitas.

(4) Sedangkan untuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal, diarahkan pada upaya identifikasi hambatan akses pelayanan serta pemantauan kondisi kesehatan yang spesifik.

Di sisi lain, sistem surveilans penyakit ditingkatkan secara menyeluruh, mencakup surveilans berbasis fasilitas kesehatan, surveilans laboratorium, dan surveilans berbasis masyarakat. Sistem ini diperkuat untuk mendeteksi tren penyakit, memantau cakupan intervensi, serta memberikan peringatan dini terhadap potensi wabah.

Arah kebijakan ini juga menekankan pentingnya integrasi lintas program dan lintas sektor, agar pelaksanaan deteksi dini dan surveilans tidak berjalan secara sektoral. Kolaborasi dengan sektor pendidikan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan sektor swasta difasilitasi untuk memperkuat upaya promotif-preventif. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui edukasi, pelaporan gejala secara mandiri, serta penguatan peran kader kesehatan dan tokoh masyarakat akan membentuk sistem kewaspadaan dini berbasis komunitas yang tangguh.

Melalui arah kebijakan ini, sistem kesehatan daerah diharapkan memiliki kemampuan deteksi dan respons yang adaptif, serta mampu mencegah dan mengendalikan penyakit secara lebih efektif demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

5) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan prioritas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan tersedianya layanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dalam dokumen perencanaan ini, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan layanan dasar sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Arah Kebijakan secara umum

a) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
- Penguatan sistem tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung pencapaian SPM.

b) Penguatan Infrastruktur Layanan Dasar
- Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Penyediaan aksesibilitas layanan untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

c) Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan
- Memperluas cakupan layanan imunisasi, pendidikan dasar, air bersih, dan hunian layak.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang terukur dan berbasis kebutuhan lokal.

d) Optimalisasi Anggaran Berbasis Kinerja
- Alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pelayanan dasar dengan pendekatan berbasis hasil (outcome-based budgeting).
- Mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya untuk mendukung pencapaian indikator SPM.

e) Kolaborasi dengan Stakeholder
- Membangun kemitraan dengan sektor swasta (melalui program CSR), organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor untuk mempercepat pemenuhan layanan dasar.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan dasar.

f) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan
- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan bersinergi antar perangkat daerah penyelenggara SPM untuk memastikan capaian indikator SPM dapat diukur secara real-time dan akuntabel.

- Menyusun laporan hasil koordinasi kinerja pemenuhan SPM secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Arah Kebijakan Bidang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal :

a) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Capaian SPM bidang pendidikan terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 78,56 persen dengan kategori ”Tuntas Pratama”, naik menjadi sebesar 89,04 persen dengan kategori ”Tuntas Madya” di tahun 2023. Tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 96,19 persen dengan kategori ”Tuntas Utama”. Meskipun indeks SPM pendidikan semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa indikator SPM yang perlu mendapat perhatian karena capaiannya yang masih rendah yaitu proporsi PTK bersertifikat dan PTK penggerak pada jenjang pendidikan dasar serta kemampuan literasi dan kemampuan numerasi pada jenjang pendidikan kesetaraan. Sedangkan sebagian indikator lainnya meskipun capaiannya tidak terlalu rendah, namun masih belum mencapai angka yang ditargetkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan difokuskan pada:

(1) Pemenuhan standar pendidikan.

(2) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik, dilaksanakan melalui pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif; kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor serta **peningkatan profesionalitas** guru/pendidik dan tenaga kependidikan.

(3) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan melalui pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik juga dilaksanakan melalui: a. pemberian

bantuan biaya pendidikan **(beasiswa) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu**; b. Peningkatan pemenuhan layanan pendidikan jenjang PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; serta d. penyediaan layanan pendidikan di wilayah kantong kemiskinan.

Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan pelaksanaan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah, pemberian **biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu**; penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau

(4) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan melalui: sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi; fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan; pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak; pemeliharaan dan **perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak** sedang dan rusak berat; pemberian **tunjangan kepada guru honorer** jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan, **serta pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak**.

b) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Capaian SPM bidang kesehatan terus meningkat dari tahun 2022 sebesar 88,50 persen dengan kategori ”Tuntas Madya”, meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 99,63 persen dengan kategori ”Tuntas Utama”. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pemenuhan SPM bidang kesehatan menjadi ”Tuntas Paripurna” maka arah kebijakan yang diambil adalah

mengoptimalkan layanan kesehatan pada semua siklus kehidupan dengan difokuskan pada :

(1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di setiap desa serta pelaksanaan ILP di semua desa;
(2) Meningkatkan kualitas layanan RSUD dan puskesmas, melalui peningkatan dukungan sarpras dan tenaga kesehatan yang memadai;
(3) Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita;
(4) Penanganan dan penuntasan TB dan HIV;

Layanan program kesehatan gratis yang berupa **Layanan Gawat Darurat 24 Jam Ambulan Gratis, berobat gratis**, serta **bantuan persalinan dan sunat gratis**, utamanya pada keluarga rentan dan kurang mampu.

c) Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Dengan sasaran pelayanan sebagai berikut :

(1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari;
(2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

d) Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Dengan sasaran pelayanan sebagai berikut :

(1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
(2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

e) Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 2 sub urusan, yaitu :

(1) Sub Urusan Pemadam Kebakaran
(2) Sub Urusan Bencana

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan pemberian pelayanan standar minimal bidang trantibumlinmas, meliputi;

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat

b. yang terdampak penegakan hukum atas pelanggaran perda dan perkada berupa pemberian:

c. Ganti rugi materiil bagi warga negara yang terdampak baik kerugian materiil ringan, sedang atau berat akibat penegakan perda dan perkada;

d. Pengobatan bagi warga negara yang terdampak baik cacat ringan, sedang atau berat akibat penegakan perda dan perkada.

e. Pelayanan kebakaran kepada masyarakat yang mengalami kejadian

f. kebakaran berupa pelayanan respon time maksimal 15 menit sejak laporan diterima sampai dengan aparatur pemadam kebakaran tiba di tempat kejadi

f) Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Bidang Urusan Sosial, Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dengan pemberian pelayanan standar minimal bidang Sosial meliputi :

(1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti diberikan untuk pelayanan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Pemberian Layanan Rujukan, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat penyandang disabilitas;

(2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti diberikan bantuan sosial;

(3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;

(4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti diberikan untuk pelayanan penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, Pemberiana akses layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan dan pemberian layanan rujukan;

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota diberikan bantuan penyediaan sandang dan pelaksanaan Kampong Siaga Bencana.

6) Arah Kebijakan dalam mendukung Ekonomi Hijau *(Green Economy)*

Kabupaten Batang berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau. Konsep ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dan global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang adil dan ramah lingkungan.

Ekonomi hijau di Kabupaten Batang difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan lapangan kerja yang mendukung transisi menuju masa depan rendah karbon. Upaya ini tercermin dalam berbagai program dan kebijakan daerah, termasuk:

a) Pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik, pemanfaatan pupuk hayati, efisiensi penggunaan air, dan teknologi tepat guna.
b) Pemanfaatan energi terbarukan, termasuk potensi tenaga surya untuk penerangan jalan umum dan mikrohidro yang sedang dikembangkan pada wilayah pedesaan.
c) Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, melalui program bank sampah, daur ulang, dan pengurangan sampah plastik di sumber, serta pembangunan TPS3R dan TPST.
d) Konservasi kawasan hutan dan pesisir, sebagai bagian dari perlindungan ekosistem dan ketahanan iklim.
e) Pemberdayaan UMKM hijau, terutama yang bergerak di sektor *ecotourism*, kerajinan ramah lingkungan, dan produk berbasis daur ulang.
f) Pendidikan lingkungan untuk anak-anak sekolah dalam meningkatkan kesadaran ekologis.

7) Arah Kebijakan dalam mendukung Ekonomi Biru *(Blue Economy)*

Pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Batang menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Pendekatan yang berkelanjutan ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem laut serta memberikan peluang baru bagi pengembangan usaha berbasis kelautan yang ramah lingkungan. Melalui berbagai program dan aktivitas riil, Kabupaten Batang berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal sekaligus inklusif, sehingga ekonomi biru dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Upaya yang dilakukan antara lain:

a) Konservasi laut untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut.
b) Implementasi pengawasan penangkapan ikan untuk mencegah *overfishing.*
c) Pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan di wilayah pesisir dan daratan.
d) Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pengolahan hasil laut.
e) Penyediaan pelatihan kewirausahaan dan sertifikasi produk, termasuk sertifikasi halal.
f) Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi laut.
g) Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi produksi, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan.
h) Sinergi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem kelautan.
i) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pembangunan ekonomi biru.

3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.3.1.Program Kepala Daerah

Program prioritas dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Program Prioritas Kepala Daerah untuk periode RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebnayak 8 program yang terdiri dari :

1. Menyiapkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Program ini diarahkan untuk mencetak generasi yang cerdas, sehat, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan global di masa mendatang.

2. Menurunkan Pengangguran Melalui Pelatihan Berbasis Industri

Dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, pelatihan kerja akan difokuskan pada pendekatan berbasis kebutuhan industri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri akan terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pelatihan yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar kerja. Program yang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah ini dilaksanakan melalui **DAPAT KERJA (DAKER)** yang melibatkan seluruh *stakeholders* dan masyarakat termasuk Pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

3. Afirmasi Kepada UMKM

Dengan memberikan perhatian khusus terhadap penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat. Afirmasi dilakukan melalui pemberian akses permodalan, pelatihan manajerial dan digitalisasi, serta fasilitasi pemasaran produk. Diharapkan UMKM dapat tumbuh berkelanjutan, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

4. Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih menjadi prioritas utama guna membuka keterisolasian wilayah serta mendorong efisiensi distribusi barang dan jasa, selain itu juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Infrastruktur yang handal akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Program/aktivitas yang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah ini dilaksanakan melalui **Batang Terang dan Saber Lubang**. Program

ini bertujuan dalam peningkatan kualitas pencahayaan (LPJU) dan sapu bersih jalan berlubang.

5. Batang Hijau dan Bersih (Kelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah yang Menyeluruh)

Program ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah secara holistik. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi, serta penerapan teknologi ramah lingkungan akan terus diupayakan agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Program/aktivitas yang mendukung pencapaian Program Prioritas Kepala Daerah ini dilaksanakan melalui **Batang Hijau dan Bersih.** Program ini bertujuan dalam peningkatan kualitas udara dan alam Batang.

6. Perlindungan Sosial untuk Mengurangi Angka Kemiskinan dan Ketimpangan

Pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan program perlindungan sosial secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat miskin akan dilakukan dengan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan serta menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial secara signifikan.

7. Penciptaan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, program ini menitikberatkan pada penguatan integritas aparatur, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam mewujudkan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

8. Pembinaan dan Pengembangan Pengamalan Agama dan Kelestarian Budaya

Untuk menjaga harmonisasi sosial dan memperkuat jati diri daerah, pemerintah daerah akan terus membina kehidupan beragama yang moderat serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Kegiatan keagamaan dan kebudayaan akan difasilitasi secara inklusif sebagai bagian dari upaya

memperkuat identitas daerah dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman.

3.3.2.Program Strategik RPJMD Kabupaten Batang 2025–2030

1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi – Transjateng

Program ini berfokus pada penguatan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Batang melalui kehadiran layanan Transjateng. Pengoperasian transportasi publik ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang efisien, aman, dan terjangkau, serta menunjang akses ke pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan jaringan Transjateng, mobilitas masyarakat dari wilayah pinggiran ke pusat kota atau kawasan industri akan semakin lancar. Program ini merupakan Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, pengembangan feeder angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan Trans Jateng juga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan konektivitas kawasan industri dan wisata di Kabupaten Batang. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat, diharapkan sistem ini dapat menjadi tulang punggung mobilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Batang menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

2. Peningkatan Infrastruktur Pengairan

Infrastruktur pengairan yang memadai menjadi kebutuhan utama dalam mendukung produktivitas pertanian. Program ini meliputi rehabilitasi dan peningkatan sistem irigasi yang ada di Kabupaten Batang. Dengan memperkuat jaringan irigasi, lahan pertanian akan memiliki pasokan air yang stabil, sehingga mampu meningkatkan hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Program ini mendukung petani lokal sekaligus menekan dampak kekeringan akibat perubahan iklim.

3. Penerangan Jalan Umum (PJU)

Program ini diarahkan pada penguatan penerangan jalan juga bisa dikenal dengan Alat Penerangan Jalan (APJ) di seluruh wilayah Kabupaten Batang melalui Penerangan Jalan Umum Kabupaten Batang berdasarkan

hasil dokumen studi PJU. Penambahan titik lampu di ruas-ruas strategis akan menciptakan lingkungan yang lebih aman, memperlancar arus kendaraan di malam hari, dan mendukung aktivitas ekonomi malam. Program ini juga mendukung kenyamanan serta menurunkan potensi

kriminalitas di ruang publik. Pada proyek ini terdapat alternatif pembiayaan menggunakan skema Kerjasama antara Pemerintah daerah dengan Badan Usaha atau KPBU dalam pemenuhan infrastruktur ini. PJU yang digunakan juga merupakan alat yang hemat energi sehingga termasuk dalam infrastruktur konservasi energi.

4. Infrastruktur Sekolah dan Bantuan Pendidikan

Program ini terdiri dari beberapa inisiatif penting:

a) Rehabilitasi sekolah, terutama bangunan yang sudah tidak layak.
b) Beasiswa bimbingan belajar bagi siswa berprestasi untuk masuk perguruan tinggi negeri.
c) Bantuan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
d) Dukungan terhadap Program Sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu, sebagai bentuk inklusi pendidikan.

Kombinasi program ini bertujuan meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga Batang, khususnya kelompok rentan.

5. Penataan Ruang dan Kawasan Strategis

Pemerintah akan melakukan penataan kawasan strategis meliputi:

a) Ruang Terbuka Hijau
b) Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten
c) Fasilitas Umum dan Olahraga
d) Mendukung Pengembangan Stasiun Batang
e) Mendukung Pengembangan Pelabuhan Batang

6. Taman dan Videotron di tiap Kecamatan

Setiap kecamatan akan dilengkapi ruang terbuka hijau sebagai tempat masyarakat berkumpul, beraktivitas, dan berinteraksi sosial. Selain itu, akan dibangun videotron sebagai media promosi, destinasi wisata, serta sarana sosialisasi program pemerintah. Program ini menggabungkan aspek

estetika, komunikasi publik, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu sistem tata ruang yang terpadu.

7. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Beberapa inisiatif penting dalam program ini:

a) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentul dan Peningkatan TPA Randukuning menjadi TPST Randukuning
b) Penertiban TPS ilegal
c) Mendorong tiap desa memiliki TPS3R dan sistem pengelolaan mandiri
d) Sosialisasi dan edukasi gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
e) Implementasi sistem pengelolaan sampah mandiri di setiap pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan

Program ini menekankan prinsip partisipatif dan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan lingkungan Batang.

8. Pengembangan Pariwisata Daerah

Pengembangan difokuskan pada kawasan wisata alam dan buatan. Setiap destinasi akan dikembangkan secara tematik dengan memperlihatkan aktivitas khas, pemandangan alam, serta pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan *travel vlogger*. Selain konten, penguatan infrastruktur dan sistem transportasi akan menjadi penunjang utama dalam mendongkrak sektor pariwisata.

9. Ketenagakerjaan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Program ini mencakup:

a) Perancangan Perda tentang serapan tenaga kerja lokal dengan mencantumkan persentase minimum.
b) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi di balai pelatihan kerja.
c) Pengembangan platform Aplikasi Ketenagakerjaan, yang memungkinkan warga lokal mendapat prioritas melalui sistem *layering* berdasarkan jarak tempat tinggal, serta integrasi sistem informasi melalui media sosial untuk mempercepat informasi lowongan kerja.

10. *Government Integrated Management System* (GIMS)

Pemerintah Kabupaten Batang akan mengembangkan sistem manajemen terintegrasi berbasis data center yang digunakan untuk memonitor *Key Performance Indicator* (KPI) setiap perangkat daerah. Sistem ini akan memperkuat analisis pengambilan keputusan berbasis data objektif.

3.3.3.Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026-2030 dirumuskan dengan menggunakan pohon kinerja dan cascading. Penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045	Mewujudkan Kabupaten Batang yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera				PDRB Perkapita
					Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
					Angka Kemiskinan
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Batang yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis **Misi 2:** Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat Secara Menyeluruh **Misi 3 :** Menjadikan Batang sebagai pusat industri dan mendukung hilirisasi berbasis alih teknologi yang ramah lingkungan **Misi 4:** Akselerasi Ekonomi **Misi 5 :** Meningkatkan Pemerataan dan Interkoneksi Infrastruktur sampai ke Pelosok Desa. **Misi 6 :** Mewujudkan Batang yang Tangguh dan Berkelanjutan **Misi 7 :** Percepatan Penurunan Kemiskinan yang Inklusif, Merata dan Berorientasi pada Keadilan Sosial **Misi 8 :** Mewujudkan Tata Kelola		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
			Menyiapkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045		
				Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah APS
					Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
Pemerintahan yang Profesional, Adaptif, Inovatif, dan Berintegritas					Persentase penurunan kasus kematian ibu
					Jumlah Kematian Bayi
					Prevalensi wasting balita
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis
					Prevalensi obesitas
					Persentase Puskesmas yang menerapkan kebijakan aktivitas fisik
					Persentase Puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)
					Insiden HIV
					Eliminasi malaria
					Eliminasi Kusta
					Penurunan Daerah Endemis DBD
					Persentase Puskesmas dengan cakupan imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%
					Cakupan Kepesertaan JKN
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna
					Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Named Nakes terhadap populasi
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
				Prorgram Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan pangan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah cadangan Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
				Program Pengendalian Penduduk	Prevalensi penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	TFR
					Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
					Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
					ASFR (15-19 tahun)
					MUKP (Median Usia Kawin Pertama)
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Mandiri
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlit yang dibina
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
			Pembinaan dan Pengembangan Pengamalan Agama dan Kelestarian Budaya		
				Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh kelompok marginal

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
			Perlindungan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan		
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Luar Panti
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
			Menurunkan Pengangguran Melalui Pelatihan Berbasis Industri (DAKER)		
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Pekerjaan yang mendapat pekerjaan
		Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing berbasis industri			Pertumbuhan Ekonomi
			Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi yang		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
			Menunjang Pertumbuhan Ekonomi		
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum aman
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terbangunnya infrastruktur pengelolaan sampah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS sesuai standar teknis
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik aman (IUP)
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kondisi baik
				Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan strategis yang memiliki akses terhadap infrastruktur dasar
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perwujudan rencana tata ruang
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah bagi korban bencana atau terdampak program pemerintah kabupaten
				Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU
				Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Presentase rumah tidak layak huni

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
				Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi di Kabupaten Batang
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Capaian produksi perikanan tangkap
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian produksi perikanan budidaya
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Capaian masyarakat pengawas sumberdaya perikanan yang diberdayakan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pendapatan sektor pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase tamu wisatawan mancanegara
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan bencana pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga/terpantau
				Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM
			Batang Terang dan Saber Lubang		
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggaranya lalu lintas angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
			Afirmasi kepada UMKM		
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru
				Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi produk dan layanan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
					Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
			Batang Hijau dan Bersih		
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan sumber pencemaran
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase jumlah RTH yang dikelola
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Jumlah limbah yang ditangani
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pemberian rekomendasi izin lingkungan per tahun

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
				Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani
		Terwujudnya Kondisi Wilayah yang semakin kondusif			Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelanggaran perda/perkada
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
			Pembinaan dan Pengembangan Pengamalan Agama dan Kelestarian Budaya		
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bagus
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud
				Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial
		Terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional, inovatif dan mandiri secara fiskal			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
					Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
			Penciptaan Pemerintahan yang bersih dan Profesional		
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang melaporkan
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya
				Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum
					Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu
					Persentase fasilitasi kerjasama daerah
					Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Perkembangan Harga Pangan
					Persentase ketercapaian deviden BUMD
					Indeks Tata Kelola PBJ

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
					Persentase OPD yang melaporkan pelaksanaan pembangunan sesuai target
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu
					Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan
					Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA
					Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pemenuhan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu
					Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
					Persentase Realisasi Serapan Belanja terhadap Anggaran Belanja
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya laporan BMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	Program Kepala Daerah	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat
				Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Prosentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan

Sumber : Bapperida, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Rencana Program Perangkat Daerah

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Batang berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayan Minimal (SPM), serta mendukung *mandatory spending* dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiaptiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-

tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi PD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri dari 134 program urusan dan 1 program penunjang dan terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawasan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kewilayahan untuk tahun 2026-2030 yang meliputi :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan pendidikan PAUD, dan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar dan Pendidikan Non Formal serta Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah serta penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, yang difokuskan pada peningkatan deteksi dini dan pengendalian penyakit menular melalui peningkatan cakupan penemuan Tb dan keberhasilan pengobatan Tb, penemuan kasus baru HIV, penemuan kasus malaria dan kusta; deteksi dini pada penyakit tidak menular difokuskan pada skrining merokok, obesitas dan pengendalian Diabetes Militus dan penanganan gangguan kesehatan jiwa. Selain hal tersebut program ini juga diarahan pada terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta kegiatan penerbitan izin Fasilitas Kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian SPM Bidang Kesehatan serta mendukung penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional khususnya pada masyakarat miskin.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pemberian kefarmasian, penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT, serta tindak lanjut pengawasan dan penyediaan tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring

kemitraan lintas sektor dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Kabupaten Batang.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) Skala Permukiman dan Skala Kawasan Tertentu.

e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah Kabupaten Batang.

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan dan jembatan kewenangan daerah.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah beserta dengan pemanfaatan tata ruang dan diarahkan juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

d. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan gangguan Trantibum Linmas; Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan kinerja dan kapasitas Satlinmas Kabupaten/Kota.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada pelayanan SPM Trantibum melalui Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; serta Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung ketercapaian SPM Urusan Sosial.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran tindak kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan serta Pemberian Layanan Rujukan. Pelaksanaan program ini mendukung ketercapaian layanan pemenuhan SPM sosial.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pengelolaan anak terlantar dan data miskin kabupaten serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini mendukung ketercapaian layanan pemenuhan SPM sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bencana alam dan sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang didukung dengan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, pemeliharaan, serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah serta Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan. Pelaksanaan program ini mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan program ini mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan serta penanganan kerawanan

pangan. Pelaksanaan program ini mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.

d. Prorgram Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga keamanan pangan. Pelaksanaan program ini mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.

4. Pertanahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan** yang diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan program ini juga berfokus pada kelembangaan GTRA serta penataan akses dan aset oleh pemerintah daerah.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati

Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 serta verifikasi lapangan

untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap komunitas peduli Lingkungan Hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa kependudukan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa penting.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa yang didukung fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta

pelaksanaan pelayanan KB; dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** yang diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin serta pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin, serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada terselenggaranya pengelolaan *E-Government* di lingkup pemerintah daerah dan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.

b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

c. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

d. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

12. Penanaman Modal

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan serta penyusunan peta potensi investasi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda serta penyelenggaraan kapasitas daya saing pemuda.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan rekreasi.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

14. Statistik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan,analisis dan diseminasi data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral serta pengembangan infrastruktur.

15. Persandian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik.

16. Kebudayaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan cagar budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota serta Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten.

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); serta penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. Indikator pada program ini yaitu Capaian produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil serta pengelolaan pembudidayaan ikan. Indikator pada program ini yaitu Capaian produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air. Indikator pada program ini yaitu Capaian masyarakat pengawas sumberdaya perikanan yang diberdayakan

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil. Indikator pada program ini yaitu Angka konsumsi ikan.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata; pengelolaan kawasan strategis pariwisata; pengelolaan destinasi pariwisata; dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, penyediaan data dan penyebaran

informasi pariwisata, baik dalam dan luar negeri, peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri, serta monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana Pertanian, pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian meliputi rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan hewan dan produk hewan daerah, serta pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan calon/penerima (orang/perusahaan) pendampingan perizinan usaha peternakan.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian.

4. Perdagangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; serta penerbitan tanda daftar gudang.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan metrologi legal.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri.

5. Perindustrian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.

6. Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan transmigrasi yang diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan.

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** yang diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah, serta pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi danpenyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan melalui penyusunan standar harga penatausahaan barang milik daerah; pengamanan barang milik daerah; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah** yang diarahkan pada kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kegiatan mutasi dan

promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** yang diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Riset dan Inovasi Daerah** yang diarahkan pada Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; serta Invensi dan Inovasi.

F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan, pengawasan dan asistensi urusan pemerintah daerah.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakanteknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

H. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan Program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah; Berikut ini pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029. Secara rinci untuk penjabaran program beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
Pendidikan															
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah APS	%	100	161.022.221.042	100	164.452.887.673	100	171.923.822.370	100	181.000.815.272	100	187.772.389.982	100	Pengampu Urusan Pendidikan
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	80		81		81,5		82		8,5		83	Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	90	1.600.000.000	100	1.648.000.000	100	1.713.920.000	100	1.773.907.200	100	1.835.993.952	100	Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase guru memiliki sertifikat pendidik	%	58	1.950.000.000	60	2.008.500.000	61	2.088.840.000	62	2.161.949.400	63	2.237.617.629	64	Pengampu Urusan Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	494.668.002.409	100	509.508.042.481	100	529.888.364.181	100	548.434.456.927	100	567.629.662.919	100	Pengampu Urusan Pendidikan
Kesehatan															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Meningkatnya Keselamatan Ibu pada Fasilitas	Persentase rumah sakit dengan Case fatality rate<	%	100	90.089.449.280	100	92.792.132.758	100	99.503.818.069	100	108.881.451.701	100	114.377.302.511	100	Pengampu Urusan Kesehatan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline* 2024	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan	1% (perdarahan, eklamsi)													
		Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	30		11,11		0		12,5		0		14,28	
	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi	orang	128		123		121		119		117		115	
	Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang (Wasting) pada Balita	Prevalensi wasting balita	%	6,1		5,75		5,5		5		4,75		4,5	
	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan pencegahan faktor risiko penyakit tidak menular	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA		40		50		60		70		80	
		Prevalensi obesitas	%	35,01		34,9		34,8		34,7		34,6		34,5	
	Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat dan Aktivitas Fisik Masyarakat	Persentase Puskesmas yang menerapkan kebijakan aktivitas fisik	%	NA		50		75		100		100		100	
	Meningkatnya Puskesmas yang Memenuhi Standar Kualitas Kesehatan Lingkungan	Persentase Puskesmas memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	puskesmas	N/A		3		5		5		5		21	
	Menurunnya Beban Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	Persen	90		90		90		90		90		90	
		Insiden HIV	orang/	75		70		70		65		60		60	

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
			1000	(0,09)		(0,08)		(0,08)		(0,07)		(0,06)		(0,06)	
		Eliminasi malaria	orang	<1/1.000 Penduduk		<1/1.000 Penduduk		<1/1.000 Penduduk		<1/1.000 Penduduk		<1/1.000 Penduduk		<1/1.000 Penduduk	
		Eliminasi Kusta	%			86		86		86		86		86	
		Penurunan Daerah Endemis DBD	%	50		50		50		50		50		50	
	Meningkatnya cakupan imunisasi lengkap pada seluruh kelompok umur	Persentase Puskesmas dengan cakupan imunisasi seluruh siklus hidup minimal 90%	%	28		38		48		50		55		60	
	Meningkatnya Mutu, Akses, dan Integrasi Layanan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan JKN	%	98,62		98,62		98,62		98,62		99		99	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi paripurna	%	71,15		73,08		75		76,92		82,69		84,62	
		Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	NA		57		60		62		64		66	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan	Rasio Named Nakes terhadap populasi	%	NA	420.269.150	2,5	432.877.225	2,5	450.192.313	2,5	465.949.044	2,5	482.257.261	2,5	Pengampu Urusan Kesehatan
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Nilai Konversi	83,61		86		87		88		90		95	

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	433.448.526	100	446.451.982	100	464.310.061	100	480.560.913	100	497.380.545	100	Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/ Keluarahan	100	344.112.550	120	354.435.927	170	368.613.364	220	381.514.831	238	394.867.850	248	Pengampu Urusan Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	98	186.363.470.148	98	191.954.374.252	98	199.632.549.223	98	206.619.688.445	98	213.851.377.541	98	Pengampu Urusan Kesehatan
RSUD Batang															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	%	76,3	76.550.000.000	78	78.846.500.000	79	82.000.360.000	80	85.870.372.600	81	87.840.835.641	82	Pengampu Urusan Kesehatan (RS)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	30.000.000	100	30.900.000	100	32.136.000	100	33.260.760	100	34.424.887	100	Pengampu Urusan Kesehatan (RS)
RSUD Limpung															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	%	78,87	22.140.200.000	80	22.804.406.000	81	23.716.582.240	82	25.546.662.618	83	26.405.795.810	84	Pengampu Urusan Kesehatan (RS)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya	Persentase tenaga	%	100	30.000.000	100	30.900.000	100	32.136.000	100	33.260.760	100	34.424.887	100	Pengampu Urusan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Daya Manusia Kesehatan	Manusia Kesehatan	kesehatan yang berijin													Kesehatan (RS)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terselenggaranya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	68,43	13.401.442.276	69,54	13.803.485.544	70,04	14.355.624.966	70,54	15.858.071.840	71,04	16.378.104.354	71,54	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum aman	%	50,98	3.600.000.000	51,18	3.708.000.000	51,28	3.856.320.000	51,38	4.491.291.200	51,48	5.130.986.392	51,58	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sampah	Persentase terbangunnya infrastruktur pengelolaan sampah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS sesuai standar teknis	%	0	-	8,5	2.000.000.000	31,91	2.000.000.000	55,32	2.000.000.000	78,72	2.000.000.000	100	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya pengembangan infrastruktur air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik aman (IUP)	%	5,9	6.900.000.000	6,52	7.107.000.000	6,98	7.391.280.000	7,54	7.649.974.800	8,2	7.917.723.918	8,96	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai	%	63,79	2.706.277.784	69,58	2.787.466.118	70,08	2.898.964.762	70,58	3.000.428.529	71,08	3.105.443.527	71,58	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
		dalam kondisi baik													
Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan strategis yang memiliki akses terhadap infrastruktur dasar	%	71,65	-	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Terselenggaranya Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemanfaatan bangunan gedung negara yang sesuai dengan peruntukan	%	100	35.659.775.000	99,92	35.729.568.250	99,94	35.729.568.250	99,96	35.229.568.250	99,98	36.729.568.250	100	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya penyelenggaran jalan kabupaten/kota	Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	68,04	79.954.141.427	70,04	81.702.765.670	71,04	85.302.765.670	72,04	89.302.765.670	73,04	94.583.189.933	74,04	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	0	-	6,67	50.000.000	6,67	50.000.000	6,67	50.000.000	6,67	50.000.000	6,67	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana Tata Ruang	Persentase perwujudan rencana tata ruang	%	81,01	1.076.788.000	82	1.109.091.640	83	1.153.455.306	84	1.193.826.241	85	1.235.610.160	86	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	93,98	15.752.044.248	95	16.224.605.575	95	16.873.589.798	95	17.464.165.441	95	18.075.411.232	95	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan															

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Kawasan Permukiman															
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	38,49	3.965.000.000	39,09	4.083.950.000	39,39	4.247.308.000	39,69	4.395.963.780	39,99	4.549.822.512	40,29	Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak huni	Presentase rumah tidak layak huni	%	18,88	3.969.355.660	9,34	4.088.436.330	9,11	4.251.973.783	8,87	4.400.792.865	8,64	4.554.820.616	8,4	Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya penyediaan rumah bagi korban bencana atau terdampak program pemerintah kabupaten	Persentase Penyediaan Rumah bagi korban bencana atau terdampak program pemerintah kabupaten	%	100	175.000.000	100	180.250.000	100	187.460.000	100	194.021.100	100	200.811.839	100	Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Meningkatnya jumlah perumahan yang menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	36,65	7.964.135.400	44,62	8.203.059.462	48,61	8.531.181.840	52,59	8.829.773.205	56,57	9.138.815.267	60,56	Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	4.741.153.873	100	4.883.388.489	100	5.078.724.029	100	5.256.479.370	100	5.440.456.148	100	Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban Umum															
Satpol PP															

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan kepatuhan terhadap perda/perkada	Persentase penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelanggaran perda/perkada	%	100	3.096.016.200	100	3.188.896.686	100	3.316.452.553	100	3.432.528.393	100	3.552.666.887	100	Pengampu Urusan Trantibum
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	100	942.140.000	100	970.404.200	100	1.009.220.368	100	1.044.543.081	100	1.081.102.089	100	Pengampu Urusan Trantibum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	9.676.801.777	100	9.967.105.830	100	10.365.790.064	100	10.728.592.716	100	11.104.093.461	100	Pengampu Urusan Trantibum
BPBD															
Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penanganan bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	843.110.100	100	868.403.403	100	903.139.539	100	934.749.423	100	967.465.653	100	Pengampu Kebencanaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.876.840.983	100	3.993.146.212	100	4.152.872.061	100	4.298.222.583	100	4.448.660.374	100	Pengampu Kebencanaan
Sosial															
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Luar Panti	%	96,85	936.850.000	98	964.955.500	98,5	1.003.553.720	99	1.038.678.100	99,5	1.075.031.834	100	Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan	Persentase PPKS yang mendapatkan	%	1,93	5.881.166.580	2,42	6.057.601.577	2,49	6.299.905.640	2,56	6.520.402.338	2,63	6.748.616.420	2,7	Pengampu Urusan Sosial

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
	sosial bagi PPKS	perlindungan dan jaminan sosial													
Program Penanganan Bencana	Masyarakat Miskin Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	56.000.000	100	57.680.000	100	59.987.200	100	62.086.752	100	64.259.788	100	Pengampu Urusan Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Masyarakat Miskin Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Korban Warga Negara Migran Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	%	100	1.500.000	100	1.545.000	100	1.606.800	100	1.663.038	100	1.721.244	100	Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Masyarakat Miskin Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial	%	85	533.824.200	90	549.838.926	92	571.832.483	94	591.846.620	96	612.561.252	98	Pengampu Urusan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Tersedianya layanan pengelolaan Taman Makan Pahlawan Daerah	Persentase Pemenuhan Standar Nasional Taman Makam Pahlawan Kabupaten	%	100	79.200.000	100	81.576.000	100	84.839.040	100	87.808.406	100	90.881.701	100	Pengampu Urusan Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan	%	94,73684211	3.561.983.972	94,73684211	3.668.843.491	95,833333	3.815.597.231	95,833333	3.949.143.134	100	4.087.363.144	100	Pengampu Urusan Sosial

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Daerah Kabupaten/Kota	urusan pemerintahan daerah	Pemerintah Daerah													
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
Tenaga Kerja															
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	30,77	-	30,77	50.000.000	30,77	50.000.000	30,77	50.000.000	30,77	50.000.000	30,77	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja	Rasio	77,91	5.719.000.000	78,1	5.840.570.000	78,2	5.840.570.000	78,3	5.840.570.000	78,4	5.840.570.000	78,5	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Pekerjaan yang mendapat pekerjaan	%	97,2	220.839.340	87	227.464.520	89	236.563.101	91	244.842.810	93	253.412.308	95	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Pengelolaan Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	%	12,5	207.345.515	12,1	213.565.880	11,9	222.108.516	11,7	229.882.314	11,5	237.928.195	11,3	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		6.691.371.913	100	6.892.113.070	100	7.167.797.593	100	7.418.670.509	100	7.678.323.977	100	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,5	125.660.000	2,86	129.429.800	2,86	134.606.992	2,86	139.318.237	2,91	144.194.375	2,91	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
															Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0,0031	35.000.000	0,0028	36.050.000	0,0025	37.492.000	0,0025	38.804.220	0,0023	40.162.368	0,0023	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	25	58.735.000	100	60.497.050	100	62.916.932	100	65.119.025	100	67.398.190	100	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tersedianya data gender dan anak yang akurat dan terintegrasi.	cakupan data pilah gender dan anak	%	100	20.080.000	100	20.682.400	100	21.509.696	100	22.262.535	100	23.041.724	100	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terpenuhinya hak dasar anak	Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan	%	70	80.000.000	70	82.400.000	70	85.696.000	70	88.695.360	70	91.799.698	70	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Menurunnya angka anak yang membutuhkan perlindungan	Pesentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	100	55.525.000	100	57.190.750	100	59.478.380	100	61.560.123	100	63.714.728	100	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penunjang	Meningkatnya kinerja	Persentase Pemenuhan	%	100	5.710.559.195	100	5.881.875.971	100	6.117.151.010	100	6.331.251.295	100	6.552.845.090	100	Pengampu Urusan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan															
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedauatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah cadangan Pangan	%	152,69	6.000.000	100	6.180.000	100	6.427.200	100	6.652.152	100	6.884.977	100	Pengampu Urusan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	97,44	1.156.940.000	97,46	1.191.648.200	97,47	1.239.314.128	97,48	1.382.690.122	97,49	1.427.584.277	97,5	Pengampu Urusan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	6,05	212.000.000	6	218.360.000	5,95	227.094.400	5,9	235.042.704	5,85	243.269.199	5,8	Pengampu Urusan Pangan
Prorgram Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan pangan	%	94,2	40.000.000	81	41.200.000	82	42.848.000	83	44.347.680	84	45.899.849	85	Pengampu Urusan Pangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	17.098.761.022	100	17.611.723.853	100	18.316.192.807	100	18.957.259.555	100	19.620.763.639	100	Pengampu Urusan Pangan
Pertanahan															
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terlaksananya penyelesaian administrasi pertanahan untuk pembangunan	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan untuk pembangunan	%	100	25.000.000	100	25.750.000	100	26.780.000	100	27.717.300	100	28.687.406	100	Pengampu Urusan Pertanahan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Lingkungan Hidup															
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH dan KLHS	Persentase dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun	%	100	256.000.000	100	263.680.000	100	274.227.200	100	283.825.152	100	293.759.032	100	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penyusunan dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenanganny a	Persentase penanganan sumber pencemaran	%	50	233.705.600	60	240.716.768	70	250.345.439	80	259.107.529	90	268.176.293	100	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase jumlah RTH yang dikelola	%	90	459.319.570	92	473.099.157	94	492.023.123	96	509.243.933	98	527.067.470	100	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Terlaksananya pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota	Persentase Jumlah limbah yang ditangani	%	30	10.020.000	35	10.320.600	40	10.733.424	45	11.109.094	50	11.497.912	55	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Telaksananya penerbitan Rekomendasi izin lingkungan	Persentase pemberian rekomendasi izin lingkungan per tahun	%	70	71.632.400	80	73.781.372	85	76.732.627	90	79.418.269	95	82.197.908	97	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan	Terlaksananya kegiatan	Persentase jumlah	%	100	32.000.000	100	32.960.000	100	34.278.400	100	35.478.144	100	36.719.879	100	Pengampu Urusan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	penyuluhan yang terlaksana													Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang diakui melalui perolehan penghargaan di bidang lingkungan hidup	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	%	70	109.359.900	75	112.640.697	75	117.146.325	80	121.246.446	80	125.490.072	85	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	5,53	14.760.288.931	6,1	15.203.097.599	6,3	15.811.221.503	8,5	16.364.614.255	13,3	17.937.375.754	20	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	70	13.021.581.576	75	13.412.229.023	80	13.948.718.184	85	14.436.923.321	90	14.942.215.637	95	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Pencatatan Sipil															

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya penduduk yang memiliki data administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	8,74	496.077.000	12	510.959.310	14	531.397.682	16	549.996.601	18	569.246.482	20	Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	57,3		64,5		67		70		72,5		75	
Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	489.676.000	100	504.366.280	100	524.540.931	100	542.899.864	100	561.901.359	100	Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	23	1.770.949.865	23	1.824.078.361	23	1.897.041.495	23	1.963.437.948	23	2.032.158.276	23	Pengampu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan	%	100	5.535.394.600	100	5.701.456.438	100	5.929.514.696	100	6.137.047.710	100	6.351.844.380	100	Pengampu Urusan Kependudukan dan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Daerah Kabupaten/Kota	urusan pemerintahan daerah	Pemerintah Daerah													Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
Program Penataan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	NA	35.000.000	100	36.050.000	100	37.492.000	100	38.804.220	100	40.162.368	100	Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta pendapatan desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	46,03	30.953.085.513	56,55	31.881.678.078	57	33.156.945.202	57,3	34.317.438.284	57,5	35.518.548.624	57,7	Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	70	3.553.285.850	80	3.659.884.426	85	3.806.279.803	90	3.939.499.596	95	4.077.382.081	97	Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.347.389.071	100	3.447.810.743	100	3.585.723.173	100	3.711.223.484	100	3.841.116.306	100	Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk sesuai target.	Prevalensi penggunaan kontrasepsi (Contraceptive	Angka	71,38	461.400.000	71,7	475.242.000	71,9	494.251.680	72	511.550.489	72,2	529.454.756	72,3	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
		Prevalence Rate/CPR)													Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.	*TFR*	%	2,07	7.231.726.000	2,07	7.448.677.780	2,07	7.746.624.891	2,06	8.017.756.762	2,06	8.298.378.249	2,06	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern *(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*	%	66,2		69,01		70,47		71,72		72,86		73	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	10,2		9,52		9,18		8,84		8,5		8	
		ASFR (15-19 tahun)	per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu	29,9		24,8		23		21,5		20,3		19,3	
		MUKP (Median Usia Kawin Pertama)	Tahun	20,9		21,5		21,8		22,1		22,4		22,7	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian keluarga.	Persentase Keluarga Mandiri	%	98,06	6.249.280.000	98,06	6.436.758.400	98,07	6.694.228.736	98,07	6.928.526.742	98,08	7.171.025.178	98,08	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan															
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lancar, aman, dan selamat	Persentase terselenggaranya lalu lintas angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	100	27.666.781.300	100	28.496.784.739	100	29.636.656.129	100	30.673.939.093	100	31.747.526.961	100	Pengampu Urusan Perhubungan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	7.796.815.504	100	8.030.719.969	100	8.351.948.768	100	8.644.266.975	100	8.946.816.319	100	Pengampu Urusan Perhubungan
Komunikasi dan Informatika															
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	1.686.580.400	100	1.737.177.812	100	1.806.664.924	100	1.869.898.197	100	1.935.344.634	100	Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	1.575.000.000	100	1.622.250.000	100	1.687.140.000	100	1.746.189.900	100	1.807.306.547	100	Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	75	5.881.875.204	100	6.058.331.460	100	6.300.664.719	100	6.521.187.984	100	6.749.429.563	100	Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Koperasi dan UKM															

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perkoperasian	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	90	-	100	100.000.000	100	230.000.000	100	260.000.000	100	280.000.000	100	Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatkan kualitas dan mendorong UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	10	379.600.000	12	390.988.000	14	406.627.520	14	420.859.483	16	435.589.565	16	Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Kualitas Produk dan Layanan UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi produk dan layanan	%	15	-	20	100.000.000	25	230.000.000	25	260.000.000	30	280.000.000	30	Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	50,24	170.400.000	45,53	175.512.000	45,87	182.532.480	46,25	188.921.117	46,54	195.533.356	47,15	Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	8.415.352.445	90	8.667.813.018	90	9.014.525.539	90	9.330.033.933	90	9.656.585.121	90	Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
Penanaman Modal															
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang kondusif	Persentase peningkatan jumlah investor	%	3	110.193.000	3,6	113.498.790	3,7	118.038.742	3,8	122.170.098	3,9	126.446.051	4	Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Terlaksannya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi di Kabupaten Batang	%	100	150.000.000	100	154.500.000	100	160.680.000	100	166.303.800	100	172.124.433	100	Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananny a kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang telah di terbitkan	%	100	346.890.200	100	357.296.906	100	371.588.782	100	384.594.390	100	398.055.193	100	Pengampu Urusan Penanaman Modal

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
	Penanaman Modal														
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal	%	100	120.000.000	100	123.600.000	100	128.544.000	100	133.043.040	100	137.699.546	100	Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data yang telah dicukupi	%	100	63.591.651	100	65.499.401	100	68.119.377	100	70.503.555	100	72.971.179	100	Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	98	3.707.855.957	98,2	3.819.091.636	98,3	3.971.855.301	98,4	4.110.870.237	98,5	4.254.750.695	98,6	Pengampu Urusan Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga															
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah melalui pelatihan, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi kewirausahaan serta kepemimpinan	Prosentase Angka partisipasi dan kepemimpinan pemuda	%	39	2.032.500.000	25	2.093.475.000	32	2.177.214.000	35	2.253.416.490	40	2.332.286.067	45	Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatkan prestasi atlet daerah pada tingkat regional, nasional, dan internasional	Persentase atlit yang dibina	%	45	4.110.540.000	12	4.233.856.200	14	4.403.210.448	16	4.557.322.814	18	4.716.829.112	20	Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
	melalui pelatihan dan pembinaan atlet secara berjenjang, terstruktur, dan profesional.														
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan kepramukaan melalui pembinaan berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung, serta fasilitasi kegiatan yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan kemandirian generasi muda.	Persentase peningkatan jumlah peserta kegiatan kepramukaan	%	10	200.000.000	12	206.000.000	13	214.240.000	14	221.738.400	15	229.499.244	25	Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Statistik															
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	538.855.638	100	555.021.307	100	577.222.159	100	597.424.935	100	618.334.808	100	Pengampu Urusan Statistik
Persandian															
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	100	100.000.000	100	103.000.000	100	107.120.000	100	110.869.200	100	114.749.622	100	Pengampu Urusan Persandian
Kebudayaan															
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap	%	0	800.000.000	20	824.000.000	22	856.960.000	24	886.953.600	26	917.996.976	28	Pengampu Urusan Kebudayaan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
	pengembangan kebudayaan	pengembangan kebudayaan													
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	100	2.492.000.000	40	2.566.760.000	45	2.669.430.400	50	2.762.860.464	55	2.859.560.580	60	Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	100	232.000.000	30	238.960.000	35	248.518.400	35	257.216.544	35	266.219.123	35	Pengampu Urusan Kebudayaan
Perpustakaan															
Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pemanfaatan layanan perpustakaan sebagai sarana pendidikan, peningkatan kompetensi, dan penguatan budaya literasi masyarakat Kabupaten Batang	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh kelompok marginal	%	NA	1.141.645.650	10,5	1.175.895.020	11	1.222.930.820	11,5	1.265.733.399	12	1.310.034.068	12,5	Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase masyarakat yang mengetahui koleksi	%	NA	59.050.000	0,15	60.821.500	0,2	63.254.360	0,25	65.468.263	0,3	67.759.652	0,35	Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	5.044.698.602	100	5.196.039.560	100	5.403.881.142	100	5.593.016.982	100	5.788.772.577	100	Pengampu Urusan Perpustakaan
Kearsipan															

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Pengelolaan Arsip	Terlaksananya pengelolaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75,03	293.371.330	75,07	302.172.470	75,09	314.259.369	75,11	325.258.447	75,13	336.642.492	75,15	Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Terlaksananya program perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)	%	53,43	32.999.250	53,47	33.989.228	53,49	35.348.797	53,51	36.586.004	53,53	37.866.515	53,55	Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tersedianya layanan penggunaan arsip yang transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan	Persentase permohonan penggunaan arsip yang dilayani sesuai prosedur dan ketentuan	%	0	4.133.000	100	4.256.990	100	4.427.270	100	4.582.224	100	4.742.602	100	Pengampu Urusan Kearsipan
Urusan Pilihan															

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Kelautan dan Perikanan															
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Capaian produksi perikanan tangkap	%	96	1.609.010.000	100	1.657.280.300	100	1.723.571.512	100	1.783.896.515	100	1.846.332.893	100	Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Capaian produksi perikanan budidaya	%	104,56	547.060.462	100	563.472.276	100	586.011.167	100	606.521.558	100	627.749.812	100	Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya jumlah masyarakat pengawas sumberdaya perikanan	Capaian masyarakat pengawas sumberdaya perikanan yang diberdayakan	%	100	115.000.000	100	118.450.000	100	123.188.000	100	127.499.580	100	131.962.065	100	Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	36,24	205.000.000	40	211.150.000	42	219.596.000	44	227.281.860	46	235.236.725	48	Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		5.506.416.611	81	5.671.609.109	82	5.898.473.474	83	6.104.920.045	84	6.318.592.247	85	Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Pariwisata															
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya pendapatan sektor pariwisata	Persentase Pendapatan sektor pariwisata	%	10	1.610.330.750	12	1.658.640.673	14	1.724.986.299	16	1.785.360.820	18	1.847.848.449	20	Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara	Persentase tamu wisatawan mancanegara	%	10	276.705.000	12	285.006.150	14	296.406.396	16	306.780.620	18	317.517.942	20	Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya daya saing pelaku	Persentase jumlah pengembanga	%	25	186.580.000	4	192.177.400	6	199.864.496	8	206.859.753	10	214.099.845	15	Pengampu Urusan Pariwisata

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	ekonomi kreatif melalui perlindungan hukum, legalitas usaha, dan komersialisasi produk kreatif berbasis kekayaan intelektual	n ekonomi kreatif yang memiliki HAKI													
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Terwujudnya SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing tinggi	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	40	187.000.000	6	192.610.000	8	200.314.400	10	207.325.404	12	214.581.793	15	Pengampu Urusan Pariwisata
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	5.192.644.251	90	5.348.423.579	90	5.562.360.522	90	5.757.043.140	90	5.958.539.650	100	Pengampu Urusan Pariwisata
Pertanian															
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Hortikultura	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	36,36	3.221.611.200	2	3.318.259.536	2	3.450.989.917	2	3.571.774.565	2	3.696.786.674	2	Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	19,45	2.624.717.800	19,45	2.703.459.334	19,45	2.811.597.707	19,45	2.910.003.627	19,45	3.011.853.754	19,45	Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	430,08	168.896.700	100	173.963.601	100	180.922.145	100	187.254.420	100	193.808.325	100	Pengampu Urusan Pertanian

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan bencana pertanian	%	6,67	29.950.000	6,67	30.848.500	6,67	32.082.440	6,67	33.205.325	6,67	34.367.512	6,67	Pengampu Urusan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan Kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	100	27.000.000	100	27.810.000	100	28.922.400	100	29.934.684	100	30.982.398	100	Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	100	551.040.000	25	567.571.200	30	590.274.048	35	610.933.640	40	632.316.317	45	Pengampu Urusan Pertanian
Perdagangan															
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya optimalisasi dan transparansi kelegalan perizinan	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan	%	100	15.560.000	100	16.026.800	100	16.667.872	100	17.251.248	100	17.855.041	100	Pengampu Urusan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	36,36	3.061.618.104	36,36	3.153.466.647	40	3.279.605.313	40	3.394.391.499	40	3.513.195.201	40	Pengampu Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Terlaksananya monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga/terpantau	%	75	49.920.000	75	51.417.600	75	53.474.304	75	55.345.905	75	57.283.011	75	Pengampu Urusan Perdagangan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya kinerja ekspor yang berkelanjutan.	nilai ekspor perdagangan	USD	59034726	-	61419729	13.262.600	62341025	14.000.000	63276140	15.000.000	64225282	16.000.000	65188662	Pengampu Urusan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Terlindunginya hak-hak konsumen, dan kesadaran konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75	78.750.000	75	81.112.500	75	84.357.000	75	87.309.495	75	90.365.327	75	Pengampu Urusan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	100	200.000.000	100	206.000.000	100	214.240.000	100	221.738.400	100	229.499.244	100	Pengampu Urusan Perdagangan
Perindustrian															
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	%	13,1	6.593.500.000	0,8	6.691.305.000	0,74	7.062.957.200	0,77	7.310.160.702	0,81	7.566.016.327	0,86	Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepatuhan izin berusaha	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	86	28.649.454	72	29.508.938	74	30.689.295	76	31.763.420	78	32.875.140	80	Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya ketersediaan informasi data industri yang akurat	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	86	26.250.000	72	27.037.500	74	28.119.000	76	29.103.165	78	30.121.776	80	Pengampu Urusan Perindustrian
Transmigrasi															
Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Ditempatkan	%	100	59.248.400	100	61.025.852	100	63.466.886	100	65.688.227	100	67.987.315	100	Pengampu Urusan Transmigrasi
Unsur Pendukung															

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Urusan Pemerintahan															
Sekretariat Daerah															
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya efektivitas kinerja pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Reformasi Hukum	%	77,9	38.786.297.365	78,5	39.949.886.286	79	41.547.881.737	79,5	43.002.057.598	80	44.507.129.614	80,5	Sekretariat Daerah
		Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi kerjasama daerah		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
		Persentase Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatkan efektivitas kinerja dibidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Perkembangan Harga Pangan	%	-0,28	6.592.527.527	-6	6.790.303.353	-6	7.061.915.487	-6	7.309.082.529	-6	7.564.900.417	-6	Sekretariat Daerah
		Persentase ketercapaian deviden BUMD	%	100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
		Indeks Tata Kelola PBJ	%	82,94		83		83,5		84		84,5		85	Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang melaporkan pelaksanaan pembangunan sesuai target		96		97,5		98		98,5		99		100	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	27.593.621.524	100	28.421.430.170	100	29.558.287.377	100	30.592.827.435	100	31.663.576.395	100	Sekretariat Daerah
		Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	90		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan daerah	%	100		100		100		100		100		100	Sekretariat Daerah
		Nilai Sakip Setda	%	80,35		82		82,5		83		84		85	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD															
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas fasilitasi tugas , fungsi ,wewenang dan hak DPRD .	Persentase Pemenuhan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	%	100	22.252.422.780	100	22.919.995.463	100	23.836.795.282	100	24.671.083.117	100	25.534.571.026	100	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	40.361.131.885	100	41.571.965.842	100	43.234.844.475	100	44.748.064.032	100	46.314.246.273	100	Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
Perencanaan															

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	731.367.600	100	753.308.628	100	783.440.973	100	810.861.407	100	839.241.556	100	Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	100		100		100		100		100		100	Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	100		100		100		100		100		100	Pengampu Urusan Perencanaan
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang PPM, IPW, dan PSDA	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	1.533.815.775	100	1.579.830.248	100	1.643.023.458	100	1.700.529.279	100	1.760.047.804	100	Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA	%	100		100		100		100		100		100	Pengampu Urusan Perencanaan
		Persentase keselarasan program RKPD dengan Program Renja PD Bidang Infrastruktur	%	100		100		100		100		100		100	Pengampu Urusan Perencanaan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
		dan Pengembangan Wilayah													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	4.909.342.226	100	5.056.622.493	100	5.258.887.392	100	5.442.948.451	100	5.633.451.647	100	Pengampu Urusan Perencanaan
Keuangan															
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu	375.433.737.338	Tepat Waktu	386.671.705.458	Tepat Waktu	402.164.619.436	Tepat Waktu	416.240.381.117	Tepat Waktu	430.808.794.456	Tepat Waktu	Pengampu Urusan Keuangan
		Persentase realisasi belanja atas anggaran belanja daerah	%	93,29		93,4		93,45		93,45		93,5		93,75	Pengampu Urusan Keuangan
		Penyampaian Raperda APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	Pengampu Urusan Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya laporan BMD	%	100	1.683.547.025	100	1.734.053.436	100	1.803.415.573	100	1.866.535.118	100	1.931.863.847	100	Pengampu Urusan Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah	%	10,87	3.621.854.400	3,4	3.630.510.032	2,8	3.879.730.433	4,07	4.015.520.998	3,8	4.156.064.233	2,5	Pengampu Urusan Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	44.202.376.849	100	45.528.448.154	100	47.349.586.081	100	49.006.821.593	100	50.722.060.349	100	Pengampu Urusan Keuangan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Kepegawaian															
Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan kepegawiaan daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Selesai Tepat Waktu	%	84,94	2.530.518.280	85,1	2.606.433.828	85,25	2.710.691.182	85,5	2.805.565.373	85,75	2.903.760.161	86	Pengampu Urusan Kepegawaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	5.199.826.826	100	5.355.821.631	100	5.570.054.496	100	5.765.006.403	100	5.966.781.627	100	Pengampu Urusan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan															
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan Aparatur Sipil Negara	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat	Indeks	100	1.387.537.467	100	1.429.163.591	100	1.486.330.135	100	1.538.351.689	100	1.592.193.998	100	Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan															
Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	%	N/A	623.197.750	70	641.893.683	80	667.569.430	85	690.934.360	90	715.117.062	100	Pengampu Urusan Riset dan Inovasi Daerah
Unsur Pengawasan															
Pengawasan															
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terselenggaranya pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	85	5.473.720.624	86	5.637.932.243	87	5.863.449.532	88	6.068.670.266	89	6.281.073.725	90	Pengampu Unsur Pengawasan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Prosentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan,	%	85	1.192.638.300	87	1.228.417.449	88	1.277.554.147	89	1.322.268.542	90	1.368.547.941	91	Pengampu Unsur Pengawasan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
		Pendampingan Dan Asistensi													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	11.821.009.802	100	12.175.640.096	100	12.662.665.700	100	13.105.858.999	100	13.564.564.064	100	Pengampu Unsur Pengawasan
Unsur Pemerintahan Umum															
Pemerintahan Umum															
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Menguatnya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bagus	%	100	1.035.000.000	100	1.066.050.000	100	1.108.692.000	100	1.147.496.220	100	1.187.658.588	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah	%	100	1.223.811.150	100	1.260.525.485	100	1.310.946.504	100	1.356.829.632	100	1.404.318.669	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan Ormas	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	100	80.582.850	100	83.000.336	100	86.320.349	100	89.341.561	100	92.468.516	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Menguatnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi,	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud	%	203	300.000.000	100	309.000.000	100	321.360.000	100	332.607.600	100	344.248.866	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Umum

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
	Sosial dan Budaya														
Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kondusifitas wilayah dan Peningkatan kualitas dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	%	100	1.120.000.000	100	1.153.600.000	100	1.199.744.000	100	1.241.735.040	100	1.285.195.766	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.176.954.650	100	3.272.263.290	100	3.403.153.821	100	3.522.264.205	100	3.645.543.452	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Unsur Kewilayahan															
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	45.971.500	100	47.350.645	100	49.244.671	100	50.968.234	100	52.752.122	100	Kecamatan Batang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	2.865.959.150	100	2.951.937.925	100	3.070.015.441	100	3.177.465.982	100	3.288.677.291	100	Kecamatan Batang
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	12.238.900	100	12.606.067	100	13.110.310	100	13.569.171	100	14.044.091	100	Kecamatan Batang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang	%	100	4.134.000	100	4.258.020	100	4.428.341	100	4.583.333	100	4.743.749	100	Kecamatan Batang

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
		dilaksanakan dengan baik													
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	18.116.100	100	18.659.583	100	19.405.966	100	20.085.175	100	20.788.156	100	Kecamatan Batang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	10.706.360.455	100	11.027.551.269	100	11.468.653.319	100	11.870.056.186	100	12.285.508.152	100	Kecamatan Batang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	20.000.000	100	20.600.000	100	21.424.000	100	22.173.840	100	22.949.924	100	Kecamatan Warungasem
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	28.763.000	100	29.625.890	100	30.810.926	100	31.889.308	100	33.005.434	100	Kecamatan Warungasem
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	5.352.530	100	5.513.106	100	5.733.630	100	5.934.307	100	6.142.008	100	Kecamatan Warungasem
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	10.000.000	100	10.300.000	100	10.712.000	100	11.086.920	100	11.474.962	100	Kecamatan Warungasem

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	75	13.468.000	83	13.872.040	83	14.426.922	88	14.931.864	88	15.454.479	88	Kecamatan Warungasem
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.219.521.550	100	2.286.107.197	100	2.377.551.484	100	2.460.765.786	100	2.546.892.589	100	Kecamatan Warungasem
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	32.915.000	100	33.902.450	100	35.258.548	100	36.492.597	100	37.769.838	100	Kecamatan Kandeman
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	8.935.800	100	9.203.874	100	9.572.029	100	9.907.050	100	10.253.797	100	Kecamatan Kandeman
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	6.323.000	100	6.512.690	100	6.773.198	100	7.010.260	100	7.255.619	100	Kecamatan Kandeman
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	15.223.000	100	15.679.690	100	16.306.878	100	16.877.618	100	17.468.335	100	Kecamatan Kandeman
Program Pembinaan dan Pengawasan	Terlaksananya Pembinaan dan	Persentase desa yang melaksanakan	%	100	5.323.000	100	5.482.690	100	5.701.998	100	5.901.568	100	6.108.122	100	Kecamatan Kandeman

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa	administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.306.026.281	100	2.375.207.069	100	2.470.215.352	100	2.556.672.890	100	2.646.156.441	100	Kecamatan Kandeman
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	20.000.000	100	20.600.000	100	21.424.000	100	22.173.840	100	22.949.924	100	Kecamatan Wonotunggal
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	29.278.500	100	30.156.855	100	31.363.129	100	32.460.839	100	33.596.968	100	Kecamatan Wonotunggal
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	6.360.000	100	6.550.800	100	6.812.832	100	7.051.281	100	7.298.076	100	Kecamatan Wonotunggal
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	16.000.000	100	16.480.000	100	17.139.200	100	17.739.072	100	18.359.940	100	Kecamatan Wonotunggal
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan	%	100	8.050.000	100	8.291.500	100	8.623.160	100	8.924.971	100	9.237.345	100	Kecamatan Wonotunggal

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
		keuangan desa yang tertib dan baik													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.372.547.270	100	2.443.723.688	100	2.541.472.636	100	2.630.424.178	100	2.722.489.024	100	Kecamatan Wonotunggal
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	50.453.000	100	51.966.590	100	54.045.254	100	55.936.837	100	57.894.627	100	Kecamatan Bandar
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	10.000.000	100	10.300.000	100	10.712.000	100	11.086.920	100	11.474.962	100	Kecamatan Bandar
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	6.340.000	100	6.530.200	100	6.791.408	100	7.029.107	100	7.275.126	100	Kecamatan Bandar
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	20.000.000	100	20.600.000	100	21.424.000	100	22.173.840	100	22.949.924	100	Kecamatan Bandar
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	10.000.000	100	10.300.000	100	10.712.000	100	11.086.920	100	11.474.962	100	Kecamatan Bandar

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.620.519.026	100	2.699.134.597	100	2.807.099.981	100	2.905.348.480	100	3.007.035.677	100	Kecamatan Bandar
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	50.063.000	100	51.564.890	100	53.627.486	100	55.504.448	100	57.447.103	100	Kecamatan Tulis
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	10.000.000	90	10.300.000	90	10.712.000	90	11.086.920	100	11.474.962	100	Kecamatan Tulis
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	6.865.000	100	7.070.950	100	7.353.788	100	7.611.171	100	7.877.562	100	Kecamatan Tulis
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	16.927.000	100	17.434.810	100	18.132.202	100	18.766.829	100	19.423.669	100	Kecamatan Tulis
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	13.800.000	100	14.214.000	100	14.782.560	100	15.299.950	100	15.835.448	100	Kecamatan Tulis
Program Penunjang Urusan	Meningkatnya kinerja pelayanan	Persentase Pemenuhan Penunjang	%	100	1.748.129.140	100	1.800.573.014	100	1.872.595.935	100	1.938.136.792	100	2.005.971.580	100	Kecamatan Tulis

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan Pemerintah Daerah													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	2.400.000	100	2.472.000	100	2.570.880	100	2.660.861	100	2.753.991	100	Kecamatan Subah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	58.000.000	100	59.740.000	100	62.129.600	100	64.304.136	100	66.554.781	100	Kecamatan Subah
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	3.180.000	100	3.275.400	100	3.406.416	100	3.525.641	100	3.649.038	100	Kecamatan Subah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	22.000.000	100	22.660.000	100	23.566.400	100	24.391.224	100	25.244.917	100	Kecamatan Subah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	19.000.000	100	19.570.000	100	20.352.800	100	21.065.148	100	21.802.428	100	Kecamatan Subah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.280.654.915	100	2.349.074.562	100	2.443.037.545	100	2.528.543.859	100	2.617.042.894	100	Kecamatan Subah

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
	pemerintahan daerah														
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	24.040.000	100	24.761.200	100	25.751.648	100	26.652.956	100	27.585.809	100	Kecamatan Blado
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	34.035.000	100	35.056.050	100	36.458.292	100	37.734.332	100	39.055.034	100	Kecamatan Blado
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	5.500.000	100	5.665.000	100	5.891.600	100	6.097.806	100	6.311.229	100	Kecamatan Blado
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	19.015.000	100	19.585.450	100	20.368.868	100	21.081.778	100	21.819.641	100	Kecamatan Blado
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	14.850.000	100	15.295.500	100	15.907.320	100	16.464.076	100	17.040.319	100	Kecamatan Blado
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.197.779.492	100	2.263.712.877	100	2.354.261.392	100	2.436.660.541	100	2.521.943.659	100	Kecamatan Blado

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	31.788.000	100	32.741.640	100	34.051.306	100	35.243.101	100	36.476.610	100	Kecamatan Reban
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	29.743.200	100	30.635.496	100	31.860.916	100	32.976.048	100	34.130.210	100	Kecamatan Reban
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	5.000.000	100	5.150.000	100	5.356.000	100	5.543.460	100	5.737.481	100	Kecamatan Reban
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	15.302.000	100	15.761.060	100	16.391.502	100	16.965.205	100	17.558.987	100	Kecamatan Reban
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	12.146.500	100	12.510.095	100	13.011.331	100	13.466.727	100	13.938.063	100	Kecamatan Reban
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.346.316.000	100	2.416.705.480	100	2.513.373.699	100	2.601.341.779	100	2.692.388.741	100	Kecamatan Reban
Program Penyelenggaraan	Terlaksananya Penyelenggaraan	Persentase pelayanan	%	93	46.591.000	100	47.988.730	100	49.908.279	100	51.655.069	100	53.462.996	100	Kecamatan Bawang

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PATEN yang sesuai SOP													
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	90	15.000.000	100	15.450.000	100	16.068.000	100	16.630.380	100	17.212.443	100	Kecamatan Bawang
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	Kecamatan Bawang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	10.000.000	100	10.300.000	100	10.712.000	100	11.086.920	100	11.474.962	100	Kecamatan Bawang
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	18.800.000	100	19.364.000	100	20.138.560	100	20.843.410	100	21.572.929	100	Kecamatan Bawang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.197.438.632	100	2.253.361.791	100	2.343.896.263	100	2.426.282.632	100	2.511.552.524	100	Kecamatan Bawang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	25.000.000	100	25.750.000	100	26.780.000	100	27.717.300	100	28.687.406	100	Kecamatan Pecalungan

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	25.355.000	100	26.115.650	100	27.160.276	100	28.110.886	100	29.094.767	100	Kecamatan Pecalungan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	11.610.000	100	11.958.300	100	12.436.632	100	12.871.914	100	13.322.431	100	Kecamatan Pecalungan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	17.695.000	100	18.225.850	100	18.954.884	100	19.618.305	100	20.304.946	100	Kecamatan Pecalungan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	1.260.000	100	7.580.000	100	7.580.000	100	7.580.000	100	7.580.000	100	Kecamatan Pecalungan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.875.244.646	100	1.931.501.985	100	2.008.762.065	100	2.079.068.737	100	2.151.836.143	100	Kecamatan Pecalungan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	28.680.000	100	29.540.400	100	30.722.016	100	31.797.287	100	32.910.192	100	Kecamatan Limpung
Program Pemberdayaan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakat	%	100	27.832.800	100	28.667.784	100	29.814.495	100	30.858.003	100	31.938.033	100	Kecamatan Limpung

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Masyarakat Desa dan Kelurahan	Desa dan Kelurahan	an Desa/Kelurahan yang diberdayakan													
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	5.000.000	100	5.150.000	100	5.356.000	100	5.543.460	100	5.737.481	100	Kecamatan Limpung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	16.225.000	100	16.711.750	100	17.380.220	100	17.988.528	100	18.618.126	100	Kecamatan Limpung
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	15.478.000	100	15.942.340	100	16.580.034	100	17.160.335	100	17.760.946	100	Kecamatan Limpung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.112.025.488	100	2.175.386.253	100	2.262.401.703	100	2.341.585.762	100	2.423.541.264	100	Kecamatan Limpung
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	27.750.000	100	28.582.500	100	29.725.800	100	30.766.203	100	31.843.020	100	Kecamatan Banyuputih
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha	%	100	24.878.000	100	25.624.340	100	26.649.314	100	27.582.040	100	28.547.411	100	Kecamatan Banyuputih

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
		n yang diberdayakan													
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	4.505.000	100	4.640.150	100	4.825.756	100	4.994.657	100	5.169.470	100	Kecamatan Banyuputih
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	14.104.000	100	14.527.120	100	15.108.205	100	15.636.992	100	16.184.287	100	Kecamatan Banyuputih
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	8.110.000	100	8.353.300	100	8.687.432	100	8.991.492	100	9.306.194	100	Kecamatan Banyuputih
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.127.590.591	100	2.191.418.309	100	2.279.075.041	100	2.358.842.668	100	2.441.402.161	100	Kecamatan Banyuputih
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	24.140.000	100	24.864.200	100	25.858.768	100	26.763.825	100	27.700.559	100	Kecamatan Gringsing
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	28.150.000	100	28.994.500	100	30.154.280	100	31.209.680	100	32.302.019	100	Kecamatan Gringsing

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	-	100	5.500.000	100	6.500.000	100	7.000.000	100	7.500.000	100	Kecamatan Gringsing
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	14.655.000	100	15.094.650	100	15.698.436	100	16.247.881	100	16.816.557	100	Kecamatan Gringsing
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	93,33	11.950.000	100	12.308.500	100	12.800.840	100	13.248.869	100	13.712.580	100	Kecamatan Gringsing
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.287.156.438	100	2.355.771.131	100	2.450.001.976	100	2.535.752.046	100	2.624.503.367	100	Kecamatan Gringsing
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	100	20.000.000	100	20.600.000	100	21.424.000	100	22.173.840	100	22.949.924	100	Kecamatan Tersono
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%	100	30.300.000	100	31.209.000	100	32.457.360	100	33.593.368	100	34.769.135	100	Kecamatan Tersono
Program Koordinasi	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman	Persentase gangguan trantibum yang	%	100	10.450.000	100	10.763.500	100	11.194.040	100	11.585.831	100	11.991.335	100	Kecamatan Tersono

Bidang Urusan/Program	*Outcome*	Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline 2024*	Target										Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Ketentraman dan Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum	dapat diselesaikan													
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	100	21.385.000	100	22.026.550	100	22.907.612	100	23.709.378	100	24.539.207	100	Kecamatan Tersono
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	100	16.281.800	100	16.770.254	100	17.441.064	100	18.051.501	100	18.683.304	100	Kecamatan Tersono
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.147.768.759	100	2.217.463.560	100	2.306.162.103	100	2.386.877.776	100	2.470.418.498	100	Kecamatan Tersono

Sumber : Bapperida Kab. Batang, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Batang sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PDRB Perkapita	Rp Juta	36,26	41,67	45,05	49,88	53,48	58,28	61,08	
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,59	3,74	3,89	4,04	4,19	4,34	4,49	
3	Tingkat Kemiskinan	%	8,73	8,34-8,27	8,30-8,21	8,25- 8,00	8,15-7,79	6,79 – 6,47	6,50 – 6,35	
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,73	70,75	71,2	71,71	72,12	73,2	73,54	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,67	5,65 - 5,27	5,54 - 5,10	5,34 - 5,05	5,2 - 5,0	5,1 - 4,8	4,95 - 4,55	
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,03	5,5 - 6,1	6,35 – 6,50	6,9 - 7,4	7,0 - 7,5	7,4 - 7,9	7,5 - 8,0	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	64,47	70,66	70,7	70,75	70,79	70,84	70,88	
8	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	128,7	126,8	124,7	122,7	120,7	118,7	116,7	
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	81,71	81,5	82	82,5	83	83,5	84	
10	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio	0,962	0,992	0,992	1,051	1,081	1,111	1,145	
11	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Angka	NA	6,64	6,7	6,8	6,9	7	7,1	

Sumber : Bapperida, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,9	6,16	6,52	6,98	7,54	8,2	8,96	
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	20,96	21,05	20,91	21,36	21,8	22,22	22,63	
3	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Angka	64,47	70,66	70,7	70,75	70,79	70,84	70,88	
4	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	169,79	746.332,82	776.332,82	816.332,82	866.332,82	926.332,82	996.332,82	
5	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,77	84,95	85,12	85,3	85,48	85,65	85,83	
6	Indeks Resiko Bencana	Angka	128,7	126,8	124,7	122,7	120,7	118,7	116,7	
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	6,53	6,32	6,11	5,9	5,69	5,48	5,27	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,03	5,5 - 6,1	6.35 - 6.50	6,9-7,4	7,0-7,5	7,4-7,9	7,5-8,0	
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,73	8,34-8,27	8,30-8,21	8,25- 8,00	8,15-7,79	6,79 – 6,47	6,50 – 6,35	
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	36,26	41,67	45,05	49,88	53,48	58,28	61,08	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,67	5,65 - 5,27	5,54 - 5,10	5,34 - 5,05	5,2 - 5,0	5,1 - 4,8	4,95 - 4,55	
5	Indeks Gini	Angka	0,312	0,310	0,308	0,306	0,304	0,302	0,300	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,73	70,75	71,2	71,71	72,12	73,2	73,54	
7	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,29	0,289-0,278	0,286-0,266	0,283-0,254	0,281-0,242	0,278-0,23	0,275-0,218	
8	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	NA	19,28	20,25	21,22	22,19	23,19	24,13	
9	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	14.700	14.875	15.050	15.225	15.400	15.560	
10	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	NA	20	25	30	35	40	45	
11	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	60	63	66	69	72	75	78	
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Angka Ketergantungan	%	44,59	45,14	44,5	44	43,7	43,3	43,2	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	34,89	35,55	35,83	36,1	36,38	36,66	37,01	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	4,32	4,34	4,36	4,5	4,64	4,79	4,93	
4	Rasio Kewirausahaan	%	2,76	3,4	3,57	3,75	3,94	4,14	4,34	
5	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,88	3,0	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	
6	Disparitas Harga	%	±10	±10	±10	±10	±10	±10	±10	
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	27,07	27,08	27,37	27,66	27,95	28,25	28,54	
8	Ekspor Barang dan Jasa	USD	59.034.726	60.215.421	61.419.729	62.341.025	63.276.140	64.225.282	65.188.662	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	68,17	68,54	68,90	69,27	69,63	70,00	70,37	
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	86,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	81,00	84,00	85,00	86,00	87,00	89,00	90,00	
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,62	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):									
13	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	86,14	83,84	85,97	86,99	88,01	89,03	90,05	
14	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	88,15	87,9	89,05	90,3	91,8	92,95	94,2	
15	c) Numerasi SD/Sederajat	%	76,26	80,98	82,13	83,38	84,88	86,03	87,28	
16	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	83,54	84,82	86,1	87,38	88,66	89,94	91,22	
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	14,76	14,8	14,9	15	15,1	15,2	15,3	
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	3,51	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8	
19	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	95,81	88,01	88,25	88,4	88,75	88,9	89,15	
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,81	67,3	67,7	68	68,3	68,5	68,8	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,53	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	
22	Tingkat Inflasi	%	2,19	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	
23	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,73	0,93	0,96	1,00	1,05	1,10	1,15	
24	Total Kredit pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB	%	0,57	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66	
25	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	34,89	35,55	35,83	36,1	36,38	36,66	37,01	
26	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	NA	75	75	80	85	90	100	
27	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	20,17	20	19,8	19,5	19,3	19,1	19	
28	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,32	4,34	4,36	4,5	4,64	4,79	4,93	
29	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,962	0,99	1,022	1,051	1,081	1,111	1,145	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	87,58	81	82	83	84	85	86	
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,49	80,5	80,6	80,7	80,8	80,9	81	
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,59	3,74	3,89	4,04	4,19	4,34	4,49	
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,71	81,5	82	82,5	83	83,5	84	
5	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	NA	6,64	6,7	6,8	6,9	7	7,1	
6	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,48	0,51	0,54	0,57	0,6	0,63	0,66	
7	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0	0	0	0	0	0	
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH										
A	**Pendidikan**									
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,10	7,2	7,3	7,35	7,4	7,45	7,5	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,4	12,5	12,6	12,65	12,7	12,75	12,8	
3	Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
B	**Kesehatan**									
1	**Dinas Kesehatan**									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,01	75,17	75,33	75,49	75,65	75,81	75,81	
2	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	9,00	9,00	8,00	8,00	7,00	7,00	6,00	
3	Jumlah Kematian Balita	Kasus	157,00	152,00	150,00	148,00	146,00	144,00	142,00	
4	Prevalensi Stunting	%	20,70	19,70	18,70	17,70	16,70	15,70	14,70	
5	Angka Populasi Bebas PTM	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00	
6	Angka Populasi Bebas PM	%	23,00	28,00	38,00	47,00	57,00	71,00	71,00	
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	87,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
8	Presentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	54,84	54,84	58,06	61,29	64,52	67,74	70,97	
9	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Angka	79,60	79,70	80,00	80,20	80,40	80,60	80,60	
10	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan	Angka	3,81	4,15	4,21	4,26	4,32	4,37	4,37	
2	**RSUD Batang**									
1	Persentase Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Batang)	%	80,2	82	85	88	92	95	100	
2	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (RSUD Batang)	%	87,35	88	89	90	91	92	93	
3	Indeks Pelayanan Publik RSUD Batang	Angka	3,68	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	4	
4	Nilai AKIP RSUD Batang	Angka	67,3	68,8	69,5	70	70,5	71	71,5	
3	**RSUD Limpung**									
1	Persentase Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Limpung)	%	87	88	88	89	90	91	92	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (RSUD Limpung)	%	84,32	85	86	87	88	89	90	
3	Indeks Pelayanan Publik RSUD Limpung	Angka	3,13	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
4	Nilai AKIP RSUD Limpung	Angka	69,7	69,75	70	70,25	70,5	70,75	71,0	
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	Indeks Infrastruktur	angka	0,74	0,822	0,83	0,835	0,842	0,848	0,855	
2	Persentase infrastruktur wilayah (jalan, drainase, irigasi, air minum, sanitasi, dan bangunan gedung) dalam kondisi baik	%	57,19	58,26	58,6	58,95	59,29	59,64	60,01	
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	85,31	86,81	88,31	89,81	91,31	92,81	94,31	
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	angka indeks	57,35	57,66	57,96	58,25	58,57	58,88	59,18	
5	Persentase bangunan gedung negara yang layak fungsi	%	77,01	78,25	78,25	78,25	78,25	78,25	78,25	
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	50,98	51,08	51,18	51,28	51,38	51,48	51,58	
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	83,22	84	84,5	85	85,5	86	86,5	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan (TURBINLAK) Penataan Ruang	Nilai Kinerja	71,02	74,25	78,24	81,46	85,45	89,15	92,38	
9	Indeks Pelayanan Publik DPUPR	Angka	2,72	2,73	2,75	2,77	2,79	2,81	2,83	
10	Nilai AKIP DPUPR	skor	78,55	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,9	
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	NA	69,03	69,22	69,4	69,59	69,77	69,96	
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	81,12	90,42	90,66	90,89	91,13	91,36	91,6	
3	Persentase luas kawasan kumuh	%	61,51	61,21	60,91	60,61	60,31	60,01	59,71	
4	Nilai AKIP	skor	74,5	75	75,5	76	76,5	77	77,5	
5	Indeks Pelayanan Publik DPRKP	Angka	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
1	**SATPOL PP**									
1	Indeks Rasa Aman	Angka	4,47	4,48	4,49	4,51	4,8	5,1	5,5	
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Pelayanan Publik SATPOL PP	Angka	2,5	2,75	2,85	2,95	3,55	3,65	3,75	
6	Nilai AKIP SATPOL PP	Skor	77,5	78	78,5	78,7	79	79,5	79,7	
2	**BPBD**									
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,57	0,6	0,63	0,68	0,7	0,72	0,74	
2	Persentase Cakupan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	%	4,84	6,85	8,87	10,89	12,9	14,92	16,94	
3	Nilai AKIP BPBD	Skor	73,8	75	76	77	78	79	80	
4	Indeks Pelayanan Publik BPBD	Angka	2,01	2,25	2,31	2,51	2,71	2,91	3,04	
F	**Sosial**									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	57,34	57,45	57,75	58	58,15	58,25	58,5	
2	Persentase Populasi PPKS	%	16,82	15,9	14,95	14,25	14	13,8	13,5	
3	Persentase PPKS yang diberdayakan kapasitasnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	7,09	7,12	7,2	7,25	7,3	7,4	7,5	
4	Indeks Pelayanan Publik Dinsos	Angka	3,16	3,2	3,5	3,6	3,7	3,8	4	
5	Nilai AKIP Dinsos	Skor	76,95	78,2	79,5	80,21	81,5	82,65	83	
G	**Tenaga Kerja**									
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,33	94,5	94,6	94,7	94,8	94,9	95	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,91	78	78,2	78,4	78,6	78,9	79	
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	35,25	35,35	35,4	35,46	35,51	35,56	35,61	
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	64,03	64,05	64,07	64,09	64,11	64,13	64,15	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Pelayanan Publik Disnaker	Angka	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07	3,08	
6	Nilai AKIP Disnaker	Skor	76,1	76,7	77,3	77,9	78,5	79,1	79,7	
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,68	92,88	92,91	92,94	92,97	93,09	93,21	
2	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	10,2	10,67	11,14	11,61	11,93	12,08	12,55	
I	**Pangan**									
1	Persentase cadangan pangan daerah	%	5,56	0,025	0,026	0,027	0,028	0,029	0,03	
2	Ketersediaan pangan :									
	- Beras	Ton	96.057,00	80.550	80.953	81.358	81.764	82.173	82.584	
	- Jagung	Ton	61.601,00	45.054	45.279	45.505	45.733	45.962	46.192	
3	Cadangan pangan daerah	Ton	123,02	60	60	60	60	60	60	
J	**Pertanahan**									
1	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
K	**Lingkungan Hidup**									
1	Persentase kasus lingkungan hidup yang terselesaikan	%	90	92	94	96	97	98	100	
2	Indeks kualitas air (IKA)	Angka	58,68	59,9	60	60,1	60,2	60,3	60,4	
3	Indeks kualitas udara (IKU)	Angka	80,61	84,82	84,83	84,84	84,85	84,86	84,87	
4	Indeks kualitas tutupan lahan (IKL)	Angka	44,58	62,95	62,96	62,97	62,98	62,99	63	
5	Persentase penanganan sampah	%	55	55	60	65	70	75	80	
6	Nilai AKIP DLH	Skor	72,75	74	76	78	80	82	84	
7	Indeks Pelayanan Publik DLH	Angka	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	NA	85,67	86,67	87,67	88,67	89,67	90,67	
2	Rasio Kepemilikan dokumen dan pencatatan sipil Masyarakat Batang	%	78,84	79,81	80,6	81,38	82,24	83,02	83,81	
3	Nilai AKIP Disdukcapil	Skor	77,4	77,5	77,6	77,7	77,8	77,9	78	
4	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	Angka	3,23	3,35	3,4	3,55	3,7	3,85	4	
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
1	Indeks Desa	Angka	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	
2	Persentase Desa Mandiri	Angka	2,51	4,6	6,69	8,79	10,88	12,97	15,06	
3	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Kabupaten Batang	%	27,62	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	
4	Persentase PKK Aktif	%	55,3	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Pelayanan Publik Dispermasdes	Angka	2,23	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	
6	Nilai AKIP Dispermades	Angka	75,05	76	77	77,5	78	78,5	79	
N	**Pengendalian Penduduk dan KB**									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,85	66	67,2	68,3	69,3	70,3	71,2	
2	Angka pertumbuhan penduduk per tahun/LPP	%	1,44	1,41	1,37	1,34	1,3	1,27	1,23	
3	Indeks Lansia Berdaya	Angka	56	56,5	57	57,5	57,9	58,4	58,8	
4	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Angka	85,8	86,8	87,7	88,5	89,3	90,1	90,8	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Indeks Pelayanan Publik DP3AP2KB	Angka	3,12	3,22	3,32	3,42	3,52	3,62	3,72	
6	Nilai AKIP DP3AP2KB	Skor	73,35	73,85	74,72	75,58	76,45	77,32	78,19	
O	**Perhubungan**									
1	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi di Jalan Kabupaten	Rasio	NA	93	93,5	94	94,5	95	95,5	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	60	61	62	63	64	65	66	
3	Indeks Pelayanan Publik Dishub	Angka	3,8	3,83	3,85	3,87	3,89	3,9	4	
4	Nilai AKIP Dishub	Skor	74,6	74,6	74,8	74,9	75	75,3	75,5	
P	**Komunikasi dan Informatika**									
1	Indeks Smart City	Angka	3,59	3,5	3,52	3,54	3,56	3,58	3,6	
2	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2,05	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Pelayanan Publik Diskominfo	Angka	3,7	3,72	3,74	3,76	3,78	3,79	3,8	
Q	**Koperasi dan UKM**									
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,5	2,60	
2	Persentase Koperasi Aktif	%	68,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	
3	Persentase UMKM yang berdaya saing	%	15,00	20,00	12,00	13,00	14,00	16,00	16,00	
R	**Penanaman Modal**									
1	Pertumbuhan Nilai investasi di Kabupaten Batang	%	3,5	4	5	6	7	8	9	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase peningkatan perusahaan yang berinvestasi di Kab Batang	%	3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	
3	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Angka	4,55	4,56	4,57	4,58	4,59	4,60	4,61	
4	Nilai AKIP DPMPTSP	Skor	76,00	76,55	76,60	76,70	76,80	76,90	77,00	
S	**Kepemudaan dan Olahraga**									
1	Persentase Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	10	10	15	17	19	20	25	
2	Persentase medali yang diperoleh	%	10	10	15	17	19	20	25	
T	**Statistik**									
1	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
U	**Persandian**									
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
V	**Kebudayaan**									
1	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan, dikelola dan dilindungi	%	0	0	20	25	30	35	40	
3	Nilai AKIP Disdikbud	Skor	77,5	79	80	81	82	83	84	
4	Indeks Pelayanan Publik Disdikbud	Angka	3,11	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
W	**Perpustakaan**									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	13,82	13,85	13,88	14,70	15,40	16,10	16,8	
2	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	NA	0,11	4,00	7,00	10,00	15,00	19	
X	**Kearsipan**									
1	Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang melaksanakan arsip secara baku	%	15	15	20	40	60	80	100	
2	Tingkat transparansi informasi publik terkait pengelolaan arsip yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk arsip laporan keuangan dan administrasi pemerintahan	%	0,00	0,00	75,00	85,00	90,00	95,00	100,00	
3	Indeks Pelayanan Publik Disperpuska	Angka	2,68	3,07	3,08	3,09	3,10	3,11	3,12	
4	Nilai AKIP Disperpuska	Skor	74,05	75,25	75,35	75,45	75,55	75,65	75,75	
Y	**Kelautan dan Perikanan**									
1	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	0,24	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,57	
2	Persentase Capaian Produksi Perikanan	%	119,88	98,5	100	100	100	100	100	
3	Capaian peningkatan angka konsumsi ikan	%	96	97	100	100	100	100	100	
4	Nilai AKIP Dislutkan	Skor	68,4	69,85	70	71	71,5	72	72,5	
5	Indeks Pelayanan Publik Dislutkan	Angka	2,29	2,51	2,80	2,90	3,01	3,05	3,10	
Z	**Pariwisata**									
1	Persentase peningkatan pengunjung pariwisata	%	10	12	14	16	18	20	22	
2	Rata-Rata Lama Menginap wisatawan	Hari	1	1	1	1	1	2	2	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Nilai AKIP Disparpora	Skor	75	75	76	77	78	80	82	
4	Indeks Pelayanan Publik Disparpora	Angka	2,8	2,8	3	3	3,2	3,3	3,5	
AA	**Pertanian**									
1	Produksi komoditas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)									
	a. padi	ton	160.299	161.099	161.905	162.715	163.528	164.346	165.167	
	b. jagung	ton	89.659	90.107	90.558	91.011	91.466	91.923	92.383	
	c. Bawang Merah	kuintal	5.372	5.256	5.361	5.468	5.577	5.689	5.803	
	d. Cabai Besar	kuintal	3.298	13.087	13.349	13.616	13.888	14.166	14.449	
	e. Kentang	kuintal	213.902	184.213	187.898	191.656	195.489	199.398	203.386	
	f. Kopi	kg	753.929	738.850	769.008	784.086	799.165	814.243	829.322	
	g. Teh	kg	1.414.461	1.386.172	1.442.750	1.471.039	1.499.329	1.527.618	1.555.907	
	h. Kakao	kg	176.604	173.072	180.136	183.668	187.200	190.732	194.264	
	i. Kelapa	kg	1.001.083	981.061	1.021.105	1.041.126	1.061.148	1.081.170	1.101.191	
2	Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	150,49	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	430,08	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Pelayanan Publik Dispaperta	Angka	2,39	2,51	2,72	2,95	3,01	3,23	3,51	
5	Nilai AKIP Dispaperta	Skor	77,1	77,2	77,5	77,7	77,9	78	78,2	
AB	**Perdagangan**									
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar,kecil,Reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	12,53	12,54	12,55	12,56	12,57	12,58	12,59	
2	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	%	1	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AC	**Perindustrian**									
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	34,56	34,57	34,58	34,59	36	36,01	36,02	
2	Prersentase peningkatan IKM	%	13,9	0,66	0,7	0,73	0,76	0,8	0,85	
3	Nilai AKIP Disperindagkop UKM	skor	77,2	77,3	77,4	77,5	77,6	77,7	77,8	
4	Indeks Pelayanan Publik Disperindagkop UKM	Angka	3,43	3,53	3,63	3,73	3,83	3,93	4,03	
AD	**Transmigrasi**									
1	Persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE	**Sekretariat Daerah**									
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor	68,95	69,5	70,25	71	71,5	72	73	
2	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Angka	4,37	4,37	4,38	4,39	4,42	4,45	4,51	
3	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	skor	39,4	40,25	41,25	42,25	43,25	45,25	46,15	
4	Persentase PD dengan Nilai AKIP BB	%	70,45	70,5	73	74	76	78	80	
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,13	4,2	4,23	4,26	4,29	4,32	4,34	
AF	**Sekretariat DPRD**									
1	Nilai AKIP SETWAN	Skor	78,55	78,6	78,65	78,7	78,75	78,8	78,85	
2	Indeks Pelayanan Publik SETWAN	Angka	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	
3	Persentase Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
AG	**Perencanaan**									
1	Skor Perencanaan	Angka	23,16	23,4	23,6	23,8	24	24,2	24,4	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Pelayanan Publik Bapperida	Angka	3,66	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	4	
4	Nilai AKIP Bapperida	Skor	80,05	81,5	82	82,5	83	83,5	84	
AH	**Keuangan**									
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	9,7	11,5	2,5	3,3	3,4	3,9	3,3	
4	Indeks Pelayanan Publik BPKPAD	Angka	3,24	3,36	3,39	3,43	3,49	3,55	3,6	
5	Nilai AKIP BPKPAD	Skor	79,25	80,15	80,45	80,7	80,95	81,15	81,25	
AI	**Kepegawaian**									
1	Nilai Sistem Merit	Angka	0,66	0,60	0,70	0,75	0,80	0,82	0,84	
2	Indeks Pelayanan Publik BKPSDM	Angka	3,47	3,55	3,70	3,90	4,10	4,50	4,60	
3	Nilai AKIP BKPSDM	skor	80,50	80,60	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75	
4	Indeks NSPK Manajemen ASN	Angka	81,10	81,50	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
AJ	**Pendidikan, dan Pelatihan**									
1	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	Angka	NA	5,17	3,81	4,28	4,67	5,06	5,44	
AK	**Penelitian dan Pengembangan**									
1	Nilai Kapabilitas Inovasi	Angka	2,11	2,19	2,27	2,35	2,43	2,53	2,61	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	57,46	57,78	57,95	58,02	60,02	62,03	65,02	
AL	**Pengawasan**									
1	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan	%	85	85	86	87	88	89	90	
3	Nilai AKIP Inspektorat	Skor	80,2	80,3	80,4	80,5	80,6	80,7	80,8	
4	Indeks Pelayanan Publik Inspektorat	Angka	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69	3,7	3,71	
AM	**KEWILAYAHAN**									
1	**Kecamatan Batang**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Batang	Skor	69,1	69,1	69,15	69,2	69,25	69,25	69,3	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Batang	Angka	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Batang	Angka	0,727	0,738	0,749	0,760	0,771	0,783	0,795	
2	**Kecamatan Bandar**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Bandar	Skor	65	66,25	66,25	67	67	69	70	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bandar	Angka	2,51	2,51	2,51	2,6	2,6	2,6	2,6	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Bandar	Angka	0,675	0,685	0,695	0,705	0,716	0,727	0,738	
3	**Kecamatan Banyuputih**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Banyuputih	Skor	70,15	71	72	72,5	72,7	72,9	73	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Banyuputih	Angka	2,78	2,8	2,82	2,84	2,86	2,88	2,9	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Banyuputih	Angka	0,709	0,719	0,730	0,741	0,752	0,763	0,775	
4	**Kecamatan Bawang**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Bawang	Skor	54,9	60	60,5	61	61,5	62	62,5	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bawang	Angka	2,97	2,97	2,98	2,98	2,99	2,99	3	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Bawang	Angka	0,675	0,686	0,696	0,706	0,717	0,728	0,739	
5	**Kecamatan Blado**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Blado	Skor	70,95	72,3	72,6	72,9	73	73,1	73,3	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Blado	Angka	2,76	2,80	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Blado	Angka	0,672	0,683	0,693	0,703	0,714	0,724	0,735	
6	**Kecamatan Gringsing**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Gringsing	Skor	64,25	65,3	65,85	66,15	66,25	66.35.00	66,55	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Gringsing	Angka	2,8	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Gringsing	Angka	0,713	0,724	0,735	0,746	0,757	0,768	0,780	
7	**Kecamatan Kandeman**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Kandeman	Skor	62,5	64	64,25	64,3	64,35	64,45	65	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kandeman	Angka	2,5	2,52	2,7	3	3,1	3,1	3,1	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Kandeman	Angka	0,720	0,731	0,742	0,753	0,764	0,775	0,787	
8	**Kecamatan Limpung**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Limpung	Skor	71,85	72,6	72,8	73	73,2	73,4	73,6	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Limpung	Angka	2,85	2,89	2,93	2,97	3,01	3,05	3,09	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Limpung	Angka	0,728	0,739	0,750	0,761	0,773	0,784	0,796	
9	**Kecamatan Pecalungan**									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Kecamatan Pecalungan	Skor	62,45	63,05	63,35	63,64	63,96	64,15	64,45	
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pecalungan	Angka	2	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
2	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Pecalungan	Angka	0,667	0,677	0,688	0,698	0,708	0,719	0,730	
10	**Kecamatan Reban**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Reban	Skor	67,45	68,2	68,35	68,4	1644.00.00	68,66	68,69	
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Reban	Angka	2,66	2,68	2,7	2,74	2,76	2,79	3	
2	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Reban	Angka	0,724	0,735	0,746	0,757	0,769	0,780	0,792	
11	**Kecamatan Subah**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Subah	Skor	71,95	72	72,5	72,6	72,7	72,8	73	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Subah	Angka	2,39	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Subah	Angka	0,739	0,751	0,762	0,773	0,785	0,797	0,809	
12	**Kecamatan Tersono**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Tersono	Skor	68,1	69,1	69,6	70	70,1	70,6	71	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tersono	Angka	2,6	2,65	2,7	2,8	3	3,05	3,1	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Tersono	Angka	0,706	0,717	0,728	0,739	0,750	0,761	0,772	
13	**Kecamatan Tulis**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Tulis	Skor	68,1	68,1	69	69,5	70	70,5	71	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tulis	Angka	2,65	2,68	2,7	2,74	2,76	2,79	3	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Tulis	Angka	0,706	0,716	0,727	0,738	0,749	0,760	0,772	
14	**Kecamatan Warungasem**									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Kecamatan Warungasem	Skor	60,7	60,7	60,71	60,72	60,73	60,74	60,75	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Warungasem	Angka	3,41	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Warungasem	Angka	0,704	0,714	0,725	0,736	0,747	0,758	0,770	
15	**Kecamatan Wonotunggal**									
1	Nilai AKIP Kecamatan Wonotunggal	Skor	72,15	72,9	73	73,15	73,3	73,45	73,6	
2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Wonotunggal	Angka	2,37	2,5	2,6	2,7	3,01	3,05	3,1	
3	Rata-Rata Indeks Desa Kecamatan Wonotunggal	Angka	0,711	0,721	0,732	0,743	0,754	0,766	0,776	
AN	**Unsur Pemerintahan Umum**									
1	Indeks Kerukunan	Angka	71,95	72,8	72,9	73	74	74,5	75	
2	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai AKIP Bakesbangpol	Skor	76,7	76,71	76,72	76,73	76,74	76,75	76,76	
4	Indeks Pelayanan Publik Bakesbangpol	Angka	2,02	3,5	3,52	3,55	3,57	3,58	3,6	

Sumber : Bapperida, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan strategis Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2025–2030 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Batang. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjawab tantangan pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Batang secara menyeluruh.

RPJMD ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2025–2045 serta mendukung agenda nasional dalam RPJMN 2025–2029, serta selaras dengan RPJMD Provinsi Tawa Tengah 2025-2029. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu strategis yang berkembang di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Dengan Visi pembangunan daerah lima tahun ke depan adalah: “Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045.” yang berangkat dari Tagline “***Clean Industrial City***", yang mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk menjembatani berbagai pendekatan pembangunan melalui *Green City* yang menekankan aspek ekologis yang berfokus pada lingkungan hijau, *Smart City* yang berfokus pada digitalisasi dan teknologi cerdas, serta *Sustainable City* yang menyatukan ketiganya secara makro yang lebih afirmatif terhadap sektor industri, melalui pilar-pilar pembangunan yang mengedepankan pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, inklusi UMKM, transformasi digital, tata ruang berkelanjutan, investasi hijau, dan tata kelola kolaboratif.

RPJMD ini juga secara tegas mengarusutamakan perspektif gender dan inklusi sosial dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga

evaluasi program pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif, serta menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya. Prinsip "no one left behind" menjadi landasan utama dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan sosial.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan, RPJMD ini dilengkapi dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi berbasis manajemen risiko. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk secara sistematis mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan, serta merumuskan langkah mitigasi dan adaptasi yang tepat. Sistem pengendalian ini akan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mendorong responsivitas, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola pemerintahan.

Penyusunan strategi pembangunan dilakukan melalui pendekatan analisis yang mengidentifikasi kekuatan dan peluang daerah yang dapat dimanfaatkan secara optimal, serta mengantisipasi berbagai tantangan dan kelemahan yang mungkin dihadapi. Strategi yang dirumuskan tidak hanya bersifat solutif terhadap permasalahan, namun juga proaktif dalam membuka peluang pencapaian target-target besar, seperti peningkatan daya saing daerah, ketahanan sosial dan lingkungan, serta penguatan perekonomian berbasis inovasi dan digitalisasi.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat. Dengan keterlibatan dan dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, tujuan strategis yang telah ditetapkan diharapkan dapat diwujudkan secara nyata.

Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta pengendalian yang adaptif dan berbasis risiko, Kabupaten Batang optimis mampu menjadi daerah yang mandiri, inklusif, responsif, dan tangguh dalam

menghadapi berbagai dinamika pembangunan, serta berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.